

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka peningkatan potensi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan inovasi dan pengembangan investasi daerah melalui pendirian badan usaha milik daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan analisis kelayakan usaha, potensi pasar perbankan syariah mempunyai peluang yang strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan pengembangan investasi dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) Tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 109) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah pada BAB sebagai berikut:
   a. BAB I PENDAHULUAN;
   b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
   c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
   d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
   e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
   f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
   g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
   h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
   i. BAB IX PENUTUP

2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8,20 /2019)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan

pembangunan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD 2016-2021 terdapat beberapa hal yang juga harus dilakukan yaitu:

1. penyesuaian terhadap penyusunan RPJMD atas peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. pembaharuan terhadap data capaian kinerja pemerintah daerah;
3. pembaharuan atas realisasi dan proyeksi keuangan daerah;
4. pembaharuan atas realisasi dan target indikator tujuan, sasaran dan program;
5. diversifikasi usaha daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
6. memberikan peluang berkembang ekonomi syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), Tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD, sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dilaksanakan sesuai tahapan Penyusunan RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 141

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Daftar tabel vii

Daftar gambar xiv

LAMPIRAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman I-10

1.3.2. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sleman . I-12

1.3.3. RPJMD dengan Renstra SKPD I-12

1.3.4. RPJMD dengan RKPD I-13

1.4. Maksud dan Tujuan..... I-13

1.4.1.Maksud..... I-13

1.4.2.Tujuan I-13

1.5. Sistematika Penulisan I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1

2.1.2.Topografi..... II-2

2.1.3.Geologi..... II-3

2.1.4.Hidrologi II-4

2.1.5.Klimatologi..... II-5

2.1.6.Penggunaan Lahan..... II-5

2.1.7.Potensi Pengembangan Wilayah II-6

2.1.7.1.Wilayah Rawan Bencana Alam dan Resiko Bencana II-7

2.1.7.2.Kawasan Lindung Geologi II-9

2.1.8.Demografi II-10

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-16

2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi..... II-17

BAPPEDA SLEMAN

2.2.1.1.Pertumbuhan PDRB II-17
2.2.1.2.Laju Inflasi II-19
2.2.1.3.Indeks Gini II-21
2.2.1.4.Indeks Pembangunan Manusia II-22
2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial II-23
2.2.2.1.Pendidikan II-23
2.2.2.2.Kesehatan II-26
2.2.2.3.Ketenagakerjaan II-28
2.2.2.4.Kemiskinan II-31
2.2.3.Fokus Seni, Budaya dan Olahraga II-32
2.2.3.1.Kebudayaan II-32
2.2.3.2.Olahraga II-33
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-34
2.3.1.Urusan Pemerintahan Wajib II-34
2.3.1.1.Urusan Wajib Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-34
2.3.1.1.1.Urusan Wajib Pendidikan II-34
2.3.1.1.2.Urusan Wajib Kesehatan II-40
2.3.1.1.3.Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-43
2.3.1.1.4.Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-47
2.3.1.1.5.Urusan Wajib Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-49
2.3.1.1.6.Urusan Wajib Sosial II-51
2.3.1.2.Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-52
2.3.1.2.1.Urusan Wajib Tenaga Kerja II-52
2.3.1.2.2.Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-54
2.3.1.2.3.Urusan Wajib Pangan II-55
2.3.1.2.4.Urusan Wajib Pertanahan II-57
2.3.1.2.5.Urusan Wajib Lingkungan Hidup II-58

BAPPEDA SLEMAN

2.3.1.2.6.Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-60
2.3.1.2.7.Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-61
2.3.1.2.8.Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan KB II-62
2.3.1.2.9.Urusan Wajib Perhubungan II-64
2.3.1.2.10.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika II-65
2.3.1.2.11.Urusan Wajib Koperasi dan UMKM II-66
2.3.1.2.12.Urusan Wajib Penanaman Modal II-67
2.3.1.2.13.Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga II-68
2.3.1.2.14.Urusan Wajib Statistik II-69
2.3.1.2.15.Urusan Wajib Persandian..... II-70
2.3.1.2.16.Urusan Wajib Kebudayaan..... II-70
2.3.1.2.17.Urusan Wajib Perpustakaan..... II-72
2.3.1.2.18.Urusan Wajib Kearsipan..... II-73
2.3.2.Urusan Pilihan..... II-74
2.3.2.1.Urusan Pilihan Pariwisata..... II-74
2.3.2.2.Urusan Pilihan Pertanian II-76
2.3.2.3.Urusan Pilihan Kehutanan..... II-78
2.3.2.4.Urusan Pilihan ESDM II-78
2.3.2.5.Urusan Pilihan Kelautan, Perikanan II-78
2.3.2.6.Urusan Pilihan Perdagangan..... II-79
2.3.2.7.Urusan Pilihan Perindustrian..... II-80
2.3.2.8.Urusan Pilihan Transmigrasi..... II-81
2.3.3.Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .. II-81
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-83
2.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-83
2.4.1.1.PDRB per Kapita II-83
2.4.1.2.Nilai Tukar Petani II-83

BAPPEDA SLEMAN

2.5.1.3.Produktivitas Total Daerah II-85
2.4.2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-86
2.4.2.1.Perhubungan II-87
2.4.2.2.Sarana Perekonomian II-89
2.4.2.3.Jaringan Listrik II-91
2.4.2.4.Ketersediaan Air Baku II-91
2.4.3.Fokus Iklim Berinvestasi II-92
2.4.3.1.Keamanan dan Ketertiban II-92
2.4.3.2.Perizinan II-93
2.4.3.3.Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri II-96
2.4.4.Fokus Sumber Daya Manusia II-97

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3
3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD III-3
3.1.1.1.Pendapatan Daerah III-4
3.1.1.2.Belanja Daerah III-17
3.1.1.3.Pembiayaan Daerah III-20
3.1.2.Neraca Daerah III-23
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-28
3.2.1.Proporsi Penggunaan Anggaran III-30
3.2.2.Analisis Pembiayaan III-32
3.3. Kerangka Pendanaan III-33
3.3.1.Proyeksi Pendapatan Daerah III-35
3.3.2.Proyeksi Belanja Daerah III-40
3.3.3.Proyeksi Pembiayaan Daerah III-43
3.3.4.Penghitungan Kerangka Pendanaan III-45

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH. IV-1
4.1. Kebijakan Internasional IV-1
4.1.1.Telaahan SDG's IV-1
4.1.2.Telaahan MEA IV-4
4.2. Kebijakan Nasional (RPJMN) IV-7
4.3. Kebijakan Provinsi (RPJMD DIY) IV-11
4.4. Kebijakan Kabupaten IV-13
4.4.1. Telaahan RPJPD IV-13

BAPPEDA SLEMAN

4.4.2. Telaahan RTRW Kabupaten Sleman IV-15
4.4.2.1. Telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang IV-15
4.4.2.2. Telaahan terhadap Rencana Pola Ruang IV-23
4.4.2.3. Telaahan terhadap Rencana Strategis IV-28
4.4.3. *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2035 ..... IV-29
4.4.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020 ..... IV-32
4.4.5. SIDa IV-33
4.5. Kebijakan Daerah Lain..... IV-35
4.6. Permasalahan Pembangunan IV-40
4.6.1. Pokok Permasalahan..... IV-40
4.6.1.1. Kemiskinan..... IV-40
4.6.1.2. Ketimpangan Pendapatan IV-42
4.6.1.3. Ketimpangan Wilayah IV-44
4.6.1.4. Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal IV-46
4.6.1.5. Tata Kelola Pemerintahan IV-48
4.6.2. Permasalahan per Urusan IV-49
4.7. Isu Strategis..... IV-80

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN..... V-1
5.1. Visi V-1
5.2. Misi V-5
5.3. Tujuan dan Sasaran V-11

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Umum VI-1
6.2. Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman..... VI-18
6.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis VI-29
6.4. Program Pembangunan Daerah..... VI-33

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII-1

BAPPEDA SLEMAN

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

BAPPEDA SLEMAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	II – 2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman	II – 3
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kabupaten Sleman	II – 4
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017	II – 6
Tabel 2.5	Perkembangan Data Kebencanaan di Kabuapten Sleman Tahun 2013-2018	II – 8
Tabel 2.6	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018.....	II – 11
Tabel 2.7	Penduduk Laki-laki Kabupaten Sleman menurut Kecamatan Tahun 2013-2018 (jiwa)	II – 14
Tabel 2.8	Penduduk Perempuan Kabupaten Sleman menurut Kecamatan Tahun 2013-2018 (jiwa)	II – 15
Tabel 2.9	Pertumbuhan Sektor dan PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018.....	II – 18
Tabel 2.10	PDRB dan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha ADH Konstan 2010 Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018.....	II – 19
Tabel 2.11	Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013-2017 Tahun 2013-2018.....	II – 20
Tabel 2.12	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017.....	II – 23
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Kasar/Murni dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018	II – 25
Tabel 2.14	Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018.....	II – 27

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.15 Gambaran Umum Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ..... II – 28
Tabel 2.16 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 29
Tabel 2.17 Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 ..... II – 30
Tabel 2.18 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 33
Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 35
Tabel 2.20 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 35
Tabel 2.21 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 36
Tabel 2.22 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018... II – 37
Tabel 2.23 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 42
Tabel 2.24 Indikator Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 45
Tabel 2.25 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 . II – 49
Tabel 2.26 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 50
Tabel 2.27 Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 52
Tabel 2.28 Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 53

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.29 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... II – 54
Tabel 2.30 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... II – 56
Tabel 2.31 Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018..... II – 56
Tabel 2.32 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II – 58
Tabel 2.33 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 59
Tabel 2.34 Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 60
Tabel 2.35 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 61
Tabel 2.36 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 63
Tabel 2.37 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 65
Tabel 2.38 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 66
Tabel 2.39 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 67
Tabel 2.40 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... II – 68
Tabel 2.41 Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten SlemanTahun 2013-2018 ..... II – 69
Tabel 2.42 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... II – 72
Tabel 2.43 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2018..... II – 73

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.44 Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2018 ..... II – 74

Tabel 2.45 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013-2018 II – 75

Tabel 2.46 Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2013-2018 ..... II – 75

Tabel 2.47 Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... II – 76

Tabel 2.48 Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... II – 77

Tabel 2.49 Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II – 81

Tabel 2.50 Produktivitas per Sektor di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II – 86

Tabel 2.51 Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017..... II – 89

Tabel 2.52 Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017..... II – 90

Tabel 2.53 Hotel/Penginapan Lainnya, Kamar, dan Tempat Tidur di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017..... II – 91

Tabel 2.54 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... II – 98

Tabel 2.55 Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017 ..... II – 98

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... III – 6

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... III – 9

Tabel 3.3 Realisasi dan Target PAD Pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... III – 12

Tabel 3.4 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... III – 14

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.5	Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018.....	III – 16
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018.....	III – 18
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018	III – 20
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018	III – 22
Tabel 3.9	Neraca Daerah per 31 Desember 2015-2018	III – 26
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018	III – 31
Tabel 3.11	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018	III – 32
Tabel 3.12	Realisasi SiLPA Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018	III – 33
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.....	III – 37
Tabel 3.14	Skema Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021 (Rp. 000).....	III – 39
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.....	III – 42
Tabel 3.16	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	III – 44
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2016-2021.....	III – 46
Tabel 3.18	Realisasi dan Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2016-2021 (Rupiah)	III – 47
Tabel 3.19	Kerangka Alokasi Belanja Tahun 2016-2021	III – 48
Tabel 3.20	Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Rupiah).....	III – 49

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022	IV – 11
Tabel 4.2	Telaahan Rencana Struktur Ruang	IV – 21
Tabel 4.3	Telaahan terhadap Rencana Pola Ruang	IV – 26
Tabel 4.4	Telaahan Rencana Kawasan Strategis	IV – 29
Tabel 4.5	Roadmap Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035	IV – 31
Tabel 4.6	Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain .	IV – 36
Tabel 4.7	Rasio Kesenjangan Kemiskinan.....	IV – 42
Tabel 4.8	Distribusi Kontribusi PDRB ADHB.....	IV – 46
Tabel 5.1	Keselarasan Nawacita dengan RPJMN, RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten Sleman	V – 7
Tabel 5.2	Keselarasan Misi pada RPJP Kabupaten Sleman 2016-2025dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 10
Tabel 5.3	Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 12
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi I, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 18
Tabel 5.5	Keterkaitan Misi II, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 19
Tabel 5.6	Keterkaitan Misi III, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 21
Tabel 5.7	Keterkaitan Misi IV, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 23
Tabel 5.8	Keterkaitan Misi V, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	V – 24
Tabel 5.9	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan DIY dan Kab. Sleman.....	V – 26

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.1	Strategi Antara Kekuatan dan Peluang.....	VI – 5
Tabel 6.2	Strategi Antara Kelemahan dan Peluang	VI – 6
Tabel 6.3	Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman	VI – 7
Tabel 6.4	Strategi Antara Kelemahan dan Ancaman	VI - 8
Tabel 6.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1	VI – 11
Tabel 6.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2	VI – 12
Tabel 6.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3	VI – 14
Tabel 6.8	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4	VI – 16
Tabel 6.9	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5	VI – 17
Tabel 6.10	Prioritas Kawasan PWT-JM Kabupaten Sleman	VI – 22
Tabel 6.11	Tahap Pelaksanaan PWT-JM Kabupaten Sleman Berdasarkan Prioritas per Kawasan Strategis	VI – 23
Tabel 6.12	Lokasi Kawasan PWT-JM Kabupaten Sleman	VI – 24
Tabel 6.13	Tematik Pengembangan Kawasan dalam Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman	VI – 25
Tabel 6.14	Prioritas Pengembangan Kawasan.....	VI – 27
Tabel 6.15	Sinergitas Rencana PWT-JM Kabupaten/Kota dan Tujuan BWP Kabupaten/Kota serta Keterkaitan Dengan PWT-JM Kab. Sleman.....	VI - 28
Tabel 6.16	Rekomendasi Mitigasi	VI – 32
Tabel 6.17	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	VI – 42
Tabel 6.18	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	VI - 57
Tabel 6.19	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	VI - 62
Tabel 6.20	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 4	

BAPPEDA SLEMAN

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 ..... VI - 71

Tabel 6.21 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 5
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 ..... VI - 74

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun
2016-2021 ..... VII – 2

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021..... VII – 4

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Sleman ..... VIII – 2

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sleman ..... VIII – 5

BAPPEDA SLEMAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman I-5

Gambar 1.2 Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman diantara Dokumen Perencanaan Lainnya I-10

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman ..... II- 2

Gambar 2.2 Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Sleman II- 10

Gambar 2.3 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2018 ..... II- 11

Gambar 2.4 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 ..... II- 12

Gambar 2.5 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa dalam Keluarga Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 .... II- 13

Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2018 (jiwa) ..... II- 16

Gambar 2.7 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2013 – 2017 ..... II- 17

Gambar 2.8 Tingkat Inflasi Indonesia dan Perkotaan Yogyakarta Tahun 2014-2018 ..... II- 20

Gambar 2.9 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 .. II- 21

Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 ..... II- 31

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 ..... II- 31

Gambar 2.12 Distribusi Penduduk Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II- 32

Gambar 2.13 Produksi dan Konsumsi Perikanan di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 ..... II- 79

BAPPEDA SLEMAN

Gambar 2.14 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II- 83
Gambar 2.15 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II- 85
Gambar 2.16 Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... II- 93
Gambar 3.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... III- 5
Gambar 3.2. Perkembangan Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018..... III- 8
Gambar 3.3. Perkembangan Peranan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 ..... III- 10
Gambar 4.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten ..... IV- 15
Gambar 4.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... IV- 40
Gambar 4.3. Persentase KK Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... IV- 40
Gambar 4.4. Distribusi KK miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017 ..... IV- 41
Gambar 4.5. Indeks Gini Kabupaten SlemanTahun 2013-2017 ... IV- 42
Gambar 4.6. Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 ..... IV- 43
Gambar 5.1 Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD . Kabupaten Sleman ..... V- 4
Gambar 6.1 Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021..... VI- 9

BAPPEDA SLEMAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

BAPPEDA SLEMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2006-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan **Visi Daerah: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berdaya Saing"**, yang terdiri dari 4 (empat) Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2021), dan Tahap IV (2021-2025).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. sebagai Bupati Sleman dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes. sebagai Wakil Bupati Sleman pada Tanggal 17 Februari 2016 untuk masa jabatan 2016–2021, maka Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.

BAPPEDA SLEMAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Periode 2016-2021 merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 539/15382 tanggal 09 November 2018 perihal pertimbangan penilaian atas usulan rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sleman, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 terkait evaluasi capaian kinerja, perubahan target kinerja, serta realisasi dan proyeksi

BAPPEDA SLEMAN

kemampuan keuangan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, di dalam kajian terhadap kemampuan keuangan daerah dalam rangka penganggaran rencana pembangunan serta perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap modal usaha diperlukan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pembentukan BUMD baru, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

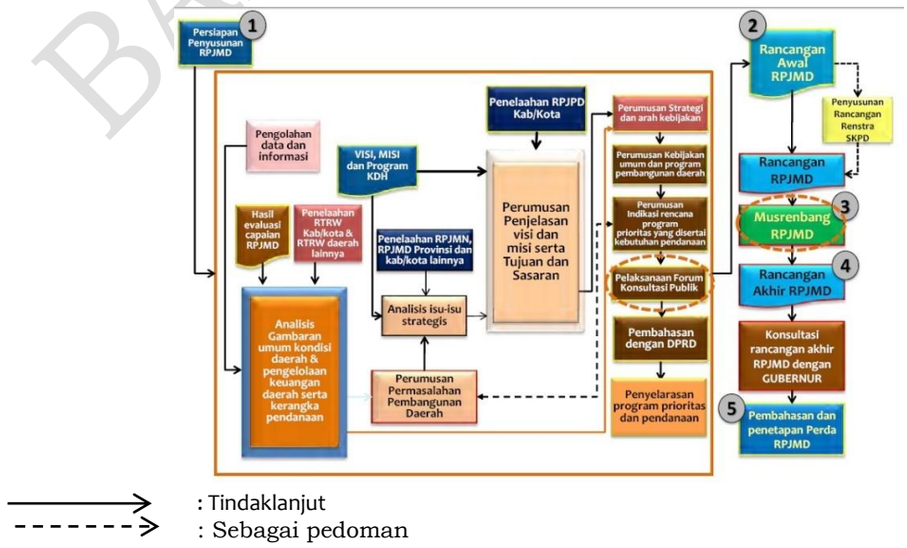
Apabila dilihat dari kajian kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman dapat melakukan pembentukan BUMD baru dimaksud. Kemampuan fiskal Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah masuk dalam kategori tinggi, demikian juga Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) termasuk dalam kelompok tinggi sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Rencana pendirian BUMD PT BPR Syariah Sleman dilatar belakangi oleh besarnya potensi pasar (1.180.479 jiwa dengan 76% beragama Islam, dan bank juga melayani penduduk beragama lainnya), kemampuan ekonomi penduduk cukup tinggi (PDRB ADHB sebesar RP 36,99 trilyun dan PDRB ADHK sebesar 29,57 trilyun), keberadaan pasar tradisional sebanyak 41 unit tersebar di tiap kecamatan, serta geliat dan perkembangan positif perbankan syariah di Kabupaten Sleman. Adapun berdasarkan studi analisis kelayakan pendirian BUMD dimaksud, biaya yang harus dikeluarkan dari proses awal kegiatan pendirian sampai beroperasionalnya adalah sebesar Rp 21 milyar.

Perubahan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi DIY Tahun 2017-2022, RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, kondisi lingkungan hidup strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, juga disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

BAPPEDA SLEMAN

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)* dan Bawah-Atas *(bottom-up)*, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penting lainnya dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman ini telah melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, diolah

BAPPEDA SLEMAN

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukan bahwa:

1. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
5. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

BAPPEDA SLEMAN

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAPPEDA SLEMAN

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan

BAPPEDA SLEMAN

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah.

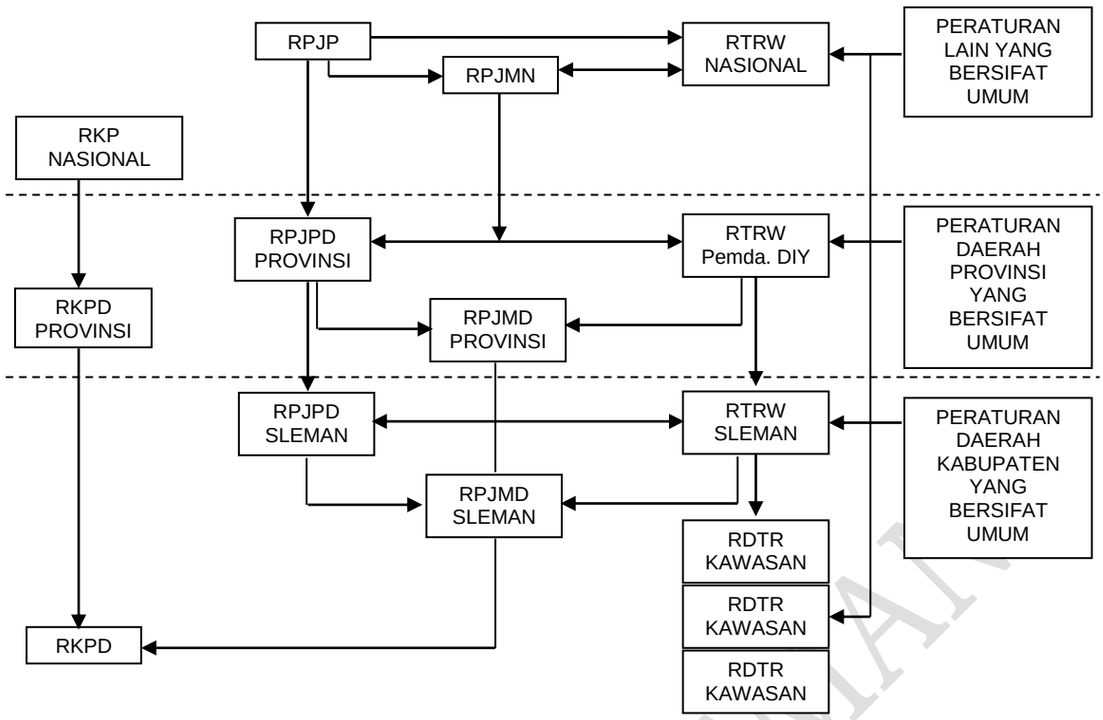
RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

BAPPEDA SLEMAN



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

→ : sebagai pedoman penyusunan

Gambar 1.2 Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman di antara Dokumen perencanaan lainnya

Secara lebih terperinci, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sleman pada RPJPD Tahun 2006-2025 beserta arah pembangunannya.

Visi daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berdaya Saing” ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan

BAPPEDA SLEMAN

4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Adapun penjelasan masing-masing misi:

Misi kesatu

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel, dan misi yang strategis.

Misi kedua

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

Misi ketiga

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.

Misi keempat

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Keempat misi di atas dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

BAPPEDA SLEMAN

masyarakat, kualitas hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.3.2. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sleman

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.3. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan

BAPPEDA SLEMAN

penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman.

1.3.4. RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru.

1.4.2. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai

BAPPEDA SLEMAN

dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021;

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah, kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan serta penyesuaian target, indikator, tujuan, saran dan program serta realisasi dan proyeksi kemampuan keuangan daerah periode 2016-2021;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021.
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2016-2021;
6. Menyesuaikan dokumen RPJMD sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017.
7. Merumuskan alternatif kebijakan dalam rangka diversivikasi sumber pendapatan asli daerah melalui pembentukan BUMD baru.

BAPPEDA SLEMAN

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sleman secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sleman untuk jangka menengah.

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga memuat Pengembangan Wilayah Terpadu jangka menengah.

BAPPEDA SLEMAN

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. Bab ini juga menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah beserta pagu indikatif pendanaannya.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Sleman dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 9 PENUTUP

BAPPEDA SLEMAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km^2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km^2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

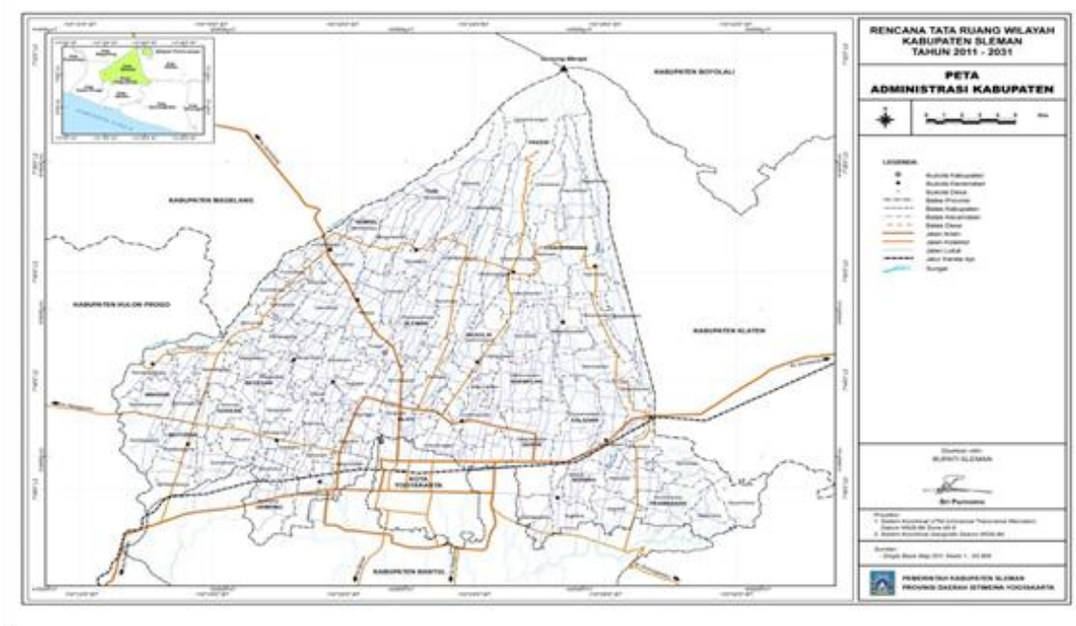
Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Minggir	5	68	2.727
3	Seyegan	5	67	2.663
4	Godean	7	77	2.684
5	Gamping	5	59	2.925
6	Mlati	5	74	2.852
7	Depok	3	58	3.555
8	Berbah	4	58	2.299
9	Prambanan	6	68	4.135
10	Kalasan	4	80	3.584
11	Ngemplak	5	82	3.571
12	Ngaglik	6	87	3.852
13	Sleman	5	83	3.132
14	Tempel	8	98	3.249
15	Turi	4	54	4.309
16	Pakem	5	61	4.384
17	Cangkringan	5	73	4.799
Jumlah		**86**	**1.212**	**57.482**

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kab. Sleman, 2018



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman

Sumber: RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031

2.1.2. Topografi

Keadaan tanah Kabupaten Sleman di Bagian Selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di Bagian Tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan.

Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, terdapat di 17 kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	<100 m dpl (ha)	100-499 m dpl (ha)	500-999 m dpl (ha)	>1.000 m dpl (ha)	Jumlah (Ha)
1.	Moyudan	2.407	355	-	-	2.762
2.	Minggir	357	2.370	-	-	2.727
3.	Godean	209	2.475	-	-	2.684
4.	Seyegan	-	2.663	-	-	2.663
5.	Tempel	-	3.172	77	-	3.249
6.	Gamping	1.348	1.577	-	-	2.925
7.	Mlati	-	2.852	-	-	2.852
8.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
9.	Turi	-	2.076	2.155	78	4.309
10.	Pakem	-	1.664	1.498	1.222	4.384
11.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
12.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
13.	Kalasan	-	3.584	-	-	3.584
14.	Berbah	1.447	852	-	-	2.299
15.	Prambanan	435	3.700	-	-	4.135
16.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
17.	Cangkringan	-	1.796	2.808	195	4.799
	Jumlah	**6.203**	**43.246**	**6.538**	**1.495**	**57.482**

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2018

2.1.3. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.

Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan

BAPPEDA SLEMAN

menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih didominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih didominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan Formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang disebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain formasi geologi tersebut diatas terdapat formasi batu gamping muda yaitu Formasi Sentolo di Kecamatan Gamping dan Formasi Semilir di Kecamatan Prambanan.

Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regosol, grumusol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi jenis tanah regosol sebesar 49.262 ha, mediteran 3.851 ha, litosol 2.317 ha, dan grumusol 1.746 ha, jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jenis Tanah di Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Litosol	Regosol	Grumusol	Mediteran	
1.	Moyudan	-	584	808	1.370	2.762
2.	Minggir	-	558	606	1.563	2.727
3.	Seyegan	-	2.187	8	468	2.663
4.	Godean	-	2.018	216	450	2.684
5.	Gamping	-	2.817	108	-	2.925
6.	Mlati	-	2.582	-	-	2.852
7.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
8.	Berbah	-	2.299	-	-	2.299
9.	Prambanan	2.155	1.980	-	-	4.135
10.	Kalasan	162	3.422	-	-	3.584
11.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
12.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
13.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
14.	Tempel	-	3.249	-	-	3.249
15.	Turi	-	4.309	-	-	4.309
16.	Pakem	-	4.384	-	-	4.384
17.	Cangkringan	-	4.799	-	-	4.799
Jumlah		**2.317**	**49.262**	**1.746**	**3.851**	**57.482**

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2018

2.1.4. Hidrologi

Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di

BAPPEDA SLEMAN

Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (*springbelt*) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi.

Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Hindia.

2.1.5. Klimatologi

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 24 hari. Kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s, rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah 19,9%. Temperatur udara tertinggi 34,4°C dan terendah 16,4°C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi ke dalam penggunaan sawah, tegalan, dan pekarangan. Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,13%, dan luas tegalan turun 0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarakan data, terlihat bahwa alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan tegalan dari tahun ke tahun, sementara tanah pekarangan makin meningkat. Hal ini memacu Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencari terobosan agar alih fungsi lahan dapat lebih dikendalikan, antara lain dapat menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengembangan desa wisata.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

No.	Jenis Penggunaan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pekarangan	18.561,00	18.590,90	18.626,87	18.755,32	18.785,96
2	Sawah	24.774,00	24.719,05	24.628,26	24.577,20	24.549,70
3	Tegal	3.924,00	3.923,69	3.921,69	3.921,69	3.921,69
4	Hutan	530,00	52,99	52,99	52,99	52,99
5	Tanah Tandus/semak	1.263,00	1.263,84	1.263,84	1.263,85	1.263,84
6	Lainnya	8.430,00	8.932,03	8.988,85	8.910,95	1.263,84
Kabupaten Sleman		**57.482,00**	**57.482,50**	**57.482,50**	**57.482,00**	**57.482**

Sumber: Sleman Dalam Angka, 2018

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain :

1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.113 ha) dan kawasan pertanian lahan kering (9.117 ha) yang tersebar di 17 kecamatan.
2) Kawasan peruntukan pertambangan;
   - Batu kapur di Kecamatan Gamping;
   - Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;
   - Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;
   - Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah;
   - Pasir dan kerikil di seluruh wilayah kecamatan.
3) Kawasan peruntukan industri meliputi lahan seluas 299 ha di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan (industri non-polutan).
4) Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.232 ha) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 ha) yang tersebar di 17 kecamatan.
5) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.
6) Kawasan hutan kawasan hutan rakyat (3.171 ha) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.

BAPPEDA SLEMAN

7) Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
   - Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
   - Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
   - Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

2.1.7.1. Wilayah Rawan Bencana Alam dan Risiko Bencana

Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman terdiri dari:

1) Kawasan rawan bencana di dalam RTRW terdiri dari:
   a. kawasan rawan tanah longsor; dan
   b. kawasan rawan kekeringan.
2) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha (tiga ribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:
   a. Kecamatan Gamping; dan
   b. Kecamatan Prambanan.
3) Kawasan rawan kekeringan seluas ± 1.969 ha (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Prambanan.

Berdasarkan hasil kajian, potensi bencana di Kabupaten Sleman dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut antara lain:

1) Erupsi Gunungapi Merapi
2) Aliran/Banjir Lahar
3) Gempa Bumi
4) Gerakan Tanah
5) Angin Puting Beliung
6) Kebakaran
7) Kekeringan

Kejadian bencana di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 didominasi oleh bencana tanah longsor (161 kejadian) dan angin kencang (80 kejadian). Kedua jenis bencana tersebut relatif lebih sering terjadi dibandingkan jenis bencana lainnya seperti erupsi gunung api, gempa bumi, banjir, petir, dan kekeringan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun demikian, korban jiwa akibat kejadian bencana dapat diminimalkan, hanya terdapat 2 orang meninggal

BAPPEDA SLEMAN

akibat bencana angin kencang pada tahun 2017. Nilai kerugian akibat bencana juga tercatat paling besar akibat bencana tanah longsor dan angin kencang pada tahun 2018 secara berturut-turut masing masing sebesar Rp970.125.000,- dan Rp540.700.000,-.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk menghindari jatuhnya kerugian baik jiwa maupun materi akibat bencana. Kegiatan gladi lapang penanggulangan bencana terus meningkat dari 8 gladi di tahun 2013, 13 gladi di 2014, dan terus meningkat sampai 33 gladi di tahun 2017. Selain itu, upaya melatih dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan bencana juga terus dilaksanakan. Pada tahun 2013, jumlah warga terlatih pada daerah rawan bencana tercatat sebesar 3.263 orang, meningkat menjadi 4.893 orang pada tahun 2014, dan di akhir tahun 2018 tercatat sebesar 9.148 orang. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui pembangunan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana sehingga kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dapat terlembagakan.

Tabel 2.5
Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

NO	URAIAN DATA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Daerah Rawan Bencana (Desa)	86	86	86	86	86	86
2	Jumlah Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	8	13	16	29	33	37
3	Penanggulangan Bencana (kejadian)						
	- erupsi	1	1	-	-	-	-
	- gempa bumi	-	2	-	-	1	-
	- banjir	-	3	6	7	7	11
	- banjir lahar hujan	3	3	-	2	-	-
	- tanah longsor	5	9	12	85	161	38
	- angin kencang	23	22	50	74	80	64
	- petir	2	-	5	9	1	11
	- Kekeringan	-	1	1	-	1	1
4	Jumlah korban jiwa						
	- erupsi	-	1	-	-	-	
	- gempa bumi	-	-	-	-	-	
	- banjir	-	3	-	-	-	
	- tanah longsor	1	-	-	-	-	3
	- angin kencang	-	1	3	-	2	1
	- petir	-	-	-	-	-	
	- Kekeringan	-	-	-	-	-	
5	Jumlah kerugian materiil (000 Rp)	869.400	13.813.000	4.739.775	1.991.097,5	1.685.152	1.584.825

BAPPEDA SLEMAN

NO	URAIAN DATA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- erupsi (000 Rp)	-	13.363.000	-	-	-	-
	- gempa bumi	-	25.000.000	-	-	8.000.000	-
	- banjir (000 Rp)	-	-	-	675.325	170.700	57.000
	- banjir lahar hujan	-	75.000.000	-	60.000.000	-	-
	- tanah longsor (000 Rp)	-	3.800	4.734.475	786.400	769.027	970.125
	-angin kencang (000 Rp)	869.400	346.200	5.300	464.872,5	722.425	540.700
	- petir	-	-	-	4.500.000	15.000.000	17.000.000
	-Kekeringan	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Dana Penanggulangan/ penyaluran	92.400.000	111.150.000	311.150.000	65.450.000	379.924.500	181.300.000
7	Masyarakat terlatih pada Daerah Rawan Bencana (orang)	3.263	4.893	5.968	6.690	7.918	9.148
8	Jumlah masyarakat yang paham terhadap bencana	3.950	4.370	5.310	5.910	6.910	6.910
9	Desa Tangguh Bencana	1	5	13	24	34	45
10	Sekolah Siaga Bencana (unit)	3	5	28	40	46	55
11	EWS yang berfungsi baik (unit)	13	13	16	20	20	20

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sudah terjadi di Kabupaten Sleman, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Penetapan desa dan sekolah siaga bencana, penambahan *early warning system*, pelatihan masyarakat dan pemenuhan *response time* pada wilayah manajemen kebakaran adalah kegiatan yang dapat dijadikan prioritas.

2.1.7.2. Kawasan Lindung Geologi

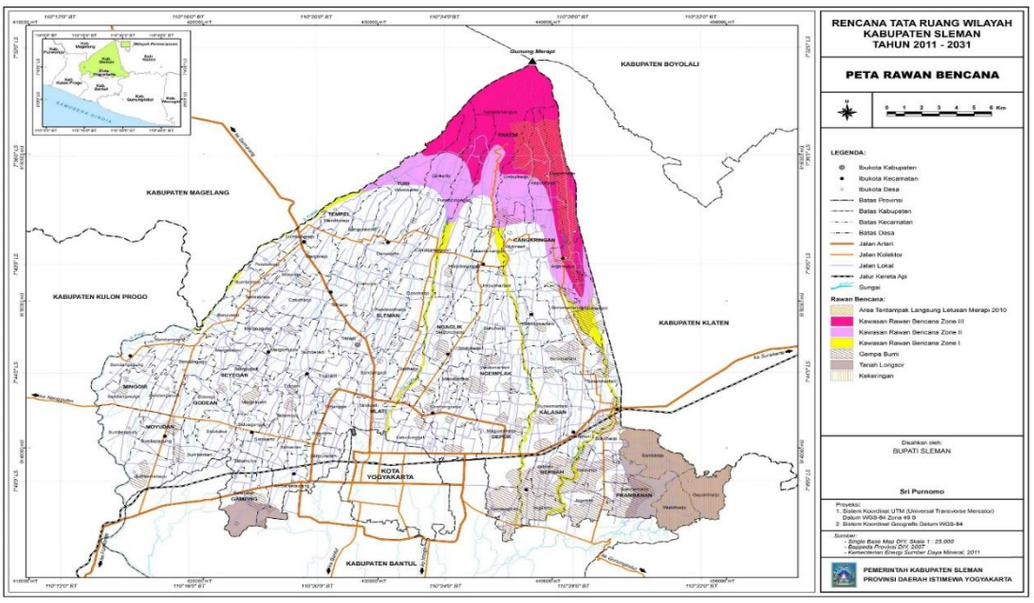
1. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
   a. Kawasan rawan bencana gunungapi;
   b. Kawasan rawan gempa bumi.
2. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi:
   a. Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas ± 1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan;
   b. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas ± 3.302 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan Cangkringan;

BAPPEDA SLEMAN

c. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas ± 3.279 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan;

d. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha meliputi Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan.

3. Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha tersebar di seluruh kecamatan.



Gambar 2. 2 Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Sleman

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031

2.1.8. Demografi

Gambaran perkembangan penduduk didasarkan pada data yang terregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, pada tahun 2013, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.047.325 jiwa, meningkat menjadi 1.062.802 jiwa pada tahun 2014, 1.075.126 jiwa pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.079.210 jiwa. Adapun berdasarkan data tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebesar 1.046.622 jiwa. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dilaksanakan pengkonsolidasian dan pembersihan data penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri. Selengkapnya seperti pada tabel berikut ini.

BAPPEDA

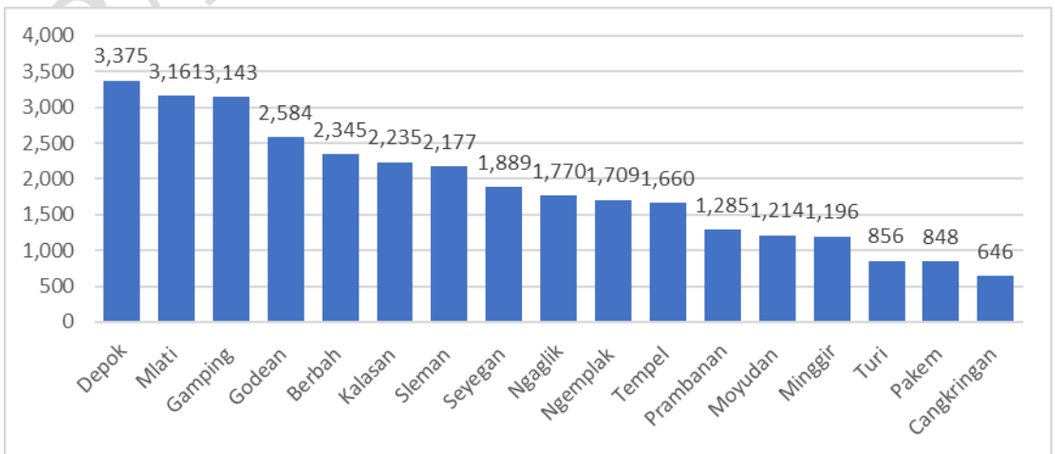
Tabel 2.6
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2013	521.444	49,79	525.881	50,21	1.047.325
2	2014	539.731	50,78	523.071	49,22	1.062.802
3	2015	538.074	50,05	537.052	49,95	1.075.126
4	2016	542.510	50,27	536.700	49,73	1.079.210
5	2017	521.483	49,83	525.139	50,17	1.046.622
6	2018	527.116	49,54	536.822	50,46	1.063.938

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman sebagaimana data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki (50,46% dan 49,54% pada tahun 2018). Kenaikan persentase penduduk perempuan mulai terjadi di dua tahun terakhir, yang dapat disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki.

Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman tidak merata, tertinggi ada di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan perkotaan yaitu Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping. Kepadatan rendah terjadi di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Gunung Api Merapi yaitu Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Kepadatan penduduk yang heterogen menimbulkan munculnya berbagai aspek permasalahan yang berbeda yang berakibat pada kebijakan pengembangan wilayah yang berbeda pula. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini.

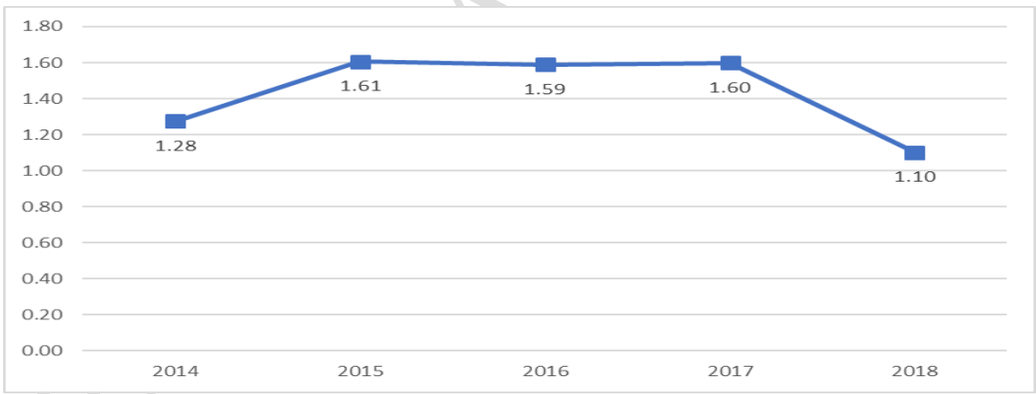


Gambar 2. 3 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman
Tahun 2018 (jiwa/km2)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

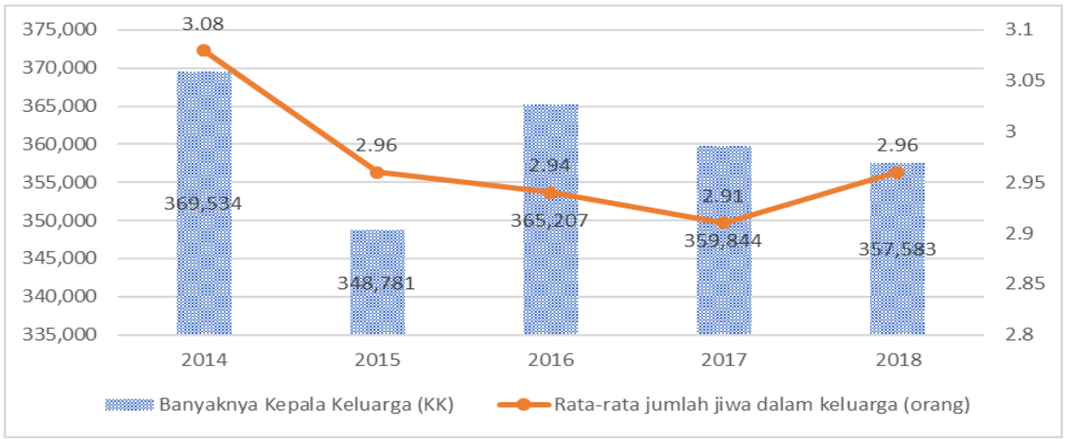
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat selama 5 tahun terakhir (Gambar 2.4) diperoleh rata-rata sebesar 1,43%, atau penduduk dengan laju pertumbuhan sedang. Laju pertumbuhan penduduk cenderung stagnan sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 pada angka di kisaran 1,60%, peningkatan cukup signifikan hanya terjadi pada tahun 2014-2015 yaitu dari 1,28% menjadi 1,61%. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1,10%, terutama akibat jumlah kelahiran yang menurun dari tahun sebelumnya (14.025 jiwa di tahun 2017 menjadi 13.879 jiwa di tahun 2018). Meskipun demikian, fenomena kepadatan penduduk di kawasan perkotaan cukup tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan. Pertumbuhan penduduk di kawasan ini lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk dibandingkan faktor pertumbuhan alami. Adanya pertumbuhan penduduk ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur serta layanan publik dasar secara memadai.



Gambar 2. 4 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2014- 2018 (%)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, 2019

Bertolak belakang dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga mengalami penurunan dari 359.844 KK pada tahun 2017 menjadi 357.583 KK pada tahun 2017. Sedangkan rata-rata jumlah jiwa setiap keluarga sebanyak 2,97 jiwa per keluarga. Pada gambar 2.5 ditunjukkan perkembangan jumlah kepala keluarga dan rata-rata jumlah jiwa pada setiap keluarga dari tahun 2014 hingga tahun 2018.



Gambar 2. 5 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga Tahun 2014-2018 di Kabupaten Sleman (jiwa)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Pada tahun 2013, struktur umur penduduk laki-laki Kabupaten Sleman didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia non-produktif usia anak (14 tahun kebawah) mencapai 22,32%, penduduk usia produktif (15-59 tahun) sebesar 65,47% dan penduduk usia non produktif di atas 60 tahun sebesar 12,21%. Pada tahun 2014 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,5%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,25%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 14,25%. Selanjutnya pada tahun 2015 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah mencapai 22,08%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,50%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 13,42%. Pada tahun 2016, penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah mengalami penurunan menjadi 21,97%, penduduk usia 15-59 tahun menurun menjadi 64,11%, akan tetapi penduduk usia non produktif usia di atas 60 tahun meningkat menjadi 13,92%. Sedangkan tahun 2017 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah menurun dari tahun sebelumnya mencapai 21,39%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar meningkat menjadi 64,34%, dan usia diatas 60 tahun meningkat menjadi 14,28%. Sementara pada tahun 2018, penduduk laki-laki usia 0-14 tahun meningkat menjadi 22,16%, sementara penduduk usia 15-59 menurun menjadi 63,92%, dan penduduk usia lansia menjadi 13,92%. Perkembangan struktur penduduk laki-laki Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.7
Penduduk Laki-laki Kabupaten Sleman menurut Kelompok Umur
Tahun 2013-2018 (jiwa)

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	34.229	28.049	34.829	35.707	31.193	34.660
5-9	40.319	37.709	41.144	41.943	41.413	41.409
10-14	41.830	39.490	42.825	41.530	41.112	40.658
15-19	38.839	37.017	40.193	41.034	40.243	38.570
20-24	37.821	35.865	36.125	36.170	36.726	36.063
25-29	37.356	36.796	34.980	34.620	34.944	35.388
30-34	44.832	47.308	43.247	41.105	38.186	36.963
35-39	43.204	46.896	45.373	44.827	44.050	43.444
40-44	42.325	45.919	42.709	43.029	41.565	40.837
45-49	37.868	42.317	41.257	41.640	41.061	40.433
50-54	31.827	35.284	33.227	35.171	35.173	35.075
55-59	27.310	30.170	29.944	30.229	30.152	29.856
60+	63.684	76.911	72.221	75.505	75.923	73.310
JUMLAH	**521.444**	**539.731**	**538.074**	**542.510**	**531.741**	**526.666**
Proporsi usia anak (0-14)	22,32	19,50	22,08	21,97	21,39	22,16
Proporsi Usia 15-59	65,47	66,25	64,50	64,11	64,34	63,92
Proporsi Lansia (>59)	12,21	14,25	13,42	13,92	14,28	13,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Komposisi penduduk perempuan usia 14 tahun ke bawah pada tahun 2013 mencapai 27,66%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,51% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 13,68%. Tahun 2014, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 24,94%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,62% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 15,01%. Pada tahun 2015, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 27,94%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,34% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 14,71%. Adapun pada tahun 2016, penduduk usia 14 tahun ke bawah meningkat menjadi 28,22%, usia penduduk 15-59 tahun menurun menjadi 64,06%, dan penduduk usia di atas 60 tahun meningkat menjadi 14,87. Pada tahun 2017 komposisi penduduk perempuan usia 14 tahun ke bawah mencapai 27,47%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,32%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 15,37%. Pada tahun 2018, penduduk perempuan usia anak mengalami penurunan menjadi 20,84%, penduduk usia 15-59 sedikit menurun menjadi 64%, serta penduduk usia lansia menjadi 15,16%.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.8
Penduduk Perempuan Kabupaten Sleman menurut kelompok umur
Tahun 2013-2018 (jiwa)

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	32.950	26.122	33.479	34.208	29.765	32.947
5-9	37.686	34.262	39.047	39.825	39.399	39.461
10-14	38.797	35.697	39.979	39.081	38.683	38.382
15-19	36.010	34.365	37.564	38.354	38.027	36.922
20-24	36.636	35.142	35.122	35.276	35.243	35.096
25-29	38.124	37.727	35.540	35.390	35.437	35.607
30-34	45.073	46.294	43.480	41.117	38.608	37.643
35-39	43.720	45.265	44.369	43.552	43.387	43.274
40-44	42.736	43.324	41.903	41.968	41.222	41.363
45-49	39.454	40.944	41.157	40.879	41.273	41.152
50-54	34.178	35.775	34.916	35.996	36.313	36.888
55-59	28.563	29.615	31.497	31.264	32.118	32.337
60+	71.954	78.539	78.999	79.790	81.645	80.630
JUMLAH	**525.880**	**523.070**	**537.050**	**536.700**	**531.120**	**531.702**
Proporsi usia anak (0-14)	27,66	24,94	27,94	28,22	27,47	20,84
Proporsi Usia 15-59	65,51	66,62	64,34	64,06	64,32	64,00
Proporsi usia lansia (>59)	13,68	15,01	14,71	14,87	15,37	15,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Berdasarkan data struktur penduduk, terlihat bahwa penduduk kelompok umur 0-4 tahun mengalami penurunan yang signifikan sedangkan jumlah penduduk yang berumur diatas 60 tahun mengalami peningkatan yang siginifikan, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

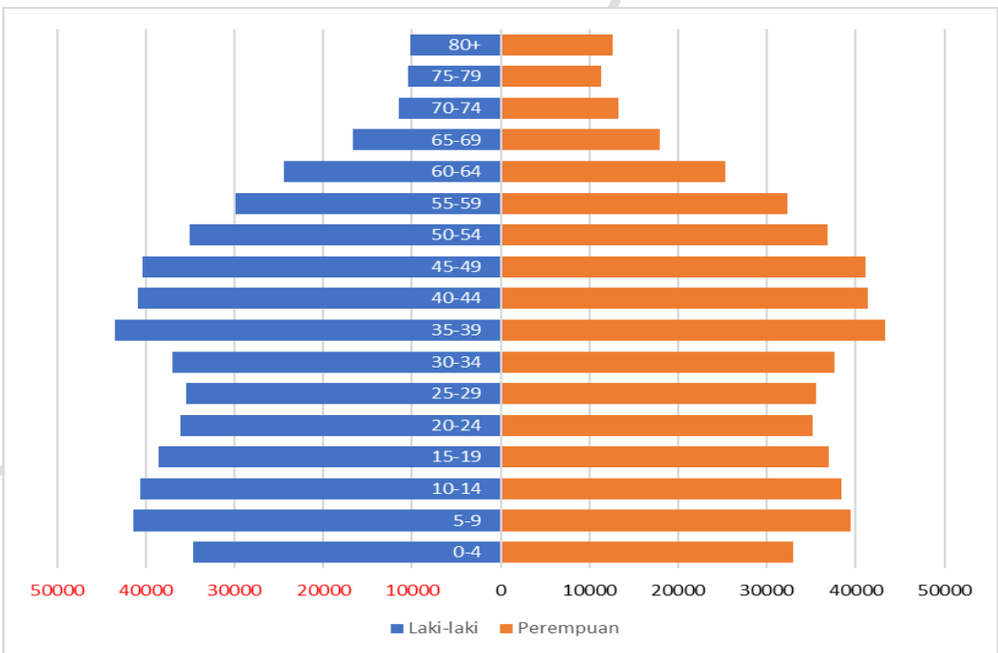
Gambaran struktur penduduk di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk yakni grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk muda (ekspansif), didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif serta anak-anak (kelompok umur 5-19 serta kelompok umur 30-49). Bentuk piramida ekspansif dapat diartikan bahwa terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda. Namun terdapat kecenderungan angka kelahiran di Kabupaten Sleman mulai menurun terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah daripada kelompok umur muda di atasnya.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi

BAPPEDA SLEMAN

saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Sleman saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Sleman yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2018, penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok umur 35-49 tahun, kelompok produktif yang pada umumnya merupakan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah. Terlihat pula bahwa besaran jumlah penduduk terjadi pada usaia 5-19 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu terus mendapatkan perhatian lebih besar.

SLEMAN



Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2018 (jiwa)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, 2019

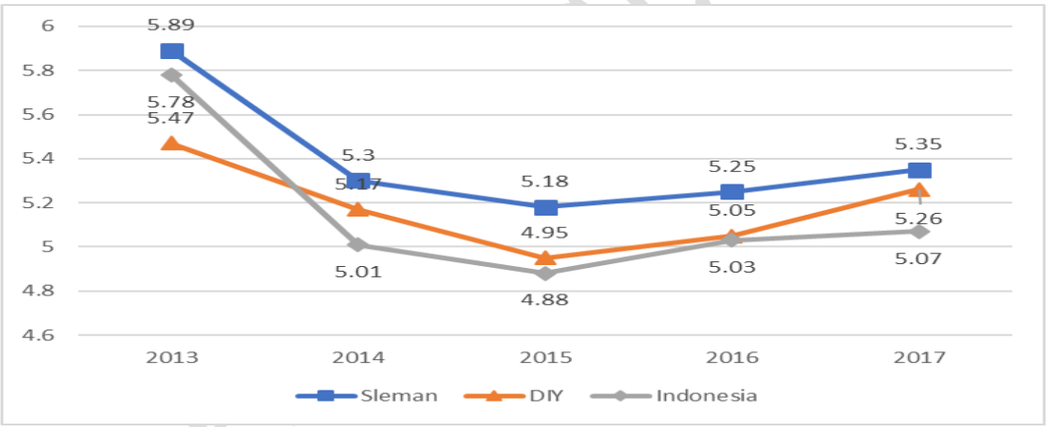
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah 5,35%, pada tahun 2016 sebesar 5,25%, dan pada tahun 2015 adalah 5,18%. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat lebih besar yaitu sebesar 5,3% dan pada tahun 2013 sebesar 5,89 %. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,07% dan DIY 5,26% pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tercatat lebih tinggi, serta menunjukkan trend positif sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Sleman berkembang ke arah yang positif selama tiga tahun terakhir serta mendukung iklim investasi yang positif. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Sleman, DIY dan Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.7.



Gambar 2. 7 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2013 – 2017 (%)

**) angka sementara, **) angka sangat sementara*
Sumber : BPS, 2018

Jika dilihat pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang tumbuh paling tinggi pada tahun 2018 adalah Sektor Konstruksi, tumbuh 13,07%, diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (8,80%), sektor Transportasi dan Pergudangan (8,07%), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (7,16%), serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,75%). Adapun sektor yang laju pertumbuhannya kecil adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,53%) dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (2,27%) Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*)	2018***)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	-4,76	1,80	0,67	1,16	1,53
B	Pertambangan dan Penggalian	2,28	1,01	0,17	0,11	0,20	8,80
C	Industri Pengolahan	6,01	2,06	1,96	5,01	5,66	5,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,71	3,62	1,46	15,75	3,93	2,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,17	4,02	3,02	1,84	3,26	3,87
F	Konstruksi	4,74	5,64	4,44	4,66	7,04	13,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	6,45	6,43	6,71	5,30	5,33
H	Transportasi dan Pergudangan	9,03	5,40	3,91	7,35	5,42	8,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	6,02	6,07	5,62	6,14	6,75
J	Informasi dan Komunikasi	8,45	7,25	5,48	8,35	6,37	6,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,17	9,02	8,65	4,86	2,85	7,16
L	Real Estate	5,00	8,37	6,62	5,35	5,02	5,10
M,N	Jasa Perusahaan	3,37	9,03	7,13	3,19	5,81	5,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	6,60	5,20	6,00	4,04	4,08
P	Jasa Pendidikan	4,21	8,57	7,88	3,56	5,69	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	8,01	7,65	4,37	6,04	6,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,92	5,80	8,19	4,91	5,58	4,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,89**	**5,30**	**5,18**	**5,22**	**5,34**	**6,43**

Sumber: BPS DIY, 2019
) angka sementara, *) angka sangat sangat sementara*

Pada tahun 2018, sektor berperan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan, sebesar 13,19%. Selanjutnya, setelah sektor industri pengolahan, sektor penyumbang PDRB terbesar adalah sektor konstruksi (11,78%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,18%) dan sektor Jasa Pendidikan (9,42%).

Sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan pada tahun 2017 memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 7,39%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mana sektor ini memberikan kontribusi sebesar 7,67%. Dalam 5 tahun terakhir (2013-2017) peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kepada PDRB cenderung menurun.

Sektor industri pengolahan pada struktur PDRB Kabupaten Sleman mempunyai peran paling besar, yakni 13,19% pada tahun 2018, meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya sebesar 13,29%. Sektor ini terdiri dari 16 kategori industri, dengan industri yang berperan paling besar pada pembentukan PDRB sektor industri

BAPPEDA SLEMAN

adalah industri makanan dan minumam, yang menyumbang 6,23%. Selanjutnya industri tekstil dan pakaian jadi yang menyumbang 2,50% dan industri pengolahan tembakau yang menyumbang 1,23%. Kategori industri yang lain masing-masingnya memberikan sumbangan kepada PDRB kurang dari 1%. Perhatian pemerintah bagi pengembangan industri makanan dan minuman akan membawa dua bermanfaat, ialah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat bahwa jumlah terbanyak dari industri makanan dan minuman ini adalah industri rumah tangga dan industri kecil.

Tabel 2.10
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

Kategori	Uraian/Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*)	2018***)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,96	8,33	8,36	8,06	7,67	7,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,45	0,44	0,41	0,38	0,39
C	Industri Pengolahan	14,21	13,95	13,43	13,44	13,29	13,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,12	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,99	10,89	10,85	10,73	10,93	11,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	7,64	7,61	7,79	7,89	7,86
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	7,00	7,03	7,27	7,42	7,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,88	9,98	10,20	10,23	10,31	10,18
J	Informasi dan Komunikasi	8,73	8,45	8,06	8,02	8,10	7,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,21	3,30	3,24	3,20	3,25
L	Real Estate	7,53	7,71	7,76	7,95	7,86	7,72
M,N	Jasa Perusahaan	1,66	1,71	1,71	1,67	1,67	1,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,54	6,65	6,83	6,95	6,82
P	Jasa Pendidikan	9,35	9,52	9,89	9,54	9,49	9,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,27	2,34	2,35	2,37	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,19	2,2	2,22	2,27	2,30	2,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

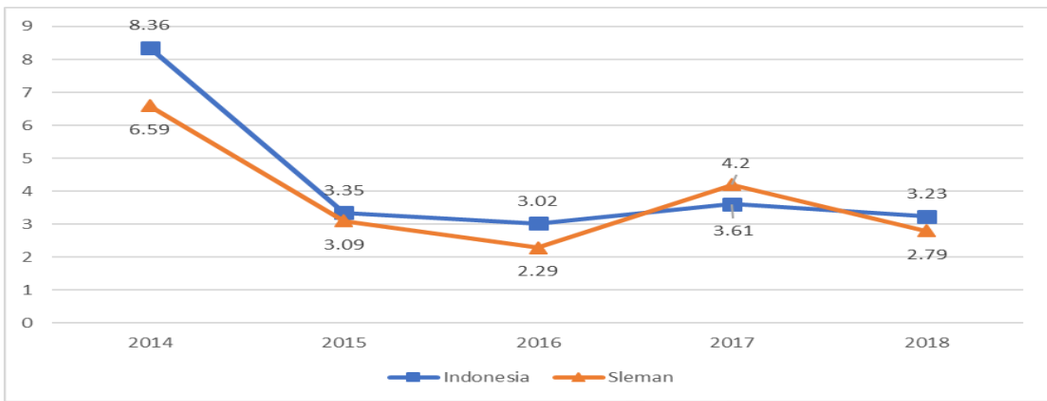
Sumber: BPS DIY, 2019
) angka sementara, *) angka sangat sangat sementara*

2.2.1.2. Laju Inflasi

Pola laju inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun menunjukkan pola fluktuatif namun sejak tahun 2013 angka inflasi selalu lebih rendah daripada inflasi nasional sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, angka inflasi mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 2,29% menjadi 4,2%, lebih tinggi dari angka inflasi nasional sebesar 3,61% di tahun 2017. Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan

BAPPEDA SLEMAN

stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Laju inflasi di Kabupaten Sleman tersebut didekati menggunakan data laju inflasi di perkotaan Yogyakarta, mengingat kondisi ekonomi di wilayah ini relatif homogen, perbedaan harga-harga tidak terpaut jauh. Perkembangan inflasi secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 8 Tingkat Inflasi Indonesia dan Perkotaan Yogyakarta Tahun 2014 s.d 2018 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia 2019

Secara lebih rinci, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sedangkan sektor sandang, pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta bahan makanan mengalami angka inflasi lebih tinggi dari sektor lainnya di tahun 2018.

Tabel 2.11
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013-2018 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	12,31	7,7	4,64	4,77	2,71	3,46
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	8,15	2,95	5,04	3,84	2,79	2,51
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,18	8,92	4,41	1,64	5,63	2,01
4	Sandang	0	3,61	5,87	3,04	3,84	5,25
5	Kesehatan	3,08	5,49	4,21	4,17	2,76	1,21
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	3,17	2,37	1,36	2,4	2,81	4,65
7	Transportasi dan Komunikasi	10,45	9,36	-2,51	-2,06	6,72	2,43

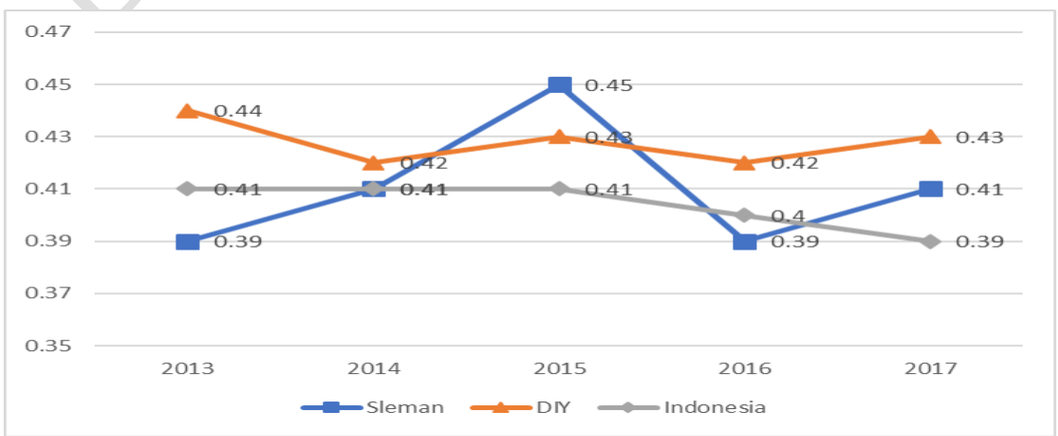
Sumber : BPS DIY, 2019

BAPPEDA SL

2.2.1.3. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang dan G>0,50 berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2013-2017 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif dengan nilai G antara 0,39-0,45 yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, namun, angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin meningkat dari 0,39 menjadi 0,41 di tahun 2014 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin melebar yang berlanjut pada tahun 2015 menjadi 0,45. Pada tahun 2016 angka indeks gini sebesar 0,39, menurun dari tahun sebelumnya yang berarti terdapat penurunan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, namun kembali meningkat menjadi 0,41 di tahun 2017 (lihat gambar).



Gambar 2. 9 Indeks Gini Kabupaten SlemanTahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

BAPPEDA SLEMAN

Indeks Gini di Kabupaten Sleman ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah atas serta menurunnya pendapatan masyarakat golongan menengah.

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar 82,85 meningkat dari 82,15 di tahun 2016, 81,20 di tahun 2015, 80,73 di tahun 2014, serta 80,26 di tahun 2013. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan angka ini juga diikuti oleh peningkatan unsur-unsur penyusun IPM. Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 adalah 74,63 tahun, sedikit meningkat dari tahun 2016 sebesar 74,60 tahun, dan sebesar 74,47 tahun dari tahun 2013-2015. Pada unsur Harapan Lama Sekolah, angka juga meningkat mulai dari 15,52 tahun di tahun 2013, 15,64 tahun di tahun 2014, 15,65 tahun di tahun 2015, 16,08 tahun di tahun 2016, dan 16,48 tahun di tahun 2017. Unsur Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami peningkatan, dari 10,03 tahun di tahun 2013, 10,28 tahun di tahun 2014, 10,30 tahun di tahun 2014, 10,64 tahun di tahun 2015, dan menjadi 10,65 tahun di tahun 2017. Peningkatan tersebut juga disertai meningkatnya Pengeluaran Perkapita Riil Sehari dari Rp14.085,- di tahun 2013, Rp14.170,- di tahun 2014, Rp14.562 di tahun 2015, Rp14.921 di tahun 2016, dan menjadi Rp15.365,- di tahun 2017.

BAPPEDA SLEMAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta dan lebih tinggi dibandingkan IPM provinsi dan nasional. Sampai saat ini, nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80). Di anatara 23 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Sleman memiliki fenomena unik, yakni merupakan satu-satunya kabupaten yang berstatus "sangat tinggi", bahkan menempati peringkat 5 terbesar dan mampu bersaing dengan wilayah kota. Pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sleman cukup maju, dan cukup komprehensif pada semua dimensi pembangunan manusia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Indikator Penyusunan IPM						
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,47	74,47	74,47	74,60	74,63
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,52	15,64	15,65	16,08	16,48
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,03	10,28	10,30	10,64	10,65
4.	Pengeluaran Perkapita Riil Sehari Disesuaikan (Rp)	14.085	14.170	14.562	14.921	15,365
IPM Kabupaten Sleman		80,26	80,73	81,20	82,15	82,85
IPM DIY		76,44	76,81	77,59	78,38	78,89
Indonesia		68,31	68,9	69,55	70,18	70,81

Sumber: BPS, 2018

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

2.2.2.1. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan penduduk secara umum. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

BAPPEDA SLEMAN

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2013 mencapai 114,77%. Pada tahun 2014 mencapai 116,78%. Pada tahun 2015 APK SD/MI mengalami kenaikan menjadi 116,81%. Sedangkan pada tahun 2016 APK SD/MI Kabupaten Sleman mencapai 116,90% dan pada tahun 2017 APK SD/MI Kabupaten Sleman meningkat lagi menjadi 116,96% dan mencapai 116,98% di tahun 2018. Sementara itu APK SMP/MTs pada tahun 2014 tercatat sebesar 111,41%, meningkat pada tahun 2015 menjadi 111,70%. Sedangkan pada tahun 2016 APK SMP/MTs mencapai 111,71% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 112,67% dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 112,71%.

Sementara itu APK SMP/MTs pada tahun 2013 tercatat sebesar 108,93% dan naik pada tahun 2014 menjadi 111,41%. Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 111,70% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 111,71% dan kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 112,67%. Pada tahun 2018 angka kembali sedikit meningkat menjadi 112,71%.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2013 di Sleman sebesar 99,96% dan tahun 2014 sebesar 102,07%. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar 103,20% dan sebesar 103,96% di tahun 2016. Angka kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 104,61%, dan di tahun 2018 menjadi 105,67%.

Adapun APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 81,24% dan tahun 2014 menjadi 81,63%. Sedangkan pada tahun 2015 APM SMP/MTs sebesar 83,96% dan terus meningkat di tahun 2016 mencapai 85,11% serta 85,16% di tahun 2017. Angka kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 85,91%.

3) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan

BAPPEDA SLEMAN

individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 10,03, meningkat pada tahun 2014 menjadi 10,28. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 10,28 dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 10,64 dan 10,65 pada tahun 2017.

5) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2013 angka HLS adalah 15,52 tahun artinya bahwa penduduk Sleman pada tahun 2013 harapan lama sekolahnya sampai 15,52 tahun atau setingkat dengan jenjang D2. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 15,64 tahun. Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 15,65 tahun, 16,08 tahun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 16,48 tahun. Perkembangan data angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar/Murni dan Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	APK SD/MI	114,77	116,78	116,81	116,90	116,96	116,98
2	APK SMP/MTs	108,93	111,41	111,70	111,71	112,67	112,71
3	APM SD/MI	99,96	102,07	103,20	103,96	104,61	105,67
4	APM SMP/MTs	81,24	81,63	83,96	85,11	85,16	85,91
5	Angka Harapan Lama Sekolah	15,52	15,64	15,65	16,08	16,48	n.a.
6	Rata-rata Lama Sekolah	10,03	10,28	10,28	10,64	10,65	n.a.

Sumber: Dinas Pendidikan & BPS, 2019

BAPPEDA SLEMAN

2.2.2.2. Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2017 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup

   Rata-rata angka harapan hidup dengan cara perhitungan baru tahun 2015 tercatat sebesar 76,13 tahun, menurun sebesar 1,53 menjadi 74,60 tahun pada tahun 2016 dan menjadi 74,63 tahun pada tahun 2017, yang bertahan di tahun 2018. Peningkatan angka harapan hidup merupakan gambaran umum dari peningkatan kualitas kesehatan setiap individu di Kabupaten Sleman yang perlu terus diupayakan.

2) Angka Kematian Bayi

   Sampai dengan tahun 2018, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup tercatat sebesar 4,11 menurun dari tahun 2017 sebesar 4,21. Namun, angka tersebut meningkat dari 3,11 di tahun 2016, 3,61 di tahun 2015. Sementara pada tahun 2014 tercatat sebesar 4,65, dan tahun 2013 sebesar 4,57.

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan

   Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 tercatat sebesar 63,27 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan menjadi 83,30 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, angka mengalami penurunan menjadi 28,30, meningkat menjadi 56,59. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup kembali menurun di tahun 2017 menjadi 43. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 50,42.

4) Balita Gizi Buruk

   Persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2016 mencapai 0,46%, mengalami penurunan menjadi 0,44% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,52. Meskipun terjadi peningkatan nilai yang kecil, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu terus meningkatkan pelayanan bidang kesehatan sehingga angka dapat ditekan serendah mungkin.

BAPPEDA SLEMAN

5) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 adalah sebesar 100%, yang dapat dipertahankan sampai tahun 2018.

6) Cakupan Penggunaan Air Bersih

Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2014 sebesar 99,29% dan pada tahun 2015 sampai tahun 2018 telah mencapai 100%. Penggunaan air bersih tidak hanya meliputi pelayanan air bersih dari PDAM tetapi juga melalui SPAMDES dan sumur terlindungi.

Adapun capaian indikator kesehatan tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka harapan hidup rata-rata	76,10	76,13	76,13	74,60	74,63	74,63
2	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	4,57	4,65	3,61	3,11	4,21	4,11
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	63,27	83,30	28,30	56,59	43	50,42
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,37	0,44	0,40	0,46	0,44	0,52
5	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100	100
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	40,1	47,90	47,90	48,49	51,61	55,12
9	Cakupan penggunaan Air Bersih (%)	98,33	99,29	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019; BPS Kab. Sleman, 2019

Sesuai dengan PermenPan-RB Nomor 26 Tahun 2011, standar kebutuhan di puskesmas perawatan sebanyak 5 tenaga dokter, 2 tenaga dokter gigi, 32 tenaga keperawatan (bidan dan perawat), 5 tenaga kefarmasian, 8 tenaga kesehatan masyarakat, 2 tenaga gizi dan 4 tenaga keteknisian medis. Sedangkan standar kebutuhan di puskesmas non perawatan sebanyak 3 tenaga dokter, 1 tenaga dokter gigi 15 tenaga keperawatan, 3 tenaga kefarmasian, 5 tenaga kesehatan masyarakat, 1 tenaga gizi dan 2 tenaga keteknisian medis. Untuk tenaga keterapian fisik kebutuhannya berdasarkan jumlah puskesmas pembantu dan poliklinik desa. Untuk gambaran umum tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.15
Gambaran Umum Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2018

No	Nama Tenaga	Puskesmas Perawatan			Puskesmas Non Perawatan		
		SS	BS	BL	SS	BS	BL
1	Dokter	4	6	-	10	1	4
2	Dokter gigi	4	8	-	10	-	5
3	Tenaga keperawatan	-	10	-	1	14	-
4	Tenaga kefarmasian	-	10	-	2	13	-
5	Tenaga kesehatan masyarakat	-	10	-	-	15	-
6	Tenaga gizi	9	-	1	3	-	12
7	Tenaga keteknisian medis	4	4	2	4	-	11
8	Tenaga keterapian fisik	10	-	-	7	8	-

Ket : SS : Sesuai Standar
BS : Belum Sesuai
BL : Berlebih
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 33,5% penduduk usia ≥ 10 tahun kurang aktifitas fisik, 9,1% penduduk usia 10 - 18 tahun merokok, 95,5% penduduk usia ≥ 5 tahun kurang mengkonsumsi buah dan sayur dan 3,3% penduduk usia ≥ 10 tahun minum minuman beralkohol.

Penyakit tidak menular juga menunjukkan kenaikan, terutama adalah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Pada tahun 2018 jumlah kasus diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar baik di puskesmas maupun faskes swasta adalah 59.567 orang dari 73.026 orang prevalensi penderita DM atau tercapai 81,57%. Kasus hipertensi tahun 2018 yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 158.451 orang dari jumlah penderita berdasarkan prevalensi sebanyak 196.912 atau sudah tercapai 80,47%.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Salah satu indikator ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja yang dapat terlibat dalan produksi barang/jasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, TPAK Kabupaten Sleman tahun 2018 tercatat sebesar 72,40% meningkat

BAPPEDA SLEMAN

dari 71,78% di tahun 2017, 69,23% di tahun 2016, 68,68% di tahun 2015, dan 65,09% di tahun 2014. Capaian angka TPAK Kabupaten Sleman tersebut salah satunya disebabkan karena pada umumnya penduduk Sleman sebagian besar yang bekerja di sektor non pertanian lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan banyaknya penduduk usia muda yang berstatus bersekolah (bukan angkatan kerja).

Penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tahun 2018 tercatat sebanyak 830.851 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 601.570 jiwa dan 229.283 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 72,40%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,76%. Adapun rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan menjadi 94,23% di tahun 2017 dari 67,73% di tahun sebelumnya. Sedangkan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi sebesar 0,26 dari 0,12 di tahun sebelumnya. Kondisi ketanagakerjaan secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penduduk Usia Kerja (orang)	875.102	861.472	829.355	852.884	841.227	830.851
2.	Angkatan Kerja	541.921	560.772	569.584	590.443	604.701	601.570
	- Bekerja (orang)	506.862	526.171	534.725	556.083	569.750	566.891
	- Penganggur Terbuka (orang)	35.059	34.601	34.859	34.360	34.951	34.679
3.	Bukan Angkatan Kerja (orang)	333.181	300.700	259.771	262.441	236.526	229.283
4.	TPAK (%)	61,93	65,09	68,68	69,23	71,78	72,40
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,47	6,17	6,12	5,82	5,78	5,76

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2019

Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja juga terus meningkat. Pada Agustus 2015, tercatat sebanyak 567.286 orang dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 636.132 orang (BPS). Masih menurut data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yakni persentase penduduk bekerja terhadap penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sleman sudah cukup tinggi yaitu di atas 94%, yakni 94,63% di tahun 2015 dan

BAPPEDA SLEMAN

96,49% di tahun 2017. Hal tersebut dapat berarti bahwa lebih dari 94% penduduk Sleman berpotensi secara ekonomis ikut berpartisipasi untuk menghasilkan barang/jasa dan sisanya masih pengangguran.

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja pada periode 2013-2018 cukup fluktuatif. Sektor pertanian mengalami penurunan, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di sektor pertanian serta jasa-jasa yang masing-masing menyerap 124.992 orang dan 112.945 orang secara berturut-turut. Sektor lainnya yang relatif besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan serta Perdagangan dan Hotel yang masing-masing menyerap 88.299 orang dan 83.561 orang. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2013–2018 (jiwa)

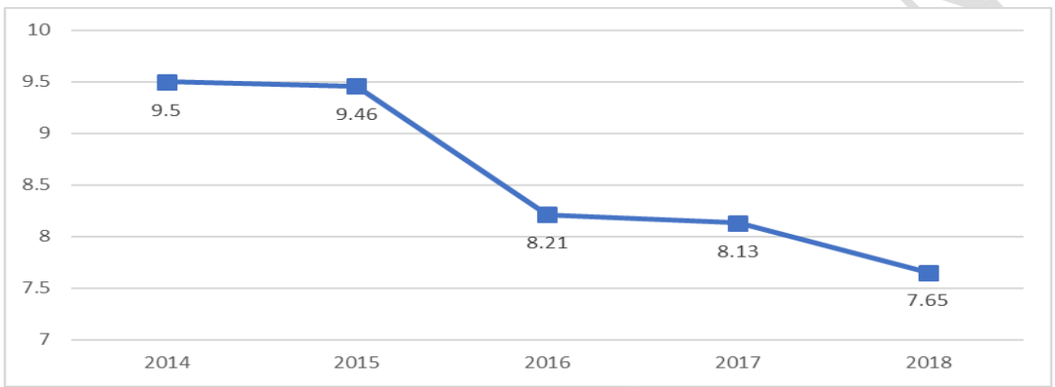
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian	129.249	123.981	123.073	127.205	127.867	124.992
2.	Pertambangan/ Penggalian	9.599	9.648	9.913	11.515	11.853	12.362
3.	Industri Pengolahan	52.181	55.765	54.662	57.327	56.606	54.831
4.	Listrik, Air, dan Gas	9.363	10.817	11.809	11.943	13.046	12.974
5.	Konstruksi & Bangunan	43.246	43.895	46.802	48.029	48.939	51.748
6.	Perdagangan dan Hotel	78.602	80.031	76.531	83.252	84.996	83.561
7.	Angkutan dan Komunikasi	21.180	23.688	23.193	24.740	25.230	25.179
8.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	46.541	58.557	72.485	73.722	89.353	88.299
9.	Jasa-jasa	116.901	119.789	116.256	118.350	111.710	112.945
Jumlah		**506.862**	**526.171**	**534.724**	**556.083**	**569.600**	**566.891**

Sumber: Dinas Tenagakerja, 2019

BAPPEDA SLEMAN

2.2.2.4. Kemiskinan

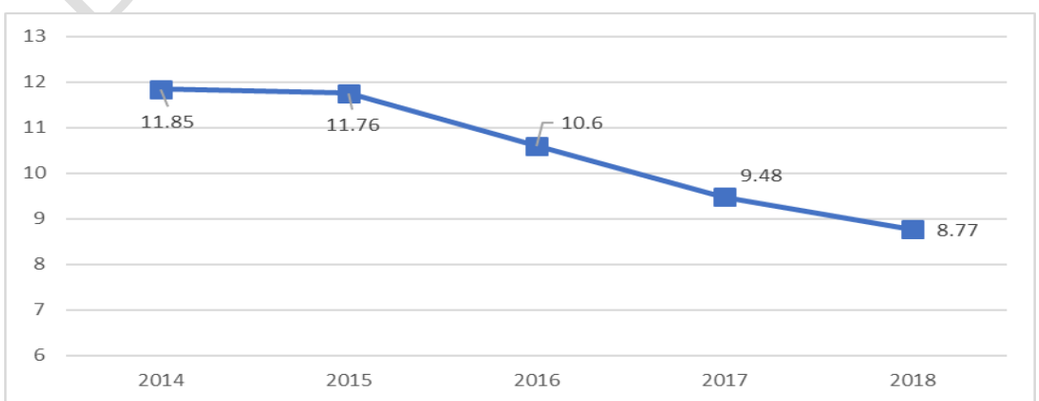
Terdapat dua sumber data kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Atas dasar angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2018 terdapat 7,65% penduduk miskin di Kabupaten Sleman, menurun dari angka 8,13% pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2016 tercatat sebesar 8,21%, 9,46% pada tahun 2015 dan 9,5% pada tahun 2014. Perkembangan garis kemiskinan secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018

Sumber: BPS, 2019

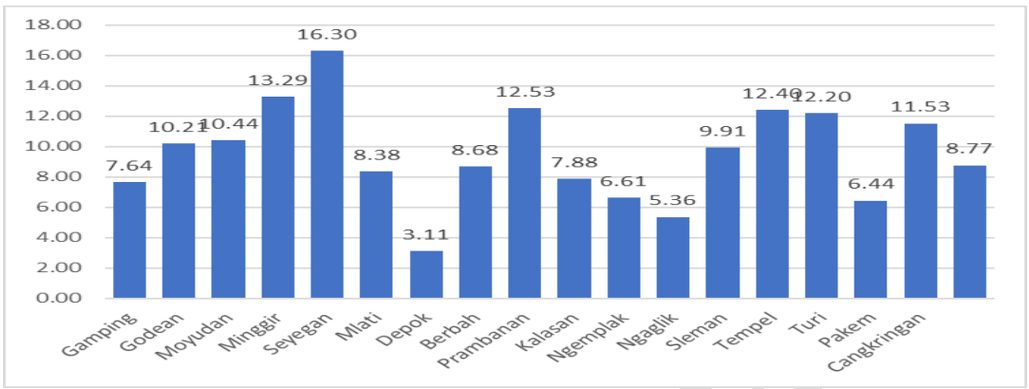
Sementara itu, data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pada tahun 2018, persentase jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 8,77% menurun dari tahun 2017 sebesar 9,48% serta 10,6% di tahun 2016 dan 11,76% di tahun 2015. Adapun penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar berikut.



Gambar 2. 11 Persentase Penduduk Miskin (KK Miskin) Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Sosial, 2019

Penduduk miskin terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Sleman, namun proporsi penduduk miskin pada masing-masing kecamatan tidaklah sama. Seyegan merupakan kecamatan dengan persentase tertinggi (16,30%) sedangkan terrendah terdapat di Kecamatan Depok (3,11%). Sebaran persentase kemiskinan di Kabupaten diperlihatkan pada gambar 2.12.



Gambar 2. 12 Distribusi Penduduk Miskin (% KK miskin) menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Kecamatan-kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi adalah kecamatan Seyegan, Minggir, Tempel, Prambanan, Turi dan Cangkringan yang merupakan wilayah-wilayah perdesaan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sebaiknya diarahkan pada wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan hasil yang signifikan atas upaya menurunkan angka kemiskinan.

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan olahraga:

2.2.3.1. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Bentuk nyata dari hal tersebut dapat dilihat dari sangat beragamnya budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan tahun 2018, kinerja persentase pelestarian

BAPPEDA SLEMAN

warisan budaya tercatat sebesar 30,625%. Pada tahun 2017, tercatat sebesar 27,37% dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 23,87%. Mengingat pentingnya warisan budaya dalam rangka pembentukan karakter masyarakat sekaligus pendidikan budaya bagi generasi penerus, maka masih terus diperlukan peningkatan upaya pelestarian warisan budaya oleh pemerintah daerah.

2.2.3.2. Olahraga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Sebagaimana kata pepatah terkenal "*Men Sana In Corporesano*" yang artinya adalah "Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Sampai tahun 2018 cakupan pembinaan olahraga meliputi 64% yang disertai cakupan pelatih yang bersertifikasi sebesar 89.05%. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 91% dengan jumlah atlet berprestasi sebanyak 7 atlet di tahun 2018. Peningkatan prestasi diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas. Keseluruhan akitivitas tersebut telah mendorong tercapainya prestasi olahraga sebanyak 12 cabang olahraga selama tahun 2018. Perkembangan indikator pemuda dan olahraga secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	n.a	90	90.32	90.32	87,5	87,5
2	Persentase wirausaha muda (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	11	15.63
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65.71	64
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64.35	89.05
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91
6	Jumlah atlet berprestasi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68	7
7	Jumlah prestasi olahraga	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	177	53

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2019

BAPPEDA SLEMAN

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Sleman.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Untuk penghitungan ini termasuk Pendidikan Non Formal (Paket A, dan Paket B).

Angka partisipasi sekolah dari tahun 2013 hingga 2018 berfluktuasi, baik untuk tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2018 adalah sebesar 117,11, mengalami peningkatan dari dari tahun 2017 sebesar 116,03. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, APS

BAPPEDA SLEMAN

tercatat 114,65 di tahun 2018, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 112,16.

Pada tahun 2018, APS jenjang SMP/MTs tercatat 114,65 meningkat dari 112,16 di tahun 2017. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 115,53 dan 114,84 di tahun 2015. Namun angka masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 sebesar 110,52 serta 103,19 di tahun 2013 dan 2014 secara berturut-turut. Adapun nilai APS secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	APS SD/MI	111,77	104,43	115,34	115,13	116,03	117,11
2	APS SMP/MTs	110,52	103,19	114,84	115,53	112,16	114,65

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

B. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.
Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio SD/MI	66	65	57	65	56	65
2	Rasio SMP/MTs	34	34	28	33	30	35

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Berdasarkan data, terlihat bahwa pada tahun 2017 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI adalah 56, meningkat menjadi 65 pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2016 adalah 65, pada tahun 2015 adalah 57, pada tahun 2014 adalah 65 dan pada tahun 2013 sebesar 66. Indikasi peningkatan menunjukkan semakin terlayaninya penduduk usia sekolah untuk mengakses pendidikan.

BAPPEDA SLEMAN

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2017 adalah 30. Pada tahun 2018, rasio gedung sekolah SMP/MTs meningkat menjadi 35. Dengan meningkatnya rasio sekolah terhadap anak usia sekolah SMP/M.Ts menunjukkan akses pendidikan semakin baik.

C. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 rasio guru dan murid SD/MI meningkat, yakni dari sebesar 15,6 menjadi sebesar 15,68. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa, sehingga rasio guru dan murid SD/MI di Kabupaten Sleman telah memenuhi standar.

Sementara untuk jenjang SMP/MTs rasio guru/murid pada tahun 2013 adalah 12. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 rasio guru dan murid SMP/MTs sebesar 13. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SMP/MTs mengajar 32 siswa, karena itu rasio guru dan murid SMP/MTs di Kabupaten Sleman telah sesuai standar. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio SD/MI	15	15	15	15	15,6	15,68
2	Rasio SMP/MTs	12	13	13	13	13,77	13,39

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Apabila dilihat dari rasio guru dan murid yang ada dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan terlihat bahwa ketersediaan guru pada setiap jenis pendidikan terpenuhi, namun karena penghitungan rasio tersebut termasuk guru non PNS/GTT sehingga apabila dihitung dengan tidak memasukkan guru Non PNS/GTT maka rasio guru dan murid untuk jenjang SD/MI mengalami kekurangan. Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Uraian Data		Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Taman Kanak-kanak							
	a.	Jumlah sekolah (unit)	**539**	**545**	**553**	**559**	**559**	**564**
		- Negeri	5	5	5	5	5	5
		- Swasta	534	540	548	554	554	559
	b.	Jumlah guru (jiwa)	**2.324**	**2.324**	**2.297**	**2.265**	**2.212**	**2.203**
		- Negeri	49	48	48	49	46	44
		- Swasta	2.275	2.276	2.249	2.216	2.166	2.159
	c.	Jumlah tenaga non guru (jiwa)	**399**	**404**	**394**	**443**	**441**	**445**
		- Negeri	18	17	17	17	10	17
		- Swasta	381	387	377	426	431	428
	d.	Jumlah siswa (murid)	**29.362**	**30.184**	**30.788**	**31.635**	**31.277**	**30.879**
		- Negeri	474	560	580	559	618	613
		- Swasta	28.888	29.624	30.208	31.076	30.659	30.266
2.	Sekolah Dasar/MI							
	a.	Jumlah sekolah (unit)	**527**	**531**	**533**	**534**	**540**	**545**
		- Negeri	379	379	379	379	376	376
		- Swasta	148	152	154	155	164	169
	b.	Jumlah guru (jiwa)	**6.159**	**6.040**	**6.113**	**6.093**	**6.181**	**6.259**
		- Negeri	4.199	4026	4016	3.980	3.841	3.748
		- Swasta	1.960	2014	2097	2.113	2.340	2.511
	c.	Jumlah tenaga non guru (jiwa)	**1.206**	**1.291**	**1.331**	**1.445**	**1.412**	**1.453**
		- Negeri	820	866	884	991	907	909
		- Swasta	386	425	447	454	505	544
	d.	Jumlah siswa (murid)	**91.338**	**92.859**	**94.200**	**94.614**	**96.448**	**98.128**
		- Negeri	64.192	64.169	64.084	63.782	62.981	62.731
		- Swasta	27.146	28.690	30.116	30.832	33.467	35.397
3.	SMP/MTS							
	a.	Jumlah sekolah (unit)	**132**	**133**	**134**	**137**	**140**	**145**
		- Negeri	64	64	65	65	64	64
		- Swasta	68	69	69	72	76	81
	b.	Jumlah guru (jiwa)	**3.303**	**3.350**	**3.401**	**3.382**	**3.366**	**3.492**

BAPPEDA SLEMAN

No	Uraian Data		Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
		- Negeri	1.939	1892	1.870	1.825	1.764	1.777
		- Swasta	1.364	1.458	1.531	1.557	1.602	1.715
	c.	Jumlah tenaga non guru (jiwa)	**974**	**957**	**1.002**	**1.011**	**1.015**	**999**
		- Negeri	663	633	660	650	625	596
		- Swasta	311	324	342	361	390	403
	d.	Jumlah siswa (murid)	**41.352**	**44.257**	**45.014**	**45.434**	**46.338**	**46.767**
		- Negeri	27.708	27.703	28.158	28.232	28.357	28.433
		- Swasta	13.644	16.554	16.856	17.202	17.981	18.334
4.	Kondisi Bangunan Sekolah							
	a.	Jumlah Ruang SD (unit)	**3.863**	**3.852**	**3.828**	**3.912**	**3.998**	**3.863**
		- Baik	3.077	3.273	3.317	3.520	3.525	3.077
		- Rusak Ringan	678	494	450	348	394	678
		- Rusak Berat	108	85	61	44	79	108
	b.	Jumlah Ruang SLTP (unit)	**1.443**	**1.534**	**1.544**	**1.583**	**1.580**	**1.443**
		- Baik	1345	1.429	1.440	1.458	1.453	1345
		- Rusak Ringan	68	77	76	82	99	68
		- Rusak Berat	30	28	28	43	28	30
B	**Pendidikan Luar Sekolah**							
1.	Lembaga Pendidikan Kursus							
	a.	Jumlah lembaga (unit)	132	135	114	117	61	60
	b.	Jumlah tutor (jiwa)	528	532	346	358	378	234
	c.	Jumlah warga belajar (jiwa)	2.640	2.720	3.204	3.344	3.857	2.802
2.	Sanggar kegiatan belajar							
	a.	Jumlah kegiatan (unit)	7	9	16	6	7	6
	b.	Jumlah pamong belajar (jiwa)	9	9	10	10	11	10
3.	Kelompok Belajar							
	a.	Kejar Paket B setara SMP						
		- Jumlah tutor (jiwa)	108	83	48	60	50	60
		- Jumlah kelompok (unit)	43	22	8	8	8	14
		- Jumlah warga belajar (jiwa)	360	300	170	200	341	559
	b.	Kejar Paket C setara SMA						
		- Jumlah tutor (jiwa)	101	165	45	143	51	143
		- Jumlah kelompok (unit)	17	21	5	8	9	18
4.	Satuan PAUD Sejenis							
	a.	Jumlah tutor (jiwa)	1.766	1.240	1148	1.191	1.290	1.165
	b.	Jumlah kelompok (unit)	573	573	290	296	304	278
	c.	Jumlah warga belajar (jiwa)	20.683	20.468	11.208	10.517	19.954	20.523
5.	Play Group (Kelompok Bermain)							
	a.	Jumlah tutor (jiwa)	862	1.052	1.081	1.129	1.121	2.163
	b.	Jumlah kelompok (unit)	224	231	243	245	251	243
	c.	Jumlah warga belajar (jiwa)	6.596	7.262	6.843	6.935	7.265	9.763

BAPPEDA SLEMAN

No	Uraian Data		Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
6.	TPA							
	a.	Jumlah tutor (jiwa)	410	460	464	511	530	313
	b.	Jumlah kelompok (unit)	88	82	87	90	98	78
	c.	Jumlah warga belajar (jiwa)	2.028	2.876	2.512	2.622	3.091	2.842
C	**Hasil Pelayanan Publik**							
1.	Angka Partisipasi Kasar (%)							
	a.	SD	114,77	116,78	116,81	116,90	116,96	116,98
	b.	SMP	108,93	111,41	111,70	111,71	112,67	112,71
2.	Angka Partisipasi Murni (%)							
	a.	SD	99,96	102,07	103,20	103,96	104,61	105,67
	b.	SMP	81,24	81,63	83,96	85,11	85,16	85,91
3.	Anak Putus Sekolah							
	a.	SD	29	42	29	8	10	5
	b.	SMP	14	18	14	8	11	3
4.	Rasio Siswa:Sekolah							
	a.	TK	55	55	56	56	55,95	53,41
	b.	SD	173	174,88	177	177,59	178,61	180,05
	c.	SMP	313	332,76	336	331,64	330,99	332,53
5.	Rasio Siswa: Guru							
	a.	TK	13	13	13	13	14,14	13,67
	b.	SD	15	15	15	15	15,60	15,68
	c.	SMP	12	13	13	13	13,77	13,39
6.	Rasio Siswa: Kelas							
	a.	SD	24	24,40	24	24	24,32	22,73
	b.	SMP	30	30,21	30	30	29,31	29,73
7.	Rata-rata Nilai Hasil Belajar							
	a.	UAN SD	7,55	7,55	49,62	61,67	56,71	211,05
	b.	UAN SMP	6,27	6,54	49,99	60,36	60,47	256,50
8.	Rata-rata nilai Hasil Belajar program Kesetaraan							
	a.	UAN Paket A Setara SD	6,00	6,00	-	-	55,79	35,14
	b.	UAN Paket B Setara SMP	6,20	6,20	5,71	33,41	52,33	51,89
	c.	UAN Paket C Setara SMA	6,30	6,30	5,05	46,69	46,11	50,54
9.	Rata-rata Kelulusan (%)							
	a.	SD	98,94	98,94	98,56	99,47	97,88	97,23
	b.	SMP	93,74	93,74	96,88	99,36	97,09	99,08
10	Prosentase guru yang layak mengajar							
	a.	TK	46,26	61,14	66,88	69,05	73,96	74,53
	b.	SD	75,48	75.48	82,22	85,38	89,94	91,34
	c.	SMP	85,89	85.89	87,85	87,53	91,30	93,56

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

BAPPEDA SLEMAN

2.3.1.1.2. Urusan wajib Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan.

Sampai dengan tahun 2018, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup tercatat sebesar 4,11 menurun dari 4,21 di tahun 2017. Namun angka tersebut lebih besar dari tahun 2016 sebesar 3,11 dan 3,61 di tahun 2015. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Sleman antara lain: Asfiksia 13 kasus, BBLR 19 kasus, BLSR 4 kasus, BBLER 2 kasus, kelainan kongenital 13 kasus, sepsis 3 kasus, gangguan respirasi 1 kasus, dan multiple konginital anomali 1 kasus. Selain itu adanya kematian bayi berdasarkan hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) 2018 disebabkan oleh adanya faktor keterlambatan, di antaranya adalah: 1) keterlambatan mendeteksi komplikasi pada bayi karena kurangnya kompetensi petugas serta fasilitas alat kesehatan di faskes; 2) keterlambatan menangani komplikasi pada bayi baru lahir akibat terlambat merujuk maupun pengambilan keputusan dari keluarga pasien; 3) meningkatnya kehamilan tidak diinginkan sehingga meningkatkan jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat rendah.

Sedangkan angka angka kelangsungan hidup bayi 995,35 di tahun 2018 sedikit meningkat dari tahun 2017 sebesar 995,89 dan lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 995,79. Adapun angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup mengalami sedikit peningkatan dari 0,14 di tahun 2017 menjadi 0,21 di tahun 2018. Angka terakhir ini sama dengan tahun 2016. Adanya kematian balita antara lain disebabkan oleh adanya: 1) keterlambatan mendeteksi kelainan genetik dan kelainan tumbuh kembang balita; 2) keterlambatan

BAPPEDA SLEMAN

menangani komplikasi penyakit pada balita; 3) keterlambatan pengambilan keputusan dari keluarga pasien dalam mencari perawatan dan pengobatan.

Demikian halnya angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup dari 2,83 di tahun 2015 dan 2,4 di tahun 2016 menjadi 3,96 di tahun 2017, serta 2,59 di tahun 2018. Hal tersebut dapat disebabkan oleh fenomena remaja sekarang, yang berkaitan pada pola dan gaya hidup negatif sehingga berimplikasi pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Kasus ini terjadi bukan hanya dikarenakan terdapat persoalan di bidang kesehatan namun melibatkan multi sektor dan multi pihak.

Sedangkan untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 56,59 di tahun 2016 menjadi 43 di tahun 2017, namun kembali meningkat menjadi 50,42 di tahun 2018. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Sleman antara lain: perdarahan 2 kasus, penyakit jantung 2 kasus, sepsis 1 kasus, aspirasi 1 kasus dan pre-eklamsia 1 kasus. Hal ini menjadi indikasi bahwa perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi, balita dan ibu, serta strategi multi sektor dan multi pihak sehingga angka kematian dapat terus ditekan.

Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan itu sendiri. Sampai tahun 2018, rasio posyandu per satuan balita adalah 22,07, menurun dari 23,99 di tahun 2017. Sementara pada tahun 2016 tercatat sebesar 24,64. Adapun rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk adalah 0,16 pada tahun 2018 dan 2017 meningkat dari 0,15 di tahun 2016. Sedangkan rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 0,03 sejak tahun 2014. Jumlah fasilitas ini disertai dengan rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,65 di tahun 2018, sementara di tahun 2017 tercatat sebesar 1,22, tahun 2016 sebesar 1,04. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk menurun di tahun 2018 sebesar 1,82 dari 2,19 di tahun sebelumnya. Adapun gambaran kondisi kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,57	4,65	3,61	3,11	4,21	4,11
2	Angka kelangsungan hidup bayi	995,35	996,39	996,89	995,79	995,89	995,35
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,36	0,35	3,19	0,21	0,14	0,21
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,59	3,82	2,83	2,40	3,96	2,59
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	63,27	83,30	28,30	56,59	43	50,42
6	Rasio posyandu per satuan balita	22,14	14,29	17,82	24,64	23,99	22,07
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,81	0,91	0,73	1,04	1,22	0,65
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,94	1,03	0,85	1,29	2,19	1,82
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100%	100%	100%	99,99%	100%
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99,69%	91,81%	98,72%	97,29%	97,25%	95,38%
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,005%	0,005%	0,004%	0,002%	0,004%	0,00%
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	8,88%	4,92%	22,23%	36,06%	35,88%	39,18%
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	39,80%	43,81%	9,00%	33,49%	16,13%	30,88%
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	30,48945	0,05	0,07	0,07	0,08	0,10
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,660762	0,752728	0,658236	0,278022	0,752685	3,024
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	39,80%	43,81%	9,00%	33,49%	16,13%	30,88%
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88%	88%	88%	87%	85,01%	86,59%
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Penderita diare yang ditangani	78%	73%	78%	63%	53,96%	59,19%
26	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01%	0%	0%	0%	0%	0,01%
27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%
28	Cakupan kunjungan bayi	91,04%	93%	93%	93%	96,58%	91,33%
29	Cakupan puskesmas	147,06%	147%	147%	147%	147,06%	147,06%
30	Cakupan pembantu	81,40%	81%	80%	80%	80,23%	81,40%

BAPPEDA SLEMAN

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	puskesmas						
31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,91%	96%	97%	95%	100%	100%
32	Cakupan pelayanan nifas	91,40%	95%	95%	96%	96,3%	96,22%
33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%
34	Cakupan pelayanan anak balita	2640,77%	100%	100%	100%	97,63%	90,69%
35	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100,00%	100%	100%	100%	100%	97,09%
36	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100,00%	100%	100%	100%	99,74%	100,00%
37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%
38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	57,69%	85%	70%	79%	100%	100,00%
39	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

2.3.1.1.3. Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2014 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,516 meningkat dari 0,504 di tahun 2013 dan pada tahun 2015 mencapai angka 0,5426. Meskipun terdapat kenaikan kondisi jalan baik karena telah dilakukan banyak perbaikan, namun untuk tahun 2016 mengalami sedikit penurunan yaitu di angka 0,5236 dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,5325. Pada tahun 2018 angka tersebut kembali meningkat menjadi 0,5356.

BAPPEDA SLEMAN

Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan yang baik. Sampai tahun 2018, rasio panjang jalan per jumlah penduduk di Kabupaten Sleman adalah 0,000661 meningkat dari 0,000648 di tahun 2017 dan tahun 2016. Adapun pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,000657 serta 0,000658 di tahun 2014. Rendahnya rasio tersebut dapat menimbulkan persoalan lalu lintas di beberapa ruas sehingga peningkatan jaringan jalan dan manajemen lalu lintas perlu terus diupayakan

Adapun kondisi jalan kabupaten kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam pada tahun 2018 adalah 88,02% meningkat dari 70,40% di tahun 2017. Peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa menjadi lebih rendah. Namun, kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan.

Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sleman, hanya terdapat di beberapa ruas saja terutama di wilayah perkotaan yang tersedia. Pada tahun 2018, drainase berkondisi baik tercatat sebesar 47% meningkat dari 9,63% di tahun 2017 dan 6,14% di tahun 2016 serta terendah pada tahun 2014 hanya 2,33%. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri.

Kabupaten Sleman yang memiliki sejumlah areal persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2018, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 63,48% menurun dari 67,54% di tahun 2017. Pada tahun 2016 tercatat 63,79% dengan rasio pelayanan sebesar 65,89%. Sampai dengan tahun 2014 panjang saluran irigasi 2.698,34 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 419,966 km, irigasi skunder 317,480 km, dan tersier sepanjang 1.960,894 km, dan luas lahan pertanian budidaya seluas 22.233 Ha.

BAPPEDA SLEMAN

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2017, sebanyak 29,52% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum, meningkat dari 28,63% di tahun 2016. Angka ini merupakan penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan yang disediakan oleh PDAM. Umumnya, penduduk Kabupaten Sleman memanfaatkan air tanah dari air permukaan/sumur sebagai sumber air bersih.

Persoalan sampah sangat berkaitan dengan kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Sampai tahun 2017, tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan tercatat sebesar 0,93% di tahun 2017, meningkat dari 0,46% di tahun sebelumnya. Karena itu, peningkatan fasilitas persampahan ini sangat diperlukan guna meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Keberadaan tempat ibadah juga diperlukan di dalam pembangunan terutama pembangunan manusia. Sampai saat ini rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah 1:132.

Tabel 2.24
Indikator Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,540615	0,51594	0,542638	0,523631	0,5325	0,5356
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,000668	0,000658	0,000657	0,000648	0,000648	0,000661
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	n.a.	n.a.	65,18	73,14	70,40	88,02
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,49	2,33	4,35	6,14	9,63	47
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	n.a.	76,5	76,93	63,79	67,54	63,48
6	Rasio Jaringan Irigasi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,89	0,60
7	Persentase penduduk berakses air minum	25,67%	26,65%	28,32%	28,63%	29,52%	100%
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	5,46%	5,52%	5,66%	5,81%	6,20%	100%
9	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,48%	0,47%	0,47%	0,46%	0,93%	10,55%
10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1:132	1:132	1:132	1:132	1:132	1:132

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan Penataan Ruang terdiri atas:

1. Informasi Penataan Ruang

Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Informasi berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja tanpa dipungut biaya. Rasio perhitungannya didasarkan pada jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten Sleman pada akhir tahun pencapaian SPM dibagi dengan jumlah kumulatif peta analog/digital yang seharusnya tersedia. Persentase target di tingkat kabupaten adalah 100% pada Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2018, masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang kabupaten, khususnya melalui peta RTRW kabupaten dan/atau rencana rincinya (RDTR Kecamatan). RTRW Kabupaten Sleman telah ditetapkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012, sedangkan pada rencana rinci, semua kecamatan (17 kecamatan) telah memiliki kajian RDTR, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Informasi terkait penataan ruang dapat diakses dengan mudah melalui website http://simtaru.slemankab.go.id/.

Meskipun demikian, target RPJMD bidang urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2018 adalah tersusunnya rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah/Raperda sebanyak 4 dokumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan penyusunan baik rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang guna mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan

BAPPEDA SLEMAN

masyarakat secara umum. Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan RTH publik.

Sampai dengan tahun 2018, luasan RTH Publik yang dikelola masih berada di bawah 20% dari yang dipersyaratkan (898,75 Ha). Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin.

Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi. Sampai tahun 2017, ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Sleman hanya tercatat sebesar 1,14%. Meskipun angka yang tercatat cukup rendah, namun perlu upaya agar perubahan peruntukannya dapat ditekan dan terkendali.

Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global. Berdasarkan analisis citra satelit dan foto udara pada tahun 2016, tercatat bahwa luasan kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan adalah sebesar 16%. Hal ini berarti diperlukan penambahan jumlah areal yang tertutup pohon sehingga kualitas lingkungan baik secara lokal maupun regional bahkan global dapat meningkat.

2.3.1.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka

BAPPEDA SLEMAN

sebesar 93,64% pada tahun 2014 meningkat dari 91,73% di tahun 2013, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 94,42%, dan tahun 2016 naik menjadi 99,61%. Namun, cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2017 menurun menjadi 98,51%. Pada tahun 2018, kembali meningkat menjadi 99,15% Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Selain melalui peningkatan kondisi ekonomi masyarakat perlu juga upaya peningkatan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau. Pada tahun 2018, cakupan rumah layak huni yang terjangkau tercatat 90,99%, meningkat dari tahun 2017 sebesar 89,28%. Namun dibanding tahun 2016 menurun yakni sebesar 93,34%. Ketersedian rumah layak huni ini bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 77,53% dan 83,91% di tahun 2014. Berfluktuasinya angka tersebut dapat juga disebabkan oleh kondisi status kepemilikan rumah yang umumnya berupa sewa.

Di wilayah Kabupaten Sleman, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi, namun sampai tahun 2017 kawasan kumuh yang tertangani mencapai 33,38%, meningkat dari 15,51% di tahun 2016. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi. Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sampai tahun 2018 mencapai 0,085%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan. Sedangkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasaran dan sarana umum (PSU) pada tahun 2018 adalah 99,72% sedikit meningkat dari 99,57% pada tahun 2017, serta dari 70,30% di tahun 2016. Indikator urusan perumahan Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.25
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,73	93,64	94,42	99,61	98,51	99,15
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n.a.	83,91	77,53	93,34	89,28	90,99
3	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	n.a.	n.a.	n.a.	15,51	33,38	30
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,003	0,07	n.a.	n.a.	30,04	0,085
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100	99,93	68,96	70,30	99,57	99,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2019

2.3.1.1.5. Urusan wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Sleman juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia juga untuk Kabupaten Sleman dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu

BAPPEDA SLEMAN

masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Sampai tahun 2018, cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman tercatat sebesar 0,93, konstan dari tahun 2014 yang bertugas untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal/lingkungan. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100%, seluruh persoalan sebanyak 232 kasus di tahun 2018 dapat diselesaikan secara efektif. Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 36,08% pada tahun 2018 dan 2017 meningkat dari 18,04% di tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penambahan 1 unit posko baru di Kecamatan Godean. Cakupan pelayanan ini terkait dengan area perkotaan yang terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sedangkan Kawasan perkotaan lainnya yang merupakan ibukota kecamatan tersebar di wilayah perdesaan Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, kondisi ini telah diimbangi dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2018 sebesar 78,79%. Namun, angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 97,14%, sebesar 84,61% di tahun 2016 dan 87,10% di tahun 2015. Upaya lainnya adalah melalui instrumen Peraturan Daerah, upaya penegakan Perda telah mencapai 100% sejak tahun 2014 sampai saat ini dari seluruh laporan pengaduan yang masuk. Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.26
Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,84	0,86	0,85	0,86	0,86	0,93
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	97,82%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	n.a.	18,04%	18,04%	18,04%	36,08%	36,08%
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n.a.	100%	87,10%	84,61%	97,14%	78,79%
5	Persentase Penegakan PERDA	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019

2.3.1.1.6. Urusan wajib Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2018 adalah sebesar 41,47% menurun dari tahun 2017 sebesar 68,69%, tahun 2016 sebesar 78,58% dan 82,35% di tahun 2015. Tahun 2015 merupakan titik balik penurunan dari tahun sebelumnya yang meningkat yaitu 78,94% di tahun 2014. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun seringkali kurang bersifat produktif. Karena itu, besaran sebagian bantuan dialihkan pada kegiatan lain seperti kegiatan padat karya yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2018 adalah sebesar 3,65% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,27%. Sedangkan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2018 adalah 90% meningkat dari 85,71% di tahun 2017.

Indikator urusan sosial lainnya adalah persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang

BAPPEDA SLEMAN

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, tahun 2018 tercatat sebanyak 86,05%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 82,05%. Sementara itu, peningkatan terjadi juga pada indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dari 44,48% di tahun 2017 menjadi 65,09% di tahun 2018.

Perkembangan indikator sosial ini dapat digunakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan sosial Kabupaten Sleman. Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PMKS skala yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	69,31%	78,94%	82,35%	78,58%	68,69%	41,47%
2	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2,53%	41,38%	59,86%	5,08%	5,27%	3,65%
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	97,37%	100,00%	100,00%	78,95%	85,71%	90%
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	82,05%	86,05%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,02%	59,77%	70,69%	67,07%	44,48%	65,09%

Sumber: Dinas Sosial, 2018

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta

BAPPEDA SLEMAN

membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Angka sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1,84 menurun dari 32 di tahun 2017 dan 30 di tahun 2016, serta 24 di tahun 2014. Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 100% di tahun 2018, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 60,7%. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Sleman. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2013-2018 secara lebih jelas dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	35	24	25	30	32	1,84
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	78,95	79,17	96	100	60,7	100
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	48,81	96,03	94,86	91,4	30,45	80,27
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	56,87	60,16	60,1	55,62	55,23	54,45
5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	14,12	28,48	47,58	41,97	n.a.	n.a.
6	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	28,4	23,24	24,56	24,14	n.a.	n.a.
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	77,86	86,6	84,91	55,82	61,2	52,31
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100	34,48	100	100	71,43	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2019
*Catatan: *) mulai tahun 2017 menjadi kewenangan provinsi*
***) Tahun 2018 tidak menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan*

BAPEDA SLEMAN

2.3.1.2.2. Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajad laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan, membuktikan bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan semakin menguat yang disebabkan oleh kapasitas dan kemampuan perempuan.

Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, terdapat pengaduan atas kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus mengalir, hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT. Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan kinerja UPT P2TPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sleman tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013-2018 (%)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kursi diduduki perempuan	9	13	13	13	15	n.a.
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	18	26	26	26	30	26
3	Rasio KDRT	0,10	0,09	0,15	0,14	0,08	0,08
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,1	0,09	0,15	0,14	0,1	n.a.
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100

BAPPEDA SLEMAN

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	88,89	100	100	100	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	90	100	100	100	100	100
12	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	99,96	102,07	103,2	103,96	0,99	n.a.
13	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	81,24	81,63	83,96	85,11	0,98	n.a.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019

2.3.1.2.3. Urusan Wajib Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan pada tahun 2018 tersedia sebesar 149.214,2 ton, menurun dibanding tahun 2017 sebesar 149.441,3 ton, sebagai implikasi dari terjadinya stagnasi produktivitas hasil pertanian. Kecenderungan turun juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 tercatat sebesar 159.668,1 ton menurun dari 161.831,8 ton di tahun 2015, dan pada tahun 2014 tercatat sebesar 150.338,6 ton. Berfluktuasinya ketersediaan pangan tersebut dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangakan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lain melalui perizinan pertanahan juga secara intensif terus dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara illegal sebagai salah satu faktor penurun produksi pertanian dapat ditekan.

BAPPEDA SLEMAN

Sementara itu, ketersediaan energi per kapita pada tahun 2018 tercatat sebesar 140% meningkat dari tahun 2017 sebesar 136%. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 157% angka tersebut lebih rendah, namun lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 137%. Meskipun angka tersebut menunjukkan surplus energi per kapita, namun penyediaan sumber-sumber energi perlu tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Kondisi fluktuatif juga terjadi pada ketersediaan protein per kapita, pada tahun 2018 tercatat sebesar 141%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 135%, menurun dari tahun 2016 sebesar 141,8% dan pada tahun 2015 sebesar 153%. Akan tetapi pada tahun 2014 tercatat lebih rendah yaitu sebesar 138%.

Tabel 2.30
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	158.535,2	150.338,6	161.831,8	159.668,1	149.441,3	149.214,2
2	Ketersediaan energi per kapita (%)	168,7	137	157	164,9	136	140
3	Ketersediaan protein per kapita (%)	150	138	153	141,8	135	141

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2018

Kondisi di Kabupaten Sleman terkait dengan aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Desa	Status	Keterangan
1	2014	Desa Glagaharjo Desa Kepuharjo	Rawan Rawan	Dari aspek ketersediaan Dari aspek ketersediaan
2	2015	Desa Glagaharjo Desa Wonokerto Desa Lumbungrejo	Waspada Waspada Waspada	Aspek akses pangan dan akses pemanfaatan pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan
3	2016	Desa Merdikorejo Desa Wonokerto Desa Glagaharjo	Waspada Waspada Waspada	Aspek akses pangan, akses pemanfaatan pangan dan ketersediaan pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan
4	2017	Desa Kepuharjo Desa Wonokerto	Waspada Waspada	Aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan Aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan

BAPPEDA SLEMAN

2.3.1.2.4. Urusan Wajib Pertanahan

Dalam urusan pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman meningkat tiap tahunnya, di mana pada tahun 2013, data sertifikat tercatat sejumlah 483.183 sertifikat, sedangkan data sertifikat tanah tahun 2014 sejumlah 560.597 sertifikat. Berdasarkan data sertifikat tanah tahun 2015 sejumlah 512.516 sertifikat dan pada tahun 2016 sejumlah 528.599 sertifikat. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 509.655 sertifikat dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 615.184 sertifikat, dengan luas yang telah bersertifikat sebesar 419.293.558 m2.

Pada tahun 2018, di Kabupaten Sleman terdapat 85 kasus permasalahan tanah negara yang terdaftar dan terfasilitasi seluruhnya. Sementara pada tahun 2017 terdapat 20 kasus dengan kasus terfasilitasi sebanyak 10 kasus. Adapun jumlah kasus pada tahun 2016, tercatat sebanyak 20 kasus dan terfasilitasi seluruhnya.

Penyelesaian izin pemanfaatan ruang dibagi menjadi Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Izin Lokasi yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2014 tercatat sejumlah 16 izin, tahun 2015 sejumlah 14 izin, tahun 2016 sebanyak 6 izin, tahun 2017 sebanyak 11 izin dan pada tahun terakhir tahun 2018 tercatat sebanyak 21 izin. Demikian halnya dengan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) di wilayah Kabupaten Sleman yang tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2014 sejumlah 269 izin, tahun 2015 sejumlah 359 izin, tahun 2016 sebanyak 358 izin, tahun 2017 sebanyak 394 izin dan tahun 2018 sebanyak 1.088 izin. IPT merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang atau pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha.

Peningkatan jumlah izin juga terjadi pada penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) di wilayah Kabupaten Sleman mengalami perubahan setiap tahunnya, tahun 2014 sejumlah 276 izin, tahun 2015 sejumlah 492 izin, tahun 2016 sebanyak 348 izin,

BAPPEDA SLEMAN

tahun 2017 sebesar 421 izin, dan tahun 2018 sebanyak 2.229 izin. Adapun IPPT merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/ perseorangan. Instrumen izin ini merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang, namun perlu disertai dengan upaya lainnya di bidang penataan ruang sehingga pelanggaran tata ruang dapat ditekan. Data perkembangan indikator urusan pertanahan di Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sertifikat tanah (buah)	483.183	560.597	512.516	528.599	509.655	615.184
2	Jumlah kasus terdaftar	17	16	21	20	20	85
3	Jumlah kasus yang terfasilitasi	15	15	20	20	10	85
	Persentase	88.24%	93.75%	95.24%	100.00%	50.00%	100%
4	Penyelesaian izin lokasi (buah)	12	16	14	6	11	21
5	Izin Pemanfaatan Tanah (buah)	326	269	359	358	394	1.088
6	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (buah)	384	276	492	348	421	2.229

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, 2019

2.3.1.2.5. Urusan wajib Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Indeks kualitas air di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 adalah 41,33, meningkat dari 35,33 di tahun 2017, 23,42 di tahun 2016, dan 41 di tahun 2015. Demikian halnya dengan kualitas udara menunjukkan trend meningkat, pada tahun 2017 tercatat sebesar

BAPPEDA SLEMAN

81,11%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 62,15% dan tahun 2015 sebesar 38,74%, meskipun di tahun 2018 tercatat 78,73% menurun dari tahun sebelumnya. Meningkatnya indeks pencemaran udara dapat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Sleman, selain pula karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang menyebabkan berkurangnya tanaman yang dapat menyerap zat-zat polutan di udara.

Pada indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2018 adalah sebesar 85,94% meningkat dari 16,46% di tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, Kabupaten Sleman belum memiliki PPLHD yang dilatih dan/atau dibina. Sedangkan untuk pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sudah mencapai 100% di tahun 2018.

Penurunan angka terjadi pada operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sleman yaitu dari 72 di tahun 2017 menjadi 67,76 di tahun 2018. Demikian juga dengan persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2018 tercatat sebesar 85,79% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 100%. Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Adapun indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.33
Capaian Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Sungai	n.a.	n.a.	41	42	35,33	41,33
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	n.a.	n.a.	38,74	62,15	81,11	78,73
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Hutan	n.a.	n.a.	32,23	32,45	33,95	33,95
4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,46%	85,94%

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	1	1	1	1	1	0
6	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100%	100%
7	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72	67,76
8	Persentase penglolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100%	85,79%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2019

2.3.1.2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan, dan kembali meningkat sampai tahun 2018, khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini ditunjukkan dengan rasio kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP pada tahun 2015 sebesar 0,97 menurun menjadi 0,95 pada tahun 2016 yang disebabkan penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik pertama kali yang menjadi kewenangan Pusat banyak yang belum jadi, sehingga pihak Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik. Namun pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,99, yang artinya telah terjadi peningkatan pelayanan.

Pada indikator lain, rasio bayi berakte kelahiran, pada tahun 2018 adalah 96,01% meningkat dari 88,08% di tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran. Adapun indikator rasio pasangan berakte nikah sudah mencapai 100% sejak lima tahun terakhir. Perkembangan indikator pelayanan administrasi kependudukan tahun 2013-2018 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,97	0,97	0,97	0,95	0,98	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	89	89,2	89,04	77,96	88,08	96,01
3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100	100
4	Kepemilikan KTP	97,79	97,72	97,19	94,88	97,76	98,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

BAPPEDA SLEMAN

2.3.1.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima Desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	n.a.	n.a.	n.a.	100%	100%	100%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	n.a.	n.a.	n.a.	86	86	86
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	n.a.	n.a.	n.a.	1315	1315	1.315
4	Persentase PKK aktif	n.a.	n.a.	n.a.	80%	80%	100
5	Persentase Posyandu aktif	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	99.93
	Pratama	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,47%	4,44
	Madya	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,98%	14,90
	Purna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,79%	17,32
	Mandiri	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,76%	63,27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakata dan Desa, 2019

Data tahun 2013 hingga 2016 tidak lengkap diperkirakan karena terjadinya perubahan nomenklatur lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat dan desa membawa dampak kepada ketidaktersediaan data indikator.

BAPPEDA SLEMAN

Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi LPMD, PKK, Karang Taruna, RT dan RW dalam perencanaan desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Posyandu, lebih mendorong peran peran masyarakat dalam hal pembangunan daerah. Tidak hanya dalam hal perencanaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa ini juga diharapkan juga membantu program pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa, maupun tugas pembantuan dari kabupaten, provinsi maupun nasional baik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun melalui Perangkat Daerah yang lain. Selama ini pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan Desa oleh Perangkat Daerah guna mendukung aksi program yang ditetapkan masih sangat minim.

2.3.1.2.8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR.

Sampai tahun 2018, angka kesuburan/*Total Fertility Rate* (TFR) tercatat sebesar 1,90 meningkat dari 1,70 di tahun 2017 dan sebesar 1,89 di tahun 2016. Sedangkan Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2018 dan tahun 2017 tercatat sebesar 60,42%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 45,83%. Adapun data persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah sebesar 56,25% pada tahun 2018 dan 2017. Demikian halnya dengan jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan

BAPPEDA SLEMAN

program pembangunan tercatat sebesar 56,25% pada tahun 2017 dan 2018. Terdapat angka kecenderungan meningkat pada indikator rasio akseptor KB di tahun 2018 yaitu sebesar 76,51% dari tahun sebelumnya sebesar 75,23%. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Cakupan anggota BKB ber-KB dan cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 0,35, lebih rendah daripada tahun 2017 sebesar 0,41. Penurunan juga terjadi pada angka *unmet need* yaitu sebesar 9,50 pada tahun 2018 dan 11,75 di tahun 2017. Diperlukan upaya yang lebih intensif lagi agar ketiga indikator tersebut menjadi lebih baik. Perkembangan capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sleman tahun 2013 sampai 2018 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	*Total Fertility Rate* (TFR)	2,1	n.a.	n.a.	1,89	1,70	1,90
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	n.a.	n.a.	n.a.	45,83	60,42	60,42
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	n.a.	n.a.	4,17	41,67	56,25	56,25
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n.a.	n.a.	4,17	41,67	56,25	56,25
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,26	2,88	n.a.	n.a.	2,97	2,76
8	Rasio Akseptor KB	79,31	79,1	79,14	79,22	75,23	76,51
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	0,65	0,65	0,63	0,62	0,41	0,35
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	9,57	8,67	8,18	9	11,75	9,50
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,25	36,85	39,81	37,74	38,06	38,41
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	26	26	26,35	28,19	36,44	76,51
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	83,72	85,74	83,74	80,84	80,93	89,7
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	76,49	76,53	75,42	74,13	73,11	88,3

BAPPEDA SLEMAN

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	65,72	64,97	61,85	62,74	62,77	86,7
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	93,02	116,28	127,91	146,51	154,65	159,30
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	88,9	88,39	87,07	87,97	86,34	88,26
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	n.a.	n.a.	n.a.	22,9	22,9	32,82
21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100	100

Sumber: Dinas P3AP2KB, 2019

2.3.1.2.9. Urusan wajib perhubungan

Pada urusan perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kabupaten Sleman adalah minimnya trayek pedesaan yang mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Jumlah arus penumpang di Kabupaten Sleman berkisar di angka 4 juta penumpang, dengan perubahan yang relatif rendah dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 495.000 penumpang. Hal ini juga disertai dengan rendahnya jumlah armada angkutan umum yang beroperasi. Pada tahun 2018, rasio izin trayek tercatat sebesar 0,00011. Sementara jumlah uji kir angkutan umum pada tahun 2018 tercatat sebesar 2.914 unit, meningkat dari 2.815 unit di tahun 2017.

Sampai saat ini, Kabupaten Sleman telah memiliki 1 unit Bandara serta 4 unit terminal bis dengan persentase layanan angkutan darat sebesar 14,8%. Dengan kata lain, jumlah kendaraan pribadi yang melayani angkutan darat jauh lebih besar. Begitu juga dengan jumlah orang yang melalui terminal cukup rendah, tahun 2018 tercatat sebesar 495.000 penumpang. Namun, besaran arus

BAPPEDA SLEMAN

penumpang ini menuntut suatu penyediaan sistem angkutan umum yang memadai dan layak sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Keberadaan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo diprediksi dapat mengurangi beban lalu lintas menuju dan dari bandara, namun di sisi lain, lalu lintas antar kota akan mengalami peningkatan. Masalah lainnya adalah belum tersedianya lajur untuk pengendara sepeda sebagai alat transportasi alternatif ramah lingkungan yang seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Adapun perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.254.314	4.068.315	4.011.122	4.016.407	368.271	495.000
2	Rasio ijin trayek	0,03	0,03	0,03	0,03	0,002	0,00011
3	Jumlah uji kir angkutan umum	4.701	3.357	3.264	3.095	2.815	2.914
4	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Terminal bis	5	5	5	5	4	4
6	Persentase layanan angkutan darat	3,9	3,42	3,46	3,16	7,13	14,8
7	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	9	12	10	9	9	90
8	Pemasangan Rambu-rambu	74,85	89,85	104,85	122,5	130,5	200
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.254.314	4.068.315	4.011.122	4.016.407	368.271	495.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

2.3.1.2.10. Urusan wajib komunikasi dan informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mendorong pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi ini. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kabupaten

BAPPEDA SLEMAN

Sleman sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 mencapai 100% (jumlah KIM kecamatan yang diberdayakan sebanyak 17 KIM dibagi 17 kecamatan). Sedangkan cakupan layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pengembangan & pemberdayaan Klpk Informasi Masyarakat di Tk. Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	89%	90%	91%	95%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

2.3.1.2.11. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat trend yang menurun atas keberadaan koperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah koperasi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 444 unit, menurun dari tahun 2017 sebanyak 515 unit, 656 unit pada tahun 2016, 646 unit pada tahun 2015, dan 629 unit pada tahun 2014. Jumlah koperasi aktif juga menurun dari 495 di tahun 2017 menjadi 413 di tahun 2018, dari 627 pada tahun 2016, 598 pada tahun 2015, dan 581 pada tahun 2014.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 93,01% sedikit menurun dari 96,12% di tahun 2017, 95,58% di tahun 2016, 92,57% di tahun 2015, dan 92,37% di tahun 2014.

Sebagaimana koperasi, usaha mikro dan usaha kecil juga mempunyai peran dalam perekonomian daerah baik dalam produksi dan distribusi barang dan jasa maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan penduduk. Jumlah usaha mikro pada tahun 2018 tercatat sebesar 35.682, meningkat dari 26.226 di tahun 2017. Adapun jumlah usaha mikro kecil menengah pada tahun 2018 bertambah dibandingkan tahun 2017, dari 31.287 unit usaha menjadi 36.653 unit usaha. Sementara untuk persentase usaha mikro dan kecil juga mengalami peningkatan dari 83,82% menjadi 97,35%. Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Sleman tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.39
Perkembangan Koperasi & Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	573	581	598	627	495	413
2	Jumlah Koperasi (unit)	623	629	646	656	515	444
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	91.97%	92.37%	92.57%	95.58%	96.12%	93,01%
4	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	n.a.	n.a.	n.a.	23.275	26.226	35.682
5	Jumlah UKM (unit)	n.a.	n.a.	n.a.	27.281	31.287	36.653
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	n.a.	n.a.	n.a.	85.32%	83.82%	97,35%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2019

2.3.1.2.12. Urusan wajib penanaman modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2018 meliputi investasi PMA sebanyak 80unit dengan nilai investasi US$193.830.919 dan investasi PMDN 88 unit dengan nilai investasi Rp5.584,260,- juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 161,307 dari tahun sebelumnya sebesar 167,257, tahun 2016 sebesar 174,103 dan 188,814 di tahun 2015.

Meskipun terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN dari 12,24% di tahun 2017 menjadi 43,43%, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan

BAPPEDA SLEMAN

daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2013-2018 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor berskala nasional (unit)						
	PMDN	40	45	51	60	64	88
	PMA	44	45	57	66	68	80
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional						
	PMDN (juta rupiah)	1.868.199	1.945.867	3.159.444	3.370.881	3.783.600	5.584.260
	PMA (US $)	206.788.265	231.963.753	233.545.997	233.587.774	262.662.078	193.830.919
3	Rasio daya serap tenaga kerja	203,261	193,488	188,814	174,103	167,257	161,307
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	72,49%	4,16%	62,37%	6,69%	12,24%	43,43%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2019

2.3.1.2.13. Urusan wajib kepemudaan dan olahraga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Sleman dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Sampai tahun 2018, di Kabupaten Sleman terdapat 87,5% organisasi pemuda yang aktif menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 90,32%. Keberadaan wirausaha muda juga sangat berperan di dalam proses pembangunan, tercatat 15,63% di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11%. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas dan aktif yang memiliki jiwa wira usaha. Terkait hal ini, Sleman telah menyediakan prasarana pendukung seperti pembangunan Sleman Creative Space, sebagai wadah bagi penggiat ekonomi kreatif

BAPEDA SLEMAN

terutama para pemuda untuk menuangkan ide-ide usaha secara kolaboratif serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan masa kini.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Sampai tahun 2018 cakupan pembinaan olahraga meliputi 64% yang disertai cakupan pelatih yang bersertifikasi sebesar 89.05%. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 91% dengan jumlah atlet berprestasi sebanyak 7 atlet di tahun 2018. Peningkatan prestasi diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas. Keseluruhan akitivitas tersebut telah mendorong tercapainya prestasi olahraga sebanyak 12 cabang olahraga selama tahun 2018. Perkembangan indikator pemuda dan olahraga secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	n.a	90	90.32	90.32	87,5	87,5
2	Persentase wirausaha muda (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	11	15.63
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65.71	64
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64.35	89.05
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91
6	Jumlah atlet berprestasi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68	7
7	Jumlah prestasi olahraga	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	177	53

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2019

2.3.1.2.14. Urusan Wajib Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral,

BAPPEDA SLEMAN

dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Hasil dari statistik dasar ini merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga untuk mendapatkan beberapa data, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPS. Produk statistik yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS adalah IPM, IPG, Indeks NTP, Indeks Gini, Inflasi, dan ICOR.

Sedangkan statistik sektoral juga telah dilakukan oleh beberapa instansi di Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh data baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik sektoral ini antara lain termuat dalam buku Indeks Williamson, buku penduduk pertengahan tahun, dan buku sistem informasi pembangunan daerah.

Diakui bahwa tuntutan data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi seluruhnya, namun secara bertahap tata kelola dan pemenuhan kebutuhan data lebih baik akan terus diupayakan.

2.3.1.2.15. Urusan Wajib Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Sampai dengan tahun 2018, Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi PD adalah sebesar 100%.

2.3.1.2.16. Urusan Wajib Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel 2.42.

Pada tahun 2018, festival seni dan budaya diselenggarakan sebanyak 28 festival, yaitu Festival Sriwijaya Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, *Makassar International Eight Festival and Forum* (MIEFF), Parade Busana di TMII, Parade Lagu di TMII, Festival Sendratari DIY, Festival Langen Carito DIY, Festival Ketoprak DIY, Festival Teater Tradisional, Festival Dalang Anak dan Remaja, Festival Reog dan Jathilan DIY, Festival Jathilan Sleman, Festival Religius, Festival Sendratari Sleman, Festival Langen Carito Sleman, Festival Ketoprak Sleman, Lomba Macapat ASN, Lomba Pranatacara, Festival Macapat antar kecamatan, Lomba Mendongeng, Lomba Sesorah, Lomba Geguritan, Cerdas Cermat Museum, Festival Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO), Carnival Menoreh Kulonprogo, dan Parade Wira Bangsa Surabaya Juang, Festival Budaya Suran Mbah Demang, Festival Bekakak, dan Festival Budaya Saparan Pondok Wonolelo. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 terdapat 24 penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Tahun 2016, situs dan kawasan cagar budaya yang tercatat di Kabupaten Sleman sebanyak 800 unit, dengan rincian 34 buah monumen, 163 buah situs, 17 struktur, 177 buah bangunan, 395 rumah tradisional dan 14 museum. Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 191 unit (23.87%) dari 800 unit benda cagar budaya yang tercatat. Pada tahun 2017, benda cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 27 unit cagar budaya yang terdiri dari 25 unit cagar budaya yang telah mendapat SK Bupati No.14.7/Kep.KDH/A/2017 dan cagar budaya yang direnovasi ada 2 unit cagar budaya yaitu Kapanewon Tempel dan Pegadaian Tempel, sehingga total benda cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 adalah 218 unit (27.37%) dari 800 unit benda cagar budaya. Selanjutnya di tahun 2018 benda cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 27 unit cagar budaya yang terdiri dari 26 unit cagar budaya yang telah mendapat SK Bupati No. 5.9/Kep.KDH/A/2018 dan 1 unit cagar budaya yang dipelihara yaitu saluran air Donon di Kecamatan Moyudan. Dengan demikian total benda cagar budaya yang sudah dilestarikan hingga tahun 2018 sebanyak 245 unit (30.625%) dari 800 unit cagar budaya di Sleman.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.42
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	11	11	23	24	28
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	n.a	n.a	n.a	23,87	27,37	30,625
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit)	1	1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2019

2.3.1.2.17. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Sleman cenderung stagnan di tahun 2018 sebesar 0,5767 dari sebelumnya sebesar 0,5177 di tahun 2017 serta 0,5698 di tahun 2016, dan 0,5676 di tahun 2015. Angka tersebut disertai juga dengan sedikitnya peningkatan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan sebanyak 1.797 di tahun 2018 dari 1.547 pengunjung per tahun di tahun 2017, meskipun koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2018, jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 33.791 judul, lebih sedikit dibanding tahun 2017 sebanyak 36.943 dan 36.949 judul di tahun 2016. Akan tetapi jika dibandingkan tahun 2015, angka tersebut mengalami peningkatan dari 34.815 judul.

Selain rasio jumlah pengunjung perpustakaan yang menurun, rasio perpustakaan per satuan penduduk juga menurun. Pada tahun 2015 rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah 0,7809 turun menjadi 0,6556 di tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu terus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat adalah penyediaan layanan

pustaka digital guna mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan melalui dunia digital. Secara lebih jelas, capaian indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Sleman
Tahun 2015-2018

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,5676	0,5698	0,5177	0,5767
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,5858	0,5612	0,68	0,71146
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,7809	0,0665	0,6557	0,6556
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1.670	1.677	1.547	1.797
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	34.815	36.949	36.943	33.791
6	Persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0%	50%	42,86%	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.3.1.2.18. Urusan wajib kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Persentase SKPD yang mengelola arsip kategori baik mengalami peningkatan dari 68% pada tahun 2015 menjadi 85% pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 menurun menjadi 75% dan kembali meningkat menjadi 79,17% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah semakin perlu meningkatkan kepedulian tentang pengelolaan arsip. Sedangkan SDM pengelolaan arsip Perangkat Daerah mengalami stagnasi dari 62 orang pada tahun 2015 dan tahun 2016, sedikit mengalami peningkatan menjadi 63 orang pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 70 orang di tahun 2018.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2018

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	68%	85%	75%	79,17%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (jiwa)	62	62	63	70

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 tercatat sebesar 7.342.396 orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 8.531.738 orang (wisatawan nusantara sebanyak 8.224.033 orang atau sebesar 96,392% serta wisatawan mancanegara sebanyak 307.705 orang atau sebesar 3,61%) atau meningkat sekitar 16,20%. Peningkatan jumlah wisatawan ini perlu disertai dengan penyediaan amenitas yang memadai agar mampu meningkatkan waktu kunjungan wisata. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Sleman perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan ODTW serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan length of stay wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi destinasi, pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata alam tercatat sebanyak 2.792.529 orang, wisata budaya sebanyak 4.648.411 orang, dan wisata buatan sebanyak 1.090.798 orang. Wisata budaya menjadi daya tarik paling besar untuk kegiatan pariwisata di Kabupaten Sleman, perlu terus dikembangkan melalui perencanaan yang menyeluruh.

Tabel 2.45
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2014-2018

URAIAN	TAHUN									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
REALISASI (jiwa)	3.820.575	312.358	4.936.929	259.887	5.075.315	248.370	7.038.207	238.488	8.224.033	307.705
JUMLAH REALISASI (jiwa)	4.132.933		5.196.816		5.323.685		7.276.695		8.531.738	
(%) (Nus-Manc)	92,44%	7,56%	95,00%	5,00%	95,33%	4,67%	96,72%	3,28%	96,39%	3,61%
Kontribusi thd PDRB Hb (%)	9,98		10,20		10,27		10,34		n.a.	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2016, BPS Kab. Sleman, 2018

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sub sektor penyumbang terhadap PAD Pariwisata terbanyak yaitu dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yaitu masing-masing sebesar Rp99.163.768.082,- dan Rp92.048.500.298,- sedangkan sub sektor terendah yaitu dari retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp99.511.800. Secara lebih jelas, PAD sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2014-2018 (Rp)

No	Jenis	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Hotel	49.800.597.180,77	52.305.963.907,43	67.278.001.146,89	85.153.727.058,73	99.163.768.082,00
2	Pajak Restoran	27.979.616.224,17	39.132.497.134,23	51.190.737.213,24	69.627.369.310,00	92.048.500.298,00
3	Pajak Hiburan	5.652.846.660,64	6.084.319.142,08	13.503.081.110,38	17.310.424.630,56	20.594.485.463,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (fasilitas kaliurang, kaliadem dan tlogo putri)	73.015.400,02	75.747.500,00	89.134.100,00	114.878.300,00	99.511.800,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:	3.840.355.599,00	3.295.120.500,00	6.006.806.665,00	8.883.791.665,00	7.455.640.500,00
	DPKAD/BKAD	443.579.599,00	252.662.500,00	866.497.665,00	1.425.967.165,00	1.077.817.500,00
	DIPENDA	2.411.194.500,00				
	DINAS PARIWISATA	985.581.500,00	3.042.458.000,00	5.140.309.000,00	7.457.824.500,00	6.377.823.000,00
6	Lain-lain PAD:	276.315.340,00	33.614.877,00	640.464.357,50	972.250.384,00	1.071.813.404,00
	Bagi Hasil TWC Ratu Boko	276.315.340,00	33.614.877,00	640.464.357,50	955.950.384,00	958.447.704,00
	Bagi Hasil Parkir Musium Gunung Merapi	12.561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Taman lampion				16.300.000,00	113.365.700,00
Penerimaan		87.622.746.404,60	100.927.263.060,74	138.708.224.593,01	182.062.441.348,29	220.728.918.822,00
Peningkatan		**23,7%**	**15,2%**	**37,4%**	**31,3%**	**21,2%**

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata alam, wisata candi, wisata museum, kegiatan luar atau even dan desa wisata. Desa wisata memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Desa wisata berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan desa yang alami. Pada tahun 2018 tercatat 47 desa wisata yang terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu 11 desa wisata pada kategori rintisan, 14 desa wisata pada kategori tumbuh, 11 desa wisata pada kategori berkembang, dan 11 desa wisata pada kategori mandiri. Perkembangan potensi obyek wisata secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wisata Alam (jenis)	4	4	4	4	4	4
2	Wisata Candi	12	12	12	12	12	12
3	Wisata Museum	10	13	13	14	14	14
4	Kegiatan luar (event)	5	5	5	5	5	5
5	Kategori Desa Wisata	38	38	38	39	39	47

Sumber: BPS, 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2019

2.3.2.2. Urusan Pilihan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Pada tahun 2018, cakupan bina kelompok tani adalah 100%, artinya seluruh petani terlayani olah program pembinaan. Sementara untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal, jika dibandingkan dengan tahun 2017, mengalami sedikit penurunan dari 57,15 kw/ha menjadi 57 kw/ha di tahun 2018. Penurunan ini terjadi pula pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 61,58 kw/ha di tahun 2016, 65,27 kw/ha di tahun 2015. Sementara di tahun 2014 tercatat sebesar 59,75 kw/ha. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik. Guna mengatasi kecenderungan penurunan produktivitas ini telah diupayakan

peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam tajarwo dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Adapun perkembangan indikator pertanian tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Sleman
Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Cakupan bina kelompok tani (%)	448	260	195	195	100
2	Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal (kw/ha)	59,75	65,27	61,58	57,15	57
3	Produksi sektor pertanian dan peternakan (ton)					
	- padi sawah	312.891	326.819	322.418	289.070	246.539
	- padi ladang	1.511	1.864	1.751	1.557	3.340
	- jagung	33.430,61	42.310,15	22.574	47.060	31.558,47
	- kedelai	530	199	88	22	211
	- kacang tanah	8.671	6.485	4.389	4.209	4.516,26
	- kacang hijau	9	10	0	0	0
	- ubi kayu	13.418	11.524	12.806	11.596	8.631,77
	- ubi jalar	3.400	2.355	2.071	1.569	1.728
	- talas	523	1.251	1.388	1.388	1.156,48
	- ganyong	244	152	148	148	128,73
	- irut	389	557	571	571	568,95
	- sayuran	25.609,84	1.155.118	1.131.810	118.728,80	394.667,63
	- buah-buahan	17.090,34	1.964.993	1.764.605	172.971,52	1.262.302,93
	- daging	20.642,57	21.554,97	22.300,88	18.751,74	133.307,92
	- telur	16.886,83	16.887,07	16.951,86	15.129,79	16.309,91
	- susu sapi	3.685,88	3.710,26	3.741,75	3.843,44	3.819,36
4	Jumlah produksi komoditas perkebunan					
	- Kelapa	7799,56	7752,99	7395,26	6726,74	6.749,30
	- Cengkeh	6,59	7,4	9,86	9,10	30,30
	- Kakao	8,28	10,61	14,04	24,65	70,57
	- Mete	9,71	6,05	3,29	3,85	13,35
	- Kopi Robusta	25,77	43,96	33,37	239,61	234,99
	- Kopi Arabika	10,25	21,15	14,81	54,47	52,43
	- Mendong	2356	1908,75	1128,05	53,65	77,03
	- Lada	1,54	1,75	2,25	5,89	17,29
	- Kapuk randu	5,44	4,79	1,98	1,89	5,69
	- Tembakau rakyat	757,5	896,15	95,67	80,69	190,47
	- Panili	0,1	0,29	0,19	0,30	2,56
	- Jarak pagar	3,63	3,53	1,59	3,17	31,71
	- Tebu	3.581,67	3.866,65	3.332,37	2.808,12	2.053,62

*Keterangan: *) angka sementara*
Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2019

BAPPEDA SLEMAN

2.3.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Kabupaten Sleman tidak memiliki taman hutan rakyat.

2.3.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Sleman meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan tambang ini dapat kita temui di sepanjang perairan sungai di kaki Gunung Merapi, yang dipasok dari aktivitas Gunung Merapi. Sementara batu gamping yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam tidak boleh ditambang.

Seluruh padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Pada tahun 2014 terdapat 5.482 KK yang belum punya KWh meter sendiri, atau elektrifikasi 99%. Sedangkan penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai dengan tahun 2014 telah terpasang 167 PLTS rumah tangga dan 21 PLTS non rumah tangga (hilang 5 akibat erupsi). Selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 145 unit.

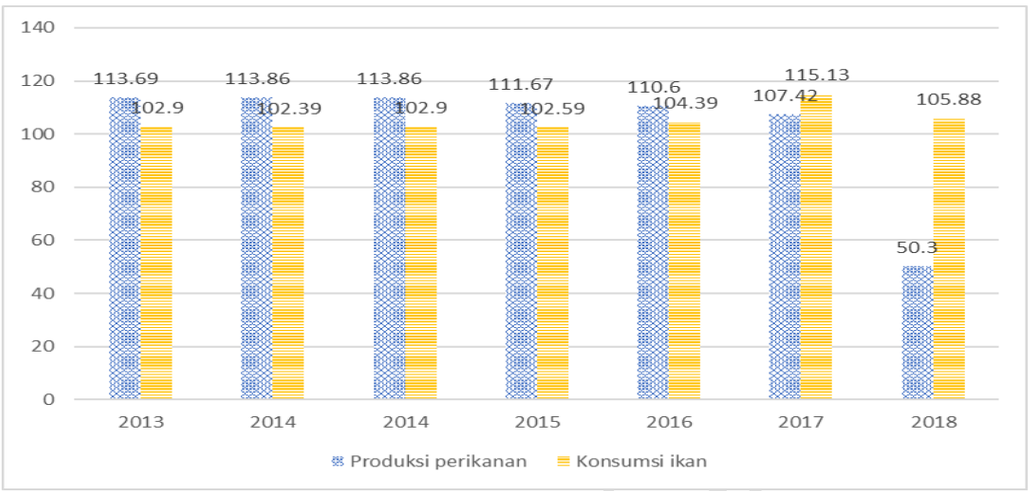
Mulai tahun 2017 urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah panas bumi. Kabupaten Sleman tidak memiliki potensi panas bumi tersebut.

2.3.2.5. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan jumlah produksi ikan pada tahun 2018 yakni menjadi 50,3% dari 107,42% di tahun 2017, 110,6 di tahun 2016, 111,67 di tahun 2015 dan 113,86 di tahun 2014. Akan tetapi, produksi perikanan ini melebihi jumlah kebutuhan dalam kabupaten dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sehingga sebagian diekspor ke luar wilayah. Sedangkan pada tahun 2018 kebutuhan jauh lebih tinggi yaitu sebesar 105,88%, sehingga diperlukan impor dari luar wilayah

BAPPEDA SLEMAN

Sleman. Kondisi tersebut mulai terjadi sejak tahun 2017, jumlah konsumsi ikan lebih tinggi dibandingkan produksi sehingga perlu ada penambahan jumlah ikan untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan data, terlihat bahwa konsumsi ikan, di tahun 2016 sebesar 104,39% meningkat menjadi 115,13% di tahun 2017. Capaian indikator urusan perikanan sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2. 13 Produksi dan Konsumsi Perikanan di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 (%)

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2019

Target konsumsi ikan per kapita, tahun 2017 sebesar 47,12 kg per kapita (capaian 49,34 kg per kapita) dan konsumsi ikan Kabupaten Sleman tahun 2017 hanya mencapai 25,81 kg per kapita, padahal tingkat konsumsi ini tertinggi se-DIY.

Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman berasal dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya berasal dari produksi di kolam sebesar 49.186,6 ton, mina padi sebesar 310,6 ton dan perairan umum sebesar 190,1 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap berasal dari perairan umum. Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman ini didominasi oleh ikan nila (merah dan hitam) dengan produksi sebesar 19.933,25 ton, ikan lele dengan produksi sebesar 11.608,95 ton, ikan gurami dengan produksi 8.987,31 ton, ikan mas dengan produksi 57,83 ton, ikan grasscarp 39,29 ton, dan selebihnya 9.085,57 ton terdiri dari ikan bawal, belut, mujahir dan udang.

2.3.2.6. Urusan Pilihan Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Sleman sampai dengan bulan September tahun 2017 adalah 17,07%.

BAPPEDA SLE

Meskipun angka relatif kecil, namun pembinaan ini sangat penting sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarkat terhadap pelayanan perekonomian terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, keberadaan sektor informal diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum lainnya seperti berjualan yang menutup akses masyarakat terhadap fasilitas trotoar serta terawasi dalam hal pelayanan yang baik terhadap konsumen.

Indikator lain yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kegiatan perdagangan di Kabupaten Sleman adalah ekspor. Adapun besaran nilai ekspor Kabupaten Sleman tahun 2018 (s/d November) tercatat sebesar US$38.361.310,18 menurun dari tahun 2017 sebesar US$39.316.185,53.

2.3.2.7. Urusan Pilihan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sampai tahun 2017, sektor industri di Kabupaten Sleman berkontribusi sebesar 13,27% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku serta mengalami pertumbuhan sebesar 1,50%. Selain itu, industri kecil dan rumah tangga yang mendominasi kegiatan masyarakat di tingkat lokal mengalami kenaikan dari 16.488 unit di tahun 2016 menjadi 16.735 unit di tahun 2017.

Pendampingan dan pemberdayaan industri kecil merupakan prioritas pembangunan dalam rangka pengembangan potensi lokal. Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini yang semakin tinggi di Kabupaten Sleman. Adapun data perkembangan indikator perindustrian tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.49.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.49
Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	13,90	13,37	12,82	13,28	13,27
2	Pertumbuhan Industri (%)	0,89	0,68	1,83	1,60	1,50
3	Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)	15.841	15,944	16.230	16.488	16.735

Sumber: Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Sleman, 2018

2.3.2.8. Urusan Pilihan Transmigrasi

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada tahun 2018, persentase jumlah calon transmigran yang dapat diberangkatkan dengan fasilitasi APBD sejumlah 92% atau 23 KK dari 25 KK pendaftar calon transmigran. Dari jumlah tersebut, 15 KK merupakan program sharing penempatan dengan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, sedangkan 8 KK merupakan penampatan berdasarkan kuota yang diterima dari pemerintah pusat. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat teratasi. Namun dalam pelaksanaan urusan transmigrasi masih banyak permasalahan yang perlu diantisipasi, seperti ketangguhan transmigran di lokasi transmigrasi, kesiapan lahan, konflik sosial di lokasi transmigrasi dan mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah penempatan.

2.3.3. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima.

Tahun 2018, IKM Kabupaten Sleman tercatat sebesar 81,39 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 81,08 dan 79,36 pada tahun 2016. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 74,60, lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 77,77, dan 78,65 pada tahun 2013. Peningkatan ini merupakan bukti nyata terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dan kualitas ini perlu untuk terus ditingkatkan.

b) Persentase PAD terhadap pendapatan

Indikator Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada Tahun 2018, persentase PAD terhadap pendapatan tercatat sebesar 32,97%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 31,56%, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 34,32%. Sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 25,75%, 24,12% pada tahun 2014 dan 23,65% pada tahun 2013. Meskipun terdapat kecenderungan naik, namun Pemerintah Kabupaten Sleman perlu terus meningkatkan upaya pengelolaan keuangan serta pembangunan ekonomi sehingga dapat meingkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan.

c) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Sleman berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat ini telah dipertahankan sejak delapan tahun terakhir berturut-turut (dari tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publlik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik.

d) Nilai AKIP

Nilai AKIP Kabupaten Sleman pada tahun 2013 dan 2014 adalah B dengan nilai masing-masing berturut turut sebesar 66,35 dan 70,64. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017, meningkat menjadi BB (nilai tahun 2015: 76,90, tahun 2016: 77,89, dan tahun 2017: 78,06) yang artinya meskipun terdapat perbaikan kinerja, masih terdapat indikator manajemen yang harus diperbaiki di Kabupaten Sleman, seperti penjabaran kinerja, pengintegrasian sistem perencanaan penganggaran, dan manajemen kinerja sampai level individu, serta evaluasi program belum menilai efektivitas program kegiatan untuk

BAPPEDA SLEMAN

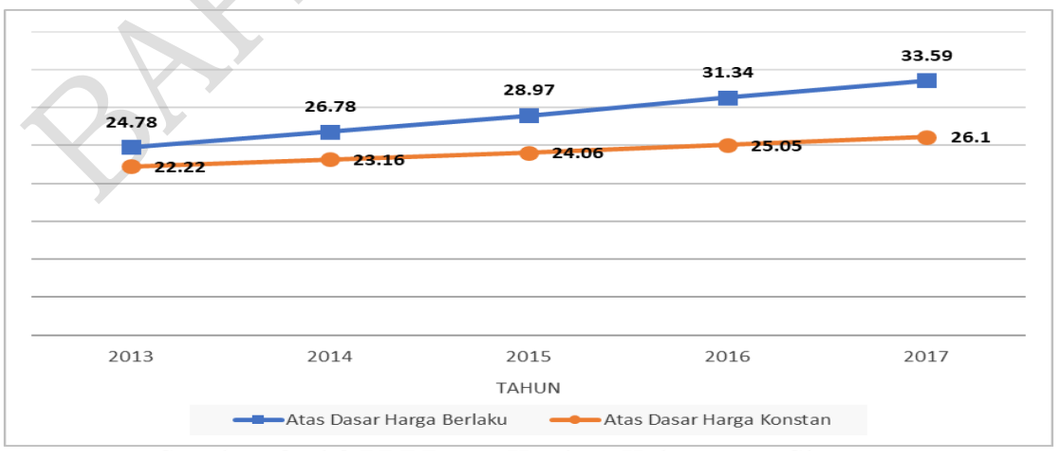
refocusing program kegiatan. Selanjutnya, pada Tahun 2018 Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah A (nilai: 81,72), sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Pencapaian tersebut menggambarkan peningkatan kinerja, karena itu, perlu disertai dengan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dalam manajemen pemerintahan daerah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Analisis kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh gambaran tersebut adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita mengalami trend peningkatan, baik dilihat melalui harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010. Atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita Kabupaten Sleman Pada tahun 2013 sebesar Rp24,78 juta, meningkat menjadi sebesar Rp33,59 juta pada tahun 2017. Atas dasar harga konstan, PDRB per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp25,05 juta dan meningkat menjadi Rp26,1 juta pada tahun 2017. Perkembangan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 2. 14 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

Sumber: BPS, 2018

RAPERDA SLEMAN

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

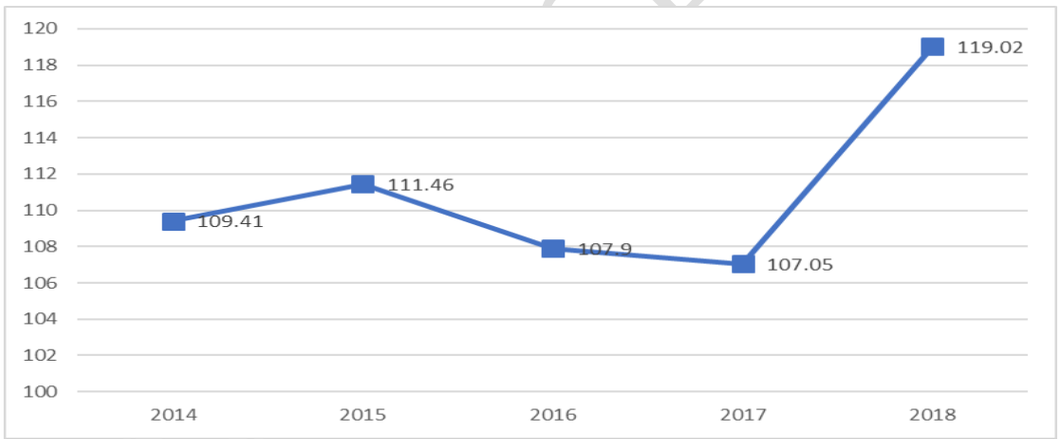
Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (term of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator relevan menggambarkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas/breakeven. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

BAPPEDA SLEMAN

Selama kurun waktu dua tahun terakhir, NTP Kabupaten Sleman mengalami peingkatan dari 107,05 di tahun 2017 menjadi 119,02 di tahun 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa surplus yang diperoleh petani dari proses produksi semakin meningkat dibanding konsumsi yang dikeluarkan. Oleh karena itu secara terus menerus dilakukan penyusunan program-program guna menekan biaya produksi pertanian serta pengendalian harga pasar melalui serangkaian kebijakan di bidang pertanian, juga diperlukan upaya untuk mendorong produktivitas pertanian. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas potensial seperti Beras Sleman, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi potong, pengembangan mina padi, pengembangan udang galah padi (ugadi), dan pengembangan salak pondoh serta turunannya. Diharapkan, program-program tersebut dapat berimplikasi pada semakin meningkatnya NTP.



Gambar 2. 15 Perkembangan Nilai Tukar Petani (Gabungan) Kabupaten Sleman Tahun 2013–2018

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian Kab. Sleman, 2019

2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah

Pada tahun 2017, sektor yang mempunyai peran paling besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan, sebesar 13,21%. Dalam sektor ini, jenis industri yang kontribusinya paling besar adalah industri makanan dan minuman 6,17%. Selanjutnya, setelah sektor industri, sektor penyumbang PDRB terbesar adalah sektor konstruksi 10,84%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 10,34% dan sektor Jasa Pendidikan 9,88%.

Sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan pada tahun 2017 memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 7,75%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mana pada tahun 2016, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 8,06%. Dalam 5 tahun terakhir (2013-2017) peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kepada PDRB cenderung menurun.

Sektor industri pada struktur PDRB Kabupaten Sleman mempunyai peran paling besar, yakni 13,21% pada tahun 2017. Sektor ini terdiri dari 16 kategori industri. Industri yang berperan paling besar pada pembentukan PDRB sektor industri adalah industri makanan dan minumam, yang menyumbang 6,17%, selanjutnya industri tekstil dan pakaian jadi yang menyumbang 2,48 % dan industri pengolahan tembakau yang menyumbang 1,20%. Kategori industri yang lain masing-masingnya memberikan sumbangan kepada PDRB kurang dari 1%. Perhatian pemerintah bagi pengembangan industri makanan dan minuman akan membawa dua manfaat, ialah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat bahwa jumlah terbanyak dari industri makanan dan minuman ini adalah industri rumah tangga dan industri kecil. Adapun produktivitas per sektor di Kabupaten Sleman dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50
Produktivitas per Sektor di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,96	8,33	8,36	8,06	7,75
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,45	0,44	0,41	0,39
C	Industri Pengolahan	14,21	13,95	13,43	13,37	13,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,99	10,89	10,85	10,71	10,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	7,44	7,64	7,61	7,79	7,85
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	7,00	7,03	7,28	7,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,88	9,98	10,20	10,28	10,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,73	8,45	8,06	8,01	8,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,21	3,30	3,25	3,18
L	Real Estate	7,53	7,71	7,76	7,90	7,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,66	1,71	1,71	1,67	1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,35	6,54	6,65	6,81	6,87
P	Jasa Pendidikan	9,35	9,52	9,89	9,67	9,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,27	2,34	2,35	2,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,19	2,20	2,22	2,28	2,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2018
*) angka sementara, **) angka sangat sementara

BPPDA SLEMAN

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya:

2.4.2.1. Perhubungan

Fasilitas wilayah/infrastuktur bidang perhubungan adalah jaringan jalan serta fasilitas pendukungnya. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman berfluktuatif. Pada tahun 2014 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,516 meningkat dari 0,540 di tahun 2013 dan pada tahun 2015 mencapai angka 0,5426. Meskipun terdapat kenaikan kondisi jalan baik karena telah dilakukan banyak perbaikan, namun untuk tahun 2016 mengalami sedikit penurunan yaitu di angka 0,5236 dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,5325. Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan yang baik.

Sampai tahun 2017, rasio panjang jalan per jumlah penduduk di Kabupaten Sleman adalah 0,000648,sama dengan rasio pada tahun 2016. Angka tersebut mengalami penurunan dari 0,000657 pada tahun 2015 serta 0,000668 di tahun 2013. Semakin menurunnya angka tersebut dapat menimbulkan persoalan lalu lintas di beberapa ruas sehingga diperlukan suatu upaya manajemen lalu lintas.

Adapun kondisi jalan kabupaten kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam pada tahun 2017 adalah 70,40% menurun dari 73,14% di tahun 2016. Penurunan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa semakin besar. Lebih

jauh, kondisi jalan juga dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan.

Daya saing daerah Kabupaten Sleman didukung oleh Rencana Pengembangan Transportasi Kabupaten Sleman dalam draft Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi
    a. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi darat
        i. Pengembangan jaringan pelayanan LLAJ untuk angkutan massal berbasiskan jalan berupa: Jaringan Utama bis berjalur khusus; Jaringan angkutan bis besar; dan Jaringan angkutan pengumpan/feeder (feeder direncanakan pada lokasi stasiun Jombor)
        ii. Sistem dan Prasarana Jalan
            - Pengembangan jaringan jalan nasional (Jalan Arteri Primer Jalan Strategis Nasional)
            - Pengembangan jaringan jalan provinsi (Jalan Kolektor Primer)
        iii. Pengembangan sistem fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) di pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal dan terminal angkutan umum
        iv. Pengembangan sistem prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung Kawasan Industri dan kegiatan ekspor impor
    b. Pengembangan sistem dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian
        i. Pengembangan jaringan dan layanan perekerataapian perkotaan yang melayani jalur timur – barat dan utara – selatan;
        ii. Stasiun kereta api kecil :
            - Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandar udara Adisutjipto;
            - Stasiun Patukan sebagai stasiun penumpang;

BAPPEDA SLEMAN

- Stasiun Kalasan sebagai stasiun barang.

2. Pengembangan outer ringroad khusus angkutan barang sebagai upaya memecah tumpukan kendaraan pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta agar kendaraan angkutan ber-tonase besar tidak masuk ke Perkotaan Yogyakarta sehingga dapat memperlancar jalur distribusi dan transportasi.

Pembangunan persilangan garis bidang Gejayan, Kentungan, dan Monjali sebagai upaya menambah kelancaran transportasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

2.4.2.2. Sarana Perekonomian

Gambaran kegiatan perekonomian penduduk dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan, sebagai aktivitas ekonomi masyarakat lokal sehari-hari. Pada tahun 2017, sarana perdagangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 2.013 unit, terbagi ke dalam pasar sebanyak 84 unit, kios 1.307 unit, dan los 622 unit. Bila dibandingkan tahun 2016, jumlah sarana ini meningkat cukup yang tercatat sebesar 1.787 unit. Peningkatan terbesar terjadi pada sarana los, pada tahun sebelumnya (2014-2016) tercatat 483 unit. Dukungan terhadap keberadaan sarana perdagangan ini sangat penting dan perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan perekonomian lokal sehingga aktivitas perdagangan semakin dinamis. Perkembangan sarana perdagangan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2017

No	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar	82	82	82	84	84
2	Toko	-	-	-	-	-
3	Kios	1.374	1.220	1.220	1.220	1.307
4	Los	513	483	483	483	622
5	Warung	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2018

Selain sarana perdagangan, sarana perekonomian masyarakat lokal adalah koperasi sebagai salah satu penopang perekonomian kebangsaan. Pada tahun 2017, terdapat 515 koperasi dengan

BAPPEDA SLEMAN

berbagai macam jenisnya. Koperasi tersebut antara lain terdiri dari KUD sebanyak 17 unit, KPRI sebanyak 77 unit, KOPKAR sebanyak 56 unit, dan lainnya sebanyak 365 unit. Jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kecamatan Depok yaitu sebesar 88 unit dan terbesar kedua adalah di Kecamatan Sleman yaitu sebesar 68 unit. Sementara jumlah koperasi paling sedikit terdapat di Kecamatan Moyudan dan Minggir, yaitu masing-masing sebesar 11 unit dan 14 unit. Jumlah koperasi menurut jenis koperasi dan kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2017 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017

No	Kecamatan	KUD	KPRI	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
1	Moyudan	1	3	-	7	11
2	Minggir	1	1	-	12	14
3	Seyegan	1	2	1	15	19
4	Godean	1	2	1	14	18
5	Gamping	1	4	4	19	28
6	Mlati	1	6	4	19	28
7	Depok	1	15	18	54	88
8	Berbah	1	1	2	14	18
9	Prambanan	1	2	1	14	18
10	Kalasan	1	5	4	23	33
11	Ngemplak	1	3	2	18	24
12	Ngaglik	1	2	7	34	44
13	Sleman	1	21	9	37	68
14	Tempel	1	3	3	14	21
15	Turi	1	1	-	15	17
16	Pakem	1	5	-	24	30
17	Cangkringan	1	1	0	16	18

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2018

Selain perdagangan, perekonomian Kabupaten Sleman juga diwarnai oleh kegiatan pariwisata serta pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menginap. Keberadaan hotel atau fasilitas penginapan lainnya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sampai dengan tahun 2017 telah terdapat 624 unit hotel/penginapan lainnya, meningkat pesat apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 389 unit di tahun 2015 dan 2016, 390 unit di tahun 2014 dan 387 unit di tahun 2013. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kamar dan tempat tidur yang tercatat masing-masing secara berurutan sebesar 11.775 dan 21.142 pada tahun 2017. Perkembangan hotel/penginapan lainnya, kamar, dan tempat tidur secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 2.53
Hotel/Penginapan Lainnya, Kamar, dan Tempat Tidur di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

No	Fasilitas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Hotel/Penginapan lainnya	387	390	389	389	624
2	Kamar	5.663	7.252	7.519	7.519	11.775
3	Tempat Tidur	8.181	10.695	10.895	10.895	21.142

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2018

2.4.2.3. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dewasa ini dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Sampai tahun 2017, data rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah pelanggan listrik dan jumlah kepala keluarga yang menikmati listrik tercatat sebesar 99,97% (PLN). Meskipun angka ini cukup tinggi apabila dibandingkan wilayah lainnya di DIY (Kota Yogyakarta 69%, Kabupaten Bantul 98,57%, Kabupaten Kulon Progo 90,52% dan Kabupaten Gunung Kidul 86%), diperlukan upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

2.4.2.4. Ketersediaan Air Baku

Sumber air baku yang digunakan Kabupaten Sleman adalah mata air, sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan dengan tingkat pemanfaatan yang sudah maksimal. Ketersediaan sumber air baku ini dapat terancam oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan peningkatan area tangkapan air.

Guna menjamin ketersediaan air baku, di Kabupaten Sleman terdapat SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

a. Melakukan penghijauan pada daerah tangkapan air di daerah hilir sekitar Gunung Merapi.
b. Mengupayakan penambahan kapasitas sumber air dari Embung Kembangarum, Embung Argomulyo, Embung Tambakboyo, air permukaan Sungai Bedog dan Sungai Denggung dari Balai Besar SDA Wilayah Sungai Progo Opak Serayu
c. Menyiapkan tindak lanjut atas kesepakatan bersama mengenai pengembangan SPAM di kawasan Regional Kartamantul dengan

BAPPEDA SLEMAN

membuat draft perjanjian kerjasama dalam penyediaan air minum di kawasan SPAM Regional Kartamantul, mengambil sumber air baku dari sungai Progo dengan kapasitas yang direncanakan 700 liter/detik. Kegiatan Pengembangan SPAM Regional Kartamantul dilaksanakan secara *multi years*.

Ada 2 (dua) sistem yang terbangun dalam pengembangan SPAM Kartamantul diantaranya :

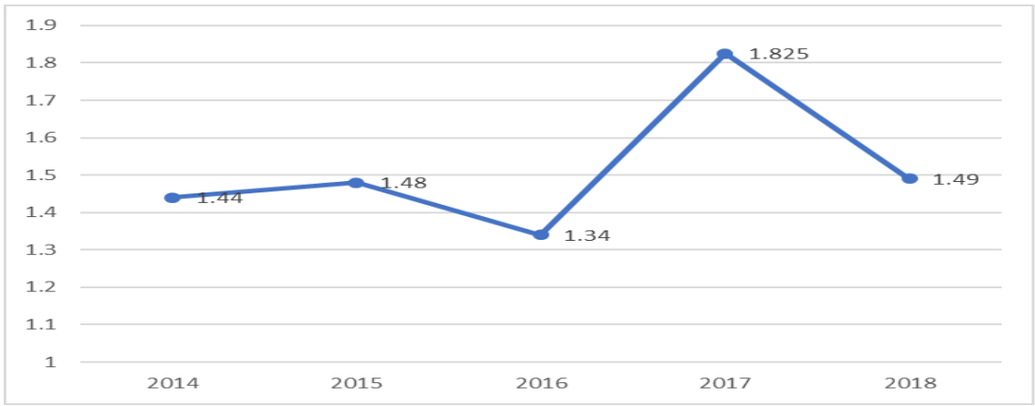
a. Sistem SPAM Bantar kapasitas yang direncanakan sebesar 400 liter/detik (sudah mulai dibangun in-take oleh BBWS).
b. Sistem SPAM Kebonagung Kapasitas yang direncanakan sebesar 300 liter/detik (masih dalam perencanaan).
c. Mengusulkan pada pemerintah pusat melalui BBWSSO agar pembangunan *long storage* Karangtalun segera direalisasikan.

2.4.3.Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas di Kabupaten Sleman berada pada rentang terendah 1,34% yang terjadi di tahun 2016 dan tertinggi 1,825% di tahun 2017. Adapun angka kriminalitas pada tahun 2018 tercatat 1,49%. Secara umum trend angka kriminalitas bersifat fluktuatif, namun pada akhir tahun pengamatan sedikit penurunan sebesar 0,34% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun rendah, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya baik berupa upaya preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas. Kenakalan remaja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas di Kabupaten Sleman, mengingat perannya di wilayah DIY sebagai sentra pendidikan. Karena itu, selain mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan akademis dan non-akademis melalui lembaga-lembaga pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga berupaya menekan angka kriminalitas melalui program-program yang dapat meningkatkan keharmonisan mulai dari lingkungan keluarga. Hal ini terkait dengan peran pentingnya pendidikan anak mulai dari lingkungan keluarga sendiri sampai ke masyarakat.

BAPPEDA SLEMAN



Gambar 2. 16 Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Sleman Tahun 2014–2018

Sumber:Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman, 2019

2.4.3.2. Perizinan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaran Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi:

A. BPMPPT

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL) selain yang dilimpahkan kepada Camat;
3. Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB);
4. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat;
5. Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
7. Izin Usaha Industri;
8. Tanda Daftar Industri;
9. Izin Perluasan Industri;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Tanda Daftar Perusahaan;
12. Tanda Daftar Gudang;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
14. Izin Usaha Toko Modern;
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
16. Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

BAPPEDA SLEMAN

18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
19. Izin Usaha Penanaman Modal;
20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal.

B. Organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BPMPPT

a. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
- Izin Lingkungan;
- Izin Pembuangan Air Limbah;
- Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
- Izin Penebangan Pohon; dan
- Izin Sambungan Rumah Air Limbah.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Sertifikat Laik Fungsi;
- Pendaftaran Bangunan Gedung;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan; dan
- Izin Penutupan Saluran Drainase.

c. Dinas Kesehatan
- Izin Apotek;
- Izin Optik;
- Izin Toko Obat;
- Izin Toko Alat Kesehatan;
- Izin Laboratorium Klinik;
- Izin Klinik Pratama;
- Izin Klinik Utama;
- Izin Rumah Sakit;

BAPPEDA SLEMAN

- Izin Praktik Dokter Umum;
- Izin Praktik Dokter Gigi;
- Izin Praktik Dokter Spesialis;
- Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- Izin Bidan;
- Izin Perawat;
- Izin Perawat Gigi;
- Izin Tenaga Kefarmasian;
- Izin Fisioterapis;
- Izin Radiografer;
- Izin Refraksionis Optisien;
- Izin Okupasi Terapis;
- Izin Terapis Wicara; dan
- Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

d. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Izin Dokter Hewan Praktik;
- Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
- Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
- Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
- Izin Klinik Hewan;
- Izin Rumah Sakit Hewan;
- Izin Rumah Sakit Hewan Khusus; dan
- Izin Pusat Kesehatan Hewan.

e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- Izin Usaha Angkutan;
- Izin Pengelolaan Perparkiran; dan
- Izin Trayek.

f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
- Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga; dan Kerja Asing.

g. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

BAPPEDA SLEMAN

- Izin Pertambangan Rakyat;
- Izin Pemakaian Air Tanah;
- Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
- Izin Juru Bor;
- Izin Sempadan Saluran Irigasi;
- Izin Mendirikan Bangunan di Atas atau yang Melintasi Irigasi (Izin Penutupan Saluran Irigasi);
- Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi (Izin Memindah Saluran);
- Izin Pemakaian Air untuk Irigasi;
- Izin Pengusahaan Air untuk Irigasi; dan
- Izin Prinsip Alokasi Air.

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sampai dengan tahun 2015 ini jumlah berkas permohonan izin ada sebanyak 9.362 buah, dan yang sudah keluar Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sebanyak 8.763 buah. Dari data tersebut ada sebanyak 599 berkas yang belum selesai dan belum keluar SK dari Kepala Daerah tentang status permohonan izin tersebut.

2.4.3.3. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa

BAPPEDA SLEMAN

iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2017 meliputi investasi PMA sebanyak 68 unit dengan nilai investasi US$262.662.078 dan investasi PMDN 64 unit dengan nilai investasi Rp3.783.600,- juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 167,257 dibandingkan tahun 2016 sebesar 174,103 dan 188,814 di tahun 2015. Hal ini menjadi perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal perlu terus diupayakan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Gambaran sumber daya manusia dapat terlihat dari rasio ketergantungan. Berdasarkan data tahun 2018, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 45,64, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar lebih kurang 46 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 31,31, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 14,33. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda. Namun hal ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Sleman di masa yang akan datang. Di sisi lain, pada tahun 2025 akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi. Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha. Di sisi yang lain banyaknya lanjut usia di Kabupaten Sleman menjadi kewajiban pula bagi pemerintah daerah menyediakan fasilitas ramah lansia misalnya pemberdayaan posyandu lansia dan rumah sakit lansia.

Tabel 2.54
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

Tahun	Penduduk Kelompok Umur (%)					
	0-14	15-64	≥ 65	Anak	Lansia	Total
2013	225.760	725.097	96.461	31.14	13.30	44.44
2014	201.329	749.805	111.667	26.85	14.89	41.74
2015	234.629	728.194	108.773	32.22	14.94	47.16
2016	226.169	744.111	108.773	30.39	14.62	45.01
2017	221.565	733.578	107.718	30.20	14.68	44.89
2018	227.517	726.712	104.139	31,31	14,33	45,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Guna melihat potensi sumberdaya manusia di Kabupaten Sleman, dapat didekati pula melalui angkatan kerja serta status pendidikan, sehingga memudahkan dalam penyusunan kebijakan dan strategi. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sampai tahun 2017 dari sebanyak 599.295 jiwa, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA tercatat paling besar dengan 44,76% yang disusul oleh pendidikan Sarjana sebesar 17,36%. Sementara angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD terdapat sebesar 5,05% menempati persentase terendah.

Tabel 2.55
Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tingkat pendidikan						Jumlah
		Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	
1	Moyudan	538	1.498	2.892	10.417	1.683	2.681	19.709
2	Minggir	1.176	2.167	3.512	9.258	991	2.667	19.771
3	Seyegan	2.377	3.266	4.141	13.003	1.784	3.447	28.018
4	Godean	1.812	3.423	6.024	18.120	3.196	7.373	39.948
5	Gamping	2.494	4.968	9.965	23.725	4.824	7.090	53.066
6	Mlati	3.702	5.765	7.995	20.719	4.599	9.378	52.158
7	Depok	1.673	4.553	8.863	30.082	3.212	15.731	64.114
8	Berbah	1.310	2.497	3.711	14.218	3.212	5.285	30.233
9	Prambanan	1.731	3.897	6.912	12.761	1.841	3.630	30.772
10	Kalasan	2.539	3.965	4.942	25.185	2.929	8.125	47.685
11	Ngemplak	1.416	2.938	4.452	14.846	2.628	5.389	31.669
12	Ngaglik	1.708	4.074	5.587	23.340	5.582	14.510	54.801
13	Sleman	2.013	4.130	8.396	16.154	2.686	6.430	39.809
14	Tempel	2.111	3.689	6.077	13.043	1.708	3.840	30.468
15	Turi	1.734	2.361	3.758	6.981	2.376	3.121	20.331
16	Pakem	691	2.191	3.021	9.734	1.562	3.282	20.481
17	Cangkringan	1.261	2.695	2.800	6.686	745	2.075	16.262
Jumlah		**30.286**	**58.077**	**93.048**	**268.272**	**45.558**	**104.054**	**599.295**
Persentase (%)		**5,05**	**9,69**	**15,53**	**44,76**	**7,60**	**17,36**	**100**

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2018

BAPPEDA SLEMAN

Dari data capaian kinerja selama 5 (lima) tahun periode RPJMD sebelumnya sebagaimana tersaji di atas, terlihat masih ada beberapa capaian yang belum sesuai target, sehingga akan menimbulkan masalah dan menjadi isu strategis yang harus ditangani pada periode RPJMD 2016-2021. Selain itu potensi geografi dan demografi yang ada di Kabupaten Sleman merupakan sumber daya yang harus dikelola. Berbagai potensi ancaman bencana di sleman juga harus diantisipasi dengan menyiapkan rencana penanggulangan bencana secara komprehensif.

Keberadaan letak geografis Kabupaten Sleman yang strategis mengakibatkan pertumbuhan pertumbuhan penduduk yang kebanyakan berasal dari mutasi antar daerah. Hal ini berakibat pada dituntutnya pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih untuk mendukung layanan umum kepada masyarakat. Di sisi lain perkembangan wilayah berakibat pada perkembangan sektor perekonomian yang tidak setara, menyebabkan ketimpangan pendapatan (indeks gini) yang semakin lebar.

Aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat pengangguran, merupakan hal yang serius harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Adanya bonus demografi yang mengakibatkan banyakanya usia produktif (angkatan kerja) pada 2020-2025 harus bisa dimanfaatkan dengan menyediakan lapangan kerja atau mencetak wirausaha baru. Untuk itu pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Sleman, yaitu perdagangan, pariwisata dan pertanian mendapat perhatian yang lebih pada 5 (lima) tahun ke depan.

Pada aspek pelayanan umum, untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan daerah, Kabupaten Sleman harus mencari terobosan baru guna mempermudah dan mempercepat layanan pemerintah. Dengan adanya perkembangan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin cepat dan transparan Pemerintah Kabupaten Sleman harus bersiap menata diri dengan mengadopsi perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi diharapkan meningkatkan respon pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAPPEDA SLEMAN

Aspek daya saing yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman harus dikelola dan ditingkatkan guna menarik investasi masuk. Dengan banyaknya investasi yang ada di Sleman, diharapkan berimbas positif pada sektor penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Tentu saja investasi yang masuk ke kabupaten harus selaras dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan potensi ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Sleman.

BAPPEDA SLEMAN

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

BAPPEDA SLEMAN

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan – peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang mendasarkan kepada peraturan perundangan yang telah disebutkan di muka, secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan tersebut di atas. Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap peraturan-peraturan pengelolaan keuangan telah menuai hasil yang dibuktikan dengan capaian WTP Kabupaten Sleman atas pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2011.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

BAPPEDA SLEMAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selalu menerapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu pelaksanaan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, APBD meliputi aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

BAPPEDA SLEMAN

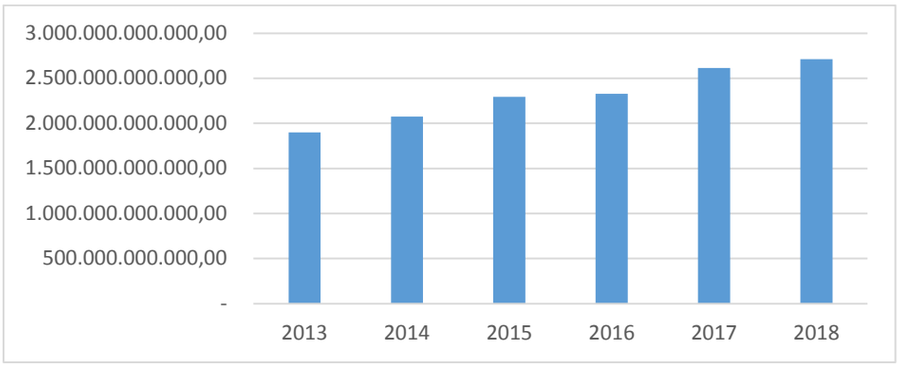
3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/ BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta dana desa. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus yang terdiri dari dana insentif daerah dan dana tunjangan pendidikan (BOSNAS).

Secara umum, pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga 2018 mengalami kenaikan, dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 tumbuh sebesar 9,33%, tahun 2015 tumbuh 10,49%, tahun 2016 tumbuh 1,50%, tahun 2017 tumbuh 12,30% dan tahun 2018 tumbuh 3,72%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama tahun 2013 – 2018 adalah 7,47%. Grafik pertumbuhan pendapatan daerah ditampilkan pada gambar 3.1. berikut:

BAPPEDA SLEMAN



Gambar 3.1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Secara lengkap, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2013-2018 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 (Rupiah)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata pertumbuhan (%)
Pendapatan Asli Daerah	**49.270.304.864,83**	**573.337.599.560,11**	**643.130.079.828,03**	**717.151.176.028,57**	**825.637.751.681,82**	**894.272.961.557,85**	**14,95**
Pajak daerah	274.628.955.500,77	326.033.995.236,66	373.137.768.070,80	407.675.230.792,56	528.453.215.727,18	596.559.264.609,83	16,99
Retribusi daerah	48.001.679.730,61	42.632.198.781,03	45.052.207.026,81	43.217.124.390,15	48.706.088.818,85	47.760.996.920,00	0,24
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)	15.551.529.372,17	23.654.901.728,19	34.330.598.540,50	42.031.674.753,95	36.292.784.407,97	34.654.443.121,29	20,30
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	111.088.140.261,28	181.016.503.814,23	190.609.506.189,92	224.227.146.091,91	212.185.662.727,82	215.298.256.906,73	16,40
Dana perimbangan	**992.782.430.677,00**	**1.034.404.522.916,00**	**1.080.162.444.931,00**	**1.384.675.221.762,00**	**1.416.428.331.296,00**	**1.449.905.691.794,00**	**8,29**
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	50.369.188.677,00	45.797.112.916,00	38.281.936.931,00	66.604.303.616,00	60.499.721.072,00	50.685.431.396,00	4,62
Dana alokasi umum	891.589.912.000,00	952.102.502.000,00	984.410.612.000,00	1.014.310.630.000,00	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	2,29
Dana alokasi khusus	50.823.330.000,00	36.504.908.000,00	29.421.080.000,00	240.745.571.146,00	278.580.346.224,00	321.540.108.398,00	140,37
Alokasi Dana Desa dari APBN	0,00	0,00	28.048.816.000,00	63.014.717.000,00	80.855.810.000,00	81.187.698.000,00	30,68
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	**457.472.901.297,00**	**469.078.008.608,02**	**571.330.239.997,09**	**227.271.058.216,23**	**373.449.014.421,16**	**368.615.427.104,36**	**5,43**
Pendapatan Hibah	1.016.000.000,00	4.334.136.890,46	5.132.097.396,00	8.947.518.750,00	8.712.131.733,00	9.154.000.000,00	84,36
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	134.451.960.504,00	165.068.472.717,56	198.089.393.601,09	205.041.339.466,23	214.366.369.383,86	234.123.774.471,36	12,01
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	28.336.200.000,00	25.013.687.000,00	27.241.950.000,00	8.282.200.000,00	17.655.805.907,00	786.747.000,00	-10,96
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	254.817.230.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.095.325.000,00	0,00	340.866.799.000,00	5.000.000.000,00	52.588.927.000,00	0,00	
Dana Insentif Daerah	0,00	25.878.507.000,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000.000	
Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)	0,00	248.783.205.000,00	0,00	0,00	80.125.780.397,30	73.050.905.633,00	
Pendapatan dari Piutang PBB yang belum diserahterimakan	6.756.185.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.899.525.636.838,83**	**2.076.820.131.084,13**	**2.294.622.764.756,12**	**2.329.097.456.006,80**	**2.615.515.097.398,98**	**2.712.794.080.456,21**	**7,47**

Sumber : BKAD Kab Sleman 2019

BAPPEDA FINAL

Peran Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2013-2018 semakin meningkat, meskipun belum mendominasi dalam struktur pendapatan daerah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur pendapatan daerah masih berada di bawah Dana Perimbangan. Pada tahun 2018 peran dana perimbangan sebesar 53,44% turun dari 54,15% pada tahun 2017. Rata-rata per tahun kontribusi dana perimbangan adalah 52,99%.

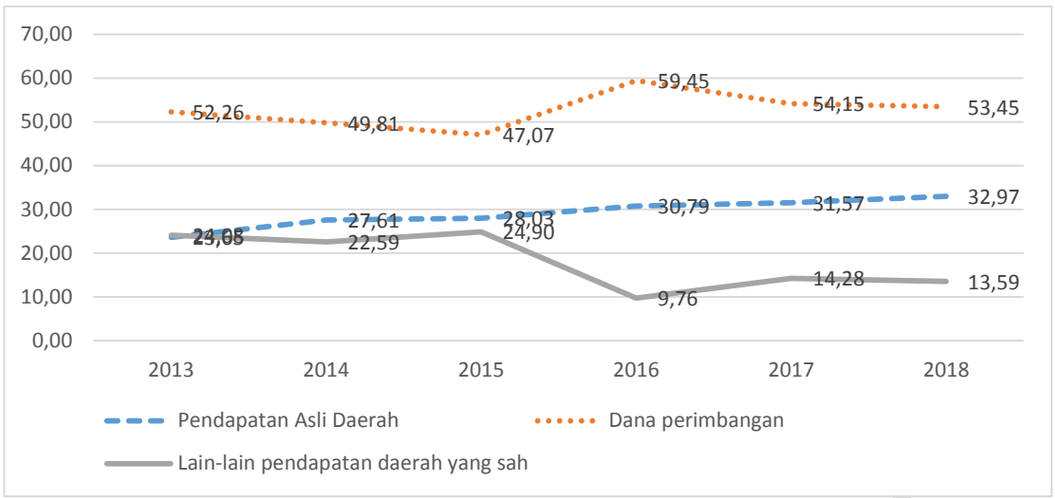
Peran PAD dalam struktur Pendapatan daerah berturut-turut selama tahun 2013-2018 adalah 23,65%, 27,61%, 28,03%, 30,79%, 31,57% dan 32,96%. Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 2013-2018 adalah 30,64%. Adanya trend kenaikan porsi PAD dalam pendapatan daerah menunjukkan adanya kemauan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Trend peran Dana Perimbangan pada pendapatan daerah selama 2013-2018 adalah fluktuatif, berturut-turut adalah 52,26%, 49,81%, 47,07%, 59,45%, 54,15% dan 53,44%. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang menyebabkan pertumbuhan Dana Perimbangan meningkat menjadi 28,19% dan kontribusi terhadap pendapatan daerah pada tahun ini mencapai persentase tertinggi yaitu 59,45%. Namun pada tahun 2017 kontribusinya menurun menjadi 54,15% dan menurun lagi di Tahun 2018 menjadi 53,44%.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata kontribusinya per tahun 19,12%. Adapun trend peran Lain-lain pendapatan daerah adalah fluktuatif namun cenderung menurun, ialah 24,08% pada tahun 2013, menjadi 22,59% pada tahun 2014, 24,90% pada tahun 2015, turun menjadi 9,76% pada tahun 2016, naik menjadi 14,28% pada tahun 2017, dan turun menjadi 13,58% di tahun 2018 .

Grafik perkembangan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2013 – 2018 ditampilkan pada gambar 3.2.

BAPPEDA SLEMAN



Sumber : Hasil analisis, 2019

Gambar 3.2. Perkembangan Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

Kemandirian keuangan Kabupaten Sleman, dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan yang diterima, menunjukkan bahwa pada periode 2013-2018, terdapat kecenderungan rasio yang semakin meningkat. Rasio PAD dibandingkan Dana Perimbangan pada tahun 2013 hingga 2018 berturut-turut adalah 0,45 pada tahun 2013; 0,55 pada tahun 2014; 0,60 pada tahun 2015; 0,52 pada tahun 2016; 0,58 pada tahun 2017; dan 0,61 pada tahun 2018. Terjadi penurunan angka kemandirian pada tahun 2016 dikarenakan pada tahun itu terdapat tambahan dana DAU, DAK dan Dana Desa yang cukup signifikan, meskipun sebenarnya pada tahun itu perolehan PAD lebih tinggi dibandingkan tahun 2015.

Apabila dianalisa tentang desentralisasi fiskal, yakni dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, diperoleh hasil adanya trend yang semakin meningkat. Pada tahun 2013 desentralisasi fiskal adalah 0,24; pada tahun 2014 sebesar 0,28, demikian pula pada tahun 2015, kemudian naik menjadi 0,31 pada tahun 2016, meningkat lagi menjadi 0,32 pada tahun 2017 dan menjadi 0,33 pada tahun 2018.

BAPPEDA SLEMAN

3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah. Pada periode 2013-2018, tumbuh cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan 14,95%. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Sleman adalah Rp449.270.304.864,83 menjadi Rp894.272.961.557,85 pada tahun 2018.

Komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan komponen Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013-2018 disajikan pada tabel 3.2. dan peranan masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah ditampilkan pada gambar 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018 (Rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	JUMLAH TOTAL PAD
2013	274.628.955.500,77	48.001.679.730,61	15.551.529.372,17	111.088.140.261,28	449.270.304.864,83
2014	326.033.995.236,66	42.632.198.781,03	23.654.901.728,19	181.016.503.814,23	573.337.599.560,11
2015	373.137.768.070,80	45.052.207.026,81	34.330.598.540,50	190.609.506.189,92	643.130.079.828,03
2016	407.675.230.792,56	43.217.124.390,15	42.031.674.753,95	224.227.146.091,91	717.151.176.028,57
2017	528.453.215.727,18	48.706.088.818,85	36.292.784.407,97	212.185.662.727,82	825.637.751.681,82
2018	596.559.264.609,83	47.760.996.920,00	34.654.443.121,29	215.298.256.906,73	894.272.961.557,85
Rata2 Pertumbuhan (%)	16,99	0,24	20,30	16,40	14,95

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN



Gambar 3.3. Perkembangan Peranan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

Sumber: BKAD Kab Sleman 2019, dianalisis

Pajak daerah, selama lima tahun terakhir meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 16,99%. Pajak daerah pada tahun 2013 adalah Rp274.628.955.500,77 meningkat menjadi Rp596.559.264.609,83 pada tahun 2018. Pajak daerah merupakan kontributor terbesar dalam struktur pendapatan asli daerah. Rata – rata kontribusi pajak selama tahun 2013-2018 adalah 60,60%. Adapun setiap tahunnya selama periode tersebut berfluktuasi ialah 61,13% pada tahun 2013, turun menjadi 56,87% pada tahun 2014, naik menjadi 58,02% pada tahun 2015, turun menjadi 56,85% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 64,01% pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 66,71% pada tahun 2018. Melihat trend penerimaan pajak yang meningkat, diperkirakan pendapatan asli daerah dari komponen ini masih dapat ditingkatkan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah.

Selama tahun 2013 – 2018, besaran pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah meningkat secara perlahan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 0,24%. Kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD selama tahun 2013 – 2018 cenderung menurun, dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 7,07%. Kontribusi pada tahun 2013 dan 2014 berada diatas rata-rata tahunan yakni 10,68% dan 7,44%, sedangkan kontribusi pada tahun 2015 hingga 2018 berada di bawah rata-rata tahunan yaitu 7,01% pada 2015, 6,03% pada tahun 2016, 5,9% pada tahun 2017, turun menjadi 3,4% pada tahun 2018.

BAPEDA SLEMAN

Pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, selama tahun 2013-2016 meningkat namun pada tahun 2017 dan 2018 berkurang. Rata-rata pertumbuhan pertahun pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama periode 2013–2018 adalah 20,30%. Meskipun secara riil pendapatan dari komponen ini meningkat, namun selama periode 2014-2018 trend laju pertumbuhannya adalah menurun. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan komponen ini adalah 52,11%, menurun menjadi 45,13% pada tahun 2015, menurun menjadi 22,43% pada tahun 2016 dan tumbuh sebesar minus 13,65% pada tahun 2017, dan minus 4,51% pada tahun 2018, yang artinya pendapatan yang diterima pada tahun 2018 oleh komponen ini lebih sedikit daripada jumlah yang diterima pada tahun 2017 dan lebih sedikit dari pada jumlah yang diterima pada tahun 2016.

Sumber PAD yang berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, selama tahun 2013-2106 mengalami kenaikan dan berkurang pada tahun 2017 dan sedikit meningkat pada tahun 2018. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan dari sumber ini adalah Rp111.088.140.261,28 menjadi Rp224.227.146.091,91 pada tahun 2016, turun menjadi Rp212.185.662.727,82 pada tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan menjadi Rp215.298.256.906,73 pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan per tahun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah 20,12%. Pada tahun 2016 tumbuh sebesar 17,63% sedangkan pada tahun 2018 tumbuh 1,46% dibandingkan Tahun 2017.

Target Pendapatan Asli Daerah, di dalam APBD Kabupaten Sleman periode 2013-2018 diasumsikan selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang berbeda, dan realisasi atas penerimaan PAD selama periode tersebut selalu dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan antara target dan realisasi dalam hal laju pertumbuhan PAD. Selengkapnya angka target dan realisasi PAD selama periode 2013-2018 ditampilkan pada tabel 3.3 berikut ini.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.3
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 (Rupiah)

Tahun	Target(Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Rasio Efektivitas (%)
2013	342.895.307.197,81		449.270.304.864,83		131,02
2014	474.917.917.941,46	38,50	573.337.599.560,11	27,62	120,72
2015	577.585.009.141,24	21,62	643.130.079.828,03	12,17	111,35
2016	648.841.915.155,32	12,34	717.151.176.028,57	11,51	110,53
2017	718.151.492.310,00	10,68	825.637.751.681,82	15,13	114,97
2018	821.071.767.742,63	14,33	894.272.961.557,85	8,31	108,12

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2013-2018 realisasi PAD selalu melampaui target, dengan rasio efektivitas berkisar antara 108,12 hingga 131,02. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Masih terdapat sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang bisa digali dan dikembangkan sebagai sumber pendapatan pembangunan daerah, salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah).

3.1.1.1.2. Dana Perimbangan

Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dana transfer ke daerah. Dana transfer terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan yang dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah. Dana Perimbangan Daerah berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Setiap jenis dana perimbangan mempunyai peran masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal anatara pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Pemanfaatan dana perimbangan diserahkan kepada daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah

BAPPEDA SLEMAN

dapat secara efektif dan efisien menggunakan dana ini untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2013-2018, Dana Perimbangan rata-rata pertahun tumbuh sebesar 8,29%. Dana bagi hasil pajak kecenderungannya menurun dimana pada tahun 2018 penerimaan komponen itu lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Sedangkan penerimaan DAU tahun 2018 sama dengan tahun 2017. Meskipun selama periode 2013-2016 pendapatan DAU meningkat, namun pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan DAU sedikit turun dibandingkan tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan pertahun Dana Alokasi Umum adalah sebesar 2,29% sementara itu rata-rata per tahun pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak adalah 4,62%. Dana Alokasi Khusus naik pesat pada tahun 2016, ketika pada tahun 2015 DAK yang diterima adalah sebesar Rp29.421.080.000,00 menjadi Rp240.745.571.146,00 pada tahun 2016, naik menjadi Rp278.580.346.224,00 pada tahun 2017 dan kembali naik cukup signifikan menjadi Rp321.540.108.398,00 pada tahun 2018. Alokasi Dana Desa dari APBN yang dilaksanakan mulai tahun 2015, mempunyai trend meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar Rp28.048.816.000,00 pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp63.014.717.000,00, bertambah menjadi Rp80.855.810.000,00 pada tahun 2017 dan naik sedikit menjadi Rp81.187.698.000,00 pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan per tahun dari Alokasi Dana Desa APBN adalah 30,68%.

3.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 terdiri dari pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, serta Dana Tunjangan BOSNAS. Komposisi ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dimana BOSNAS tidak muncul pada tahun 2015 dan tahun 2016 di kelompok Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah. Komponen yang secara rutin selama periode 2013-2018 muncul dalam Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

BAPPEDA SLEMAN

Laju pertumbuhan rata-rata per tahun pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 5,43%. Komponen Pendapatan Hibah rata-rata tumbuh 84,36%, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota rata-rata tumbuh 12,01%, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pertumbuhannya minus 10,96%.

3.1.1.1.4. Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengintepretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan.

Tabel 3.4
Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana perimbangan (Rp.)	Rasio Kemandirian = PAD/Dana Perimbangan
1	2	3	4 = (2/3)
2013	449.270.304.865	992.782.430.677	0,45
2014	573.337.599.560	1.034.404.522.916	0,55
2015	643.130.079.828	1.080.162.444.931	0,60
2016	717.151.176.029	1.384.675.221.762	0,52
2017	825.637.751.682	1.416.428.331.296	0,58
2018	894.272.961.557,85	1.449.905.691.794,00	0,62

Sumber: BKAD Kab. Sleman 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sleman masih belum tinggi, masih di kisaran 0,62. Hal itu terjadi bukan karena Pendapatan Asli Daerahnya tidak

BAPPEDA SLEMAN

bertambah, namun karena antara PAD dengan Dana Perimbangan selama kurun waktu 2013-2018 sama-sama meningkat. Dua tahun terakhir yakni 2017-2018 kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman meningkat dari 0,58 menjadi 0,62. Dari angka tersebut, disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman masih tergantung kepada pusat, belum sepenuhnya mandiri.

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam pengelolaan urusan rumah tangganya sendiri, yaitu dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. PAD hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di samping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain penerimaan yang sah.
Mencermati struktur hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat Desentralisasi Fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dalam perencanaan dan pembangunan di daerah terutama dalam hubungannya dengan tingkat kemandirian suatu daerah akan membawa konsekuensi terhadap posisi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan penyelenggaraaan pembangunan di daerah. Karena itu untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya terutama dalam hal keuangan daerah, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai ukuran. Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio dana transfer pusat terhadap total

BAPPEDA SLEMAN

penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dengan melihat struktur realisasi penerimaan Kabupaten Sleman, maka dapat dianalisis besarnya derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sleman seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018 (%)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	23,65	27,61	28,03	30,79	31,57	32,96	29,10
Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah	9,73	10,15	10,30	11,66	10,51	1,86	9,035
Rasio Dana Transfer Pusat terhadap Total Penerimaan Daerah	52,26	49,81	47,07	59,45	54,15	53,44	52.69

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2019

Dari tabel di atas, tampak bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Sleman rata-rata masih di bawah angka 30%, yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah. Ketergantungan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman terhadap pusat dapat pula dilihat dari rasio sumbangan/bantuan serta rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan yang diukur dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak nilainya relatif rendah yaitu rata-rata hanya 9,035% kurun waktu tahun 2013 sampai 2018. Relatif rendahnya derajat desentralisasi perpajakan juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang produktif, baik jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung belum menjadi kewenangan pemerintah daerah secara administrasi. Sementara itu, jika dilihat dari rasio sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah nampak bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap sumbangan pusat selama periode tahun 2013 - 2018 rata-rata masih di atas angka 50%. Pada tahun 2014 dan 2015 sudah di bawah angka 50%, namun menjadi naik secara signifikan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 karena terdapat dana desa dari APBN yang dialokasikan untuk desa

BAPPEDA SLEMAN

sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Tabel 3.6 berikut menunjukkan besaran belanja yang terjadi selama tahun 2013-2018 di Kabupaten Sleman.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Daerah						
Belanja Tidak Langsung	**1.060.168.201.356,01**	**1.094.875.630.929,07**	**1.298.797.514.723,91**	**1.380.996.251.480,47**	**1.299.646.259.688,98**	**1.290.867.655.413,00**
Belanja Pegawai	909.252.019.365,18	966.774.939.471,14	1.033.804.728.931,07	1.097.707.839.367,23	950.142.604.624,18	925.330.430.469,00
Belanja Bunga	28.750.905,83	12.341.084,68	258.765.334,00	3.021.102.416,00	2.358.580.867,00	1.574.098.880,00
Belanja Subsidi	19.518.562.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	43.239.057.000,00	17.015.655.800,00	50.913.755.411,00	40.024.505.000,00	47.965.959.800,00	52.751.833.680,00
Belanja Bantuan Sosial	21.801.063.000,00	40.214.260.000,00	38.703.752.000,00	29.383.789.000,00	34.694.686.100,00	29.112.937.900,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	33.366.158.150,00	34.793.261.504,00	41.101.803.027,00	43.485.614.551,00	48.747.897.642,00	61.204.231.336,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	32.962.590.515,00	35.224.009.481,25	133.725.021.327,00	166.884.663.874,24	214.565.611.722,80	220.758.430.850,00
Belanja Tidak Terduga	0	841.163.588,00	289.688.693,84	488.737.272,00	1.170.918.933,00	135.692.298,00
Belanja Langsung	**633.360.095.649,78**	**801.601.746.559,29**	**1.029.954.405.201,42**	**1.074.450.697.393,77**	**1.189.950.371.638,54**	**1.289.226.062.576,06**
Belanja Pegawai	125.003.792.070,80	143.285.096.349,00	163.717.705.627,00	165.659.692.724,00	178.352.823.667,00	211.105.892.006,00
Belanja Barang Dan Jasa	301.496.438.442,81	375.454.600.951,29	439.453.872.165,57	564.788.678.438,44	630.970.493.075,82	666.807.766.001,50
Belanja Modal	206.859.865.136,17	282.862.049.259,00	426.782.827.408,85	344.002.326.231,33	380.627.054.895,72	411.312.404.568,56
Jumlah Belanja	**1.693.528.297.005,79**	**1.896.477.377.488,36**	**2.328.751.919.925,33**	**2.455.446.948.874,24**	**2.489.596.631.327,52**	**2.580.093.717.989,06**
Surplus/(Defisit)	**205.997.339.833,04**	**180.342.753.595,77**	**(34.129.155.169,21)**	**(126.349.492.867,44)**	**125.918.466.071,46**	**132.700.362.467,15**
Persentase surplus/(defisit)	10,84	8,68	(1,49)	(5,42)	4,81	4,89

Sumber: Bappeda & BKAD KAb. Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Pada tabel di atas dapat dicermati bahwa realisasi belanja daerah selalu meningkat, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung adalah 12,93% sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 5,14%.

Pos Belanja Tidak Langsung, selama periode 2013-2018 terdapat kecenderungan menurun, pada tahun 2013 proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar 62,60%, menurun menjadi 57,73% pada tahun 2014, menjadi 55,77% pada tahun 2015, menurun menjadi 56,24% pada tahun 2016, menjadi 52,20% pada tahun 2017 dan menjadi 65,36% pada tahun 2018. Rata-rata Belanja Tidak Langsung selama tahun 2013-2018 adalah 56,54%.

Sebagian besar Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai. Dari tahun 2013 hingga 2018, Belanja Pegawai cenderung meningkat. Besaran Belanja Pegawai terhadap total Belanja Tidak Langsung rata-rata per tahun selama 2013- 2018 adalah 53,69% pada tahun 2013, naik menjadi 50,98% pada tahun 2014, turun menjadi 44,39% pada tahun 2015, naik menjadi 44,71% pada tahun 2016, menjadi 38,16% pada tahun 2017 dan kembali naik menjadi 49,45% di tahun 2018.

Pos belanja bunga selama tahun 2013-2018 berfluktuasi, tergantung keperluan masing-masing tahun. Pada tahun 2017 dan 2018 belanja bunga meningkat dibandingkan tahun 2016 dikarenakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Sleman.

Pos Belanja Langsung, terdapat trend yang meningkat dari waktu ke waktu, dari Rp633.360.095.650,00 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp1.289.226.062.576,06,00 pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan per tahun Belanja Langsung adalah 15,69%. Meskipun rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung cukup tinggi, namun pada tiga tahun terakhir pertumbuhannya di bawah rata-rata yakni 4,32% pada tahun 2016, 10,75% pada tahun 2017 dan 8,34% pada tahun 2018.

Realisasi atau penyerapan anggaran pada Belanja Daerah selama tahun 2013-2018 secara umum, telah baik yaitu di atas 80%, baik

BAPEDA SLEMAN

belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Penyerapan yang rendah ada pada belanja tak terduga. Ke depan, tidak hanya penyerapan anggaran yang harus dioptimalkan, tetapi juga realisasi kinerja baik output maupun outcome.

Tabel. 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 (%)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Daerah						
Belanja Tidak Langsung	62,60	57,73	55,77	56,24	52,20	65,36
Belanja Pegawai	53,69	50,98	44,39	44,71	38,16	49,45
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,01	0,12	0,09	0,07
Belanja Subsidi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	2,55	0,90	2,19	1,63	1,93	2,30
Belanja Bantuan Sosial	1,29	2,12	1,66	1,20	1,39	1,27
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,97	1,83	1,76	1,77	1,96	2,66
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	1,95	1,86	5,74	6,80	8,62	9,61
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,04	0,01	0,02	0,05	0,01
Belanja Langsung	37,40	42,27	44,23	43,76	47,80	56,10
Belanja Pegawai	7,38	7,56	7,03	6,75	7,16	9,19
Belanja Barang Dan Jasa	17,80	19,80	18,87	23,00	25,34	29,02
Belanja Modal	12,21	14,92	18,33	14,01	15,29	17,90

Sumber: Hasil Analisis

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal kepada BUMD;
c. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

BAPEDA SLEMAN

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun 2013-2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.8. Sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Selama tahun 2013-2018 SiLPA berfluktuasi naik turun tidak stabil. Tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan SiLPA tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 menjadi lebih besar lagi dari tahun 2014, namun pada tahun 2016 menurun dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 SiLPA berkurang jika dibandingkan SiLPA tahun 2016, dan kembali naik pada tahun 2018. SiLPA yang terlalu besar menunjukkan kurangnya kecermatan perhitungan dalam perencanaan pendapatan dan belanja. Diharapkan pada masa yang akan datang SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan Modal dilakukan kepada BUMD Bank BPD DIY, Bank Sleman dan PDAM. Adapun pembayaran pokok hutang adalah pembayaran atas pokok hutang RSUD Sleman.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018 (Rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Pembiayaan Daerah						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	289.079.874.715,22	431.359.469.619,86	499.724.664.810,23	478.521.631.855,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	30.761.374.714,00	1.195.256.286,00	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**289.079.874.715,22**	**431.359.469.619,86**	**530.486.039.524,23**	**479.716.888.141,02**	**337.768.495.273,58**	**417.658.961.346,00**
Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	63.580.000.000,00	111.839.813.477,00	17.835.252.500,00	8.578.900.000,00	39.007.999.999,04	140.296.757.415,00
Pembayaran Pokok Utang	137.744.928,40	137.744.928,40	0	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**63.717.744.928,40**	**111.977.558.405,40**	**17.835.252.500,00**	**15.598.900.000,00**	**46.027.999.999,04**	**147.316.757.415,00**
Pembiayaan Netto	**225.362.129.786,82**	**319.381.911.214,46**	**512.650.787.024,23**	**464.117.988.141,02**	**291.740.495.274,54**	**270.342.203.931,00**

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

3.1.2. Neraca Daerah

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan sebesar -4,47% per tahun. Pada tahun 2015 total aset lancar sebesar Rp617.917.900.208,32, pada tahun 2016 berkurang/turun sebesar -25,38%, mencapai angka sebesar Rp461.049.193.359,08, kemudian

BAPPEDA SLEMAN

pada tahun 2017 jumlah Aset Lancar meningkat sebesar 16,43% menjadi Rp536.803.387.224,45 dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,87% menjadi Rp579.076.086.426,30. Komponen aset lancar yang mengalami kenaikan adalah kas dan piutang. Pertumbuhan aset yang positif memberikan indikasi, bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara efektif dan efesien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, secara keseluruhan dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) dengan rata-rata sebesar -16,44%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansialnya secara tepat waktu.

Dari sisi kewajiban jangka pendek dengan berbagai pihak dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuasi. Sedangkan rata-rata pertumbuhannya adalah 15,16%. Pada tahun 2015 kewajiban dengan pihak ketiga masih sebesar Rp9.665.798.823,32; kemudian pada tahun 2016 meningkat 75,30% menjadi Rp16.944.612.683,94; pada tahun 2017 berkurang -33,4% menjadi Rp11.328.768.975,39 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 9,24% menjadi Rp12.376.336.408,91.

Peningkatan kewajiban dengan pihak ketiga yang terjadi di tahun 2016 dan 2018 sebenarnya bukanlah merupakan suatu kejelekan dalam pengelolaan keuangan daerah, selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan untuk

BAPPEDA SLEMAN

sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat memberikan multiplier efek pada peningkatan pendapatan masyarakat. Gerak dinamika ini tentunya akan memberikan dampak positif pada berkembangnya berbagai aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan tentunya dunia usaha dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sleman selama kurun waktu 4 tahun mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,06% yang berarti bahwa ekuitas dananya rendah.

Sementara itu, secara keseluruhan perkembangan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan menggeliatnya berbagai aktivitas pembangunan yang secara gencar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Data yang ada selama 2015-2018 menunjukkan, bahwa total pertumbuhan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata 3,25% per tahun. Hal positif inilah yang mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha baik yang dilaksanakan oleh kelompok pengusaha menengah dan besar serta usaha-usaha masyarakat yang semakin bermunculan di wilayah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan

BAPPEDA SLEMAN

rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.9
Neraca Daerah Per 31 Desember 2015, 2016, 2017 dan 2018

URAIAN	2015	2016	2017	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	386.623.972.300,23	273.276.330.962,99	364.928.677.654,90	348.012.081.723,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	58.326.869.665,93	8.424.878.922,00	135.413.344,73	16.508.175,00
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	90.942.000,00	20.514.400,00	327.580.909,00	91.673.127,00
Kas di BLUD	33.910.387.690,86	56.144.514.449,59	47.425.961.738,57	50.234.400.000,12
Kas Lainnya	12.535.889.120,50	7.515.489.890,89	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BOS	0,00	0,00	4.876.792.506,80	4.774.937.861,68
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	132.495.334.793,11	139.919.994.097,77	155.618.998.348,60	169.745.688.244,33
Piutang Retribusi	6.169.861.109,00	9.227.661.611,00	6.766.731.180,50	6.532.821.660,50
Piutang Lain-Lain PAD yang sah	4.690.707.760,07	7.746.330.916,85	14.500.888.646,36	53.301.345.246,34
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00	937.563.635,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.424.619.650,00	3.553.213.398,03	0,00
Penyisihan Piutang	(65.031.000.187)	(84.527.688.549)	(104.090.014.937)	(104.353.258.339,27)
Belanja Dibayar Dimuka	454.167,00	19.335.899,88	71.115.209,47	266.271.258,32
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	48.104.481.789,09	41.857.211.106,98	41.750.465.589,54	50.453.617.468,93
JUMLAH ASET LANCAR	617.917.900.208,32	461.049.193.359,08	536.803.387.224,45	**579.076.086.426,30**
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	54.815.595.678,00	54.816.698.978,00	54.816.389.010,00
Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	(5.769.903.990,51)
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih	0,00	(5.414.730.625)	(6.030.207.819)	0,00

BAPPEDA SIAK

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Investasi Non Permanen Lainnya	49.921.277.418,69	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	49.921.277.418,69	49.400.865.052,96	48.786.491.159,26	**49.046.485.019,49**
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	319.824.071.755,07	333.531.748.866,86	382.348.182.281,91	535.817.004.117,89
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	319.824.071.755,07	333.531.748.866,86	382.348.182.281,91	**535.817.004.117,89**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	369.745.349.173,76	382.932.613.919,82	431.134.673.441,17	**584.863.489.137,38**
ASET TETAP				
Tanah	815.956.072.189,00	835.173.516.329,00	781.440.729.745,00	805.077.424.026,26
Peralatan dan Mesin	518.278.248.820,14	619.976.890.577,99	671.238.697.377,21	737.044.961.567,79
Bangunan dan Gedung	889.911.892.089,40	1.101.606.697.677,86	1.232.062.050.319,26	1.278.118.037.059,01
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.156.952.914.247,30	1.278.983.567.498,26	1.415.417.667.976,64	1.569.093.721.371,83
Aset Tetap Lainnya	67.084.700.057,16	78.838.148.202,44	78.812.756.284,80	86.231.711.900,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	235.271.842.145,77	152.259.336.983,00	19.827.265.385,51	65.667.770.291,41
Akumulasi Penyusutan	(842.005.185.007,06)	(980.362.648.861,15)	(1.084.898.795.109,45)	(1.211.755.245.744,20)
Jumlah Aset Tetap	2.841.450.484.541,71	3.086.475.508.407,40	3.113.900.371.978,97	**3.329.478.380.472,56**
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	381.596.250,00	370.336.250,00	370.336.250,00	370.336.250,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	272.874.000,00	272.874.000,00	272.874.000,00	272.874.000,00
Aset Tak Berwujud	7.064.148.125,00	9.973.359.626,00	14.588.755.536,00	18.427.538.179,66
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.608.315.973)	(4.432.073.838)	(4.370.164.891)	(5.098.613.360,85)
Aset Lain-Lain	19.102.613.349,04	17.598.835.102,55	21.359.593.784,92	88.820.367.447,94
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(620.355.116,30)	(3.423.398.341,57)	(7.434.688.598,09)	(58.325.476.445,81)
Jumlah Aset Lainnya	22.592.560.634,94	20.359.932.798,56	24.786.706.081,83	**44.467.026.070,94**
JUMLAH ASET	3.851.706.294.558,73	3.950.817.248.484,86	4.106.625.138.726,42	**4.537.884.982.107,18**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	339.629.346,00	65.415.799,00	35.464.808,00	87.034.489,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	313.372.499,32	3.889.569.283,94	530.895.551,02	380.305.545,98
Utang Belanja	1.992.796.978,00	5.969.627.601,00	3.734.447.916,37	4.888.996.373,93
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	7.960.700,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	9.665.798.823,32	16.944.612.683,94	11.328.768.975,39	**12.376.336.408,91**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	23.741.374.714,00	17.916.631.000,00	10.896.631.000,00	3.876.631.000,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	323.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	24.065.274.714,00	17.916.631.000,00	10.896.631.000,00	**3.876.631.000,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	33.731.073.537,32	34.861.243.683,94	22.225.399.975,39	**16.252.967.408,91**
EKUITAS				
Ekuitas	3.817.975.221.021,41	3.915.956.004.800,92	4.084.399.738.751,03	4.521.632.014.698,27
JUMLAH EKUITAS	3.817.975.221.021,41	3.915.956.004.800,92	4.084.399.738.751,03	4.521.632.014.698,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.851.706.294.558,73	3.950.817.248.484,86	4.106.625.138.726,42	4.537.884.982.107,18

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

BADELA SEMAR

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sleman diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode 2013-2018 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni rata-rata 42,34%.

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Terkait dengan hal itu, Kebijakan Umum pendapatan daerah dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

BAPPEDA SLEMAN

(1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, SKPD penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

BAPPEDA SLEMAN

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Sleman, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) harus diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan neto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai

BAPPEDA SLEMAN

ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2013-2018, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai adalah 46,39% sedangkan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 56,91%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan belum berorientasi kepada masyarakat, sedangkan idealnya pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

TAHUN	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja (Rp)	Prosentase
	(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
2013	1.052.968.980.000,00	1.693.528.297.005,79	62,18
2014	1.220.306.140.000,00	1.896.477.377.488,36	64,35

BAPPEDA SLEMAN

TAHUN	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja (Rp)	Prosentase
	(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
2015	n.a.	2.328.751.919.925,33	n.a.
2016	1.016.157.342.238,36	2.455.446.948.874,24	41,38
2017	1.052.968.957.159,98	2.489.596.631.327,52	42,29
2018	1.136.436.322.475	2.298.131.055.803,06	49,45
Rata-rata			51,00

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebagai sumber utama Penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2015 dan 2016 selain bersumber dari dana SiLPA, penerimaan pembiayaan juga berasal dari penerimaan pinjaman daerah. Untuk tahun yang lainnya sumber penerimaan pembiayaan adalah SiLPA saja. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terutama adalah untuk pembayaran pokok hutang dan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Kondisi pembiayaan daerah terlihat pada tabel 3.11. Adapun SiLPA, selain untuk pengeluaran pembiayaan, SiLPA dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran apabila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp.)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.899.525.636.838,83	2.076820.131.084,13	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456
Dikurangi realisasi:							
2.	Belanja Daerah	1.693.528.297.005,79	1.896.477.377.488,36	2.328.751.919.925,33	2.455.446.948.874,24	2.489.596.631.327,52	2.298.131.055.803,06
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	63.717.744.928,40	111.977.558.405,40	17.835.252.500,00	15.598.900.000,00	46.027.999.999,04	147.316.757.415,00
Defisit riil		142.279.594.904,64	68.365.195.190,37	(51.964.407.669,21)	(141.948.392.867,44)	125.918.466.071,46	132.700.362.467,15

Sumber: BKAD Kab Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Realisasi SiLPA tahun 2013-2018 tampak pada tabel 3.12. Berfluktuasinya besaran SiLPA pada setiap tahunnya mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sleman ke depan untuk lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran.

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah SiLPA(Rp)
2013	289.079.874.715,22
2014	431.359.469.619,86
2015	499.724.664.810,23
2016	478.521.631.855,02
2017	337.768.495.273,58
2018	403.042.566.398,15

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, sebagian besar pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan sebagian kecil untuk pembayaran pokok utang. Pembiayaan untuk penyertaan modal kepada BUMD meskipun setiap tahunnya jumlahnya tidak sama, namun porsinya selalu lebih besar daripada porsi pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang. Dengan banyaknya penerimaan pembiayaan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih berani lagi dalam penggunaan penerimaan pembiayaan, misalnya dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal pada BUMD baru.

3.3. Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena

BAPPEDA SLEMAN

itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sleman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1, bahwa Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan

BAPPEDA SLEMAN

langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut;

b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Sleman;
d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh.

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
    1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    2. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
    3. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
    4. Terbentuknya sistem zona nilai tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

BAPPEDA SLEMAN

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Dana Alokasi Umum cenderung meningkat setiap tahun dihitung dengan memperhatikan rata rata kenaikan per tahun.
c. Dana transfer yang lain diasumsikan sama dengan anggaran tahun 2019.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**717.151.176.028,57**	**825.637.751.681,82**	**894.272.961.557,85**	**867.643.469.527,46**	**942.974.054.277,00**	**1.006.874.054.277,00**
1	Pajak daerah	407.675.230.792,56	528.453.215.727,18	596.559.264.609,83	581.800.000.000,00	637.000.000.000,00	690.000.000.000
2	Retribusi daerah	43.217.124.390,15	48.706.088.818,85	47.760.996.920,00	43.669.694.250,00	57.410.250.000,00	60.310.250.000
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)	42.031.674.753,95	36.292.784.407,97	34.654.443.121,29	38.579.263.688,00	48.579.263.688,00	51.579.263.688
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	224.227.146.091,91	212.185.662.727,82	215.298.256.906,73	203.594.511.589,46	199.984.540.589,00	204.984.540.589
II	**Dana Perimbangan**	**1.321.660.504.762,00**	**1.335.572.521.296,00**	**1.368.717.993.794,00**	**1.411.921.108.000,00**	**1.436.921.108.000,00**	**1.441.921.108.000,00**
1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	66.604.303.616,00	60.499.721.072,00	50.685.431.396,00	50.014.153.000,00	50.014.153.000,00	50.014.153.000,00
2	Dana alokasi umum	1.014.310.630.000,00	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	1.026.081.409.000,00	1.051.081.409.000,00	1.056.081.409.000,00
3	Dana alokasi khusus	240.745.571.146,00	278.580.346.224,00	321.540.108.398,00	335.825.546.000,00	335.825.546.000,00	335.825.546.000,00
III	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**290.285.775.216,23**	**454.304.824.421,16**	**449.803.125.104,36**	**402.621.307.152,06**	**758.545.447.152,06**	**659.045.447.152,06**
1	Pendapatan Hibah	8.947.518.750,00	8.712.131.733,00	82.204.905.633,00	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00
2	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	205.041.339.466,23	214.366.369.383,86	234.123.774.471,36	225.084.687.853,06	225.084.687.853,06	225.084.687.853,06
3	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	8.282.200.000,00	17.655.805.907,00	786.747.000,00	0	-	-
	- Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-	355.924.140.000,00	256.424.140.000,00

BAPPEDA SLEMAN

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68.014.717.000,00	133.444.737.000,00	132.687.698.000,00	170.882.517.000,00	170.882.517.000,00	170.882.517.000,00
	a. Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	52.588.927.000,00	51.500.000.000,00	71.847.341.000	71.847.341.000,00	71.847.341.000,00
	b. Dana Desa dari APBN	63.014.717.000,00	80.855.810.000,00	81.187.698.000,00	99.035.176.000	99.035.176.000,00	99.035.176.000,00
5	Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)		80.125.780.397,30	0,00	-	-	-
6	DPIPD		-	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.329.097.456.006,80**	**2.615.515.097.398,98**	**2.712.794.080.456,21**	**2.682.185.884.679,52**	**3.138.440.609.429,06**	**3.107.840.609.429,06**

Sumber: DPKAD Kab. Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3) Pendayagunaan aset daerah.
4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5) Diversifikasi BUMD dengan mendirikan BUMD baru yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Penyertaan modal pada BUMD merupakan amanat Peraturan Daerah. Skema penyertaan modal di Kabupaten Sleman setelah adanya BUMD baru yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Skema Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Sleman
Tahun 2019-2021 (Rp.000)

No.	BUMD	2019	2020	2021
1	PDAM	11.098.000	12.032.000	12.431.000
2	Bank Sleman	30.000.000	45.000.000	0
3	Bank BPD DIY	55.575.000	55.575.000	55.575.000
4	BPRS	10.000.000	6.125.000	0
	Total	106.673.000	118.732.000	68.006.000

Sumber: BKAD, 2019

Penyertaan modal pada Bank Sleman dan BPRS selesai pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 sudah tidak perlu dianggarkan lagi penyertaan modal untuk kedua BUMD tersebut.

BAPPEDA SLEMAN

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dirincikan melalui:

a. Mendanai belanja wajib dan mengikat;
b. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
c. Mendanai hibah bansos dan bantuan keuangan yang diberikan jika belanja wajib dan mengikat dan belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sudah tercukupi.

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel 3.12. diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun ke depan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai PPPK.
b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021;
c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

BAPEDA SLEMAN

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel 3.14. Belanja tidak langsung diproyeksikan naik setiap tahun sebagai akibat kenaikan belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pengeluaran pada komponen Belanja Bunga tidak naik bahkan hanya sampai pada tahun 2020. Tahun 2021 pinjaman RSUD Sleman sudah selesai sehingga kewajiban belanja bunga sudah tidak ada lagi. Pada tahun 2020, Kabupaten Sleman menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sehingga Belanja Hibah meningkat jika dibandingkan tahun 2019 karena pada 2020 memberikan hibah kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sleman. Belanja Langsung diproyeksikan selalu meningkat setiap tahunnya sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Selengkapnya proyeksi belanja Kabupaten Sleman 2016-2021 tersaji pada tabel 3.15 di bawah ini.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Belanja Tidak Langsung**	**1.380.996.251.480,47**	**1.299.646.259.688,98**	**1.290.867.655.413,00**	**1.506.722.610.960,00**	**1.552.180.997.747,70**	**1.547.308.196.523,70**
1	Belanja pegawai	1.097.707.839.367,23	950.142.604.624,18	925.330.430.469,00	1.063.232.350.778,00	1.089.455.639.323,70	1.098.455.639.323,70
2	Belanja bunga	3.021.102.416,00	2.358.580.867,00	1.574.098.880,00	1.870.801.224,00	1.870.801.224,00	-
3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0	0	0	-
4	Belanja hibah	40.024.505.000,00	47.965.959.800,00	52.751.833.680,00	68.669.600.000,00	92.677.800.000,00	67.565.800.000,00
5	Belanja bantuan sosial	29.383.789.000,00	34.694.686.100,00	29.112.937.900,00	22.209.667.000,00	22.316.000.000,00	24.316.000.000,00
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	43.485.614.551,00	48.747.897.642,00	61.204.231.336,00	62.545.217.425,00	69.441.025.000,00	75.031.025.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Daerah	166.884.663.874,24	214.565.611.722,80	220.758.430.850,00	268.544.031.154,00	272.919.732.200,00	278.439.732.200,00
8	Belanja tidak terduga	488.737.272,00	1.170.918.933,00	135.692.298,00	19.650.943.379,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
II	**Belanja Langsung**	**1.074.450.697.393,77**	**1.189.950.371.638,54**	**1.289.226.062.576,06**	**1.294.162.474.911,00**	1.708.421.093.932,00	1.686.921.093.932,00
1	Belanja pegawai	165.659.692.724,00	178.352.823.667,00	211.105.892.006,00	201.747.887.230,00		
2	Belanja barang dan jasa	564.788.678.438,44	630.970.493.075,82	666.807.766.001,50	670.931.907.256,00		
3	Belanja modal	344.002.326.231,33	380.627.054.895,72	411.312.404.568,56	421.482.680.425,00		
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**2.455.446.948.874,24**	**2.489.596.631.327,52**	**2.580.093.717.989,06**	**2.800.885.085.871,00**	3.260.602.091.679,70	3.234.229.290.455,70
	Surplus/(defisit)	(126.349.492.867,44)	125.918.466.071,46	132.700.362.467,15	(118.699.201.191,48)	(122.161.482.250,64)	(126.388.681.026,64)

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2018

BAPPEDA SLEMAN

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu,
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.Pembiayaan daerah terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal pada BUMD, yaitu PDAM, Bank Sleman, Bank BPD DIY dan penyertaan modal pada diversifikasi BUMD baru yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 3.15 di bawah ini.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Penerimaan pembiayaan**	**479.716.888.141,02**	**337.768.495.273,58**	**417.658.961.346,00**	**172.294.201.191,48**	**247.913.482.250,64**	**194.394.681.026,64**
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	478.521.631.855,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	172.294.201.191,48	247.913.482.250,64	194.394.681.026,64
2	Penerimaan pinjaman daerah	1.195.256.286,00	0	0	0	0	0
3	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0
II	**Pengeluaran pembiayaan**	**15.598.900.000,00**	**46.027.999.999,04**	**147.316.757.415,00**	**113.693.000.000,00**	**125.752.000.000,00**	**68.006.000.000,00**
1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	8.578.900.000,00	39.007.999.999,04	140.296.757.415,00	106.673.000.000,00	118.732.000.000,00	68.006.000.000,00
3	Pembayaran pokok utang	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**464.117.988.141,02**	**291.740.495.274,54**	**270.342.203.931,00**	**58.601.201.191,48**	**122.161.482.250,64**	**126.388.681.026,64**

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi sesuai prioritas selama tahun 2016-2021, seperti tercantum pada tabel 3.17, tabel 3.18, dan tabel 3.19.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun ke depan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana Tabel Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2016-2021. Dari tabel tersebut dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2016-2021, yaitu:

1. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp1,490 trilyun atau sebesar 53,07% dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp1,730 trilyun atau sebesar 58,59% dari total penerimaan.
3. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp1,914 trilyun atau sebesar 61,16% dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2019 sebesar Rp1,451 trilyun atau sebesar 50,84% dari total penerimaan.
5. Proyeksi Tahun 2020 sebesar Rp1,945 trilyun atau sebesar 57,46% dari total penerimaan.
6. Proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp1,828 trilyun atau sebesar 55,74% dari total penerimaan.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pendapatan Daerah	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.682.185.884.679,52	3.138.440.609.429,06	3.107.840.609.429,06
2	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	478.521.631.855,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	172.294.201.191,48	247.913.482.250,64	194.394.681.026,64
3	Penerimaan pinjaman daerah	1.195.256.286,00	0	0	0	0	0
4	TOTAL PENERIMAAN = 1+2+3	2.808.814.344.147,82	2.953.283.592.672,56	3.130.453.041.802,21	2.854.480.085.871,00	3.386.354.091.679,70	3.302.235.290.455,70
	Belanja Wajib dan Mengikat						
5	Belanja pegawai	1.097.707.839.367,23	950.142.604.624,18	925.330.430.469,00	1.063.232.350.778,00	1.089.455.639.323,70	1.098.455.639.323,70
6	Belanja bunga	3.021.102.416,00	2.358.580.867,00	1.574.098.880,00	1.870.801.224,00	1.870.801.224,00	0
7	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	43.485.614.551,00	48.747.897.642,00	61.204.231.336,00	62.545.217.425,00	69.441.025.000,00	75.031.025.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Daerah	166.884.663.874,24	214.565.611.722,80	220.758.430.850,00	268.544.031.154,00	272.919.732.200,00	278.439.732.200,00
9	Pembayaran pokok utang	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	0
10	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT = 5+6+7+8+9	1.318.119.220.208,47	1.222.834.694.855,98	1.215.887.191.535,00	1.403.212.400.581,00	1.440.707.197.747,70	1.451.926.396.523,70
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN = 3-9	1.490.695.123.939,35	1.730.448.897.816,58	1.914.565.850.267,21	1.451.267.685.290,00	1.945.646.893.932,00	1.828.877.893.932,00
	% Kapasitas riil thd total penerimaan	53,07	58,59	61,16	50,84	57,46	55,74

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2019

BAPPEDA SLEMAN

Kapasitas riil kemampuan keuangan pada tahun 2020 diprediksi meningkat 6,62% dari tahun 2019 dikarenakan mulai tahun 2020, terdapat Dana Keistimewaan DIY yang merupakan Bantuan Propinsi DIY kepada Kabupaten Sleman sebesar Rp355.924.140.000,- Adapun pada tahun 2021 kapasitas riil kemampuan keuangan menjadi sedikit turun dengan asumsi bahwa Dana Keistimewaan DIY yang akan diperoleh Kabupaten Sleman sebesar Rp256.424.140.000,- Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun ke depan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2016-2021.

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2016-2021 (Rupiah)

URAIAN	KAPASITAS KEUANGAN	PRIORITAS I	PRIORITAS II
Realisasi Tahun 2016	1.490.695.123.939,35	1.074.450.697.393,77	416.244.426.546
Realisasi Tahun 2017	1.730.448.897.816,58	1.189.950.371.638,54	540.498.526.178
Realisasi Tahun 2018	1.914.565.850.267,21	1.289.226.062.576,06	253.611.658.434
Anggaran Tahun 2019	1.451.267.685.290,00	1.294.162.474.911,00	157.105.210.379
Proyeksi Tahun 2020	1.945.646.893.932,00	1.708.421.093.932,00	158.493.800.000
Proyeksi Tahun 2021	1.828.877.893.932,00	1.686.921.093.932,00	141.956.800.000

Sumber: Hasil Analisis

Dari sajian data dan informasi pada tabel di atas, maka rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas sebagaimana tabel berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 3.19
Kerangka Alokasi Belanja Tahun 2016 – 2021

TAHUN	Belanja Wajib dan Mengikat (Rp)		Belanja Prioritas I (Rp)		Belanja Prioritas II (Rp)	
2016	1.318.119.220.208	46,93%	1.074.450.697.394	38,25%	416.244.426.546	14,82%
2017	1.222.834.694.856	41,41%	1.189.950.371.639	40,29%	540.498.526.178	18,30%
2018	1.215.887.191.535	38,84%	1.289.226.062.576	41,18%	625.339.787.691	19,98%
2019	1.403.212.400.581	49,16%	1.294.162.474.911	45,34%	157.105.210.379	5,50%
2020	1.440.707.197.747	42,54%	1.708.421.093.932	50,45%	237.225.800.000	7,01%
2021	1.451.926.396.524	44,26%	1.686.921.093.932	51,42%	141.956.800.000	4,33%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel di atas, kerangka alokasi belanja tahun 2016 – 2021 dijelaskan sebagai berikut:

a. Alokasi Belanja Wajib dan Mengikat diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang.

b. Alokasi pengeluaran prioritas I adalah semua Belanja Langsung, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan *(dedicated)* Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

c. Alokasi pengeluaran prioritas II, berkaitan dengan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga dan penyertaan modal daerah. Pengalokasian dana pada prioritas II baru akan dipenuhi setelah keperluan dana pada alokasi belanja wajib dan mengikat dan prioritas I dipenuhi terlebih dahulu.

Setelah mengetahui proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan,berikut kami sajikan realisasi dan proyeksi APBD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAPEDA SLEMAN

Tabel 3.20
Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN							
I	**Pendapatan asli daerah**	**717.151.176.028,57**	**825.637.751.681,82**	**894.272.961.557,85**	**867.643.469.527,46**	**942.974.054.277,00**	**1.006.874.054.277,00**
1	Pajak daerah	407.675.230.792,56	528.453.215.727,18	596.559.264.609,83	581.800.000.000,00	637.000.000.000,00	690.000.000.000
2	Retribusi daerah	43.217.124.390,15	48.706.088.818,85	47.760.996.920,00	43.669.694.250,00	57.410.250.000,00	60.310.250.000
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)	42.031.674.753,95	36.292.784.407,97	34.654.443.121,29	38.579.263.688,00	48.579.263.688,00	51.579.263.688
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	224.227.146.091,91	212.185.662.727,82	215.298.256.906,73	203.594.511.589,46	199.984.540.589,00	204.984.540.589
II	**Dana perimbangan**	**1.321.660.504.762,00**	**1.335.572.521.296,00**	**1.368.717.993.794,00**	**1.411.921.108.000,00**	**1.436.921.108.000,00**	**1.441.921.108.000,00**
1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	66.604.303.616,00	60.499.721.072,00	50.685.431.396,00	50.014.153.000,00	50.014.153.000,00	50.014.153.000,00
2	Dana alokasi umum	1.014.310.630.000,00	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	1.026.081.409.000,00	1.051.081.409.000,00	1.056.081.409.000,00
3	Dana alokasi khusus	240.745.571.146,00	278.580.346.224,00	321.540.108.398,00	335.825.546.000,00	335.825.546.000,00	335.825.546.000,00
III	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**290.285.775.216,23**	**454.304.824.421,16**	**449.803.125.104,36**	**402.621.307.152,06**	**758.545.447.152,06**	**659.045.447.152,06**
1	Pendapatan Hibah	8.947.518.750,00	8.712.131.733,00	82.204.905.633,00	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00
2	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	205.041.339.466,23	214.366.369.383,86	234.123.774.471,36	225.084.687.853,06	225.084.687.853,06	225.084.687.853,06
3	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	8.282.200.000,00	17.655.805.907,00	786.747.000,00	0	-	-
	- Dana Keistimewaan DIY					355.924.140.000,00	256.424.140.000,00

BAPPEDA SLEMAN

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68.014.717.000,00	133.444.737.000,00	132.687.698.000,00	170.882.517.000,00	170.882.517.000,00	170.882.517.000,00
	a. Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	52.588.927.000,00	51.500.000.000,00	71.847.341.000	71.847.341.000,00	71.847.341.000,00
	b. Dana Desa dari APBN	63.014.717.000,00	80.855.810.000,00	81.187.698.000,00	99.035.176.000	99.035.176.000,00	99.035.176.000,00
5	Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)	0	80.125.780.397,30	0	0	0	0
6	DPIPD	0	0	0	0	0	0
	TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.329.097.456.006,80**	**2.615.515.097.398,98**	**2.712.794.080.456,21**	**2.682.185.884.679,52**	**3.138.440.609.429,06**	**3.107.840.609.429,06**
BELANJA							
I	**Belanja Tidak Langsung**	**1.380.996.251.480,47**	**1.299.646.259.688,98**	**1.290.867.655.413,00**	**1.506.722.610.960,00**	**1.552.180.997.747,70**	**1.547.308.196.523,70**
1	Belanja pegawai	1.097.707.839.367,23	950.142.604.624,18	925.330.430.469,00	1.063.232.350.778,00	1.089.455.639.323,70	1.098.455.639.323,70
2	Belanja bunga	3.021.102.416,00	2.358.580.867,00	1.574.098.880,00	1.870.801.224,00	1.870.801.224,00	0
3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja hibah	40.024.505.000,00	47.965.959.800,00	52.751.833.680	68.669.600.000,00	92.677.800.000,00	67.565.800.000,00
5	Belanja bantuan sosial	29.383.789.000,00	34.694.686.100,00	29.112.937.900,00	22.209.667.000,00	22.316.000.000,00	24.316.000.000,00
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	43.485.614.551,00	48.747.897.642,00	61.204.231.336,00	62.545.217.425,00	69.441.025.000,00	75.031.025.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Daerah	166.884.663.874,24	214.565.611.722,80	220.758.430.850,00	268.544.031.154,00	272.919.732.200,00	278.439.732.200,00
8	Belanja tidak terduga	488.737.272,00	1.170.918.933,00	135.692.298,00	19.650.943.379,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
II	**Belanja Langsung**	**1.074.450.697.393,77**	**1.189.950.371.638,54**	**1.289.226.062.576,06**	**1.294.162.474.911,00**	**1.708.421.093.932,00**	**1.686.921.093.932,00**
1	Belanja pegawai						

BAPPEDA SLEMAN

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		165.659.692.724,00	178.352.823.667,00	211.105.892.006,00	201.747.887.230,00		
2	Belanja barang dan jasa	564.788.678.438,44	630.970.493.075,82	666.807.766.001,50	670.931.907.256,00		
3	Belanja modal	344.002.326.231,33	380.627.054.895,72	411.312.404.568,56	421.482.680.425,00		
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**2.455.446.948.874,24**	**2.489.596.631.327,52**	**2.580.093.717.989,06**	**2.800.885.085.871,00**	**3.260.602.091.679,70**	**3.234.229.290.455,70**
	defisit	(126.349.492.867,44)	125.918.466.071,46	132.700.362.467,15	(118.699.201.191,48)	(122.161.482.251)	(126.388.681.027)
PEMBIAYAAN							
I	**Penerimaan pembiayaan**	**479.716.888.141,02**	**337.768.495.273,58**	**417.658.961.346,00**	**172.294.201.191,48**	**247.913.482.250,64**	**194.394.681.026,64**
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	478.521.631.855,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	172.294.201.191,48	247.913.482.250,64	194.394.681.026,64
2	Penerimaan pinjaman daerah	1.195.256.286,00	0	0	0	0	0
3	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0
II	**Pengeluaran pembiayaan**	**15.598.900.000,00**	**46.027.999.999,04**	**147.316.757.415,00**	**113.693.000.000,00**	**125.752.000.000,00**	**68.006.000.000,00**
1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	8.578.900.000,00	39.007.999.999,04	140.296.757.415,00	106.673.000.000,00	118.732.000.000,00	68.006.000.000,00
3	Pembayaran pokok utang	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**464.117.988.141,02**	**291.740.495.274,54**	**270.342.203.931,00**	**58.601.201.191,48**	**122.161.482.250,64**	**126.388.681.026,64**

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2019

BAPPEDA

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Kebijakan Internasional

4.1.1. Telaahan SDG's

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB. SDG's ini mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur sampai dengan tahun 2030. Penerapan SDG's di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan amanat Perpres tersebut, Pemda DIY menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 – 2022. menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDG's, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

   Sasaran dalam Tujuan 7 ini tidak bisa dijabarkan lebih lanjut di Kabupaten Sleman karena kewenangan ada di tingkat propinsi.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;

BAPPEDA

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan.

    Sasaran dalam Tujuan 14 ini tidak bisa dijabarkan lebih lanjut di Kabupaten Sleman karena kondisi geografis Kabupaten Sleman yang tidak memiliki laut;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian indikator SDG's pada tahun 2018 dan target tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menekan angka kelahiran dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi pada perempuan usia 15 – 49 tahun. Pada tahun 2018, prevalensi peserta KB aktif baru mencapai 76,51%, sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 79,50%. Untuk mengurangi angka kemiskinan juga dilakukan dengan menurunkan angka *unmeet need*. *Unmet need* dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi pengguna. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat

BAPPEDA SLEMAN

kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengguna. Selain pemakaian kontrasepsi, jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak juga menjadi sasaran tujuan 1. Pada tahun 2018, persentase kawasan kumuh yang tertangani mencapai 70,03%, sedangkan target pada tahun 2021 semua kawasan kumuh sudah tertangani 100%;

2. Salah satu indikator pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang baik adalah prevalensi balita kurus rendah. Pada tahun 2018, cakupan status gizi buruk mencapai 0,52%. Jumlah ini pada tahun 2021 perlu diturunkan mencapai 0,4% dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gizi serta pemberian asupan makanan tambahan dan suplemen. Anak balita beresiko kurus ini akan mudah terinfeksi penyakit, kurang aktif, prestasi belajar menurun serta adanya gangguan tingkah laku. Selain itu, perlu meningkatkan cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif dari 81,73% (tahun 2018) menjadi 86% pada tahun 2021;
3. Penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat dan menjadi refleksi pengetahuan ibu soal kehamilan, perawatan semasa hamil dan asupan gizi. Pada tahun 2018, angka kematian ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup dan bayi per 1.000 kelahiran hidup sudah melampaui target tahun 2018 namun untuk mempertahankan pada angka tersebut masih membutuhkan anggaran terutama pada urusan kesehatan;
4. Prevalensi penyakit menular perlu menjadi perhatian. Seperti, penderita HIV. Meskipun pada tahun 2018 angkanya masih di bawah target, tetapi mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan ini merupakan angka tertinggi di DIY. Begitu pula dengan prevalensi TBC yang angkanya masih cukup tinggi, 30,88.
5. Kesetaraan gender yang ditunjukkan dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD (pada tahun 2018 baru mencapai 26%) karena harapannya parlemen perempuan mampu menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu

BAPPEDA SLEMAN

prioritas kebijakan, diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan;

6. Ketersediaan lapangan kerja dan adanya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak akan mengurangi jumlah penganggur di Kabupaten Sleman. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 5,76% (target 2021 5,4%). Secara umum peningkatan investasi bisa memperluas lapangan kerja, karena jika invesatasi meningkat maka jumlah produksi barang atau jasa pun akan meningkat. Selain dengan membuka lapangan kerja, pengangguran juga dapat dikurangi dengan memberikan bekal ketrampilan dan keahlian untuk berwirausaha; serta
7. Terkait dengan kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel, Kabupaten Sleman harus terus meningkatkan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), meskipun pada tahun 2018, sudah mendapat nilai 81,72 dengan predikat A.

4.1.2. Telaahan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA diawali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kula Lumpur, yang menghasilkan sebuah visi yang sama antar negara negara ASEAN yakni ASEAN vision 2020. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Secara umum tujuan dari MEA adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat di Asia Tenggara (ASEAN), yang diuraikan secara lebih rinci pada Deklarasi Cebu, sebagaimana berikut:

1. Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN, dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal dan investasi, sehingga menciptakan pusat produksi untuk negara-negara ASEAN;
2. ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan

BAPPEDA SLEMAN

dalam hal ekonomi (kompetisi ekonomi), perlindungan konsumen, HAKI, perpajakan, aktivitas *e-commerce* serta pengempangan infrastruktur;

3. Pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN khsusnya pada sasaran utama yakni revitalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM); serta
4. Mengintegrasikan ekonomi pada kawasan asia tenggara dengan ekonomi global dimana tujuan meningkatkan peran ASEAN dalam kebijakan global, sehingga menjadi sisi positif bagi negara-negara ASEAN, dikarenakan masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.

Dampak positif dengan diberlakukannya MEA adalah:

1. MEA akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan *multiplier effect* dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi;
2. Kondisi pasar tunggal membuat kemudahan dalam hal pembentukan *joint venture* (kerjasama) antar perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah;
3. MEA menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara;
4. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam perpindahan tenaga kerja/ sumber daya manusia; serta
5. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.

Meskipun tujuan MEA adalah membuka kesempatan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan taraf perekonomian, namun tidak dipungkiri, tingkat kompetisi pun semakin tinggi. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus dilakukan adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

   Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah meningkatkan kualitas pendidikan sehingga tenaga kerja yang dihasilkan mempunyai kualitas yang setara atau lebih tinggi dari

BAPPEDA SLEMAN

tenaga kerja luar. Daya saing tenaga kerja dicerminkan oleh keahlian dan keterampilan pekerja merespon pasar yang semakin terbuka. Kecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah dan produksi massal, namun fleksibel untuk merespon berbagai kebutuhan tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian (*multitasking*), termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentuk kontrak maupun *part time*. Pasar tenaga kerja juga dituntut lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar tenaga kerja global. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan, karena keduanya berbanding lurus dengan produktivitas tenaga kerja.

2. Penguatan sektor koperasi dan usaha mikro kecil (KUMK)

   Faktor penghambat untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah SDM pelaku bagi koperasi dan usaha mikro kecil (KUMK) masih rendah. Yang harus dilakukan adalah peningkatan wawasan pelaku usaha terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUMK lokal serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dan harapannya dapat menghasilkan produk yang berkualitas, berstandar dan berdaya saing tinggi. Selain itu, masyarakat dan pemerintah harus punya komitmen yang kuat untuk mendukung program penggunaan produk dalam negeri.

3. Peningkatan Infrastruktur

   Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan.

4. Reformasi pemerintahan dan kelembagaan

   Pemerintah menjamin iklim kompetisi yang baik dimana tidak ada praktek tidak terpuji seperti kolusi, monopoli dan penetapan harga yang berpotensi menyingkirkan pesaing dari pasar. Lembaga perdagangan bekerja dengan baik sehingga arus pengadaan dan penyaluran barang, baik di dalam negeri maupun

keperluan ekspor. Kemudahan memperoleh informasi perdagangan bagi para pengusaha. Selain itu, juga kerjasama antar instansi terkait agar dapat menyamakan persepsi dan langkah dalam rangka meningkatkan ekspor serta perdagangan yang lancar.

4.2. Kebijakan Nasional (RPJMN)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengangkat visi "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dari visi tersebut kemudian ditetapkan 7 (tujuh) misi untuk mewujudkannya yang meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 9 (sembilan) agenda Nawacita dengan sub agenda sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dengan sub agenda:
   a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif;
   b. Penguatan sistem pertahanan;
   c. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

BAPPEDA SLEMAN

d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran;
f. Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional;
g. Meminimalisasi dampak globalisasi;
h. Membangun industri pertahanan nasional;
i. Membangun Polri yang professional; serta
j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sub agenda:
   a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
   b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
   c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
   d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); serta
   e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dengan sub agenda:
   a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris;
   b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia; serta
   c. Penanggulangan kemiskinan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan sub agenda:
   a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan;
   b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
   c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
   d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah; serta
   e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

BAPPEDA SLEMAN

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan sub agenda:
   a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
   b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
   c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; serta
   d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub agenda:
   a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
   b. Membangun transportasi massal perkotaan;
   c. Membangun infrastruktur/prasarana dasar;
   d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
   e. Menguatkan peran investasi;
   f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
   g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi;
   h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
   i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional; serta
   j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
7. Peningkatan kedaulatan pangan, dengan sub agenda:
   a. Peningkatan kedaulatan pangan;
   b. Peningkatan ketahanan air;
   c. Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; serta
   d. Penguatan sektor keuangan.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dengan sub agenda pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karkater yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dengan sub agenda meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara.

BAPPEDA SLEMAN

Kegiatan strategis jangka menengah pada tahun 2015 -2019 di wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, melalui pembangunan jalan lingkar Kota Yogyakarta (Jogja *outer ring road*). Dalam hal ini, Kabupaten Sleman ikut terlibat dalam persiapan lahan;
2. Pengembangan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel, melalui strategi pengembangan rel kereta api pendukung bandara termasuk dalam hal ini pembangunan *mono rail transport*, pengembangan *bus rapid transit*. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan menghidupkan kembali Stasiun Patukan;
3. Pembangunan *techno park* oleh Kemeterian Kelautan dan Perikanan. Meskipun Kabupaten Sleman tidak mempunyai laut, namun mempunyai kawasan minapolitan, khususnya budidaya ikan yang berada di Kecamatan Ngemplak dan Berbah dengan 75 kelompok pokdakan, yang 30% anggotanya berasal dari KK miskin dan usia remaja;
4. Penyediaan sistem penyediaan pemantauan gunung api untuk mengurangi resiko bencana karena Kabupaten Sleman merupakan wilayah letusan gunung api dengan intensitas tinggi. Selain itu, dibangun juga kantong lahar Kali Gendol, pembangunan dan rehabilitasi sabo/dam pengendali sedimen;
5. Peningkatan perkuatan tebing dan pintu klep Kali Progo sebagai antisipasi longsornya tebing di kawasan permukiman;
6. Untuk pemenuhan air minum, DIY bersama dengan Kartamantul membangun sistem penyediaan air minum regional dengan mengambil air baku dari Karang Talun Kali Progo. Oleh karena itu pemerintah membangun waduk dan *long storage* Karang Talun; serta
7. Pembangunan embung kecil/telaga untuk konservasi dan perlindungan lingkungan. Embung merupakan waduk yang dibangun untuk menampung air hujan sehingga menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air di musim kemarau. Untuk pembangunan embung diperlukan lahan yang cukup luas, maka sebagai alternatif digunakan tanah kas desa (TKD).

BAPPEDA SLEMAN

4.3. Kebijakan Provinsi (RPJMD DIY)

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, visi pembangunan DIY adalah "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi, tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan, Sasaran RPJMD DIY
Tahun 2017 – 2022

No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2022
1	Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban		
	1.1. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin kebhineka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI	6,2
	1.1.1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	IPM	81,68
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,32
	1.1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Indeks Gini	0,3635
		Persentase angka kemiskinan	7
	1.1.3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	12,04
	1.1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	5,34
		IKLH	66,15
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	82,5
		Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	54,44
	1.1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4489
2	Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis		
	2.1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks reformasi birokrasi	76 (A)
	2.1.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP
		Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	A

BAPPEDA SLEMAN

No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2022
	2.1.2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	86,96
	2.1.3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	21.877

Sumber : RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengann RPJMD DIY adalah:

1. PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2021 diharapkan senilai Rp39.531.605,34 juta. Hal ini didukung dengan adanya proyek-proyek besar seperti pembangunan JORR, pembangunan *underpass* Gejayan, Monjali dan Kentungan dan pengembangan jalan Selokan Mataram, pengembangan SPAM Regional, pembangunan stasiun *interchange*, pembangunan jaringan air bersih serta pengembangan jalan bebas hambatan. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 sebesar Rp31.155.675,6 juta. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017-2022 diharapkan mencapai 5,75%. Sedangkan capaian tahun 2017 baru mencapai 5,35%;
2. IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2021 diharapkan mencapai 83,86, sedangkan tahun 2017 mencapai 82,85. Dilihat dari komponen pembentuk IPM, rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,65 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Sleman bersekolah sampai kelas 1 atau 2 pendidikan menengah. Dan harapan lama sekolah mencapai 16,48 tahun. Komponen lainnya adalah angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita riil per hari. Pada tahun 2017, angka harapan hidup mencapai 74,63 tahun. Angka ini dipengaruhi oleh cakupan pelayanan kesehatan. Sedangkan pengeluaran perkapita riil per hari baru mencapai Rp15.365,00; serta
3. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 diharapkan mencapai 6,01%. Dan pada tahun 2017, mencapai 8,13%. Hal yang paling efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.

BAPPEDA SLEMAN

Proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017 – 2022 yang berlokasi di Kabupaten Sleman adalah:

1. Pembangunan jalan dan jembatan
   a. Pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS);
   b. Pembangunan Jogjakarta *Outer Ring Road* (JORR);
   c. Pembangunan *underpass* Gejayan, Monjali dan Kentungan;
   d. Pembangunan jalan/jembatan Prambanan – Gading; dan
   e. Pengembangan jalan selokan Mataram;
2. SPAM regional;
3. Pembangunan stasiun *interchange*, pengembangan Stasiun Patukan;
4. Pengembangan pengelolaan sampah dengan mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Tepadu (TPST Piyungan); serta
5. Pengembangan jalan bebas hambatan Jogjakarta - Solo, Bawen - Jogjakarta dan Jogjakarta – Cilacap.

4.4. Kebijakan Kabupaten

4.4.1. Telaahan RPJPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sleman adalah ”Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing”. Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan misi:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; serta
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis.

Kondisi yang ingin diwujudkan dalam dua puluh tahun kedepan sebagai hasil pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah rata-rata mencapai 85. Pada tahun 2018, IKM mencapai 81,39. Ada beberapa hal yang menjadi unsur penilaian, diantaranya

BAPPEDA SLEMAN

persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran, serta sarana prasarananya. Walaupun sudah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat

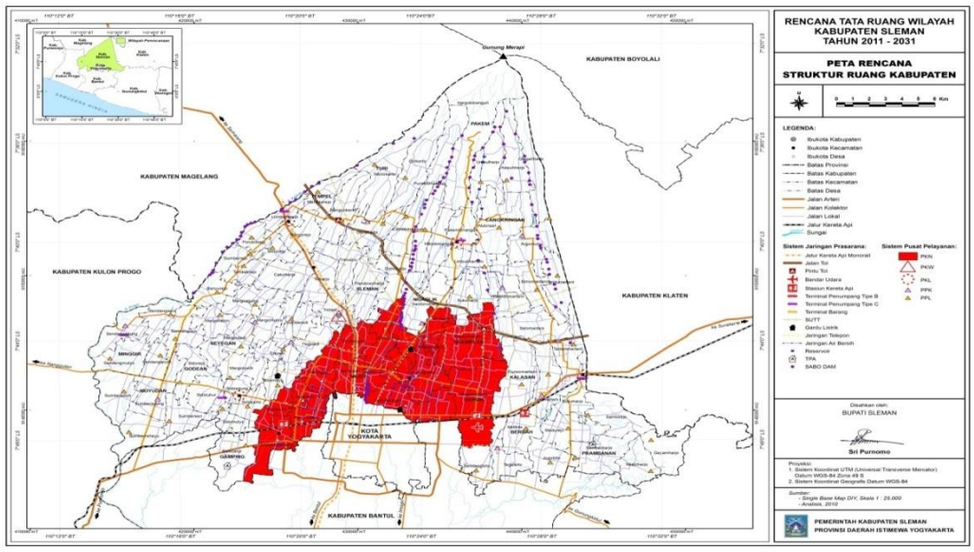
2. Indeks pembangunan manusia meningkat dari peringkat 30 menjadi peringkat 10 besar nasional. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Sleman mencapai 82,85 menempati ranking 1 kabupaten se-Indonesia dan ranking 5 dari kota kabupaten se-Indonesia;
3. Pendapatan perkapita meningkat dari 600 US$ per tahun menjadi 2.500 US$ per tahun. Pada tahun 2017, PDRB atas dasar harga berlaku perkapita sebesar Rp33.588.000,00 atau setara dengan 2.399 US$;
4. Koefisien gini yang pada awal tahun RPJP pada angka 0,15, diusahakan tetap pada posisi ketimpangan rendah. Pada tahun 2017, indeks gini Kabupaten Sleman pada angka 0,41. Indeks gini ini cenderung meningkat karena lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat lapisan bawah. Sementara masyarakat lapisan menengah ke atas, tumbuh lebih cepat tingkat pendapatannya; serta
5. Indeks williamson yang pada awal tahun RPJP berada pada angka 0,03, diusahakan tetap pada posisi pemerataan pembangunan yang sangat baik. Dasar perhitungan indeks williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Indeks williamson berdasarkan PDRB perkapita antar kecamatan pada tahun 2017 adalah 0,41. Angka tersebut menunjukkan bahwa kurang meratanya alokasi dan persebaran ekonomi karena kegiatan ekonomi masih terpusat (terkonsentrasi) hanya pada beberapa wilayah tertentu.

BAPPEDA SLEMAN

4.4.2. Telaahan RTRW Kabupaten Sleman

4.4.2.1. Telaahan Terhadap Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.



Gambar 4.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Sumber: RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031

A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

1. Pengembangan Sistem Perkotaan

   Pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Sleman meliputi PKN, PKW, PKL dan PPK.

   a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), meliputi:

      1) kawasan perkotaan Kecamatan Gamping meliputi: Desa Ambarketawang; Desa Banyuraden; Desa Nogotirto; dan Desa Trihanggo;
      2) kawasan perkotaan Kecamatan Godean berada di Desa Sidoarum;
      3) kawasan perkotaan Kecamatan Mlati meliputi: Desa Sendangadi; dan Desa Sinduadi;

4) kawasan perkotaan Kecamatan Depok meliputi: Desa Caturtunggal; Desa Maguwoharjo; dan Desa Condongcatur;
5) kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak berada di Desa Wedomartani; serta
6) kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik meliputi: Desa Sariharjo; Desa Sinduharjo; dan Desa Minomartani.

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), berada di Kecamatan Sleman berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup kabupaten.

c. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu pada lingkup satu atau lebih kecamatan meliputi:
1) kawasan perkotaan Kecamatan Godean;
2) kawasan perkotaan Kecamatan Prambanan;
3) kawasan perkotaan Kecamatan Tempel;
4) kawasan perkotaan Kecamatan Pakem.

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi:
1) kawasan perkotaan Kecamatan Moyudan;
2) kawasan perkotaan Kecamatan Minggir;
3) kawasan perkotaan Kecamatan Seyegan;
4) kawasan perkotaan Kecamatan Mlati;
5) kawasan perkotaan Kecamatan Berbah;
6) kawasan perkotaan Kecamatan Kalasan;
7) kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak;
8) kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik;
9) kawasan perkotaan Kecamatan Turi;
10) kawasan perkotaan Kecamatan Cangkringan.

2. Pengembangan Sistem Perdesaan

Pengembangan sistem perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pengembangan sistem perdesaan diwujudkan berdasarkan sistem pusat permukiman perdesaan danfungsi permukiman perdesaan.

BAPPEDA SLEMAN

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

1. Pengembangan Sistem Prasarana Utama

   a. Sistem jaringan transportasi darat

      Dengan mengacu pada sistem jaringan dan fungsi jalan, maka di Kabupaten Sleman terdapat sistem jaringan dan fungsi jalan bebas hambatan, jalan arteri primer, jalan kolektor dan jalan lokal. Jalan bebas hambatan meliputi:

      1) jalan bebas hambatan Yogyakarta - Bawen melewati Tempel, Turi, Pakem, Ngaglik, dan Ngemplak;
      2) jalan bebas hambatan Yogyakarta - Surakarta melewati Ngemplak dan Kalasan.

      Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: terminal penumpang; terminal barang; dan jembatan timbang.

      1) Terminal penumpang meliputi:
         a) Tipe B berada di Kecamatan Mlati;
         b) Tipe C berada di Minggir, Godean, Gamping, Depok, Prambanan, Tempel, dan Pakem.
      2) Terminal barang berada di Kalasan dan Tempel; serta
      3) Jembatan timbang berada di Berbah dan Kalasan.

      Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek perkotaan, jaringan trayek perdesaan dan jaringan trayek angkutan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Sedangkan untuk jaringan transportasi perkotaan meliputi pengembangan jaringan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi KPY dan pengembangan jaringan perkotaan yang menghubungkan Prambanan, Wedomartani, Sleman, Pakem, Rejondani, serta Godean.

   b. Sistem jaringan perkeretaapian

      Jalur perkeretaapian meliputi: jalur kereta api Jakarta - Yogyakarta - Surabaya, melewati wilayah Moyudan, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, dan Prambanan; serta jalur kereta api Parangtritis - Yogyakarta - Borobudur, melewati wilayah Mlati, Sleman, dan Tempel.

BAPPEDA SLEMAN

Sedangkan untuk pengembangan stasiun jalur kereta api meliputi jalur kereta api Jakarta - Yogyakarta – Surabaya di stasiun Patukan Gamping, stasiun Maguwo Depok, dan stasiun Kalasan; serta jalur kereta api Parangtritis - Yogyakarta – Borobudur di stasiun Sendangadi Mlati, stasiun Tridadi Sleman dan stasiun Margorejo Tempel.

c. Sistem jaringan transportasi udara

Bandar udara Adisutjipto yang mengacu pada kebijakan pengembangan sistem jaringantransportasi udara nasional mengemban fungsi bandar udara militer dan bandar udara umum.

3. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

a. Sistem jaringan energi

1) Jaringan pipa minyak berupa saluran pipa bawah tanah yang melewati Gamping, Depok, Kalasan, dan Prambanan;
2) Jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Godean, Gamping, Mlati, Depok, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel dan Turi;
3) Jaringan Tenaga Listrik Berupa Gardu Induk meliputi gardu induk Godean; gardu induk Gejayan Depok; gardu induk Kentungan Ngaglik; dan gardu induk Medari Sleman.

b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi pengembangan jaringan kabel telepon dan pengembangan jaringan nir kabel.

c. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, ditetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber air, dan prasarana sumber daya air.

d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan

1) Sistem pelayanan air minum berupa pembangunan jaringan air minum (*drinking water*) di kawasan koridor

BAPPEDA SLEMAN

jalan arteri Yogyakarta - Surakarta mulai dari batas wilayah Kabupaten - Kota Yogyakarta sampai dengan bandar udara Adisutjipto.

2) Sistem air bersih perpipaan melayani 85% kawasan perkotaan dan 15% kawasan perdesaan; serta sistem air bersih non perpipaan melayani kawasan di luar pelayanan sistem air bersih perpipaan.
3) Sistem pengelolaan prasarana drainase meliputi: pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada KPY; pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk aliran (Sungai Kuning, Sungai Tambakbayan, Sungai Gajahwong, Sungai Boyong/ Code, Sungai Winongo, dan Sungai Bedog.
4) Sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah melalui pengelolaan secara terpadu pada kawasan KPY; pengembangan sambungan rumah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan terpadu; pengembangan air limbah domestik sistem komunal; dan sistem pengelolaan air limbah setempat.
5) Sistem pengelolaan prasarana persampahan
   a) Sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah meliputi pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) paling sedikit 40 buah di desa-desa wilayah perkotaan, pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
   b) Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang berada di Gamping, Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Ngemplak, Ngaglik, dan Sleman.
   c) Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang berada di Gamping untuk melayani

BAPPEDA SLEMAN

wilayah bagian barat dan Prambanan untuk melayani wilayah bagian timur.

6) Sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah B3

e. Jalur dan ruang evakuasi bencana

Pengembangan Jalur evakuasi bencana berada di zona aman di desa-desa terdekat dengan lokasi bencana diusahakan pada lapangan sepak bola, fasilitas pendidikan, dan balai desa. Adapun rute jalur evakuasi diusahakan se-optimal mungkin dengan memperhatikan faktor jarak, aksesibilitas dan keamanan.

1) Jalur evakuasi bencana tanah longsor berada di Gampingdan Prambanan;
2) Jalur evakuasi bencana letusan gunungapi Merapi berada di Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
3) Jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin meliputi: Kecamatan Tempel; Pakem; Turi; Ngaglik; Mlati;Depok; Ngemplak; Cangkringan; Kalasan; Prambanan; dan Kecamatan Berbah;
4) Pengembangan ruang evakuasi tersebar di seluruh kecamatan meliputi: tempat penampungan sementara dan atau hunian sementara (huntara) di Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan; tempat hunian tetap (huntap) di Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan; barak pengungsi; dan ruang-ruang terbuka; serta
5) Jalur evakuasi bencana berupa pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 4.2
Telaahan Rencana Struktur Ruang

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
A.	Perwujudan Struktur Ruang						
1	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan						
1.1.	Pengembangan PKN, PKW, PKL dan PPK	- Meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan dasar wilayah perkotaan - Meningkatkan kualitas lingkungan fisik perkotaan	PKN di 14 De-sa, 6 Keca-matan, PKW di Kecamatan Sleman, PKL di 4 kecama-tan, PPK di 11 kecamatan	*	*	*	*
1.2.	Pemindahan PPK dan PPL	- Meningkatan kualitas tata ruang kawasan rawan bencana - Pengurangan resiko benca-na	Kec. Cangkringan	*			
1.3.	Pengembangan PPL	- Meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan dasar wilayah perdesa-an - Meningkatkan kualitas lingkungan fisik perkotaan	Kab. Sleman	*	*	*	*
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana						
2.1.	Sistem Jaringan Transportasi Darat						
a.	Jaringan Jalan	- Meningkatkan sistem jaringan jalan - Meningkatkan kualitas jalan beserta bangunan pelengkapnya guna kenyamanan pengguna jalan - Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang	Kab. Sleman	*	*	*	*
b.	Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	- Meningkatkan fasilitas terminal penumpang - Meningkatkan arus lalu lintas dengan pembatasan rute dan waktu pergerakan armada angkutan barang dalam kota dengan membangun terminal barang - Meningkatkan pengawasan lalu lintas angkutan barang, terkait tonase dan jenis barang	Kab. Sleman	*	*	*	*
c.	Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Ang-kutan Jalan dan Transportasi Perkotaan	- Meningkatkan layanan transportasi umum - Mengebangkan jaringan angkutan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan sehingga tidak mengganggu jalan umum dan jalan evakuasi bencana	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.2.	Sistem Jaringan Perkeretaapian	- Mengembangkan angkutan massal berbasis rel untuk efisiensi waktu pengguna jalan - Menghidupkan kembali stasiun kereta api dalam rangka mendukung angkutan massal	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.3.	Sistem Jaringan Transportasi Udara	- Meningkatkan layanan transportasi udara	Kec. Depok, Kec. Berbah	*	*	*	*
2.4.	Sistem Jaringan Energi	- Meningkatkan jaringan minyak perpipaan - Mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik - Mengembangkan jaringan listrik	Kab. Sleman	*	*	*	*

BAPPEDA SLEMAN

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
		- Mengembangkan energi alternatif					
2.5.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	- Meningkatkan jaringan kabel telepon - Meningkatkan jaringan nirkabel - Mengembangkan dan mengatur pemanfaatan menara telepon seluler bersama	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.6.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	- Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai - Mengembangkan pengelolaan konservasi sungai - Menyediakan pengo-lahan air baku, dengan membangun embung, tandon air dan kolam penampung - Mengembangkan pengelolaan konservasi mata air - Mengembangkan pengelolaan konservasi embung - Mengendalikan secara ketat pemanfaatan ruang di daerah tangkapan air dan sekitar sumber air - Mengembangkan pengelo-laan jaringan irigasi - Mengembangkan pengelo-laan pengendali banjir - Menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola air untuk minum dan untuk pertanian	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.7.	Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan						
a.	Jaringan Air Bersih	- Mengembangkan sistem pelayanan/ jaringan air minum	Kab. Sleman	*	*	*	*
b.	Drainase	- Mengembangkan sistem pelayanan/ jaringan drainase - Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang drainase ramah lingkungan, yaitu dengan cara meresapkan kelebihan air se-besarbesarnya ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya	Kab. Sleman	*	*	*	*
c.	Prasarana Pengolah Air Limbah	- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat - Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah setempat dan individual - Menerapkan PHBS - Menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola air limbah	Kab. Sleman	*	*	*	*
d.	Prasarana Pengelolaan Persampahan	- Mengembangkan pengelolaan prasarana persampahan - Memasyarakat sistem 3R (reduce, reuse, recycle) - Menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola per-sampahan	Kab. Sleman	*	*	*	*
e.	Prasarana Pengolah Limbah B3	- Mengembangkan pengelolaan prasarana pengolahan limbah B3	Kab. Sleman	*	*	*	*

BAPPEDA SLEMAN

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
2.8.	Jalur dan Ruang Evakuasi Benca-na	- Meningkatkan dan me-ngembangkan jalur evaku-asi bencana - Meningkatkan dan mengembangkan barak pengungsi - Membangun penampungan sementara dan/ atau hunian sementara (huntara) - Membangun hunian tetap (huntap) - Mengembangkan ruang terbuka - Mengembangkan ruang evakuasi penunjang	Kab. Sleman	*	*	*	*

4.4.2.2. Telaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

A. Rencana Kawasan Lindung

1. Rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Yang termasuk dalam fungsi ini adalah kawasan resapan air, kurang lebih seluas 23.683 hektar meliputi Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Seyegan, Mlati, Ngemplak, Ngaglik, Sleman dan Tempel.
2. Rencana kawasan perlindungan setempat. Yang termasuk dalam kawasan ini meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau atau waduk (berupa kawasan sekitar embung), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
3. Rencana kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
   a. Kawasan pelestarian alam berada di Kecamatan Gamping dan kawasan Taman Nasional Gunungapi Merapi;
   b. Kawasan cagar budaya berupa kawasan situs Kraton Ambarketawang berada di Kecamatan Gamping dan kawasan peninggalan arkeologis berada di Kecamatan Prambanan, Kalasan, Ngemplak, dan Sleman.
4. Rencana kawasan rawan bencana alam
   a. Kawasan rawan bencana tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 hektar berada di Kecamatan Gamping, dan Prambanan. Kawasan rawan longsor banyak diketemukan pada daerah dengan kelerengan tinggi (>40%), materialnya

BAPPEDA SLEMAN

lepas-lepas, mempunyai bidang gelincir, yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi.

b. Kawasan rawan bencana kekeringan seluas kurang lebih 1.969 hektar pada daerah dengan jenis tanah kapur di Kecamatan Prambanan

5. Rencana Kawasan Lindung Geologi

a. Kawasan rawan bencana gunung api meliputi: area terdampak langsung letusan merapi 2010 (1.578 hektar); KRB Merapi III (3.302 hektar); KRB Merapi II (3.279 hektar); serta KRB Merapi I (1.357 hektar) tersebar di Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan.

b. Kawasan rawan gempa bumi sesar mayor berupa jalur patahan Sesar Opak dan sesar minor, seluas kurang lebih 13.782 hektar tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan daerah yang rawan adalah Kecamatan Prambanan dan Berbah.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan hutan rakyat merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan hutan rakyat yang terdapat di Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 3.171 hektar;
2. Kawasan peruntukan pertanian meliputi: peruntukan pertanian lahan basah (pertanian tanaman pangan) dengan luas 21.113 hektar berupa komoditas padi, jagung, kedeleai, kacang tanah dan umbin-umbian; peruntukan pertanian lahan kering (peruntukan hortikultura) dengan luas 7.643; kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 9.117 berupa komoditas tembakau, kopi, mete, cengkeh, kelapa, tebu, coklat, dan mendong; kawasan peternakan yang berupa ternak besar, ternak kecil dan unggas; serta pengembangan kawasan agropolitan di wilayah kabupaten yang diatur dengan

BAPPEDA SLEMAN

peraturan bupati sedangkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) diatur dengan peraturan daerah;

3. Kawasan peruntukan perikanan meliputi: budidaya perikanan darat tersebar di seluruh kecamatan; dan pengembangan perikanan dengan konsep minapolitan di Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak;
4. Kawasan peruntukan pertambangan, di Kabupaten Sleman berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
5. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri menengah serta peruntukan kecil dan mikro;
6. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: kawasan peruntukan wisata alam (berupa keragaman flora dan fauna, dan pemandangan alam Gunungapi Merapi); pariwisata budaya (berupa cagar budaya); wisata perkotaan (berupa wisata pendidikan, ilmu pengetahuan, dan belanja); dan wisata perdesaan (berupa wisata pertanian dan kehidupan perdesaan);
7. Kawasan peruntukan permukiman, meliputi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 12.590 hektar; dan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 10.232 hektar; serta
8. Kawasan peruntukan lainnya, yang terdiri dari kawasan pertahanan dan keamanan negara serta kawasan pendidikan tinggi.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 4.3
Telaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
1	Perwujudan Kawasan Lindung						
1.1.	Kawasan yang memberikan per-lindungan terha-dap kawasan ba-wahannya	- Mengidentifikasi dan mengin-ventarisasi kawasan resapan air - Meningkatkan perlindung-an dan konservasi sumber daya air - Mengendalikan kegiatan bu-didaya - Menerapkan sanksi terha-dap pelanggaran tata ru-ang	Kab. Sleman	*	*	*	*
1.2.	Kawasan Perlindungan Setempat	- Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sempadan sungai - Meningkatkan pengelolaan dan konser-vasi sempadan mata air dan embung - Mengembangkan dan me-ningkatkan pengelolaan RTH perkotaan - Mengembalikan fungsi lin-dung yang telah meng-alami kerusakan - Mengendalikan kegiatan bu-didaya - Mengendalikan pemanfaatan air untuk mempertahankan kuantitas dan kualitasnya	Kab. Sleman	*	*	*	*
1.3.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	- Meningkatkan perlindung-an, pengelolaan dan konservasi Kawasan TNGM - Mengembangkan dan me-ningkatkan pengelolaan keka-yaan dan keragaman budaya - Menata kawasan cagar bu-daya berbasis kearifan lokal - Melarang kegiatan budi-daya yang tidak berkaitan dengan fungsinya - Memadukan kepentingan pe-lestarian dan kepariwi-sataan	Kab. Sleman	*	*	*	*
1.4.	Kawasan Rawan Bencana Alam	- Meningkatkan kesiapsiagaan dan pence-gahan bencana tanah longsor - Mengembangkan prasarana dan sarana evakuasi bencana - Meningkatkan kesiapsia-gaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana kekeringan	Gamping, Prambanan Diluar KRB Prambanan	*	*	*	*
1.5.	Kawasan Lin-dung Geologi	- Meningkatkan kesiapsia-gaan bencana Gunungapi Merapi - Meningkatkan kesiap-siagaan bencana gempa bumi - Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana - Menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lin-dung - Mengatur kegiatan hunian untuk keselamatan manu-sia dan mitigasi bencana	KRB III, KRB II, KRB I Kab. Sleman	*	*	*	*

BAPPEDA SLEMAN

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
2	Perwujudan Kawasan Budidaya						
2.1.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	- Mempertahankan luasan kawasan hutan rakyat - Meningkatkan pemanfaatan potensi sum-ber daya hutan	10 Kec	*	*	*	*
2.2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	- Mempertahankan luasan kawasan lahan basah dan lahan kering - Meningkatkan produksi pertanian tanaman pa-ngan - Meningkatkan produksi hortikultura - Meningkatkan produksi perkebunan - Meningkatkan produksi peternakan - Mengembangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) - Mengembangkan kawasan agropolitan - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.3.	Kawasan Peruntukan Perikanan	- Meningkatkan produksi perikanan darat dengan mempertimbangkan keseimbangan ketersediaan air - Mengembangkan Minapolitan	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	- Meningkatkan pembinaan dan pengawas-an bidang pertambangan - Meningkatkan pengawas-an dan penertiban kegi-atan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.5.	Kawasan Peruntukan Industri	- Mengembangkan industri kecil dan menengah - Meningkatkan penataan struktur industri - Mengembangkan sentra-sentra industri potensial	Kab. Sleman Gamping, Berbah, Kalasan Kab. Sleman	*	*	*	*
2.6.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	- Mengembangkan obyek dan daya tarik wi-sata - Mengembangkan prasa-rana dan sarana pariwi-sata - Memanfaatkan obyek wi-sata dengan bijaksana	Kab. Sleman	*	*	*	*
2.7.	Kawasan Peruntukan Permukiman	- Mengembangkan permukiman perkotaan - Mengembangkan permukiman perdesaan - Mengintensifkan lahan permukiman dengan pengembangan ke atas dan ke samping - Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman - Menjaga kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan aman	Kab. Sleman	*	*	*	*

BAPPEDA SLEMAN

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
		- Meningkatkan penghijauan atau ruang terbuka hijau di kawasan permukiman sebagai peresapan air hujan					
2.8.	Kawasan Peruntukan Lainnya	- Mengendalikan perubahan peruntukan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara - Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pendidikan tinggi	Gamping Depok, Berbah KPY	*	*	*	*

4.4.2.3. Telaahan Terhadap Rencana Strategis

A. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. merupakan aset kabupaten berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
3. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian kabupaten;
4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. rawan bencana alam; atau
7. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

B. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;

BAPPEDA SLEMAN

4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten;
7. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi kabupaten; atau
8. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Tabel 4.4
Telaahan Rencana Kawasan Strategis

No	Rencana Strategis	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Rencana Strategis Sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4
1	Kawasan Strate-gis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hi-dup	- Meningkatkan perlindung-an, pengelolaan dan konservasi Kawasan TNGM - Meningkatkan perlindung-an dan konser-vasi sumber daya air - Mengendalikan perubahan peruntukan ru-ang	Kab. Sleman	*	*	*	*
2	Kawasan Strate-gis Pertumbuh-an Ekonomi	- Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh KPY, dan cepat tumbuh koridor jalan - Mengendalikan perubahan peruntukan ruang - Pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan penelitian teknologi tinggi. - Pengembangan dan pengelolaan keka-yaan dan keragaman budaya	Kab. Sleman Pramba nan	*	*	*	*

BAPPEDA SLEMAN

4.4.3. *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2035

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan pedoman bagi kebijakan pembangunan di bidang kependudukan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dua komponen pokok kependudukan adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran,

kematian dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinian dan lain-lain. GDPK berpijak dari data kependudukan yang ada masa ini yang menggambarkan kuantitas dan kualitas penduduk untuk selanjutnya diproyeksikan kondisinya pada masa depan. Terdapat lima pilar penting dalam pembangunan kependudukan, yaitu pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas dan pembangunan basis data kependudukan.

Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dengan revitalisasi program keluarga berencana yang diubah dari orientasi *supply side approach* ke *demand side approach.* Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus kepada penduduk miskin. Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya, meliputi kematian ibu hamil, kematian ibu melahirkan, kematian ibu pasca melahirkan serta kematian bayi dan anak. Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama, yang difokuskan pada:

1. kesamaan hak reproduksi pasutri;
2. keseimbangan akses, kualitas KIE dan pelayanan;
3. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; serta
4. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup;
2. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun informal;

BAPPEDA SLEMAN

3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;
4. Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran; serta
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Adapun *roadmap* pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Sleman tahun 2015 – 2035 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Roadmap Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015 - 2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
A	Pengendalian Kuantitas Penduduk					
1	Jumlah penduduk	1.063.448	1.099.384	1.132.016	1.159.190	1.177.141
2	Laju pertumbuhan penduduk		0,65	0,61	0,57	0,52
3	*Total fertility rate*	1,80	1,77	1,75	1,73	1,70
4	*Nett reproduction rate*	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82
5	*Crude birth rate*	13,70	13,00	12,40	11,70	11,00
6	*Contraceptive prevalency rate*	79,30	81,10	82,80	83,40	85,00
B	Peningkatan Kualitas Penduduk					
1	Angka melek huruf (%)	96,72	99,25	100,00	100,00	100,00
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,65	10,91	11,16	11,42	11,67
3	Angka partisipasi murni pada tingkat SMA dan sederajat (%)	58,73	63,74	68,79	73,84	78,89
4	Indeks pendidikan dalam IPM	87,25	88,75	90,25	91,75	93,25
5	*Crude birth rate*	9,10	9,00	9,20	9,70	10,80
6	*Infant mortality rate*	4,65	4,15	3,60	3,00	3,00
7	*Maternal mortality rate*	83,30	87,30	71,10	64,60	60,00
8	Eo / Angka harapan hidup (tahun)	76,18	76,33	76,58	76,83	77,08
9	Indeks kesehatan dalam IPM (%)	85,00	86,50	88,00	89,50	90,50
10	Konsumsi riil per kapita (000)	700,00	710,50	721,00	731,50	741,00
11	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	11,05	7,05	3,00	3,00	3,00
12	Angka ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif	46,00	43,00	44,00	46,00	49,00
13	Indeks pendapatan dalam IPM (%)	68,80	70,80	72,90	75,00	77,10

Sumber : Grand Design Kabupaten Sleman 2015 - 2035

Pokok-pokok kebijakan dalam pembangunan keluarga adalah :

1. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Membangun iklim berkeluarga melalui perkawinan yang sah;
3. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;

KEPEDA SLEMAN

4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; serta
5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan pembangunan daerah yang berkeadilan. Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
2. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya;
3. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu;
5. Memperluas kesempatan kerja produktif;
6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran; serta
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Kebijakan umum pembangunan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

4.4.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, bersama-sama, partisipatif dan berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perlu disusun suatu program kegiatan yang terencana, terpadu, dan melibatkan semua komponen. Melalui serangkaian *focus group discussion* (FGD) dan

BAPPEDA SLEMAN

seminar bersama instansi terkait, LPM perguruan tinggi, aktifis penanggulangan kemiskinan telah menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan untuk mewujudkan tiga sasaran strategis penanggulangan kemiskinan tahun 2016-2020 yaitu :

1. Sinkronisasi dan koordinasi antar penentu kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya dari luar pemerintah daerah; serta
3. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin.

Sasaran dapat terwujud dengan melalui 3 (tiga) langkah yaitu penguatan sekretariat TKPKD, penguatan TPK kecamatan, TPK desa dan TPK padukuhan serta optimalisasi pemanfaatan saran teknologi informasi. Jaringan kerja penanggulangan kemiskinan mencakup semua pemangku kepentingan, yaitu unsur swasta (industri, lembaga keuangan, asosiasi, pers), unsur masyarakat (LSM, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi) dan unsur pemerintah (eksekutif dan legislatif). Penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada siapapun yang miskin dan dimanapun mereka berada, perlu upaya-upaya yang luar biasa, perlu kreatifitas dan melibatkan semua aspek. Tidak ada pelaku tunggal yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, perlu strategi perencanaan berbasis masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. SKPD ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga keluarga miskin dapat meningkat kesejahteraannya.

4.4.5. SIDa

SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan ekonomi daerah. Roadmap penguatan SIDa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan

BAPPEDA SLEMAN

belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Kebijakan penguatan SIDa adalah meningkatkan kerjasama lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan industri. Sedangkan strategi penguatan SIDa Kabupaten Sleman dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi daerah melalui *research and development* (R&D) dengan membentuk inkubator teknologi;
2. Peningkatan promosi produk inovasi;
3. Peningkatan keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam penguatan SIDa;
4. Pengembangan *bisnis inovation centre* (BIC)/*business technology centre* (BTC); serta
5. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sebaran inovasi.

Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut:

1. Tekanan persaingan global yang terus meningkat;
2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan
3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

Tujuan utama lainnya adalah untuk meningkatkan daya ungkit *(leverage)* peran iptek yang sesuai dan spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan iptek (dalam arti luas) dan hasil penelitian dan pengembangan rekayasa serta mengembangkannya. Inovasi yang dilakukan selama tahun 2014 – 2019 diarahkan pada 2 pilar yakni sektor pertanian inovatif dan pengembangan UMKM berbasis klaster dengan tema “Industri Kreatif Pertanian Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja”.

Tema tersebut dipilih sebagai langkah antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang terus menerus turun. Salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya alih fungsi

lahan pertanian ke non pertanian dan belum optimalnya penerapan inovasi di sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perlu ditingkatkan melalui inovasi sehingga meningkatkan daya saing dan mensejahterakan petani mengingat penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 127.863 jiwa dan potensi lahan di Kabupaten Sleman mempunyai mikrobia spesifik dengan adanya gunung api Merapi.

Produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Produk unggulan Kabupaten Sleman yang dipilih untuk penguatan SIDa adalah padi, salak pondoh, kambing PE dan budidaya jambu.

4.5. Kebijakan Daerah Lain

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan antar daerah, baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang berbatasan maka dilakukan analisis keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota yang berbatasan. Berikut telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman:

BAPPEDA S

Tabel 4.6
Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
1	Kabupaten Bantul	2016-2021	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Kab. Sleman dan Kab. Bantul banyak memiliki potensi pariwisata alam. Oleh karena itu, dalam RPJP Kab. Sleman terdapat strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung Program Sapta Peson sehingga terwujud pariwisata berwawasan agama, lingkungan dengan berdasar pada kearifan budaya lokal agar mampu berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
			Meningkatkan kapa-sitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaat-an pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Bersama dengan Kab. Bantul dan Kota Yogyakarta, Kab. Sleman bekerja sama dalam Sekber Kartamantul untuk menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di tiga pemerintah daerah, berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kawasan perkotaan Yogyakarta.
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Kab. Sleman ke selatan sampai dengan Kab. Bantul merupakan dataran alluvial Gunungapi Merapi, Kab. Sleman merupakan hulu dan daerah resapan air yang perlu dijaga pemanfaatan ruangnya agar terjaga ketersediaan air untuk keperluan Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Bantul

BAPPEDA SLEMAN

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
2	Kota Yogyakarta	2017-2022	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Lebih dari 50%, tanah di Kabupaten Sleman merupakan lahan pertanian. Dalam RPJP Kab. Sleman, arah kebijakan bidang telah mencakup peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
			Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Ekonomi kerakyatan yang dimaksud dalam menurunkan ketimpangan, sama dengan amanat dari misi kedua yang tertuang dalam RPJP Kab. Sleman mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, dan arah pembangunan ketiga mengenai pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, diutamakan bagi kecamaan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang berkembang sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dapat dilakukan secara sinergi oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengembangan dan penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar regional dan perluasan pasar dan jaringan pemasaran atas produk lokal

BAPPEDA SLEMAN

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
				Pertumbuhan ekonomi meningkat	Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman salah satunya melalui pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat multidisipliner dan partisipatoris untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata serta peningkataan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan kerjasama kepariwisataan regional secara optimal. Selain itu, juga pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan kepada aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan pemasaran berbasis pada sentra dan KSP/USP agar menjadi unit usaha yang tangguh dan lebih mampu agar lebih mampu berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Dalam bidang investasi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif yang berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja lokal.
			Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	Kualitas pendidikan meningkat	Unsur IPM adalah pendidikan. Untuk meningkatkan IPM, Kabupaten Sleman harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan daerah lain, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman
			Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Permasalahan infrastruktur membutuhkan integrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya karena kabupaten tidak dapat berdiri sendiri dalam perencanaan pembangunan karena dalam berbagai hal, terutama infrastruktur, permasalahan yang terjadi di wilayah sebagai akibat dari interaksi

BAPPEDA SLEMAN

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
					kegiatan antar wilayah yang satu dengan yang lain
3	Kabupaten Kulon Progo	2017-2022	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup merupakan indikator IPM. UHH ini dipengaruhi oleh kualiitas pelayanan kesehatan. Arah kebijakan dalam RPJP Kab. Sleman adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah, terutama dengan meningkatkan pemahaman dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan
			Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	NYIA di Kab. Kulon Progo akan segera dioperasikan. Harapannya, Kab. Sleman dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, meskipun hanya sebagai transit, karena rencana mode transportasi menuju dan dari bandara melalui kereta api dengan lokasi stasiun di wilayah Sleman. Dengan dioperasikan bandara, akan mempermudah akses dan distribusi barang serta jasa, sehingga pemerintah Kab. Sleman harus mempersiapkan masyarakat untuk dapat bersaing dengan membuka peluang usaha mandiri/ aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
4	Kabupaten Klaten	2016-2021	Meningkatkan kapa-sitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kab. Klaten dan Kab. Sleman sama-sama terletak di lereng Gunungapi Merapi, sehingga meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana menjadi salah satu strategi penanganannya dengan meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan peran serta aktif masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten/ Kota terkait

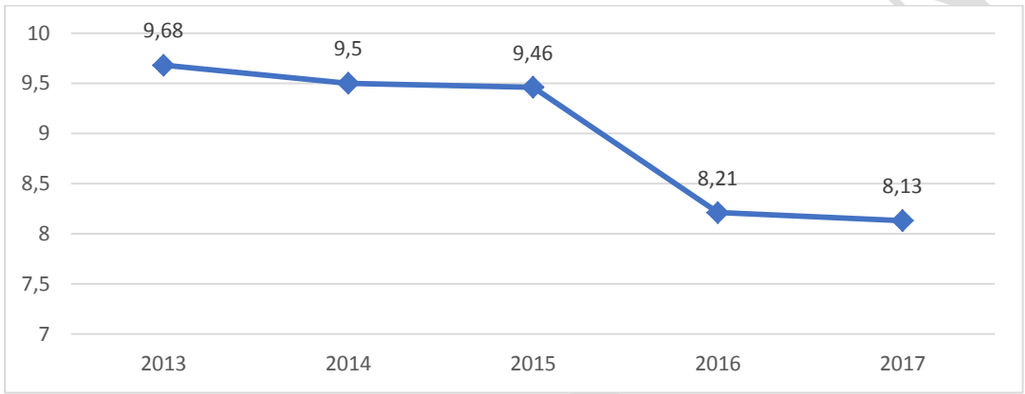
BAPPEDA SLEMAN

4.6. Permasalahan Pembangunan

4.6.1. Pokok Permasalahan

4.6.1.1. Kemiskinan

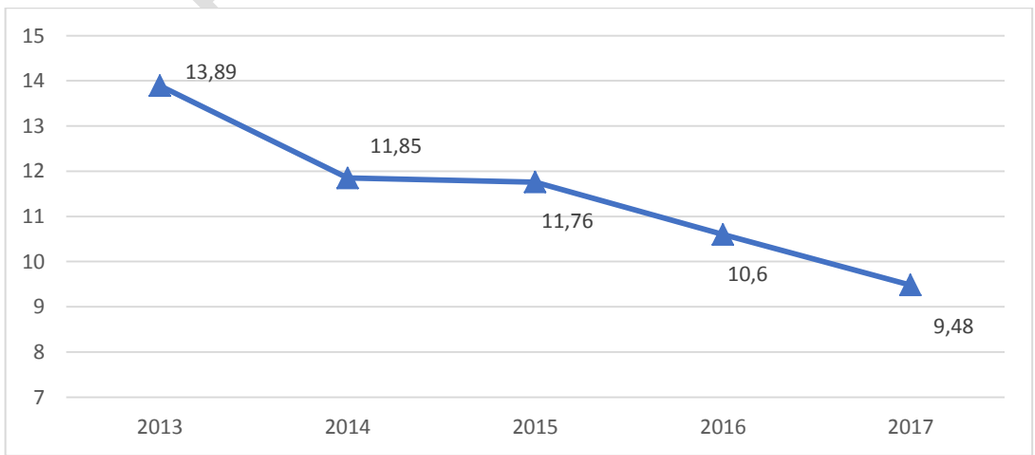
Ada dua sumber data kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 terdapat 8,13% penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Perkembangan garis kemiskinan secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

Sumber: BPS RI, 2018

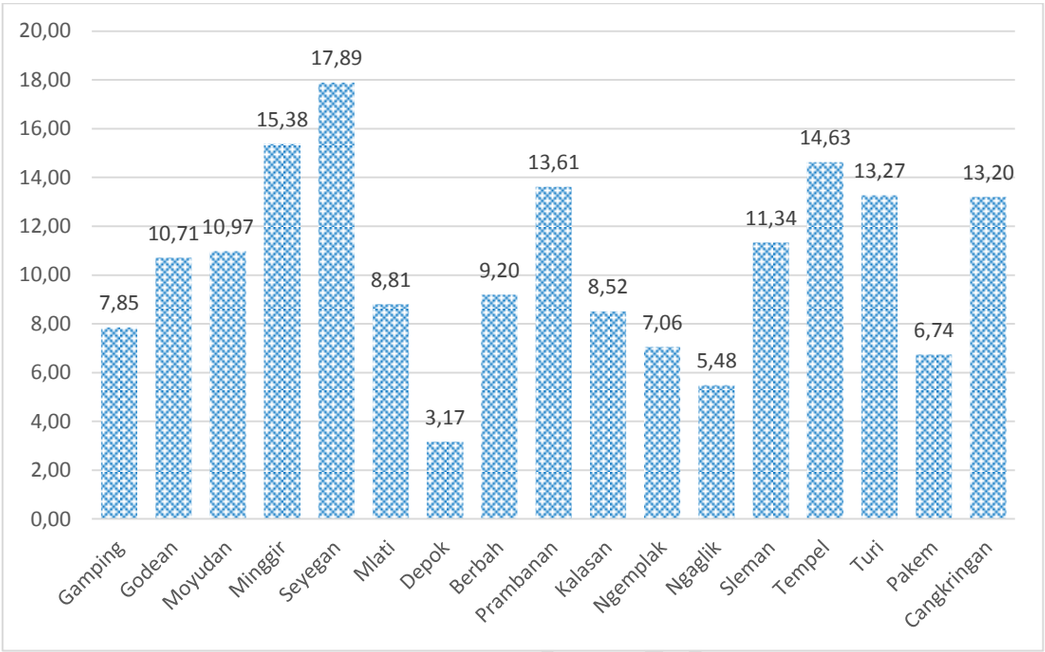
Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pada tahun 2017, persentase jumlah KK miskin tercatat sebesar 9,48%. Adapun perkembangan KK miskin dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar 4.3 berikut ini.



Gambar 4.3. Persentase KK Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Penduduk miskin terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Sleman, namun proporsi penduduk miskin pada masing-masing kecamatan tidaklah sama. Sebaran persentase kemiskinan di Kabupaten diperlihatkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Distribusi KK miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Kecamatan-kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi adalah Kecamatan Seyegan, Minggir, Tempel, Prambanan, Turi dan Cangkringan yang merupakan wilayah-wilayah perdesaan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sebaiknya diarahkan pada wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan hasil yang signifikan atas upaya menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan rasio kesenjangan kemiskinan, pada tahun 2017 Kabupaten Sleman mencapai 1,23 (Tabel 4.7). Rasio kemiskinan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY dan Indonesia. Rasio kesenjangan kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan kemiskinan terhadap garis kemiskinan, untuk penduduk tidak miskin mempunyai nilai rasio nol. Dengan kata lain, rasio ini menjelaskan jarak antara pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sehingga secara sederhana dapat pula digunakan untuk mengukur besaran biaya yang harus diberikan kepada penduduk miskin sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.

BAPPEDA

Tabel 4.7.
Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017

No	Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persen Penduduk Miskin	P1 (rasio kesenjangan kemiskinan)	P2 (Indeks keparahan kemiskinan)
1	Sleman	351.331	96,75	8,13	1,23	0,28
2	DIY	374.009	488,53	13,02	2,19	0,55
3	Indonesia	374.478	27.770	10,64	1,83	0,48

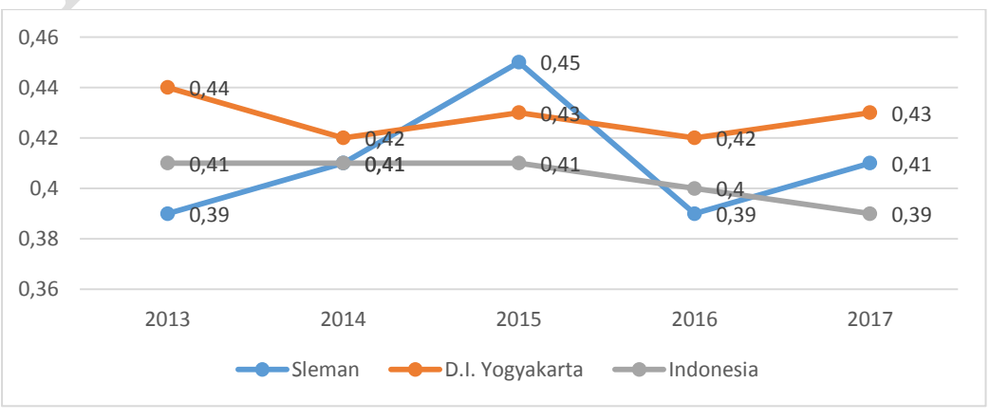
Sumber : BPS RI, 2018

4.6.1.2. Ketimpangan Pendapatan

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan indeks gini.

Indeks gini mempunyai nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks gini sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna).

Indeks gini Kabupaten Sleman pada tahun 2017 adalah 0,41. Dan selama tahun 2013-2017 (Gambar 4.5), indeks gini di Kabupaten Sleman berada pada ketimpangan sedang yang berarti bahwa pendapatan penduduk pada kurun waktu tersebut antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah belum merata.

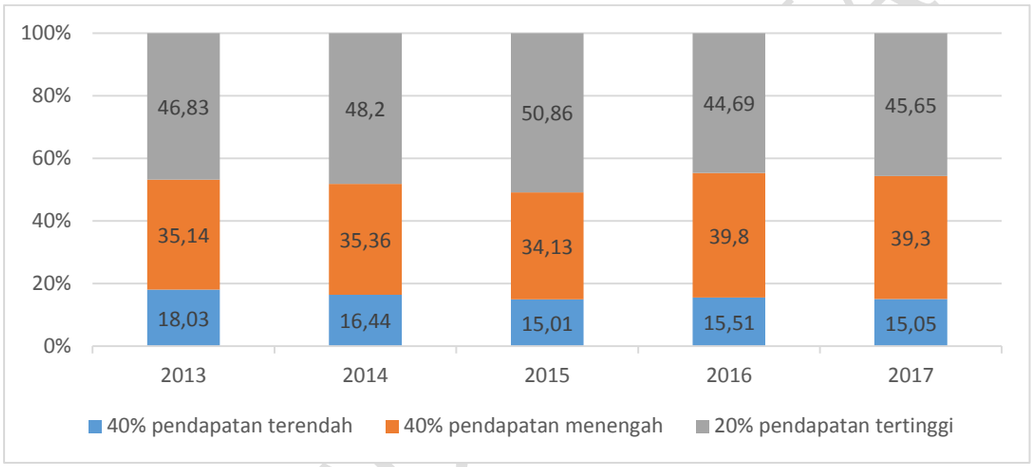


Gambar 4.5. Indeks Gini Kabupaten SlemanTahun 2013-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

BAPPEDA SLEMAN

Sedangkan menurut versi Bank Dunia, indikator kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40% penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Kelompok 40% penduduk berpenghasilan terendah tahun 2017 di Kabupaten Sleman berada pada 15,05% (Gambar 4.6). Angka ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk tergolong sedang (*moderate inequality*).



Gambar 4.6. Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017

Sumber: diolah dari Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan diantaranya:

1. Struktur ekonomi. Daerah dengan struktur ekonominya didominasi sektor agraris cenderung mempunyai ketimpangan pendapatan yang rendah. Sedangkan daerah yang didominasi sektor industri cenderung mempunyai ketimpangan pendapatan yang tinggi.
2. Ketimpangan aset dalam berbagai bentuk seperti modal dana, tanah dan kondisi SDM yang menyebabkan ketimpangan kapasitas produksi antar individu.
3. Intervensi pemerintah yang kurang tepat. Intervensi pemerintah seharusnya difokuskan pada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya.

BAPPEDA SLEMAN

Intervensi yang tidak tepat kurang dapat memberikan efek pendorong

Berdasarkan hal di atas, langkah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah dengan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah atas.

4.6.1.3. Ketimpangan Wilayah

Indeks williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah. Indeks mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks williamson sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang indeks williamson sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna).

Masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah memang juga bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Indeks Williamson Kabupaten Sleman berdasarkan PDRB perkapita antar kecamatan pada tahun 2017 adalah 0,41. Berdasarkan prediksi besarnya ketimpangan di Kabupaten Sleman tiap tahunnya akan mengalami penurunan sebesar 0,0105 sehingga diperkirakan pada tahun 2021 ketimpangan di Kabupaten Sleman akan mencapai angka 0,3775.

Berdasarkan tipologinya, Kabupaten Sleman dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu:

1. Sleman bagian barat, yang meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Besarnya angka ketimpangan pada tahun 2017 sebesar 0,0185. Angka ketimpangan di kawasan ini cukup kecil namun mengalami perubahan mendasar secara rerata di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan daerah pertanian yang memiliki kecenderungan pendapatan regional dan perkapita yang rendah daripada daerah lainnya.

BAPPEDA SLEMAN

2. Sleman bagian tengah (KPY atau kawasan perkotaan Yogyakarta) yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Sebagai pusat pendidikan, perdagangan baru dan jasa dan juga merupakan kawasan dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sleman angka ketimpangan di kawasan ini cukup besar dan cenderung mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,1235 pada tahun 2017.
3. Sleman bagian timur, meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah merupakan kawasan area non irigasi dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi. Angka ketimpangan di kawasan ini pada tahun 2017 sebesar 0,0532.
4. Sleman bagian utara, yang meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Angka ketimpangan di kawasan ini, meskipun cenderung meningkat, tetapi juga yang paling kecil dibandingkan dengan kawasan yang lain. Pada tahun 2017 sebesar 0,1363. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduknya memperoleh pendapatan dari bertani salak dengan luas lahan yang relatif hampir sama sehingga perbedaan pendapatan mereka tidak terlalu besar. Sedangkan adanya kenaikan ketimpangan di wilayah ini kemungkinan disebabkan oleh tumbuhnya desa wisata dan tempat-tempat wisata di kawasan ini.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan penyebab ketimpangan di Kabupaten Sleman adalah masih terpusatnya (terkonsentrasinya) kegiatan ekonomi hanya pada wilayah tertentu. Upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan:

1. Pemerataan investasi pada wilayah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah tersebut, misalnya wilayah di lereng Merapi dengan investasi di bidang agrowisata; serta
2. Mengembangkan daya saing ekonomi lokal, dengan potensi alam yang ada dengan didukung oleh SDM dari masyarakat dan pemerintah setempat, seperti sektor pertanian, pariwisata atau industri UMKM.

BAPPEDA SLEMAN

4.6.1.4. Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

PDRB Kabupaten Sleman tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sleman didominasi oleh sektor industri pengolahan dalam masa lima tahun berturut-turut dengan nilai kontribusi lebih dari 13% per tahun. Kontributor kedua adalah sektor konstruksi, dan posisi ketiga ditempati sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan kontribusi sektor pertanian tidak lagi menempati 5 besar. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum semakin meningkat setiap tahunnya, berkebalikan dengan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif. Hal tersebut menunjukkan adanya peralihan mata pencaharian antara ketiga sektor tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingginya alih fungsi lahan sehingga produksi pertanian juga menurun.

Tabel 4.8
Distribusi Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2013 - 2017 (%)

No	Uraian/Sektor	2013	2014	2015	2016*	2017**
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,96	8,33	8,36	8,06	7,75
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,45	0,44	0,41	0,39
C	Industri Pengolahan	14,21	13,95	13,43	13,37	13,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,99	10,89	10,85	10,71	10,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	7,64	7,61	7,79	7,85
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	7	7,03	7,28	7,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,88	9,98	10,20	10,28	10,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,73	8,45	8,06	8,01	8,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,21	3,30	3,25	3,18
L	Real Estate	7,53	7,71	7,76	7,90	7,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,66	1,71	1,71	1,67	1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,54	6,65	6,81	6,87
P	Jasa Pendidikan	9,35	9,52	9,89	9,67	9,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,27	2,34	2,35	2,33
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,19	2,2	2,22	2,28	2,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2018
*Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara*

Berdasarkan analisis LQ, yang termasuk dalam sektor basis dan unggulan adalah industri pengolahan, bangunan, transportasi dan

BAPEDA SLEMAN

pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, perumahan, jasa perusahaan serta jasa pendidikan. Dan berdasarkan analisis shift share, sektor yang berdaya saing tinggi di tingkat provinsi meliputi: sektor transportasi dan pergudangan; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor yang memiliki potensi untuk berkembang meliputi: sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Berdasarkan data di atas, sektor yang dikembangkan di Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri dan sektor perdagangan. Namun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan akselerasi sektor-sektor pertanian dan pariwisata. Sektor ini harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja.

Sektor pertanian dikembangkan sebagai potensi lokal dalam rangka memantapkan ketahanan pangan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif, terutama karena cadangan pangan masih belum mencapai target, konsumsi keberagaman pangan masih rendah dan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan masih kurang. Selain itu, berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai lebih dari 20% penduduk yang bekerja. Dan berdasarkan data simnangkis, kecamatan yang merupakan daerah pertanian mempunyai persentase KK miskin yang lebih besar.

Dalam sektor pariwisata, berdasarkan jumlah wisatawan, Kabupaten Sleman merupakan destinasi unggulan DIY. Wisatawan tersebut berkunjung bukan semata-mata untuk menikmati alam yang ada, melainkan juga untuk berinteraksi baik dengan masyarakat maupun adat dan budayanya. Sehingga arah pengembangan pariwisata harus diletakkan bagi pembangunan manusia dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap langkah dan tahapnya.

BAPPEDA SLEMAN

Desa wisata menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kecenderungan pasar yang mulai bergeser, dari kondisi yang serba modern kepada kondisi skala kecil yang unik. Pengembangan desa wisata yang baik, secara ekonomi dapat memeratakan pendapatan secara lebih luas, mulai dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut, masyarakat sekitar sampai dengan pemerintah yang menaungi desa wisata tersebut. Sekitar 40% pengeluaran wisatawan untuk belanja, baik kuliner, produk pertanian maupun produk kerajian.

Selain sektor pertanian, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja adalah melalui pemberdayaan pelaku usaha industri baik skala mikro, kecil dan menengah. Pada tahun 2017, jumlah usaha industri meningkat sebsar 1,51% dan serapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,38%. UMKM ini bergerak dalam bidang, antara lain: perdagangan dan jasa; kuliner; fashion; otomotif; agrobisnis; teknologi informasi; dan pendidikan.

Terkait perkembangan investasi di Kabupaten Sleman, penanaman modal asing (PMA) di tahun 2017 mencapai 68 unit usaha, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai 64 unit usaha. Investasi ini akan bisa menghasilkan produk barang dan jasa, lapangan kerja, serta nilai tambah ekonomis bagi daerah. Selain itu juga bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

4.6.1.5. Tata Kelola Pemerintahan

Ada beberapa hal yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu predikat AKIP kabupaten, opini BPK terhadap LKD, persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan indeks kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2018, perolehan nilai pada akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) adalah 81,72 dengan predikat A, naik dari perolehan nilai pada tahun 2017 sebesar 78,16. Ada 5 aspek terkait penilaian AKIP, yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Untuk opini BPK pada tahun 2018 terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD), Kabupaten Sleman mendapatkan WTP dan ini harus dipertahankan.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2018 mencapai 32,96 dari target 32. Persentase ini masih perlu ditingkatkan untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Komponen PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan. Dari keempat komponen tersebut, proporsi paling besar adalah pajak daerah. Pajak ini terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak parkir, pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak penerangan jalan, pajak reklame, serta lain-lain. Dari sektor pajak daerah, proporsi pendapatan paling tinggi adalah BPHTB dan PBB.

Kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,39, lebih tinggi dari target tahun 2018 (78,80). Walaupun sudah melampaui target, pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

4.6.2. Permasalahan Per Urusan

A. Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya jumlah guru kelas untuk jenjang SD dan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP.

Berdasarkan Permendiknas 41 Tahun 2007, 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa, dan 1 (satu) orang guru SMP/MTs mengajar 32 siswa. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 15,68 untuk SD dan 13,39 untuk SMP. Apabila dilihat dari rasio guru dan murid yang ada terlihat bahwa

BAPPEDA SLEMAN

ketersediaan guru pada setiap jenis pendidikan terpenuhi, namun karena penghitungan rasio tersebut termasuk guru non PNS/GTT sehingga apabila dihitung dengan tidak memasukkan guru Non PNS/GTT maka rasio guru dan murid untuk jenjang SD/MI mengalami kekurangan;

b. Kurang optimalnya supervisi dan pengawasan terhadap guru maupun sekolah karena keterbatasan personil pengawas dan penilik;

   Berdasarkan regulasi bahwa untuk Pengawas SD rasionya adalah 1:10 artinya 1 pengawas mengampu 10 Satuan Pendidikan. Saat ini Dikpora memiliki 32 pengawas TK/SD. Jika ingin ideal maka sesungguhnya Dikpora masih kekurangan pengawas TK/SD sebanyak 68 orang karena jumlah TK/ SD negeri dan swasta di Sleman lebih dari 1000 sekolah. Sedangkan untuk Pengawas SMP rasionya adalah 1 Pengawas Mata Pelajaran akan mengawasi 40 guru mata pelajaran atau 7 lembaga. Kondisi saat ini jumlah pengawas ada 10 orang sehingga kekurangan 5 pengawas. Untuk penilik PAUD ada 13 orang sedangkan kebutuhannya adalah 63 orang sehingga kekurangan 50 penilik PAUD.

c. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan masih kurang.

   Pada tahun 2018, untuk tingkat SD terdapat 678 unit bangunan rusak ringan dan 108 unit rusak berat. Sedangkan untuk tingkat SMP terdapat 68 unit bangunan rusak ringan dan 30 unit rusak berat;

d. Pelaksanaan pendidikan karakter belum optimal, sehingga semakin tinggi kasus kenakalan remaja;

   Angka kriminalitas pada tahun 2018 tercatat 1,49%. Kenakalan remaja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Sleman. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong program-program pendidikan yang dapat meningkatkan keharmonisan mulai dari lingkungan keluarga sendiri sampai ke masyarakat;

BAPPEDA SLEMAN

e. Masih adanya anak putus sekolah.

   Pada tahun 2018, masih terdapat 5 anak yang putus sekolah jenjang SD dan 3 anak jenjang SMP. Meskipun menurun dari tahu 2017, namun permasalahan ini tetap menjadi perhatian pemerintah karena mengenyam pendidikan dasar adalah hak setiap anak; serta

f. Belum optimalnya prestasi siswa.

   Pada tahun 2018, nilai rata-rata ujian SD/MI mencapai 211,05, sedangkan nilai rata-rata ujian SMP/MTs mencapai 256,50. Meskipun realisasi tidak mencapai target, namun Kabupaten Sleman menduduki peringkat II peraih nilai rata-rata tertinggi untuk jenjang SD dan jenjang SMP se DIY.

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Belum mencukupinya rasio tenaga kesehatan di puskesmas.

   Puskesmas dengan jumlah tenaga keperawatan dan kefarmasian yang sesuai standar baru di bawah 8% sedangkan puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan masyarakat belum ada yang sesuai standar. Tiga puskesmas kurang tenaga dokter gigi dan enam puskesmas perawatan kurang tenaga dokter;

b. Meningkatnya penyakit tidak menular pada usia lansia.

   Salah satu contoh penyakit tidak menular adalah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Pada tahun 2018, jumlah kedua kasus penyakit yang menjalani rawat jalan meningkat (DM 59.567 kasus dan hipertensi 158.451 kasus), dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DM 29.079 kasus dan hipertensi 66.618 kasus);

c. Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS.

   Berdasarkan Tabel 2.23, prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya menjadi 0,01%;

BAPPEDA SLEMAN

d. Masih adanya penyakit menular (demam berdarah/DBD, leptospirosis, Tubercolose/TBC, Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, diare.

   Pada tahun 2018, hampir semua penyakit menular menunjukkan peningkatan, seperti jumlah lepstospirosis 32 kasus, TB 1.016 kasus, diare 16.914 kasus. Sedangkan untuk kasus DBD turun sehingga mencapai 145 kasus;

e. Masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba.

   Pada tahun 2018, terdapat 65 kasus narkoba dan 15 kasus miras di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat;

f. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir.

   Pada tahun 2018, terjadi 50,44 kasus kematian ibu melahirkan per-100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari tahun 2017 yang mencapai 43 kasus. Sedangkan angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup sama dengan tahun sebelumnya, 4,11;

g. Masih adanya balita gizi buruk dan kasus stunting.

   Balita gizi buruk pada tahun 2018 naik 18,18% dari tahun sebelumnya atau menjadi 0,52%. Dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta mencapai 11%.

h. Banyaknya kasus gangguan jiwa.

   Sebanyak 1.985 jiwa penyandang ODGJ berat (psikotik) di wilayah Kabupaten Sleman sudah mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dari 2.224 jiwa total penyandang ODGJ;

i. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai.

   Sebenarnya semua puskesmas di Kabupaten Sleman merupakan puskesmas santun lansia, yaitu 2 puskesmas strata I, 19 puskesmas strata II, dan 4 puskesmas strata III). Namun sampai saat ini belum tersedia puskesmas dengan fasilitas pelayanan strata IV, seperti pelayanan khusus (loket, poli obat, fisioterapi, psikologi, dan lain-

BAPPEDA SLEMAN

lain). Hal tersebut dibangun untuk mewujudkan fasilitas kesehatan ramah lansia dan difabel.

j. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

   Tahun 2018, di Kabupaten Sleman terdapat 357.528 rumah tangga (RT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 103.528 RT dipantau dan ditemukan sebanyak 57.055 RT atau 55,1% telah menerapkan PHBS.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Kondisi jalan rusak masih 11,98% dikarenakan jalan rusak akibat curah hujan tinggi dan berkepanjangan.

   Kondisi jalan kabupaten kondisi mantap, yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam pada tahun 2018 adalah 88,02%.;

b. Belum semua bangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel.

   Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, beberapa sektor seperti pelayanan publik, gedung perkantoran dan aksesibiltas sarana umum masih belum bersahabat bagi penyandang disabiltas. Seperti standar kemiringan bangunan ramp tidak memperhatikan kemiringan maupun panjang maksimal, masih terlalu tajam dan panjang, pemakaian railing di kamar mandi serta ketinggian dudukan toilet, dan sebagainya;

c. Alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non pertanian yang semakin tinggi dan sulit dikendalikan.

   Perubahan lahan yang dominan adalah lahan sawah dan lainnya menjadi tanah kering kemudian untuk pemukiman sebesar 0,05%;

d. Masih adanya genangan di wilayah permukiman.

   Berdasarkan luas wilayah dan panjang saluran drainase, nilai aksesibilitas wilayah Kabupaten Sleman sebesar

BAPPEDA SLEMAN

±0,52 km/km^2, masih di bawah angka ideal yang berada pada 1,5 – 2,5 km/km^2 untuk kawasan perdesaan. Hal tersebut menyebabkan adanya genangan di Condongcatur, Caturtunggal, Nogotirto, Banyuraden, dan Balecatur (resiko tinggi);

e. Tingginya limpasan air di tepi jalan kabupaten.
   Drainase sebagai pendukung prasarana jalan, hanya terdapat di beberapa ruas saja terutama di wilayah perkotaan Sleman. Pada tahun 2018, drainase berkondisi baik tercatat hanya sebesar 47%;

f. Pembuangan air limbah rumah tangga yang langsung masuk ke saluran drainase.
   Ada beberapa lokasi di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah perkotaan belum terjangkau jaringan air limbah, baik komunal maupun terpusat. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah yang tidak mendukung, seperti elevasi tanah yang rendah. Sehingga limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase;

g. Masih kurangnya pengolahan air limbah komunal.
   Pada tahun 2018, Kabupaten Sleman telah membangun IPAL individual sejumlah 1.497 unit. Jumlah sambungan rumah (SR) air limbah sebanyak 3.277 SR;

h. Adanya konflik pengelolaan air dan pemanfaatan air.
   Konflik ini terjadi di wilayah barat antara petani pemakai air irigasi untuk pertanian tanaman pangan dengan petani pembudidaya ikan. Biasanya konflik terjadi pada musim kemarau dimana debit air berkurang hingga 50%. Selain itu, di wilayah atas juga terjadi konflik antara petani pemakai air irigasi dengan perusahaan air minum komersial (tanki air minum);

i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di saluran irigasi.
   Berdasarkan Permen PU Nomor 30 Tahun 2015, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Namun, sebagian partisipasi masyarakat masih terbatas pada gotong royong

BAPPEDA SLEMAN

untuk membersihkan saluran irigasi, belum pada peningkatan saluran;

j. Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) termasuk hutan rakyat dan hutan kota.

   Berdasarkan data dari DLH DIY, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 898,75 Ha.;

k. Kurangnya penyediaan ruang publik.

   Ruang publik adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Cirinya adalah terbuka, mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau. Ruang publik ini hampir setiap tahunnya mengalami penyusutan. Sampai tahun 2017, ruang publik di Kabupaten Sleman beralih fungsi sebesar 1,14%; serta

l. Belum adanya regulasi tata ruang sehingga menyulitkan didalam pengendalian pemanfaatan ruang.

   Pada tahun 2018, Kabupaten Sleman sedang melakukan review RTRW. RDTR 17 kecamatan belum ada satu pun yang berkekuatan hukum, sehingga proses izin pemanfaatan ruang hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat kawasan kumuh.

   Pada tahun 2018, kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 48,72 Ha atau 30% (sesuai SK Bupati Nomor 14.31 Tahun 2016 tentang Kawasan Kumuh);

b. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

   Pada tahun 2018, masih terdapat 3.076 rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani, dari total 359.844 atau 0,85%;

BAPPEDA SLEMAN

c. Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

   Pada tahun 2018, 34.128 KK merupakan rumah tangga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), dan yang menempati rumah layak huni yang terjangkau sebanyak 31.052 KK atau baru mencapai 90,99; serta

d. Layanan air minum masyarakat dengan perpipaan belum optimal.

   Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, ada 3 jenis prasarana permukiman, yaitu sarana dasar, utilitas umum dan utilitas penunjang. Salah satu yang merupakan utilitas umum adalah jaringan air minum. Pada tahun 2018, ketersediaan layanan air minum masyarakat dengan perpipaan baru mencapai 18,70%.

5. Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Tingginya potensi kerawanan dan konflik sosial karena tingkat kemajemukan masyarakat serta perubahan sosial.

   Sebagai Kota Pelajar, masyarakat Sleman sangat majemuk, berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia dengan sikap dan perilaku sesuai dengan wilayah asal. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme sangat berpotensi menjadi komoditas politik;

b. Pelanggaran terhadap perda masih tinggi

   Pada tahun 2018, penanganan terhadap pelanggaran perda dengan pembinaan 244, dengan sidang 24 dan ditutup (dibongkar) 19 usaha. Sedangkan usaha yang menindaklanjuti dengan mengurus perijinan mencapai 99 kasus;

c. Gangguan ketentraman dan ketertiban cenderung meningkat

BAPPEDA SLEMAN

Pada semester 1 tahun 2018, terdapat 98 kasus gangguan ketertiban, ketentraman dan keindahan. Kejadian gangguan tersebut didominasi oleh aksi kenakalan remaja dan klithih, peredaran minuman berakohol, dan pedagang kaki lima;

d. Tingginya nilai indeks resiko bencana di Kabupaten Sleman.

   Berdasarkan indeks resiko bencana 2013, dibanding kabupaten lain di DIY, Kabupaten Sleman memang mempunyai skor terendah, namun tetap berada pada kelas resiko tinggi (skor 153), sedangkan Kota Yogyakarta berada pada kelas resiko sedang;

e. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

   Desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana pada tahun 2018, baru mencapai 45 desa dan 55 sekolah. Sedangkan jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Sleman sebanyak 86 desa;

f. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum mencukupi.

   EWS untuk yang berfungsi baik berjumlah 20 unit. EWS ini berfungsi sebagai peringatan dini bencana Gunungapi Merapi. Sedangkan untuk rawan bencana yang lain, seperti banjir, longsor dan gempa belum tersedia;

g. Cakupan pelayanan bencana kebakaran belum optimal.

   Cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 36,08% dan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2018 sebesar 78,79%, turun dari capaian tahun 2017;

h. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi 2010 masih ada warga yang menolak relokasi dan kembali ke lokasi zona yang tidak diperuntukkan untuk pemukiman.

   Sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) saat ini masih berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi, yaitu yang berada di Dusun Kalitengah Lor, Dusun Kalitengah

BAPPEDA SLEMAN

Kidul, Dusun Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan; serta

i. Perundang-undangan bidang penanggulangan bencana masih terus dilengkapi baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga pelaksanaan tugas menjadi terhambat karena harus memastikan dulu payung hukumnya dan aturan yang ada, padahal pelaksanaan pelayanan dan penanggulangan bencana harus segera terlaksana secara cepat dan tepat.

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut:

a. Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal

   Aduan masyarakat ke pemerintah pusat memerlukan waktu penyelesaian relatif lebih lama dibanding dengan aduan ke tingkat kabupaten;

b. Pelayanan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) belum optimal.

   Di Kabupaten Sleman terdapat 102 LKS, 30% diantaranya izin operasionalnya sudah berakhir atau dapat dikatakan LKS itu tidak berizin. Sasaran LKS ini adalah anak jalanan, napi, anak, janda, WTS, difabel, NAPZA, ODGJ, ODHA, dan lain-lain. Bahkan ada yang belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai dasar pengelolaan LKS;

c. Masih adanya ketidaktepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

   Tahun 2018, terdapat 479 usulan KIS APBN, 22 usulan non aktif KIS APBN, 1.071 KK usulan MPM, rekomendasi jamkessos 681 orang dan rekomendasi jampersal 234 orang. Dari usulan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa memang masih terdapat ketidaktepatan sasaran program kemiskinan. Ada KK

BAPEDA SLEMAN

miskin tapi belum masuk SK Miskin, namun ada KK yang bukan miskin tapi masuk dalam SK Miskin;

d. Penanggulangan kemiskinan yang sektoral.
   Kabupaten Sleman sudah mempunyai SIMNANGKIS yang didalamnya terdapat penduduk miskin yang dapat diakses oleh perangkat daerah. Dengan adanya data tersebut, harapannya ada integrasi antar perangkat daerah siapa melakukan apa. Ada yang bertugas memberi ketrampilan, melatih pengemasan, membangun jaringan, dan sebagainya. Namun pelaksanaannya, belum semua perangkat daerah dapat bekerja bersinergi secara optimal;

e. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin kompleks.
   Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012, ada 26 jenis PMKS. Sesuai dengan aturan tersebut, jumlah PMKS meningkat. Hal ini terbukti dengan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2018 justru menurun dari tahun 2017, yaitu sebesar 41,47%;

f. Masih adanya perbedaan data kemiskinan, antara data kemiskinan yang diterbitkan BPS dan hasil pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman.
   BPS menggunakan pendekatan jumlah penduduk miskin, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan pendekatan KK miskin dengan data spesifik individual; serta

g. Ketimpangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi.
   Ketimpangan pendapatan diukur dengan indeks gini. Pada tahun 2017, indeks gini mencapai 0,41, naik dari tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin melebar (semakin mendekati angka 1).

BAPPEDA SLEMAN

B. Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pengangguran pada tahun 2017 relatif masih tinggi, perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.

   Penganggur terbuka tahun 2018 sebanyak 34.679 orang. Penempatan tenaga kerja sebanyak 2.239 orang. TPT sebesar 5,76%. Walaupun turun dari tahun 2017, namun lebih tinggi dari TPT DIY;

b. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.

   Di Kabupaten Sleman, jumlah penganggur tertinggi menurut pendidikan adalah lulusan SLTA sebanyak 12.362 orang, terutama penganggur dengan jenjang pendidikan SLTA Umum, sedangkan jumlah penganggur dengan jenjang pendidikan SLTA kejuruan jauh lebih rendah; serta

c. Karakter calon tenaga kerja yang pilih-pilih pekerjaan.

   Penawaran lowongan dan penempatan lokal dalam DIY lebih diminati oleh pencari kerja, terlihat dari penempatan tenaga kerja antar daerah hanya sebesar 8,31%.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

   Kasus kekerasan yang terjadi tahun 2018 sebanyak 458 kasus. Sebenarnya angka ini, belum menunjukkan angka riil tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena angka ini merupakan jumlah dari kasus yang dilaporkan;

BAPEDA SLEMAN

b. Jumlah fasilitas umum yang ramah anak, remaja dan lansia belum mencukupi.

   Fasilitas umum, terutama yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk gedung pemerintah, belum semua menyediakan fasilitas ramah anak, remaja dan lansia. Kedepan, secara bertahap, fasilitas umum, diutamakan pada tempat layanan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dilengkapi dengan fasilitas ramah anak,; serta

c. Pengarusutamaan gender yang belum optimal.

   Pada tahun 2017, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 95,62 meningkat dari tahun 2016 sebesar 95,51. IPG diturunkan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan menggunakan data penduduk perempuan. Kenaikan ini disebabkan karena pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Berdasarkan komponen pembentuknya, komponen kesehatan stabil pada angka 0,83. Sedangkan komponen pendidikan dan pendapatan mengalami kenaikan.

   Meskipun komponen pendapatan meningkat. namun jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaan utama, perempuan lebih mendominasi pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan, seperti tenaga usaha jasa, tenaga usaha penjualandan tenaga usaha pertanian.

   Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar 79,51, tertinggi se-DIY. IPG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik dan pengambilan keputusan, ekonomi serta pendapatan. Persentase komponen masing-masing adalah 26%, 44,31% dan 38,43%. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proxi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi. Sedangkan sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.

BAPEDA SLEMAN

3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan bahan pangan pokok (padi) menurun.
   Ketersediaan pangan tahun 2018 menurun 227,1 ton. Hal tersebut terjadi salah satunya karena luas lahan pertanian berkurang serta adanya pergeseran musim;
b. Belum tercapainya cadangan pangan pemerintah dan pola pangan harapan sesuai dengan target yang ditetapkan (sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah);
c. Masih ditemukannya makanan jajan yang terpapar pengawet dan pewarna kimia.
   Setiap tahun, jumlah pedagang asongan makanan jajanan anak sekolah yang berstiker aman meningkat. Tahun 2018, sudah terdapat 178 pedagang. Namun jumlah pedagang ini juga meningkat setiap tahunnya. Menurut Dinas Koperasi dan UKM, tahun 2017 sudah terdapat 6.470 UKM sektor dagang kuliner; serta
d. Masih terdapat desa waspada pangan atau desa potensi rawan pangan.
   Pada tahun 2017, Desa Kepuharjo dan Desa Wonokerto menyandang desa waspada pangan dari aspek ketersediaan maupun akses artinya produksi pangan belum stabil dan masyarakat masih ada kesulitan dalam menjangkaunya.

4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Masih ada bidang tanah yang belum bersertifikat
   Berdasarkan BPN Kabupaten Sleman, bidang tanah di Kabupaten Sleman berjumlah 624.912 bidang. Dari jumlah tersebut, tanah yang sudah bersertifikat sekitar

BAPPEDA SLEMAN

590.046 bidang. Sedangkan yang belum bersertifikat 34.866; serta

b. Data terkait riwayat dan status tanah kasultanan dan tanah kas desa kurang akurat.

Pada saat melakukan identifikasi data tanah desa guna penanganan permasalahan status tanah desa tidak lengkap. Berkas-berkas dari desa diperlukan sebagai kelengkapan untuk mengajuan izin ke Gubernur guna penyelesaian permasalahan tanah desa. Untuk mengatasi sumber data yang tidak lengkap dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, narasumber dari keraton, masyarakat dan pemerintah desa

5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan persampahan belum optimal.

Pada tahun 2018, sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 32,73%. Sampah yang dimanfaatkan atau didaur-ulang sebanyak 20,31%. Sisanya, pengelolaan sampah dilakukan mandiri oleh masyarakat, baik dengan dibakar, ditimbun, dan sebagainya;

b. Belum semua rumah tangga mempunyai sanitasi yang layak.

Berdasarkan inspeksi sanitasi rumah, sampai dengan bulan Desember tahun 2018, rumah memenuhi syarat kesehatan 95,55%;

d. Penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan.

Indeks kualitas air sungai pada tahun 2018 tidak mencapai target, yakni berada pada indeks 41,33. Berdasarkan pengujian pada tahun 2018, semua sampel air yang diambil memenuhi persyaratan baik secara fisik dan kimia. Namun ada beberapa sampel tidak memenuhi persyaratan secara mikrobiologis, karena mengandung bakteri E. Coli, yaitu di wilayah Kecamatan Minggir, Seyegan, Godean, Gamping, Mlati, Sleman, Tempel, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Berbah dan Prambanan.

BAPPEDA SLEMAN

Hal ini dimungkinkan adanya kebocoran septik tank yang seharusnya kedap air.

Secara kuantitas, ditemukan beberapa sumur penduduk yang airnya mengalami penyusutan, seperti di Kecamatan Prambanan, Sleman dan Kalasan;

e. Kualitas dokumen lingkungan masih banyak yang belum sesuai standar.

   Pengajuan dokumen UKL UPL pada tahun 2018 sebanyak 143 usaha dan yang memenuhi syarat sebanyak 120 usaha atau 83,92%;

f. Masih terdapat usaha yang kualitas pengelolaan air limbahnya rendah.

   Berdasarkan data pengawasan izin lingkungan tahun 2018, terdapat 11 (sebelas) usaha yang berkategori baik dari 64 usaha (perusahaan, rumah sakit, hotel, usaha catering, dll) yang diawasi; serta

g. Kerusakan kawasan resapan air dan lindung sempadan sungai akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali.

   Salah satu syarat untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah bangunan didirikan di atas tanah berstatus pekarangan, memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) serta memenuhi ketentuan sempadan jalan, sungai, parit. Namun, sampai saat ini, masih banyak bangunan rumah yang tidak mempunyai IMB.

6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

a. Kurang akuratnya database kependudukan, salah satunya disebabkan karena masyarakat dalam memberikan data ketika mengisi form biodata penduduk kependudukan kurang lengkap dan mutakhir;

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa

BAPPEDA SLEMAN

kependudukan yang dialaminya, berimplikasi pada data kependudukan yang kurang valid; serta

c. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

   Sebagai contoh adalah kepemilikan KTP. Dinas Dukcapil mencatat pada tahun 2018, dari sejumlah 787.958 wajib KTP di Sleman, 98,46% telah melakukan perekaman data, artinya masih terdapat sejumlah 12.119 wajib KTP yang belum melakukan perekaman data.

7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

a. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa belum optimal.

   Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan bersama oleh pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta lingkungan. Namun selama ini pemanfaatan lembaga oleh perangkat daerah guna mendukung aksi program pemerintah masih sangat minim; serta

b. Pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal.

   Dengan diterapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk memberdayakan diri dan masyarakat untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun demikian, sampai saat ini pengelolaan aset desa masih banyak yang kurang baik.

8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

a. Masih banyak terjadi pernikahan dini (583 pasangan atau 0,41% pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun dari total 144.053 pasangan usia subur);

BAPPEDA SLEMAN

b. Pertumbuhan penduduk masih tinggi

   Meskipun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 mengalami penurunan, namun pada tahun 2017, Kabupaten Sleman masih di atas laju pertumbuhan penduduk nasional, yaitu 1,6%; serta

c. Rendahnya kepesertaan KB pria.

   Pada tahun 2017, dari jumlah 159.366 pasangan usia subur, 6,29% merupakan KB pria.

9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat angkutan umum yang belum lolos uji.

   Pada tahun 2018, yang melakukan uji kendaraan sebanyak 21.021 unit, yang lolos uji sebanyak 19.126 unit;

b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas.

   Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat dilihat berdasarkan jumlahnya angka kecelakaan di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2018 mencapai 1.556 kali kejadian kecelakaan;

c. Terdapat titik kemacetan di kawasan padat.

   Salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya jumlah kendaraan pribadi sedangkan panjang jalan tetap. Masyarakat merasa nyaman menggunakan kendaraan pribadi karena angkutan umum sangat minim;

d. Masih maraknya parkir liar ataupun kantong/tempat parkir yang belum berijin.

   Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015, parkir berada di dalam ruang milik jalan yang merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan di luar ruang milik jalan yang berada pada tempat khusus parkir maupun tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu. Parkir ini harus diselenggarakan dengan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan

BAPPEDA SLEMAN

lalu lintas. Namun karena pemahaman masyarakat rendah, sering terdapat kantong parkir yang tidak memperdulikan asas tersebut;

e. Masih banyak terjadi pelanggaran batas muatan yang melebihi kapasitas yang ditentukan.

   Hal ini terjadi karena pengguna jalan tidak semua paham tentang status kelas jalan yang dilalui oleh kendaraan yang bertonase tinggi;

f. Seiring dengan makin cepatnya perkembangan teknologi, terdapat perubahan perilaku pengguna angkutan umum, yakni berpindah dari transportasi umum konvensional ke transportasi umum online. Hal ini menyebabkan penurunan minat masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan usaha angkutan umum lesu;

g. Masih terjadi perusakan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *guardrill*, dan lain-lain).

   Rambu dan marka lalu lintas dipasang untuk mengamankan dan memudahkan pengendara mengenali medan jalan dalam artian (memberikan petunjuk, peringatan, perintah dan larangan) bagi pengguna jalan. Namun disayangkan, masih banyak masyarakat yang yang merusak alat bantu keselamatan tersebut;

h. Waktu tunda yang semakin meningkat.

   Semakin banyaknya kendaraan yang berada di jalan menyebabkan panjangnya antrian kendaraan di lampu merah. Hal ini diperparah dengan banyaknya hambatan di sepanjang jalan; serta

i. Belum optimalnya pelayanan transportasi umum

   Angkutan perdesaan di Kabupaten Sleman sudah tidak ada. Sedangkan angkutan kota dalam propinsi (AKDP) hanya ada 2 penyedia jasa. Dan hanya sebagian kecil yang dilewati rute trans jogja.

10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

a. Sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan teknis bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi

   Pada tahun 2018, SDM dengan bidang keilmuan IT sebanyak 54,88%, dan sebagian besar merupakan tenaga non PNS;

b. Infrastruktur komunikasi dan informatika sudah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman, namun kinerjanya belum memadai khususnya di wilayah pedesaan;

c. Pengembangan aplikasi sistem informasi belum mencakup seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta antar perangkat daerah belum semua terintegrasi.

   Sampai dengan saat ini terdapat 33 aplikasi SIM publik dan 41 aplikasi SIM internal. Namun belum semua sistem tersebut saling terintegrasi;

d. Layanan informasi dan perizinan belum sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi.

   Aplikasi yang dibangun sebagai sumber informasi ataupun sarana untuk melacak proses perijinan belum semuanya berjalan optimal. Modul belum semua dapat diaplikasikan. Sehingga pelayanan masih dilakukan secara manual; serta

e. Belum seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan visi Bupati khususnya dalam mewujudkan *smart city* di Kabupaten Sleman.

11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya kapasitas SDM koperasi dalam manajeman koperasi, penguasaan teknologi, inovasi pengembangan produk.

   Salah satu penentu keberhasilan, keunggulan mutu bersaing suatu usaha adalah SDM. Maka penanganan SDM ini harus bersifat strategis dan unity; dan

BAPPEDA SLEMAN

b. Koperasi dengan usaha simpan pinjam, kebijakan KUR dengan bunga murah 7% efektif pertahun membuat penurunan volume usaha simpan pinjam.

   Program dengan tingkat bunga 7% tersebut telah membuat nasabah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) hengkang dan beralih ke KUR. Padahal selama ini, KSP merupakan ujung tombak akses permodalan para pelaku usaha mikro. Meskipun koperasi tetap memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan KUR, seperti kemudahan dari sisi persyaratan debitur.

12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan investasi yang tercatat kecil di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini terjadi karena kewenangan perizinan di Tingkat Kabupaten hanya menangani investasi PMDN. Untuk PMA (walaupun potensinya banyak) masih menjadi kewenangan pemerintah pusat;
b. Permasalahan penanaman modal baik PMA maupun PMDN adalah ketidaksesuaian lokasi investasi, lahan yang diminati para investor tidak sesuai dengan status peruntukan pemanfaatan lahan; serta
c. Belum optimalnya pengelolaan investasi mulai dari perencanaan dan pengembangan investasi yang kurang inklusif sampai dengan pelayanan perizinan yang belum optimal.

13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

a. Masih terjadinya beberapa kasus kenakalan pelajar dan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, yang disinyalir akibat pengaruh pergaulan dan pengaruh media sosial yang kurang terkontrol.

   Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 3,3% penduduk berusia lebih dari 10 tahun minum minuman beralkohol;

BAPPEDA SLEMAN

b. Konsep pembinaan atlet berkelanjutan belum terumuskan secara sistemik, sehingga Pemerintah Daerah belum mampu mengakomodir kebutuhan teknis lapangan dan administratif. Hal ini menyebabkan pembinaan berkelanjutan terhadap atlet sejak dini sampai dengan atlet senior agak terputus putus;

d. Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

   Karakter pemuda terdiri dari tiga aspek, yakni kompetensi, karakter, dan kompetisi. Kompetensi terkait kemampuan individu. Karakter mengarah pada kualitas individu. Sedangkan kompetisi terkait dengan bagaimana mampu bersaing dan punya daya saing. Pada tahun 2018, angka kriminalitas di Kabupaten Sleman tercatat 1,49%. Dan salah satu penyebabnya adalah kenakalan remaja;

e. Prestasi olah raga belum optimal

   Dalam POPDA DIY pada tahun 2018, Kabupaten Sleman mendapat peringkat 3, berada di bawah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, Sleman juga mendapatkan 7 medali Asian Games dan 5 medali O2SN; serta

f. Penguatan organisasi kepemudaan belum maksimal.

   Pada tahun 2018, jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sleman adalah 32 organisasi, dengan jumlah organisasi yang aktif adalah 28 organisasi.

14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik adalah kuantitas akurasi data sektoral dari perangkat daerah yang masih kurang.

15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah belum optimalnya pelaksanaannya. Hal ini disebabkan fungsi persandian yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, belum mencantumkan

BAPPEDA SLEMAN

fungsi pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi

   Hal ini terlihat pada beberapa kegiatan budaya dan tradisi partisipasi masyarakat masih terbatas pada pelaku budaya, belum pada masyarakat secara luas, terutama generasi muda;

b. Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi.

   Ruang berkreativitas dan berekspresi saat ini masih terbatas pada sanggar, rumah budaya dan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Kedepan pembangunan taman budaya dan revitalisasi gedung kesenian diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkreativitas dan berekspresi;

c. Belum optimalnya pengelolaan museum

   Museum Gunungapi Merapi pada tahun 2018, baru diserahkan secara penuh kepada Pemerintah Kabupaten Sleman oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya;

d. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.

   Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sleman sebanyak 245 unit dari total 800 unit atau sebesar 30,625%. Anggaran untuk pelestarian ini bukan hanya dari APBD Kabupaten, namun juga APBN, BUMN, swasta dan masyarakat;

e. Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal.

BAPPEDA SLEMAN

Derasnya arus globalisasi dan modernisasi menjadi salah satu sebab terkikisnya rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Sehingga kebudayaan lokal yang merupakan warisan leluhur terinjak-injak oleh budaya asing, tereliminasi di kandangnya sendiri dan terlupakan oleh para pewarisnya, bahkan banyak anak muda yang tak mengenali budaya daerahnya sendiri. Mereka cenderung lebih bangga dengan karya-karya asing, dan gaya hidup yang kebarat-baratan dibandingkan dengan kebudayaan lokal;

f. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian.

   Kelompok seni di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebanyak 1.589 kelompok. Namun pemerintah hanya bisa memfasilitasi sebagian kecil saja karena keterbatasan sumber daya. Untuk jenis kesenian, ada beberapa jenis kesenian yang hampir punah, karena hanya dimainkan oleh satu-dua kelompok saja; serta

g. Terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal.

   Adat istiadat dan tata nilai yang ada dalam suatu masyarakat sebagai nilai kearifan lokal, seperti “sambatan” gotong royong, merupakan basis dalam mengatur tata perikelakuan anggota masyarakat. Nantinya akan banyak kehilangan sesuatu yang berharga apabila kekayaan adat istiadat dan budaya yang ada tidak dipelihara dan dikembangkan.

17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Sarana prasarana serta fasilitas perpustakaan belum memadai.

   Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 119.1 Tahun 2017, perpustakaan harus mempunyai gedung, koleksi perpustakaan, rak buku, dan sebagainya, termasuk tempat parkir dan akses bagi penyandang disabilitas, anak dan lansia. Pada tahun 2017, kondisi perpustakaan desa dengan kriteria kurang

BAPPEDA SLEMAN

baik di Kabupaten Sleman saat ini mencapai 56 unit. Sementara perpustakaan desa dengan kriteria baik baru berjumlah 12 unit, dan berkembang 18 unit.

b. Layanan perpustakaan bagi masyarakat belum optimal.
   Sampai dengan tahun 2017, layanan perpustakaan selama 7 jam/hari dan perpustakaan keliling baru menjangkau 72 lokasi, sedangkan jumlah desa di Kabupaten Sleman mencapai 86 desa ;

c. Koleksi perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
   Jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mengalami penurunan, menjadi 33.791 judul; serta

d. Masih rendahnya minat baca masyarakat.
   Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 menurun, menjadi 0,6556.

18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM;

b. Belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan
   Semakin tingginya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak pula; dan

c. Belum optimalnya penerapan SKPB (Sistem Kearsipan Pola Baru).
   Persentase perangkat daerah yang menerapkan tertib administrasi dengan kategori baik sebesar 79,17%. Dari angka tersebut, belum semua menggunakan SKPB.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

a. Harga pakan ikan yang cenderung naik di pasaran.

   Pakan merupakan faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap produksi dan kualitas ikan yang dihasilkan. Tercatat terdapat kenaikan harga pakan sebesar Rp35.000 per zak selama dua tahun. Peningkatan harga pakan ini berarti peningkatan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani;

b. Kurangnya air terutama di musim kemarau.

   Sebagian besar budidaya ikan di Kabupaten Sleman menggunakan air irigasi sehingga perlu berbagi dengan kebutuhan air untuk budidaya tanaman. Pada musim kemarau, ketersediaan air berkurang sehingga ketersediaan untuk budidaya ikan juga berkurang. Hal tersebut mengakibatkan produksi ikan juga menurun;

c. Terbatasnya jumlah induk yang berkualitas

   Umur produktif induk ikan untuk menghasilkan benih yang berkualitas adalah 4 tahun sehingga perlu penggantian induk setiap 4 tahun sekali. Sampai dengan tahun 2018 jumlah indukan ikan sebanyak 1.150.000 ekor, sedangkan kemampuan pengadaan calon benih yang bersertifikat per tahun hanya 5.000 ekor calon induk lele dan 200 ekor calon induk nila. Pada tahun 2018, kebutuhan benih mencapai 1.400.000.000 ekor, yang terpenuhi baru 1.227.109.800 ekor;

d. Belum terpenuhinya kebutuhan ikan air tawar segar/ hidup di Kabupaten Sleman.

   Ketersediaan ikan konsumsi di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 baru mencapai 33,99 kg/kapita/tahun, masih dibawah kebutuhan rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun;

e. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan Kabupaten Sleman apabila dibandingkan tingkat konsumsi ikan nasional.

   Target konsumsi ikan per kapita, tahun 2017 sebesar 47,12 kg per kapita (capaian 49,34 kg per kapita) dan konsumsi ikan Kabupaten Sleman tahun 2017 hanya

BAPPEDA SLEMAN

mencapai 25,81 kg per kapita, padahal tingkat konsumsi ini tertinggi se-DIY;

f. Masih kurangnya permodalan bagi kelompok-kelompok pembudidaya ikan.

   Kebutuhan modal bagi kelompok pembudidaya ikan meningkat seiring dengan peningkatan harga kebutuhan produksi. Pada tahun 2018, terdapat 84 kelompok pembudidaya ikan yang mengajukan pinjaman penguatan modal sebesar Rp4.090.707.000,00, terpenuhi 75,18%;

g. SDM Perikanan masih kurang.

   Dari 637 kelompok pembudidaya ikan, yang mempunyai sertifikat CBIB sebanyak 75 orang, 78 kelompok dan 10 unit pembenihan rakyat (UPR). Sedangkan yang mempunyai sertifikat kelayakan pengolahan hanya 8 kelompok, dan sertifikat MD 1 kelompok; serta

h. Belum optimalnya kelembagaan pembudidaya ikan.

   Kelompok pembudidaya ikan terdiri dari 483 kelompok pemula, 124 kelompok madya dan 30 kelompok utama.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengembangan destinasi dan atraksi wisata.

   Pada saat ini penyediaan sarana prasarana wisata hanya terbatas pada prasarana penunjang, belum pada sarana wisata seperti panggung, atraksi, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengembangan destinasi baru, ada beberapa yang masih terkendala oleh status lahan;

b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pariwisata di destinasi wisata.

   Ada beberapa destinasi wisata yang pengelolaannya belum bersinergi karena ada beberapa kepentingan, seperti Kawasan Wisata Kaliurang dan Kawasan Wisata Kaliadem;

c. Terbatasnya ketersediaan prasarana zona/ ruang kreatif untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi.

BAPPEDA SLEMAN

Di Kabupaten Sleman terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif. Ada tiga (3) sektor yang merupakan unggulan, yaitu animasi film dan video, seni pertunjukan dan kriya bambu. Namun prasarana untuk kegiatan tersebut masih sangat terbatas, bahkan ada peralatan untuk kriya bambu yang merupakan pinjaman dari perguruan tinggi; serta

d. Terbatasnya kemampuan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

   Desa wisata di Kabupaten Sleman cukup banyak, namun yang terklasifikasi sebanyak 36 desa wisata (mandiri, tumbuh dan berkembang), serta 11 desa wisata kategori rintisan. Dari jumlah tersebut pemandu dan manajemen ter

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

a. Turunnya produksi tanaman pangan yang berupa padi dan palawija (terkecuali jagung) akibat berkurangnya lahan pertanian, adanya serangan hama dan perubahan iklim;
b. Masih adanya lahan kritis di Kabupaten Sleman.

   Sampai dengan tahun 2016, Kabupaten Sleman masih mempunyai lahan kritis seluas 337,10 Ha dan lahan sangat kritis seluas 325,80 Ha;
c. Belum optimalnya produktivitas pertanian

   Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2018, turun 0,26%. Tahun 2017 turun, 7,19%. Penurunan ini terjadi karena adanya serangan hama dan penyakit terutama di daerah sentra tanaman padi;
d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (saluran irigasi, traktor roda 2, dll);
e. Belum optimalnya standarisasi dan sertifikasi produksi; serta
f. Belum optimalnya kelembagaan kelompok tani (TPH, peternakan, perkebunan).

BAPPEDA SLEMAN

3. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Jumlah toko modern berjejaring telah melampaui kuota;
   Saat ini, setidaknya ada 203 toko modern yang tersebar di Kabupaten Sleman.
b. Daya tarik dan daya saing pasar tradisional masih belum dapat disejajarkan dengan toko modern;
c. Belum semua pasar dalam kondisi baik.
   Jumlah pasar pada tahun 2018 sebanyak 84 buah, yang merupakan pasar kabupaten, desa dan swasta. Sejumlah 41 pasar yang merupakan pasar tradisional ditargetkan selesai renovasi pada tahun 2021;
d. Belum optimalnya pemasaran/ekspor di pasar internasional.
   Nilai ekspor kumulatif sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 41.963.299,13 US$ atau sekitar 97,58%;
e. Masih ada pedagang pasar yang berjualan di luar area yang telah ditentukan.
   Meskipun jumlah kios mencapai 1.307 unit dan los 622 unit, namun jumlah pedagang mencapai 17.620 orang; serta
f. Belum optimalnya perlindungan konsumen.
   Pada tahun 2018, temuan produk tidak layak dikonsumsi sebanyak 209 produk. Dan penyalur barang dalam pengawasan yang patuh baru mencapai 61,46%.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah:

a. Basis data terkait UMKM/IKM belum valid sehingga belum dapat dijadikan bahan kebijakan secara maksimal;
b. Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing; serta
c. Beberapa produk industri masih menggunakan bahan baku pokok dari luar, seperti kedelei impor dan bahan baku logam.

BAPPEDA SLEMAN

5. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah jumlah transmigran yang diberangkatkan masih tergantung kuota dari Pemda DIY. Pada tahun 2018, calon transmigran yang berangkat berjumlah 23 KK. Delapan KK merupakan kuota penempatan dari pemerintah pusat. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya animo masyarakat terhadap program transmigrasi. Komitmen Kabupaten Sleman pun cukup tinggi, terbukti dengan sharing anggaran pada tahun 2018 dalam pembangunan rumah transmigran, jamban keluarga dan sarana air bersih.

D. Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelaksanaan sekretariat sebagai fungsi koordinasi dan penyedia bahan kebijakan;
b. Belum adanya regulasi tentang tata cara kerjasama daerah sebagai turunan dari aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; serta
c. Belum ada regulasi tentang batas wilayah Kabupaten Sleman serta penetapan nama dan batas wilayah desa.

2. Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPRD yang semakin meningkat; serta
b. Adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing parpol dalam pembahasan produk hukum daerah.

3. Urusan Inspektorat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan inspektorat adalah sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

a. Penetapan sasaran dan indikator kinerja pada OPD belum seluruhnya berorientasi hasil, metode pengukuran belum ditetapkan dan belum adanya basis data yang memadahi;
b. Belum seluruh personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya;
c. Belum semua SKPD mendapatkan pembinaan ZI-WBK/ WBBM

   Sampai dengan tahun 2018, perangkat daerah yang sudah mendapat pembinaan ZI-WBK/WBBM adalah 14 unit. Yang diusulkan pada tahun tersebut namun belum memenuhi kriteria yang ditetapkan ada 3 unit; serta
d. Leveling APIP masih harus ditingkatkan.

   Tahun 2018, laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP berada pada level 3 (integrated) penuh.

4. Urusan Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Belum ada instrument yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program dan kegiatan PD sehingga sulit mengukur kontribusinya terhadap pencapaian sasaran PD maupun sasaran daerah; serta
b. Adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dengan yang dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten.

5. Urusan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Beberapa regulasi teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis;
b. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi;
c. Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah masih 31,56%, perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah; serta

BAPPEDA SLEMAN

d. Efektifitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah belum optimal.

6. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah:

a. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi; serta
b. Pengangkatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi.

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Hasil riset yang tertuang dalam Agenda Riset Daerah Tahun 2016 – 2021 belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan.

8. Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ini adalah sebagai berikut:

a. Potensi gesekan antar suku, ras dan agama, karena tingkat kemajemukan masyarakat; serta
b. Kurang antusiasnya masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

   Partisipasi masyarakat Sleman dalam pemilu 2014 mencapai 81%, walaupun angka ini lebih tinggi dari partisipasi nasional yang hanya mencapai angka 75%, namun harapannya pemilu 2019, lebih tinggi lagi.

4.7. Isu Strategis

Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

BAPEDA SLEMAN

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Sleman berdasarkan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dinamika kependudukan, perlindungan perempuan dan anak;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
5. Infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup;
7. Ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana;
8. Tata kelola pemerintahan; serta
9. Daya saing potensi ekonomi lokal.

Penetapan isu strategis ini sebagai bahan kajian dalam menetapkan cita cita pembangunan sebagai solusi dari isu stategis dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Isu strategis Kabupaten Sleman dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dinamika Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman relatif tinggi bila dilihat dari data 4 tahun terakhir. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang mencapai rata-rata 1,52% tersebut lebih disebabkan oleh jumlah migrasi penduduk yang masuk dibandingkan dengan jumlah kelahiran penduduk mengingat fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, pusat pendidikan serta pusat pengembangan perumahan/permukiman. Besarnya jumlah migrasi dan penduduk sementara inilah yang menyebabkan data

BAPPEDA SLEMAN

kependudukan di Kabupaten Sleman belum akurat karena sulitnya proses pendataan penduduk. Faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus berkas-berkas kependudukan sehingga cakupan administrasi penduduk di Kabupaten Sleman belum terpenuhi secara keseluruhan.

Proporsi penduduk usia kerja pada tahun 2018, untuk laki-laki mencapai 63,92% dan untuk perempuan mencapai 64,00%. Proporsi usia kerja yang besar ini merupakan peluang sekaligus tantangan di dalam pembangunan. Di dalam istilah demografi hal ini disebut dengan *demografic bonus*, karena pada saat itu beban ketergantungan menjadi minimal. Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Sleman, potensi bonus demografi akan berlangsung terus hingga tahun 2035. Salah satu implikasi agar terwujud bonus demografi adalah dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia kerja.

Jumlah penduduk yang termasuk kategori remaja (*adolescents)* juga besar. Hal ini disebabkan karena fertilitas yang tinggi di masa lalu, dan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Implikasi kebijakan yang perlu diambil berkaitan dengan jumlah remaja yang besar ini adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

Kelompok penduduk usia 60 tahun keatas juga meningkat secara signifikan. Fenomena "*aging population*" di Sleman telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi di negara-negara maju. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya-upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui antara lain pelayanan program-program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Permasalahan kependudukan yang lain adalah persebaran yang tidak merata antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk yang

BAPPEDA SLEMAN

banyak dengan kepadatan per kilometer yang tinggi terjadi di kecamatan-kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati, Gamping, yang merupakan wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan hidup dan kehidupan sosial.

Di bidang keluarga berencana, pada tahun 2018, cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mencapai 76,51% sedangkan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 9,50%. Kepesertaan KB ini dapat lebih ditingkatkan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran.

Kedepan, berkaitan dengan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah meningkatkan cakupan layanan terhadap administrasi kependudukan dengan melaksanakan jemput bola, menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) dengan memberdayakan kader KB dalam meningkatkan cakupan kepesertaan KB khususnya KB mandiri dan KB pria, meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, serta memberdayakan institusi masyarakat pedesaan.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman tahun 2018 sebesar 0,08. Dan jumlah kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 458 kasus, ada penurunan sebesar 13 kasus dari tahun sebelumnya atau sebesar 2,76%. Sebenarnya angka ini, belum menunjukkan angka riil tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena angka ini merupakan jumlah dari kasus yang dilaporkan. Angka jumlah kasus kekerasan didapatkan dari instansi dan lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya puskesmas, kepolisian, KUA, serta kader PKDRT di setiap desa. Masih dimungkinkan adanya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan maupun kasus yang dilaporkan di luar wilayah Sleman, sehingga tidak terhitung sebagai data kasus di Sleman.

BAPPEDA SLEMAN

Permasalahan perlindungan perempuan dapat diminimalkan dengan berkoordinasi lebih intensif dengan lembaga yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga harus lebih responsif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Optimalisasi peran perempuan di segala bidang juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender.

2. Pendidikan

Angka melek huruf (AMH) dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pada tahun 2017, angka melek huruf sebesar 97,07% artinya bahwa di Kabupaten Sleman masih ada 2,93% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 116,98%, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Demikian pula bagi SMP/MTs, APK pada tahun 2018 sebesar 112,71% naik dari tahun 2017 (112,67%).

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2018 sebesar 105,67%. APM SMP/MTs sebesar 85,91%.

BAPPEDA SLEMAN

Angka putus sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 5 anak pada tingkat Sekolah Dasar dan 3 anak pada tingkat SMP.

Permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah banyaknya peserta didik penduduk Sleman yang memilih bersekolah di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah di Kota Yogyakarta lebih tinggi daripada sekolah di Kabupaten Sleman.

Pembentukan karakter kepribadian pemuda di Kabupaten Sleman belum optimal dari adanya indikasi banyaknya kenakalan pelajar dan pemuda yang terjadi karena koordinasi penanganan pemuda masih kurang serta masih rendahnya pemahaman dan peran serta pemuda dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Pembinaan olahraga di Kabupaten Sleman juga masih belum maksimal dengan terbatasnya sarana prasarana olahraga serta banyaknya atlet-atlet Sleman yang menjadi atlet daerah lain sehingga prestasi olah raga belum optimal.

Permasalahan di bidang pendidikan di Kabupaten Sleman kedepan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standart yang ditetapkan, serta peningkatan prestasi olah raga.

3. Kesehatan

Pada tahun 2018, masih terdapat angka kematian bayi 4,11 per 1000 kelahiran hidup (57 bayi dari 13.879 kelahiran hidup), angka kematian balita 0,21 per 1000 kelahiran hidup (3 balita), balita gizi buruk 0,52% (284 balita), prevalensi balita gizi kurang mencapai 7,32% (4.032 balita), serta angka kematian ibu melahirkan 50,42 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus). Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan, sehingga banyak ditemukan bayi lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, kematian ibu, bayi dan balita terjadi karena asfiksia, kelaian konginetal, sepsis, gangguan respirasi dan multiple konginital anomali. Di Kabupaten Sleman juga masih ditemukan kasus balita pendek dan sangat pendek.

BAPPEDA SLEMAN

Penyakit menular (DBD, leptospirosis, TBC, ISPA, diare) dan penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia juga masih ditemui di Kabupaten Sleman karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat. Hal ini juga disertai tingginya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba karena didorong oleh mobilitas penduduk dan perilaku reproduksi.

Permasalahan di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan cakupan jaminan kesehatan, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD yang diiringi dengan akreditasi puskesmas dan RSUD, pendampingan PHBS, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meminimalkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan angka balita gizi buruk.

4. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman menurun setiap tahunnya dan pada tahun 2018 mencapai 7,65%. Sedangkan jumlah KK miskin mencapai 8,77%. Meskipun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Kecamatan-kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi adalah kecamatan Seyegan, Minggir, Tempel, Prambanan, Turi dan Cangkringan yang merupakan wilayah-wilayah perdesaan dengan sektor penyanggga adalah pertanian. Pertanian ini terdiri dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan. NTP paling tinggi pada tahun 2018 adalah sub sektor hortikultura, sebesar 147,22. Berdasarkan gabungan dari 6 subsektor didapatkan NTP sebesar 119,02, meningkat dari tahun 2017 (107,05). Artinya indeks yang diterima petani 1,18 kali lebih besar dari indeks yang dibayar petani. Meskipun petani masih surplus, namun masih perlu ditingkatkan lagi kesejahteraannya.

BAPPEDA SLEMAN

Permasalahan kemiskinan semakin diperparah dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,76% Penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tahun 2018 tercatat sebanyak 830.851 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 601.570 jiwa dan 229.283 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 72,40%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 94,23% dari 67,73% pada tahun sebelumnya. Sedangkan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 0,26 dari 0,12 di tahun sebelumnya.

Selain itu relatif tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga menjadi masalah bagi Kabupaten Sleman. Kelompok PMKS yang aktif pada tahun 2018 sudah mencapai 353 kelompok. Hal ini dikarenakan adanya pendampingan dari pendamping PKH untuk KUBE PKH dan pendamping desa untuk PRSE. Selain itu, Dinas Sosial mengadakan seleksi dan penghargaan bagi KUBE berprestasi. Sedangkan PSKS aktif di Kabupaten Sleman ada 457 dari 772 PSKS.

Guna mengurangi permasalahan di atas, implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan strategi penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Dinas Kominfo melakukan pengolahan, updating dan analisis data penduduk miskin. Dinas Sosial sebagai *leading sector* penanggulangan kemiskinan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan serta memberikan layanan aduan masyarakat. Dinas kesehatan memfasilitasi jaminan kesehatan dengan melalui kepesertaan JKN PBI APBN sebanyak: 331.855 jiwa dan JKN PBI APBD sebanyak 100.648 jiwa. Dinas Pendidikan dengan menyediakan beasiswa pendidikan dasar bagi siswa miskin. Untuk stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, baik RTLH, jambanisasi dan layanan air bersih dilakukan oleh Dinas PUPKP dan DLH. Dinas Dukcapil melayani adminitrasi kependudukan, berupa akta catatan sipil

BAPPEDA SLEMAN

dan Kartu Tanda Penduduk. Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, manajemen kelembagaan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru oleh Dinas Koperasi dan UKM, Disnaker / BLK, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan perangkat daerah terkait lainnya diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran.

5. Infrastruktur

Prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Sleman belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang.

Adapun kondisi jalan kabupaten kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam pada tahun 2018 adalah 88,02%. Angka ini berarti bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa menjadi lebih rendah. Namun, kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya.

Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sleman, hanya terdapat di beberapa ruas saja terutama di wilayah perkotaan yang tersedia. Pada tahun 2018, drainase berkondisi baik tercatat sebesar 47%, semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar

BAPPEDA SLEMAN

tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri.

Kabupaten Sleman yang memiliki sejumlah areal persawahan, yang telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2018, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 63,48% dengan rasio pelayanan sebesar 0,60. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan pertanian budidaya (Ha).

Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, penerapan pengelolaan jaringan irigasi, partisipasi di masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal.

6. Lingkungan Hidup

Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan bantaran sungai dan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sampai tahun 2018 mencapai 0,08%. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup.

BAPPEDA SLEMAN

Berdasarkan data dari DLH DIY, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 898,75 Ha. Hal ini artinya luasan RTH publik belum mencapai 20% dari yang dipersyaratkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga selalu dapat terjamin. Untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, intervensi yang dilakukan adalah membuat target alih fungsi lahan untuk 5 (lima) tahun kedepan tidak lebih dari 100 Ha setiap tahunnya sesuai yang di rencanakan dalam RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatakan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan kawasan kumuh dan lahan kritis.

7. Ketentraman dan ketertiban umum

Kondisi Kabupaten Sleman yang heterogen dengan banyaknya warga pendatang, menimbulkan kerentanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain bidang ketentraman dan ketertiban umum, di bidang pemerintahan umum juga masih terdapat konflik sosial dan konflik SARA di masyarakat. Belum optimalnya penegakan perda juga menjadi salah satu permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban. Selain itu, angka kriminalitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 1,49%.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan sinergitas antar pemuka kelompok yang ada di masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah, misalnya FKUB, memberdayakan kelompok keamanan swadaya masyarakat, dan optimalisasi penegakan perda dengan meningkatkan respon terhadap pengaduan pelanggaran perda.

Terkait bencana, potensi bencana di Kabupaten Sleman sangat beragam, baik itu yang disebabkan oleh alam seperti angin ribut, letusan gunung dan tanah longsor, maupun yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Kawasan Area Terdampak

BAPPEDA SLEMAN

Langsung (ATL) bencana Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman telah ditetapkan, namun masih ada warga yang bersikeras untuk tinggal di kawasan tersebut. Terkait kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, belum semua masyarakat terlatih untuk tanggap bencana. Ketersediaan prasarana dan sarana kebencanaan belum memadai dengan masih adanya kawasan rawan bencana longsor yang belum dipasang EWS dan masih terdapatnya jalan evakuasi yang rusak.

Sampai tahun 2018, cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tercatat sebesar 0,93%, konstan sejak tahun 2014. Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 36,08% pada tahun 2018. Cakupan pelayanan ini terkait dengan area perkotaan yang terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sedangkan kawasan perkotaan lainnya yang merupakan ibukota kecamatan tersebar di wilayah perdesaan Kabupaten Sleman. Namun kondisi ini telah diimbangi dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2018 sebesar 78,79%.

Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang berpotensi terhadap bencana akan terus berupaya untuk membuat masyarakat lebih mandiri dalam tanggap bencana, selain juga memenuhi kekurangan sarana prasarana penanggulangan bencana. Dalam rangka menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, Kabupaten Sleman perlu terus mengembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah.

8. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman Tahun 2018 masih di angka 72,81. Angka ini masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2018 mencapai 81,39. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun 2018 sebesar 78,80. Walaupun sudah melampaui target, pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih

BAPPEDA SLEMAN

baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh perangkat daerah serta belum semua PD mempunyai SP.

Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, akan tetapi disisi lain penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa perlu dioptimalkan disesuaikan dengan perencanaan kabupaten agar proses pembangunan dapat lebih optimal dan akurat.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang pengelolaan SDM, keuangan, maupun pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat yang menunjang jabatan serta memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman harus terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah.

Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

Demikian pula, yang tidak boleh dikesampingkan adalah pendampingan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagaimanapun juga kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih baik jika didukung oleh pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.

9. Investasi dan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

BAPPEDA SLEMAN

Pengelolaan investasi di Kabupaten Sleman belum optimal, baik itu dari aspek perencanaan, pengembangan, maupun pelayanan perizinan. Potensi investasi belum terdata dengan akurat, sehingga informasi terkait dengan kesempatan berinvestasi di Kabupaten Sleman tidak terakses oleh investor. Pengembangan investasi terkendala dengan letak wilayah yang berada pada daerah resapan air yang menyebabkan industri besar tidak dapat didirikan di Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu untuk menggantikan hal tersebut harus dicari sektor yang lain yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Pelayanan perizinan sering kali belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga perlu diperketat dalam monitoring dan evaluasi SOP dan SP perizinan. Kemudahan layanan perizinan dan iklim yang kondusif untuk berusaha diharapkan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman sehingga investasi di Kabupaten Sleman terus meningkat.

Pada sektor pertanian, pola pangan harapan dan cadangan pangan pemerintah juga belum sesuai target yang diharapkan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memenuhi pola konsumsi yang beragam, bergizi, sehat dan aman, serta pentahapan dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah. Selain itu produktifitas pertanian juga masih perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan pengelolaan di bidang pertanian, baik sarana prasarana, peningkatan produksi dan pasca panen diharapkan akan meningkatkan kualitas sektor pertanian yang dapat meningkatkan nilai tukar petani yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani.

Daya saing atas potensi-potensi di Kabupaten Sleman harus terus ditingkatkan sehingga menaikkan nilai ekspor dari Kabupaten Sleman. Ekonomi lokal yang berupa potensi UMKM belum sepenuhnya mampu mengakses pasar yang lebih luas karena masih banyak produk UMKM yang belum bisa bersaing dengan produk serupa dari daerah lain. Pendampingan terhadap UMKM agar memiliki kriteria untuk masuk ke pasar bebas serta penguatan permodalan terus dilakukan oleh Kabupaten Sleman.

BAPPEDA SLEMAN

Kondisi alam yang subur dan menawan merupakan pontensi untuk pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan tetap mempertahankan lingkungan alamnya. Setiap desa wisata memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain sehingga antar desa wisata bisa saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai desa wisata mandiri.

BAPPEDA SLEMAN

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

"Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera,
Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government*
Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021"

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

Sejahtera : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap

BAPPEDA SLEMAN

dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dan meningkatnya daya saing daerah.

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing daerah dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berbudaya : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

BAPPE

Terintegrasikannya Sistem *e-government*	:	Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju *Smart Regency*, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan.

Visi Kabupaten Sleman tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

BAPPEDA

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi Pembangunan DIY 2017-2022:
"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Visi Pembangunan Sleman 2016-2021:
"Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* pada tahun 2021".

Gambar 5.1. Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman

Visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera selaras dengan visi pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan DIY sejahtera, di mana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Visi lebih mandiri selaras dengan visi nasional mandiri dan visi DIY mandiri yang berarti dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi lebih berbudaya selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong royong dan visi DIY berbudaya, di mana budaya yang ada di masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada kepribadian bangsa yang mengutamakan sifat kegotongroyongan. Visi terintegrasikannya sistem *e-government* adalah merupakan alat untuk menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya.

BAPPEDA SLEMAN

5.2. Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayan masayarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

BAPPEDA SLEMAN

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajeman pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, formulasi penataan ruang yang baik dan penguatan mitigasi bencana agar

BAPPEDA SLEMAN

sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman.

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak

.

Misi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019, dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Keselarasan Nawacita dengan Misi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman

No	9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) RPJMN 2015-2019	Misi RPJMN	Misi Pembangunan DIY 2017-2022	Misi Pembangunan Sleman 2016-2021
1.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan		

No	9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) RPJMN 2015-2019	Misi RPJMN	Misi Pembangunan DIY 2017-2022	Misi Pembangunan Sleman 2016-2021
2.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum	Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
		Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim		
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkea- dilan dan berkeadaban	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemam-puan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya		Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam mem-berikan pelayanan bagi masyarakat.
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

BAPPEDA SLEMAN

No	9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) RPJMN 2015-2019	Misi RPJMN	Misi Pembangunan DIY 2017-2022	Misi Pembangunan Sleman 2016-2021
6.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
				Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan
7.	Peningkatan kedaulatan pangan		Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Selain itu misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2006-2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.2
Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Sleman 2006-2025
dengan
Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

MISI RPJPD 2006 – 2025	MISI RPJMD 2016 – 2021
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

BAPPEDA SLEMAN

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.3
Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target								
						2016	2017	2018	2019		2020		2021	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B (72,81)	B (73,60)	B	BB (74,40)	B	BB (75,70)	A	BB (76,00)

BAPPEDA SLEMAN

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target								
						2016	2017	2018	2019		2020		2021	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Misi 2: Meningkat-kan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Mening-katkan pembangu-nan manusia	Indeks Pembangu-nan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	IPM= $\sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	%	80,90	80,98	81,05	81,10	83,02	81,13	83,12	81,15	83,49

BAPPEDA SLEMAN

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target								
						2016	2017	2018	2019		2020		2021	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Misi 3: Meningkat-kan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemam-puan ekonomi rakyat, dan penanggu-langan kemiskinan	Meningkat-kan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini berada antara 0 dan 1	Angka absolut 1 dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengelua-ran sampai dengan kelas yang dimaksud	Indeks	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	0,35 - 0,40	≤ 0,40	0,35 - 0,40	≤ 0,40	0,35 - 0,40

BAPPEDA SLEMAN

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target								
						2016	2017	2018	2019		2020		2021	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Misi 4: Memantap-kan dan meningkat-kan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyama-nan	Meningkat kan Kualitas lingkungan hidup dan kenyama-nan masyarakat	Jumlah lembaga tangguh bencana	Lembaga tangguh bencana meliputi desa tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana	Akumulasi jumlah lembaga tangguh bencana	Desa dan Satuan Pendidi-kan Aman Bencana	21 dan 36	29 dan 44	37 dan 52	45 dan 60	53 dan 68	53 dan 68	65 dan 72	61 dan 76	77 dan 76
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbagi dalam tiga kompenen yang terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKLH_ Sleman =(IKA+IKU+I KTL)/3 IKA = Indeks Kualitas Air, IKU= Indeks Kualitas Udara IKTL= Indeks Kulitas Tutupan Lahan	%	36,82	37	37,5	38	49,80	38,5	49,90	40	50,00

BAPEDA SLEMAN

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target									
						2016	2017	2018	2019		2020		2021	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Misi 5: Meningkat-kan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujud-kan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindu-ngan perempuan dan anak	Jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DIY	Desa budaya adalah desa yang mempunyai: struktur organisasi/pengurus, memiliki program dan rencana kegiatan serta memiliki potensi budaya seperti adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya	Jumlah desa budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY		8	10	12						
		Jumlah desa yang diusulkan menjadi desa budaya melalui Keputusan Gubernur DIY	sda	Jumlah desa yang diusulkan menjadi desa budaya	Desa					19		24		29

BAPPEDA SLEMAN

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target								
						2016	2017	2018	2019		2020		2021	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
		Indeks Pembangu-nan Gender	IPG adalah penca-paian kemampuan dasar pembangu-nan manusia yang sama seperti IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) dengan memperhi- tungkan ketimpa- ngan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM = IPG.	IPG = 1/3 {(Xede(1) + X ede (2) + I inc-dis)} Xede(1) = Xede untuk harapan hidup X ede (2) = X ede (2) untuk pendidikan I inc-dis = indeks distribusi pendapatan	%	96.15	96.20	96.25	96.30	95,80	96.35	95,89	96.40	95,89

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.4
Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

TUJUAN		SASARAN													
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								semula	menjadi	semula	menjadi	semula	menjadi	semula	menjadi
Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	B+	A	A	A	A	A (82,50)	A	A (83,00)	A	A (84,5)	A	A (84,5)
		Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkat-nya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	28	30	31	32	33	33	34	34	35	35	35	35
	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	78.61	78.67	78.74	78.8	78.87	81.59	78.9	81.80	79.00	82	79.00	82

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.5
Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

TUJUAN	SASARAN														
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Meningkatkan pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup	Tahun	74.47	74.47	74.48	74.48	74.49	74.78	74.49	74.80	74.49	74.82	74.49	74.82
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,17	78,20	78,27	78,26	78,29	78,30	78,32	78,32	78,35	78,35	78,35	78,35
		Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA	%	APK SD/MI≧ 116.81, APK SMP/ MTs ≥ 111.70, APK SMA/ SMK /MA : 88.69 APM SD/MI : 103.20 APM SMP/ MTs : 83.96 APM SMA/SMK /MA : 58.95	APK SD/MI ≧ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APK SMA/ SMK /MA : 86.45 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 83.97 APM SMA/ SMK/MA : 58.96	APK SD/MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 83.98	APK SD/ MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 83,99	APK SD/ MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 84	APK SD/MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 85,93	APK SD/ MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 84,01	APK SD/MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 85,95	APK SD/ MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 84,50	APK SD/MI ≧ 100, APK SMP/MTs ≥ 100, APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 85,97	APK SD/ MI ≧ 100, APK SMP/ MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 84,50	APK SD/ MI ≧ 100, APK SMP/MTs ≥ 100, APM SD/ MI : ≤100 APM SMP/ MTs : 85,97

BAPPEDA SLEMAN

TUJUAN	SASARAN														
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,28	10,33	10,36	10,39	10,42	10,75	10,45	10,80	10,48	10,85	10,48	10,85
		Harapan lama sekolah	Tahun	15,71	15,71	15,74	15,78	15,81	16,58	15,85	16,63	15,88	16,68	15,88	16,68
		Nilai rata rata Ujian :													
		SD	Nilai	236,17	236,17	236,18	236,20	236,21	210,00	236,21	210,10	236,22	210,20	210,20	211,33
		SMP	Nilai	261,65	261,65	261,66	261,68	261,70	256,50	261,70	256,60	261,71	256,65	261,71	256,65
		SMA	Nilai	335,25	335,25	335,26	335,28	335,28		335,30		335,30		335,30	
		SMK	Nilai	252,93	252,93	252,94	252,96	252,96		257,97		252,97		252,97	

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.6
Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021
Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

TUJUAN	SASARAN														
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	5,35	5,40	5,46	5,50	5,56	5,48	5,60	5,55	5,65	5,63	5,65	5,63
		Indeks Gini	Indeks	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Hari	Wisatawan Nusan-tara: 1,62 wisata-wan Manca-negara: 1,99	Wisatawan Nusan-tara: 1,63 wisata-wan Mancane-gara: 2,00	Wisatawan Nusantara: 1,64 wisata-wan Mancane-gara: 2,01	Wisatawan Nusantara: 1,65 wisatawan Manca-negara: 2,02	Wisatawan Nusantara: 1,66 wisatawan Manca-negara: 2,03	Wisatawan Nusantara: 2,00 wisatawan Manca-negara: 2,03	Wisatawan Nusantara: 1,67 wisatawan Manca-negara: 2,04	Wisatawan Nusantara: 2,01 Wisatawan Manca-negara: 2,04	Wisatawan Nusantara: 1,68 wisatawan Manca-negara: 2,05	Wisatawan Nusantara: 2,02 wisatawan Manca-negara: 2,04	Wisatawan Nusantara: 1,68 wisatawan Manca-negara: 2,05	Wisatawan Nusantara: 2,02 wisatawan Manca-negara: 2,04
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	4.117.000	4.117.000	4.323.000	4.561.000	4.834.000	8.000.000	5.149.000	8.200.000	5.149.000	8.500.000	5.149.000	8.500.000
		Nilai ekspor	US$	41,000,000	42,000,000	42,500,000	43,000,000	43.500.000	39,700,000	44.000.000	39,900,000	45.000.000	40,100,000	45.000.000	40.100.000
		Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2,73	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
		Nilai tukar petani	nilai	111,54	111,65	111,90	112,10	112,30	112,30	112,50	112,50	112,70	112,70	112,70	112,70

BAPPEDA SLEMAN

TUJUAN	SASARAN														
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
		Persentase peningkatan nilai produksi industri	%	2,65	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20	3,20
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	6.12	6.00	5.90	5.80	5.60	5.60	5.50	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40
	Meningkatnya prasarana dan sarana perekono-mian	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	%	63,0	65,99	69,54	71,07	72,59	77,91	74,11	79,07	76,00	80,23	76,00	80,23
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasaranan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	65,18 dan N/A	65,25 dan 71,04	65,45 dan 72,54	63,65 dan 73,71	66,85 dan 74,71	82,46% dan 85%	66,05 dan 75,54	82,50% dan 90%	66,25 dan 76,21	82,55% dan 95%	66,25 dan 76,21	82,55% dan 95%
	Menurunnya kemiskinan	Persentase KK miskin	%	11.36	10.69	10.02	9.35	8.68	8.68	8.50	8.50	8.00	8.00	8.00	8.00
		Persentase Penduduk Miskin					7.65		6.87		6,36		6,01		6,01

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.7
Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021
Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan Kenyamanan

TUJUAN	SASARAN													
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	Meningkat-nya kapasitas masyarakat dalam kepengu-rangan resiko bencana	Jumlah lembaga tangguh bencana	Desa	13	21	29	37	45	53	53	65	61	77	61	77
			Satuan Pendidi-kan Aman Bencana	28	36	44	52	60	68	68	72	76	76	76	76
	Meningkat-nya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	nilai	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	41.33	46,00	41.33	47,00	41.33	47,00	41.33
		Indeks Kualitas Udara	nilai	38,74	40	41	42	43	72	44	72	45	72	45	72
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	nilai	32,23	32,25	32,26	32,27	32,28	32,29	32,29	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.8
Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021
Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

TUJUAN	SASARAN														
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		AKHIR RPJMD	
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	539 (kasus)	1,00	0,98	0,96	0,94	2,5	0,92	2,3	0,90	2	0,90	2
	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Jumlah Konflik SARA	Kasus	2	≤5	≤5	≤4	≤4	≤4	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase Pelestarian warisan budaya	%	23,77	23,80	23,83	23,86	23,89	33,00	23,92	35,50	23,95	38,00	23,95	38,00

BAPPEDA SLEMAN

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga terdapat kesesuaian sebagaimana tabel berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 5.9
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
DIY dan Kabupaten Sleman

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021	Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Misi Kedua: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi Ketiga : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatkan pembangunan manusia 2. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat 4. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatkan derajat kualitas SDM	1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 4 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
						2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Menurunnya kemiskinan

BAPPEDA SLEMAN

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**
			Misi Keempat: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang , lingkungan hidup dan kenyamanan Misi Kelima : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional			3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam peng-embangan dan pelestarian budaya
						4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian 3. Meningkatnya kesempatan kerja. 4. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
						5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	

BAPPEDA SLEMAN

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**
		Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi Kesatu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e- govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
						2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	
						3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	

BAPPEDA SLEMAN

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi "**Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021"** maka strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sleman. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.
2. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.
3. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
4. Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadahi.
5. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
6. Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.

BAPPEDA SLEMAN

7. Adanya Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.
8. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
9. Tersedianya produk hukum daerah.
10. Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadahi.
11. Prasarana dan sarana pendidikan yang memadahi.
12. Adanya BOSDA dan Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD).
13. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
14. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.
15. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.
16. Meningkatnya indeks pembangunan gender.
17. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.

Kelemahan:

1. Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.
2. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.
3. Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
6. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
7. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
8. Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.
9. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
10. Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.
11. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.
12. Masih adanya kawasan kumuh.

BAPPEDA SLEMAN

13. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sleman.
14. Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
15. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
16. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
17. Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.
18. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.
19. Tersedianya produk hukum daerah.
20. Masih minimnya minat baca masyarakat.

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
2. APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.
3. Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.
4. Intervensi pemerintah dengan program 100-0-100.
5. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.
6. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.
7. Kewenangan di desa yang semakin banyak.
8. Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan.
9. Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
11. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
12. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.
13. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
14. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.

BAPPEDA SLEMAN

15. Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.

Ancaman:

1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
2. Adanya peraturan perundang undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.
3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.
4. Dampak buruk dari era globalisasi.
5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
7. Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.
8. Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.
9. Masih adanya anak putus sekolah.
10. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
11. Moratorium pegawai negeri sipil.
12. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.
13. Persaingan tenaga kerja asing.
14. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
15. Potensi kebencanaan di Kabupaten Sleman yang relatif besar.
16. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan.
17. Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Sleman.
18. Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.
19. Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.
20. Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang,

BAPPEDA SLEMAN

memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi Antara Kekuatan Dan Peluang

KEKUATAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pemerintahan yang sudah terintegrasi.	1.	Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	1.	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
2.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
3.	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.	3.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses desiminasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4.	Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.	4.	Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk,	4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
5.	Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadahi.	5.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	5.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa.
6.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.	6.	Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.	6. 7.	Mengembangnya Koperasi. Meningkatkan nilai eksport.
7.	Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal	7.	Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.	8. 9.	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan. Meningkatkan diversifikasi produk sektor parwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.
8.	Kesadaran berpolitik warga masyarakat yang semakin meningkat	8.	Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.	10.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.2
Strategi Antara Kelemahan Dan Peluang

KELEMAHAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.	1.	Kewenangan di desa yang semakin banyak.	1.	Penguatan kelembagaan Pemerintah desa.
2.	Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.	3.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	3.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa
4.	Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.	4.	Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.	4.	Meningkatkan peluang investasi daerah.
5.	Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sleman	5.	Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara	5.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
6.	Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.	6.	Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.	6.	Mengembangkan fasilitas perhubungan.
7.	Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.	7.	Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.	7.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
8.	Masih adanya kawasan kumuh	8.	Intervensi pemerintah dengan program 100-0-100	8.	Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh.
9.	Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.	9.	Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	9.	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
10.	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.	10.	Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan	10.	Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.3
Strategi Antara Kekuatan Dan Ancaman

KEKUATAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Adanya Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Pendampingan pelaksanaan *Road Map* Reformsi Birokrasi.
2.	Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.	2.	Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan	2.	Meningkatkan pendapatan asli daerah
3.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	3.	Moratorium pegawai negeri sipil.	3.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
4.	Tersedianya produk hukum daerah.	4.	Adanya peraturan perundang undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.	4.	Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah.
5.	Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadahi.	5.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	5.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. 7.	Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai. Adanya BOSDA dan Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD)	6.	Masih adanya anak putus sekolah.	6.	Memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan.
8.	Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.	7.	Persaingan tenaga kerja asing.	7.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
9.	Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.	8.	Potensi kebencanaan di Kabupaten Sleman yang relatif besar.	8.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
10	Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%	9.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	9.	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
11	Meningkatnya indeks pembangunan gender.	10.	Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.	10.	Mempercepat pengarusutamaan gender.
12	Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.	11.	Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.	11.	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan.

BAPPEDA SLEMAN

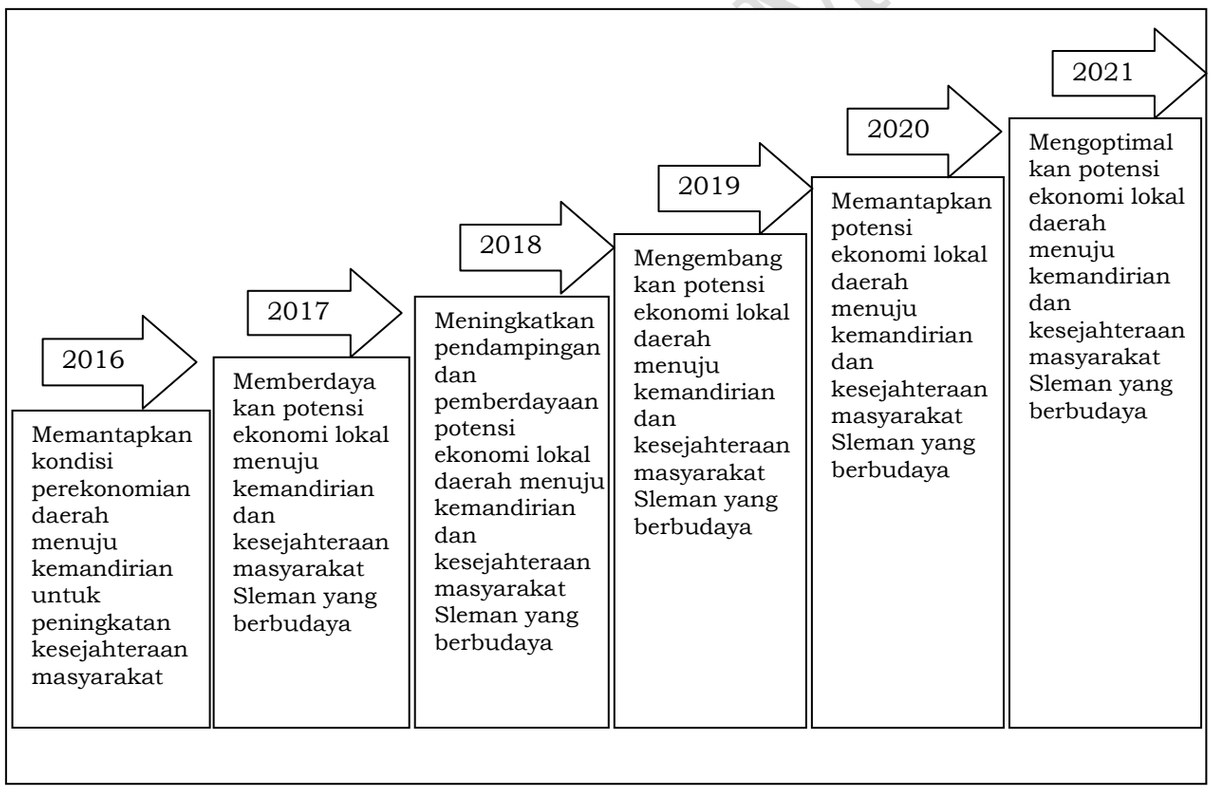
Tabel 6.4
Strategi Antara Kelemahan Dan Ancaman

KELEMAHAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Meningkatkan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2.	Tersedianya produk hukum daerah.	2.	Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.	2.	Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda.
3.	Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.	3.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	3.	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
4.	Masih minimnya minat baca masyarakat.	4.	Dampak buruk dari era globalisasi.	4.	Mengembangkan budaya baca.
5.	Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang belum maksimal.	5.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	5.	Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM
		6.	Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.	6.	Meningkatkan infrastruktur perekonomian.
6.	Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Sleman.	7.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	6.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
7.	Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.				
8.	Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.	7.	Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.	7.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
9.	Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.	8.	Potensi kebencanaan di Sleman yang relatif besar.	8.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
10.	Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal,	9.	Penurunan kualitas tanah, air dan udara	9.	Melaksanakan percepatan pengelolan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup.
11.	Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah	10.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	10.	Meningkatkan pengelolaan tata ruang

BAPEDA SLEMAN

KELEMAHAN		ANCAMAN		STRATEGI	
12.	Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.	11.	Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Sleman	11.	Meminimalkan konflik SARA dan konflik Ipoleksosbudhankam.
13	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.	12.	Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.	12.	Meningkatkan pelestarian terhadap tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan yang memiliki sinkronisasi dan konsistensi pada tiap tahunnya dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.1. Indikasi prioritas tema perencanaan tahunan Kabupaten Sleman 2016-2021

Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

1) **Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan: Strategi pertama,** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dengan **arah kebijakan** melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. **Strategi kedua**: Pendampingan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi dengan **arah kebijakan** perwujudan nilai AKIP A, perwujudan opini BPK terhadap LKD:WTP. **Strategi ketiga**: Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan **arah kebijakan** penetapan deviasi target PAD dengan realisasidan membentuk Badan Usaha Milik Daerah Baru, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. **Strategi keempat:** Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan **arah kebijakan** peningkatan indeks kepuasan masyarakat. **Strategi kelima:** meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi dengan **arah kebijakan** memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya. **Strategi keenam** adalah sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah dengan **arah kebijakan** penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan diatasnya.
2) **Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa: Strategi**, Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan **arah kebijakan** peningkatan pengelolaan keuangan desa.
3) **Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: Strategi,** Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran Perda dengan **arah kebijakan** penanganan setiap pelanggaran Perda.
4) **Urusan Komunikasi dan Informatika: Strategi,** meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan **arah kebijakan** penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah	Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
			Pendampingan pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi	Pewujudan Nilai AKIP Kabupaten: A
				Pewujudan Opini BPK terhadap LKD: WTP
			Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Peningkatan pengelolaan keuangan desa
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Pengurangan deviasi Target PAD dan realisasi
				Membentuk badan usaha milik daerah baru, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
			Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi	Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya
			Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah	Penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan di atasnya
			Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda	Penanganan setiap pelanggaran perda
			Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat	Penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

1) **Urusan kesehatan: Strategi**, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan **arah kebijakan** peningkatan cakupan jaminan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, akreditasi puskesmas dan RSUD serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
2) **Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana: Strategi**, mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan **arah kebijakan** menekan *Total Fertility Rate (TFR)***,**peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri dan peningkatan keluarga sejahtera.
3) **Urusan Pendidikan: Strategi kesatu**, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dengan **arah kebijakan** peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, menaikkan angka harapan sekolah dan menaikkan rata-rata lama sekolah. **Strategi kedua**: Meningkatkan kualitas kelulusan siswa dengan **arah kebijakan** menaikkan rata-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MI, dan SMK.
4) **Urusan Perpustakaan: Strategi,** mengembangkan budaya gemar membaca dengan **arah kebijakan** meningkatkan minat baca masyarakat, dan pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat.

Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan
				Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
				Penerapan pola hidup bersih dan sehat
				Akreditasi RSUD dan puskesmas
				Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

BAPPEDA SLEMAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Menekan *angka Total Fertility Rate* (TFR)
				Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
				Peningkatan keluarga sejahtera
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya	Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
				Menaikkan angka harapan sekolah
				Menaikkan rata-rata lama sekolah
			Meningkatkan kualitas kelulusan siswa	Menaikkan rata-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
			Mengembangkan budaya gemar membaca	Meningkatkan minat baca masyarakat
				Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

1) **Urusan penanaman modal: Strategi kesatu**, Meningkatkan peluang investasi daerah dengan **arah kebijakan** meningkatkan investasi inklusif.
2) **Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah : Strategi kesatu**, Mengembangkan koperasi dengan **arah kebijakan** meningkatkan keaktifan koperasi. **Strategi kedua,** Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM dengan **arah kebijakan** pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM serta meningkatkan aksesibilitas UMKM.
3) **Urusan pariwisata: Strategi kesatu,** meningkatkan pariwisata berkelanjutan dengan **arah kebijakan** meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata. **Strategi kedua,** Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata dengan **arah kebijakan** meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor pariwista.

BAPPEDA

4) **Urusan perdagangan: Strategi kesatu**, meningkatkan nilai ekspor dengan **arah kebijakan** memperluas pasar tujuan ekspor. **Strategi kedua**, meningkatkan diversifikasi produk sektor perdagangan dengan **arah kebijakan** meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor perdagangan.
5) **Urusan perindustrian: Strategi,** meningkatkan diversifikasi produk sektor perindustrian dengan **arah kebijakan** meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor perindustrian.
6) **Uusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan dan kelautan: Strategi,** meningkatkan diversifikasi produk sektor pangan, pertanian dan perikanan dengan **arah kebijakan** meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pangan, pertanian dan perikanan.
7) **Urusan Sosial: Strategi**, peningkatan penanganan kemiskinan dengan **arah kebijakan** menurunkan angka kemiskinan,
8) **Urusan tenaga kerja: Strategi**, peningkatan kualitas kerja dengan **arah kebijakan** peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar.
9) **Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang: Strategi**, Pengembangan infrastruktur perekonomian dengan **arah kebijakan** pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
10) **Urusan perhubungan: Strategi,** mengembangkan fasilitas perhubungan, dengan **arah kebijakan** menyediakan prasarana dan sarana lalu lintas berdasar rencana pengembangan wilayah

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.7
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkat-kan pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan peluang investasi daerah	Meningkatkan investasi inklusif
			Mengembangkan koperasi	Meningkatkan keaktifan koperasi
			Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM
				Meningkatkan aksessibilitas UMKM

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata
			Meningkatkan Nilai ekspor	Memperluas pasar tujuan ekspor
			Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
				Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
		Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar
		Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Meningkatkan insfrastruktur perekonomian	Pembangunan dan pemeliharan infrastruktur perekonomian
			Mengembangkan fasilitas perhubungan	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah
		Menurunnya kemiskinan	Meningkatkan penanganan kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

1) **Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: Strategi,** meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana menuju kemandirian dengan **arah kebijakan** menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana.

2) **Urusan lingkungan hidup: Strategi kesatu,** Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup dengan **arah kebijakan** menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, tempat pembuangan sampah dan meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. **Strategi kedua**, Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan **arah kebijakan** menyediakan ruang terbuka hijau. **Strategi ketiga**, meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh dengan **arah kebijakan** penanganan terhadap kawasan kumuh.

3) **Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang: Strategi**, Meningkatkan pengelolaan tata ruang dengan **arah kebijakan** pengendalian pemanfaatan ruang dan pengadaan regulasi tata ruang (RDTR).

Tabel 6.8
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkat-kan Kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana menuju kemandirian	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup	Menyediakan IPAL komunal, Sambungan air minum, TPS 3R
				Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
			Meningkatkan ketersedian Ruang Terbuka Hijau	Menyediakan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh	Penanganan terhadap kawasan kumuh
			Meningkatkan pengelolaan tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang
				Regulasi tata ruang (RDTR)

DRAFT FINAL

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

1) **Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: Strategi kesatu,**meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan **arah kebijakan** meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. **Strategi kedua**, Mempercepat pengarusutamaan gender dengan **arah kebijakan** Penguatan kelembagaan PUG.
2) **Urusan pemerintahan umum: Strategi kesatu,** meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi dengan **arah kebijakan** meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. **Strategi kedua,** meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan dengan **arah kebijakan** sosialisasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi kesadaran berpolitik kepada masyarakat. **Strategi ketiga**, meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam dengan **arah kebijakan** memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam.
3) **Urusan kebudayaan: Strategi**, Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya dengan **arah kebijakan** pengelolaan warisan budaya. **Strategi kedua,** Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya dengan **arah kebijakan** pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Tabel 6.9
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.	Meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.
			Mempercepat pengarusutamaan gender	Penguatan kelembagaan PUG
		Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu

BAPPEDA SLEMAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Sosialisasi wawasan kebangsaan
				Sosialisasi kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat
			Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam	Memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhan-kam
		Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya	Pengelolaan warisan budaya
			Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya	Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya

6.2 Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman

Strategi Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWT-JM) Kabupaten Sleman merupakan pengembangan tematis kawasan strategis seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang Kabupaten Sleman dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan strategis terpilih baik Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Kebijakan yang diambil dalam pembangunan wilayah terpadu mendasarkan kepada kebijakan penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sleman 2011-2031 meliputi:

1. Pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;
2. Pengembangan kawasan dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;

BAPPEDA SL

4. Pengembangan kawasan pendidikan;
5. Pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
6. Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
7. Pemantapan prasarana wilayah; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara

Pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana ditempuh melalui strategi (a) mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana di dalam KPY; (b) meningkatkan hubungan PPL dengan PKW, PPK dan atau PKL; (c) menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan; dan (d) mengembangkan PPL di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi III.

Arah kebijakan yang ditempuh meliputi: (a) Pengembangan PKN di 14 Desa di 6 Kecamatan dengan luas 9.835 hektar; (b) Pengembangan dan pemantapan PKW di Kecamatan Sleman dengan luas 504 hektar;(c)Pengembangan PKL di 4 Kecamatan dengan luas 1.548 hektar;(d)Pengembangan PPK di 11 Kecamatan dengan luas 6.404 hektar;(e)Pemindahan PPK di Kecamatan Cangkringan; (f) Pengembangan PPL di kawasan perdesaan Kabupaten Sleman; (g) Pemindahan PPL di Kecamatan Cangkringan meliputi 2 Desa.

Pengembangan kawasan dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan diwujudkan melalui strategi (a) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan (b) mengembangkan agrobisnis dan minapolitan.

Arah kebijakan yang ditempuh meliputi: peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), peningkatan produksi hortikultura, peningkatan produksi perkebunan, peningkatan produksi peternakan, pengembangan kawasan agropolitan, kawasan peruntukan perikanan, peningkatan produksi perikanan darat dan pengembangan minapolitan.

Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi diwujudkan melalui strategi mengembangkan obyek dan daya tarik wisata,

BAPPEDA SLEMAN

mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, dan melestarikan situs warisan budaya. Arah kebijakan yang diambil di dalam mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi adalah pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata yang meliputi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan prasarana dan sarana pariwisata.

Pengembangan kegiatan pendidikan terutama pendidikan tinggi merupakan aktivitas utama yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Sleman, selain kegiatan permukiman, pariwisata dan pertanian. Pengembangan kawasan pendidikan diwujudkan melalui strategi:

a. revitalisasi pendidikan; dan
b. mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan.

Pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan diwujudkan melalui strategi mengembangkan kawasan peruntukan industri, mengembangkan sentra industri kecil dan menengah dan mengembangkan industri ramah lingkungan. Arah kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan Kawasan peruntukan industri yang mencakup pengembangan industri kecil dan menengah, penataan struktur industri dan pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan ditempuh melalui strategi mengembangkan kawasan permukiman di luar KRB, mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan. Arah kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman yang berupa:

a. Pengembangan permukiman perkotaan di Kabupaten Sleman dengan luas 12.590 hektar.
b. Pengembangan permukiman perdesaan di Kabupaten Sleman dengan luas 10.733 hektar.
c. Pengembangan huntara dan huntap.

Pemantapan prasarana wilayah diwujudkan melalui strategi memelihara dan mempertahankan fungsi prasarana wilayah dan

BAPPEDA SLEMAN

mengembangkan prasarana transportasi massal. Arah kebijakan yang diambil ialah pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat, Sistem Jaringan Perkeretaapian, Sistem Jaringan Transportasi Udara, Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara diwujudkan melalui strategi:

a. mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Strategi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui arah kebijakan pengendalian perubahan peruntukan ruang disekitar kawasan pertahanan dan keamanan, di Gamping, Depok, dan Berbah dengan luas 472 hektar.

Wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga skala kawasan strategis, ialah Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSK) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSN meliputi KSN Candi Prambanan dan KSN Taman Nasional Gunung Merapi. KSP meliputi KSP Kawasan Perkotaan Yogyakarta, KSP Koridor Tempel-Prambanan, KSP Koridor Tempel – Parangtritis, KSP Koridor Yogyakarta –Piyungan – Wonosari – Rongkop – Sadeng, KSP Teknologi Tinggi Gunung Merapi, KSP Cagar Budaya, KSP IKK Godean, KSP IKK Pakem, KSK Keamanan dan Ketahanan Pangan Wilayah dan KSK Kawasan Resapan Air.

Guna melaksanakan Pembangunan Wilayah Terpadu, kemudian dari kawasan-kawasan strategis tersebut, diturunkan menjadi 21 (dua puluh satu) Kawasan Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka

BAPPEDA SLEMAN

Menengah Kabupaten Sleman. Kedua puluh satu kawasan beserta skala prioritas pengembangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10
Prioritas Kawasan PWT Jangka Menengah Kabupaten Sleman

No	Kawasan PWTJM	Kaitan Kawasan Strategis	Prioritas
1.	Kawasan Ketahanan Pangan	KSK	1
2.	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck	KSK	2
3.	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh	KSK	3
4.	Kawasan Transisi Resapan Air	KSK	4
5.	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi	KSK	5
6.	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko-Kalasan	KSN	6
7.	Wisata Gunungapi Merapi	KSN	7
8.	Koridor Tempel-Sleman-Mlati	KSP	8
9.	KPY Wilayah Sleman	KSP	9
10.	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan	KSP	10
11.	Koridor Berbah	KSP	11
12.	Perkotaan PKL Godean	KSP	12
13.	Kawasan Resapan Air	KSK	13
14.	Kawasan Candi dan Artefak	KSP	14
15.	Super blok Depok	KSP	15
16.	Perkotaan PKL Pakem	KSP	16
17.	Kawasan Olah raga dan RTH Maguwo	KSP	17
18.	KRB Gunung Merapi	KSN	18
19.	Kawasan Dry port Patukan	KSP	19
20.	Riset Merapi	KSP	20
21.	Pertanian Perkotaan	KSK	21

Sumber: PWTJM Kabupaten Sleman,2015

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.11
Tahap Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Menengah Kabupaten Sleman
berdasarkan Prioritas per Kawasan Strategis

No.	Kawasan Strategis	Tahun Pelaksanaan				
		1	2	3	4	5
Kawasan Strategis Nasional						
1	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko Kalasan	■	■			■
2	Wisata Gunungapi Merapi		■	■		
3	Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi			■	■	
Kawasan Strategis Provinsi						
1	Koridor Tempel-Sleman-Mlati	■	■			
2	KPY Wilayah Sleman	■	■			
3	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan		■			
4	Koridor Berbah		■			
5	Perkotaan PKL Godean			■		
6	Kawasan Candi dan Artefak			■		
7	Super blok Depok				■	
8	Perkotaan PKL Pakem				■	
9	Kawasan Olah raga dan RTH Maguwo				■	
10	Kawasan Dry port Patukan					■
11	Riset Merapi					■
Kawasan Strategis Kabupaten						
1	Kawasan Ketahanan Pangan	■	■			
2	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck		■			
3	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh		■			
4	Kawasan Transisi Resapan Air			■		
5	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi			■		
6	Kawasan Resapan Air			■		
7	Pertanian Perkotaan				■	■

Sumber: PWTJM Kab. Sleman, 2015

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.12
Lokasi Kawasan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman

No	Kawasan PWTJM	Lokasi
1.	Kawasan Ketahanan Pangan	Moyudan – Minggir – Godean- Seyegan
2.	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck	Moyudan – Minggir – Godean- Seyegan – Gamping- Mlati – Depok – Kalasan – Berbah
3.	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh	Tempel – Turi – Pakem
4.	Kawasan Transisi Resapan Air	Tempel-Turi- Pakem-Ngaglik- Ngemplak-Kalasan
5.	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi	Berbah-Kalasan-Prambanan- Ngemplak
6.	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko-Kalasan	Prambanan, Kalasan, Berbah
7.	Wisata Gunungapi Merapi	Cangkringan, Pakem, Turi, Tempel
8.	Koridor Tempel-Sleman-Mlati	Koridor Tempel- Sleman – Mlati
9.	KPY Wilayah Sleman	Depok, Ngaglik, Mlati, Gamping, Godean
10.	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan
11.	Koridor Berbah	Berbah
12.	Perkotaan PKL Godean	Godean
13.	Kawasan Resapan Air	Tempel-Turi- Pakem
14.	Kawasan Candi dan Artefak	Kawasan UII-Ngemplak-Kalasan-Candisari-Sambisari- Kedulan Kompleks
15.	Super blok Depok	Caturtunggal-Depok
16.	Perkotaan PKL Pakem	Pakem
17.	Kawasan Olah raga dan RTH Maguwo	Stadion Maguwoharjo-Embung Tambakboyo, Kalikuning dan sekitarnya
18.	KRB Gunung Merapi	Cangkringan, Pakem, Ngemplak, Turi
19.	Kawasan Dry port Patukan	Stasiun Patukan-Gamping
20.	Riset Merapi	Disaster Oasis-Pakem-Museum Merapi – Pakem
21.	Pertanian Perkotaan	Gamping – Mlati – Depok

Sumber: PWTJM Kabupaten Sleman, 2015

BAPEDA SLEMAN

Adapun Sinergi Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah dengan prioritas pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota yang berbatasan adalah bahwa Strategi Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWT-JM) Kabupaten Sleman merupakan penjabaran kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan yang yang ada pada Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten. Untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Sleman, ditetapkan tematik pengembangan kawasan dalam Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 6.13
Tematik Pengembangan Kawasan Dalam Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman

No.	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Prioritas Spesifik Bagi Kab. Sleman	Tematik Pengembangan PWT-JM Kab. Sleman
Kawasan Strategis Nasional (RTRW Nasional)				
1	KSN Candi Prambanan	Cagar Budaya	1. Pengembangan ekonomi sosial budaya bagi wilayah Sleman, khususnya kawasan dan masyarakat di sekitar KSN Candi Prambanan. 2. Menjadikan Candi Prambanan dan Ratu Boko sebagai branding budaya Kabupaten Sleman	KawasanPenyangga Prambanan Ratu Boko
2	KSN TNGM	Cagar Alam dan Kawasan Bencana Gunungapi	1. Konservasi kawasan lindung dan rawan bencana; 2. Mewujudkan tata kelola pengembangan wilayah lereng Gunung Merapi yang tanggap bencana. 3. Pengembangan pariwisata alam dan minat khusus	1. Kawasan Wisata Gunungapi Merapi 2. KRB Gunung Merapi
Kawasan Strategis Provinsi (RTRW DIY)				
1	KSP Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kawasan perkotaan regional	1. Pengembangan, pengelolaan dan pengendalian kawasan perkotaan	1. KPY Wilayah Sleman 2. Superblok Depok 3. Kawasan Olah

BAPPEDA SLEMAN

No.	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Prioritas Spesifik Bagi Kab. Sleman	Tematik Pengembangan PWT-JM Kab. Sleman
			regional dengan standar metropolitan. 2. Peningkatan kemitraan dan daya saing dalam kerjasama pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).	Ragadan RTH Maguwo
2	KSP Koridor Temon-Prambanan	Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan koridor pertumbuhan ekonomi regional.	1. Koridor Godean-Gamping-Mlati-Kalasan-Prambanan 2. Kawasan *Dryport* Patukan 3. Koridor Tempel-Sleman-Mlati 4. Koridor Berbah
3	KSP Koridor Tempel-Parangtritis	Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan koridor pertumbuhan ekonomi regional.	
4	KSP Teknologi Tinggi Gunung Merapi	Sains dan Teknologi	Pengembangan kawasan riset, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana kegunungapian.	Riset Merapi
5	KSP Cagar Budaya	Cagar Budaya	Pengelolaan cagar budaya sebagai bagian pengembangan budaya dan perekonomian wilayah.	Kawasan Candi & artefak
6	KSP IKK Godean	kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pusat kegiatan pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk Sleman bagian barat.	Perkotaan PKL Godean
7	KSP IKK Pakem	kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pusat kegiatan pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk Sleman bagian utara, sekaligus pengendalian pengembangan kawasan resapan air dan rawan bencana vulkanik.	Perkotaan PKL Pakem
Kawasan Strategis Kabupaten (RTRW Kab. Sleman)				
1	KSK Keamanan dan Ketahanan Pangan Wilayah	Pertanian	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan	1. Keamanan Ketahanan Pangan 2. Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi 3. Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram & Van derWijck 4. Kawasan

BAPPEDA SLEMAN

No.	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Prioritas Spesifik Bagi Kab. Sleman	Tematik Pengembangan PWT-JM Kab. Sleman
				Perkebunan Salak Pondoh 5. Pertanian Perkotaan
2	KSK Kawasan Resapan Air	Lingkungan hidup	1. Pengendalian pembangunan wilayah pada kawasan resapan air dan transisi resapan air. 2. Pengembangan pertanian unggulan selaras kawasan resapan air dan transisi resapan air.	1. Kawasan ResapanAir 2. Kawasan Transisi Resapan Air

Tematik Pengembangan PWT-JM Kabupaten Sleman dianalisa melalui pembobotan dengan menggunakan kriteria pengembangan wilayah. Dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah:

a. Mendukung prioritas nasional & provinsi
b. Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah
c. Memiliki dampak positif terhadap perekonomian kawasan dan masyarakat
d. Memiliki daya ungkit signifikan terhadap pembangunan kawasan
e. Kemudahan untuk dikelola

Sehingga didapat prioritas pengembangan kawasan sebagai berikut:

Tabel 6.14
Prioritas Pengembangan Kawasan

Prioritas	Tematik Kawasan PWT-JM Kabupaten Sleman	
Kawasan Strategis Nasional		
1	N2A	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko Kalasan
2	N1A	Wisata Gunungapi Merapi
3	N1B	Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi
Kawasan Strategis Provinsi		
1	P4	Koridor Tempel Sleman
2	P1	Kawasan Perkotaan Yogyakarta Wilayah Sleman
3	P3	Koridor Gamping-Berbah-Kalasan-Prambanan
4	P2	Koridor Berbah

BAPPEDA SLEMAN

Prioritas	Tematik Kawasan PWT-JM Kabupaten Sleman	
5	P7A	Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Godean
6	P5	Kawasan Candi dan Artefak
7	P1A	Super Blok Depok
8	P7B	Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pakem
9	P1B	Kawasan Olahraga dan RTH Maguwoharjo
10	P3A	Kawasan Dry Port Patukan
11	P6	Riset Merapi
Kawasan Strategis Kabupaten		
1	K2	Keamanan Ketahanan Pangan
2	K2A	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram
3	K2B	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh
4	K1B	Kawasan Transisi Resapan Air
5	K2C	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi
6	K1A	Kawasan Resapan Air
7	K2D	Kawasan Pertanian Perkotaan

Adapun Rencana PWT-JM Kabupaten Sleman dikaitkan dengan prioritas pengembangan Kabupaten/Kota yang berbatasan yang dilakukan dengan strategi mensinergikan tujuan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP)Kabupaten/Kota yang berbatasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing Kabupaten Kota.

Tabel 6.15
Sinergitas Rencana PWT-JM Kabupaten/Kota dan tujuan BWP Kabupaten/Kota, serta Keterkaitan dengan PWT-JM Kab. Sleman

No	Kabupaten/Kota yang berbatasan	Tujuan BWP	Keterkaitan dengan PWT-JM Kab. Sleman
1	Kota Yogyakarta	Mewujudkan BWP Kota Yogyakarta dalam mendorong pengembangan ekonomi perkotaan yang didasarkan pada kegiatan pariwisata, pendidikan dan budaya.	▪ Pengembangan KPY WilayahSleman dengan skala Kawasan Perkotaan regional yang menitikberatkan pada sektor Perdagangan dan jasa,perumahan, dan pendidikan tinggi ▪ Pengembangan Superblok Depok sebagai PusatPengembanganPerkotaanTerpadu pada sektor Perdagangan dan jasa skala regional (termasuk pendidikan tinggi), dan perumahan vertikal. ▪ Pengembangan Kawasan Olahraga dan RTHMaguwo sebagai fasilitas olahraga dan RTH dengan aspek unggulan Fasilitas olahraga outdoor/indoor dan taman kota/rekreasi outdoor

BAPPEDA SLEMAN

No	Kabupaten/Kota yang berbatasan	Tujuan BWP	Keterkaitan dengan PWT-JM Kab. Sleman
2	Kabupaten Bantul	Mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan,dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	▪ Pengembangan Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan, Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi, Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan vander Wijck, serta Pertanian Perkotaan dengan sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perikanan. ▪ Penataan Kawasan Rawan Bencana Merapi dengan strategi pengurangan resiko bencana dan pengembangan pariwisata lansekap dan Minat Khusus. ▪ Pengembangan KPY Wilayah Sleman dengan skala Kawasan Perkotaan regional yang menitikberatkan pada sektor Perdagangan dan jasa, perumahan, dan pendidikan tinggi.
3	Kabupaten Magelang	Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.	▪ Pengembangan Koridor Tempel-Sleman sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan aspek unggulan pada sektor Perdagangan dan jasa, Industri, dan Rest Area ▪ Penataan Kawasan Resapan Air dan Kawan Transisi Resapan Air melalui konservasi KRA dan Pengendalian Pembangunan pada kawasan transisi resapan air
4	Kabupaten Kulonprogo	Mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah	▪ Pengembangan Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan, Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi, Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck, serta Pertanian Perkotaan dengan sektor unggulan Tanaman pangan, hortikultura dan perikanan.
5	Kabupaten Klaten	Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.	▪ Pengembangan Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko dengan aspek unggulan Konservasi cagar budaya, pariwisata budaya, perdagangan & jasa pendukung wisata budaya (pasar kerajian, pasar hewan tradisional) ▪ Penataan Kawasan Rawan Bencana Merapi dengan strategi pengurangan resiko bencana dan pengembangan pariwisata lansekap dan Minat Khusus.

BAPPEDA SLEMAN

6.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

Alur proses penyusunan KLHS RPJMD sebagai berikut:

1. Pra pelingkupan
   a. Identifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
   b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
   c. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
   d. Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

   Berdasarkan kajian didapatkan 179 isu pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) oleh seluruh stakeholder yang meliputi unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia pendidikan.
2. Pelingkupan
   a. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan;
   b. Penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan;
   c. Penyepakatan hasil penapisan.

      Berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan isu-isu pembangunan tersebut dikelompokkan menjadi 16 kelompok isu untuk dianalisis lebih lanjut sesuai tiga tema utama, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial.
3. Baseline data

   Baseline data diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi.

BAPPEDA SLEMAN

4. Pengkajian

a. Kajian keterkaitan, meliputi:

1) Keterkaitan antar wilayah;

2) Keterkaitan antar waktu;

3) Keterkaitan antar sektor;

4) Keterkaitan antar pemangku kepentingan;

b. Kajian keseimbangan, meliputi:

1) Keseimbangan antar kepentingan ekonomi;

2) Keseimbangan sosial budaya;

3)Keseimbangan lingkungan hidup.

c. Kajian keadilan, meliputi:

1) Keadilan antar kelompok masyarakat

2) Keadilan antar generasi

Kajian juga dilakukan dengan melihat gap antara target dan realisasi capaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman dan didapatkan masih adanya 17 indikator yang belum tercapai dengan gap terbesar pada persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan.

5. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana program (KRP).

Berdasarkan kajian didapatkan 176 KRP dengan 19 KRP yang berpotensi memiliki dampak negatif yang 4 diantaranya memiliki potensi dampak terhadap lingkungan sangat tinggi, yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Perumahan, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, dan Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

6. Rekomendasi perbaikan.

Hal yang paling krusial dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam RPJMD agar memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan. Program dan rekomendasi mitigasi dalam KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.16
Rekomendasi Mitigasi

No	Muatan KRP	Alternatif Penyempurnaan KRP	Materi Perbaikan KRP
1	Program Pengembangan Perumahan	a. Pembuatan kajian lingkungan terkait lokasi yang diperuntukan untuk pengembangan perumahan layak huni	Menurunkan angka kemiskinan serta penanganan terhadap kawasan kumuh
		b. Manajemen lalu lintas untuk menghindari kemacetan	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah
		c. Pengolahan dan pengelolaan limbah padat atau cair	Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R
		d. Pengendalian perkembangan permukiman sesuai aturan tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang dan Regulasi RDTR
		e. Pengembangan lingkungan permukiman yang nyaman	Menyediakan ruang terbuka hijau
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	a. Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah	Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup
		b. Pembangunan TPST3R dan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R	Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R
3	Program pembangunan prasarana dan sarana ekonomi	a. Penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan rencana pengembangan wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian

BAPPEDA SLEMAN

No	Muatan KRP	Alternatif Penyempurnaan KRP	Materi Perbaikan KRP
		b. Peningkatan aksesibilitas UMKM	Meningkatkan aksesibilitas UMKM
		c. Peningkatan arus investasi untuk menggerakkan UMKM	Meningkatkan investasi inklusif
		d. Pengelolaan air bersih dan limbah prasarana ekonomi secara tepat guna	Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R
4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	a. Peningkatan pembinaan dan pemantauan hasil produk industri	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
		b. Pelibatan UMKM dalam indutri	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM
		c. Pengelolaan dan pengolahan limbah padat atau cair oleh perusahaan	Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R

BAPPEDA SLEMAN

Selain rekomendasi mitigasi, analisis KLHS juga telah merekomendasikan perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program. Rekomendasi-rekomendasi tersebut telah diintegrasikan dan dicantumkan secara eksplisit pada beberapa bagian, terutama dalam arah kebijakan di misi 3 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sleman.

6.4 Program Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem*e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”. Visi ini dilaksanakan dengan 5 (lima) misi untuk kemudian dijabarkan dalam

tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Program pengembangan data dan informasi
4. Program pengkajian dan penelitian bidang iptek
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
7. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
8. Program pengembangan kualitas kebijakan publik
9. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
10. Program peningkatan budaya pemerintahan
11. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
12. Program peningkatan administrasi pemerintahan
13. Program kerjasama pembangunan
14. Program pengembangan wilayah perbatasan
15. Program kerjasama dan informasi dan media masa
16. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
17. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
18. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
19. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
20. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
21. Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan

BAPPEDA SLEMAN

22. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
23. Program pelayanan administrasi perkantoran
24. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
26. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
27. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
28. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
29. Program pengelolaan pendapatan daerah
30. Program penataan administrasi kependudukan
31. Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
32. Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
33. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
34. Program pendidikan kedinasan
35. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
36. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
37. Program penataan peraturan perundang-undangan
38. Program pelayanan dan bantuan hukum
39. Program penegakkan hukum
40. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
41. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
42. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
43. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
44. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
45. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
46. Program peningkatan kemanan dan kenyaman lingkungan
47. Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

BAPPEDA SLEMAN

48. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemanan
49. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
50. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
51. Program penyelesaian konflik konflik pertanahan
52. Program pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten
53. Program pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi di atas didukung oleh Program:

1. Program obat dan perbekalan kesehatan
2. Program upaya kesehatan masyarakat
3. Program pengawasan obat dan makanan
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Program perbaikan gizi masyarakat
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
7. Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan
14. Program pengembangan lingkungan sehat
15. Program keluarga berencana
16. Program kesehatan reproduksi remaja
17. Program pelayanan kontrasepsi
18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

BAPPEDA SLEMAN

19. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
21. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU
22. Program perencanaan sosial budaya
23. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
24. Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
25. Program manajemen pelayanan pendidikan
26. Program pendidikan anak usia dini
27. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
28. Program pendidikan menengah
29. Program peningkatan kualitas pendidikan non formal
30. Program pengembangan budaya baca
31. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
32. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
33. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
34. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
35. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
36. Program pengembangan dan keserasian hidup pemuda
37. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
6. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

BAPPEDA SLEMAN

8. Program pembinaan dan penataan pedagang pasar
9. Program perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
10. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
11. Program perencanaan pembangunan ekonomi
12. Program pengembangan pemasaran pariwisata
13. Program pengembangan destinasi pariwisata
14. Program pengembangan kemitraan
15. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
16. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
17. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
18. Program peningkatan kesempatan kerja
19. Program transmigrasi regional
20. Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
21. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan lainnya
22. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
23. Program pembangunan insfrastruktur perdesaan
24. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
25. Program pembangunan jalan dan jembatan
26. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
27. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
28. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
29. Program peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan
30. Program pembinaan jasa konstruksi
31. Program pengembangan desa wisata
32. Program peningkatan kesejahteraan petani
33. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
34. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
35. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
36. Program peningkatan produksi hasil peternakan
37. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
38. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

BAPPEDA SLEMAN

39. Program pengembangan budidaya perikanan
40. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
41. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
42. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
43. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
44. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
45. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
46. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
47. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
48. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
49. Program pengembangan industri kecil dan menengah
50. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
51. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
52. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
53. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
54. Program pembinaan anak terlantar
55. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
56. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
57. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
58. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
59. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
60. Program pengembangan perumahan
61. Program pengembangan energi terbarukan
62. Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.
63. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
64. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
65. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
66. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ
67. Program peningkatan pelayanan angkutan

BAPPEDA SLEMAN

68. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
69. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
70. Program keselamatan lalu lintas
71. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
3. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
6. Program perencanaan tata ruang
7. Program pengendalian pemanfaatan ruang
8. Program pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten
9. Program penyediaan dan pengolahan air baku
10. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
11. Program pengandalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
12. Program peningkatan pengendalian polusi
13. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
14. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
15. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
16. Program lingkungan sehat perumahan
17. Program pengelolaan areal permakaman
18. Program pengembangan sistem informasi pertanahan
19. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

BAPPEDA SLEMAN

20. Program rehabilitasi hutan dan lahan
21. Program perencanaan dan pengembangan hutan

Misi 5:Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
5. Program pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program pengembangan nilai budaya
9. Program pengelolaan kekayaan budaya
10. Program pengelolaan keragaman budaya
11. Program pelestarian pengembangan peninggalan budaya
12. Program sejarah, bahasa, sastra dan permusiuman
13. Program pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
14. Program sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan
15. Program adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya
16. Program pengelolaan taman budaya
17. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Adapun keterkaitan antara misi, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan beserta program dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 6.17

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021
Misi 1 : Meningkakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	**Strategi :** 1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah 2. Pendampingan pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi 3 Penguatan kelembagaan pemerintahan desa **Arah Kebijakan :** 1. Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 2 Pewujudan Nilai LAKIP: A 3 Pewujudan Opini BPK terhadap LKD: WTP 4 Peningkatan pengelolaan keuangan desa	Predikat AKIP kabupaten	BB (77,89)	A (84,50)	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN,
						Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	Inspektorat Daerah	BKPP, KEC. GAMPING, SETDA, D.PPTR, BADAN KESBANG, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, DINAS PERPUS DAN ARSIP DAERAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK KEC.NGEMPLAK, KEC.NGAGLIK, KEC.SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIK, DISPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, BAPPEDA, D.PERTANIAN PP, DISNAKER, DINSOS, D.LH, D.PMP2T, D.PUP DAN KP, D.KEBUDAYAAN, D.PARIWISATA, D.DUKCAPIL, BKAD, D.PERHUBUNGAN, DISKOMINFO, SETWAN, D.PPPA PP DAN KB, DISPERINDAG, DINAS KOPERASI DAN UKM, D.PMD
						Program peningkatan pengembangan sistem	Urusan Utama Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
						Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
						Program peningkatan budaya pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
						Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	--
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas PMD	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan administrasi pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN D. PMD
						Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	--
						Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BKPP, KEC. GAMPING, SETDA, BADAN KESBANGPOL, KEC. BERBAH, DINAS PERPUS DAN ARSIP DAERAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIK, DISPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, D.PERTANIAN PP, DISNAKER, DINSOS, D.LH, D.PMP2T, D.KEBUDAYAAN, D.PARIWISATA, D.DUKCAPIL, BKAD, D.PERHUBUNGAN, DISKOMINFO, DISPERINDAG, DINAS KOPERASI DAN UKM, SETWAN, D.PPTR, D.PUP DAN KP, D.PPPA PP DAN KB, RSUD SLEMAN, D.PMD

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Keuangan	Dinas PMD	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN SETDA
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Strategi: 1 Peningkatan Pendapatan asli Daerah Arah Kebijakan: 1 Pengurangan deviasi Target PAD dan realisasi	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30%	35%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	D.PMP2T SETDA

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi: 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 2 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat 3 Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi 5 Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah 6 Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda **Arah Kebijakan:** 1 Peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat 2 Penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifam sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah 3 Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya 4 Penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan di atasnya 5 Penanganan setiap pelanggaran perda	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.67	82.00	Program pengembangan data/ informasi	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program pengkajian dan penelitian bidang iptek	Penelitian dan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program peningkatan kulitas pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	BKPP, KEC. GAMPING, BADAN KESBANGPOL, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BAPPEDA, D.PERTANIAN PP, D.PMP2T, D.PUP DAN KP, BKAD, DISPERINDAG, SETWAN, D.PPPA PP DAN KB, DINSOS, DISKOMINFO

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program kerjasama pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
						Program pengembangan wilayah perbatasan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	--
						Program kerjasama informasi dan media massa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	SETWAN DISKOMINFO D.PMP2T
						Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
						Program pelayanan administrasi perkantoran	Urusan Utama Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	--
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Urusan Utama Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	--
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Urusan Utama Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	--
						Program penataan administrasi kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	Persandian	D.KOMINFO	
						Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	--
						Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, D.PPPA PP DAN KB, DISKOMINFO, D.PMD

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	BKPP, KEC. GAMPING, SETDA, D.PPTR, BADAN KESBANGPOL, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIK, DISPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, D.PERTANIAN PP, DISNAKER, DINSOS, D.LH, D.PMP2T, D.PUP DAN KP, D.KEBUDAYAAN, D.PARIWISATA, D.DUKCAPIL, BKAD, D.PERHUBUNGAN, DISKOMINFO, DISPERINDAG, D.KOPERASI DAN UKM, SETWAN, D.PPPA PP DAN KB, D.PMD

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
						Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	BKPP, KEC. GAMPING, SETDA, D.PPTR, BADAN KESBANGPOL, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIK, DISPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, D.PERTANIAN PP, DISNAKER, DINSOS, D.LH, D.PMP2T, D.PUP DAN KP, D.KEBUDAYAAN, D.PARIWISATA, D.DUKCAPIL, BKAD, D.PERHUBUNGAN, DISKOMINFO, DISPERINDAG, D.KOPERASI DAN

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
									UKM, SETWAN, D.PPPA PP DAN KB, D.PMD
						Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informasi	SETDA	--
						Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	SETDA
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
						Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	--
						Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	--
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--
						Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
						Program penataan Peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	SETWAN
						Program pelayanan dan bantuan hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program penegakan hukum	Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	KEC. GAMPING, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN,
						Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumber daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumber daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN,

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
									D.PMP2T, KEC. DEPOK
						Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	--
						Program pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
						Program pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	

Tabel 6.18

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021
Misi 2 : Meningkakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	**Strategi :** 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan 2. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 3. Penerapan pola hidup bersih dan sehat 4. Akreditasi puskesmas dan RSUD 5. Pengendalian penyakit 6. Menekan angkaTotal Fertility Rate (TFR) 7. Peningkatan peserta KB aktifdan KB mandiri 8. Peningkatan keluarga sejahtera	Usia Harapan Hidup	74,47	74.82	Program Obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program pengawasan obat dan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD PRAMBANAN, RSUD SLEMAN
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru paru / rumah sakit mata	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD SLEMAN, RSUD PRAMBANAN

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan	--
						Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	Dinas Perindag	--
						Program peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD SLEMAN, RSUD PRAMBANAN
						Program pengembangan lingkungan Sehat	Kesehatan	Sekretariat Daerah	--
						Program perencanaan sosial budaya	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	--
						Program keluarga berencana	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program kesehatan reproduksi remaja	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pelayanan kontrasepsi	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	--
						Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	--
						Program pengembangan kebijakan dan managemen olah raga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	--
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	**Strategi :** 1. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya 2 Meningkatkan kualitas kelulusan siswa 3 Mengembangkan budaya baca **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah 2 Menaikkan angka harapan sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78.20	78.35	Program pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan	--
			Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK/MA : 86.45% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,97% APM SMA/SMK/MA : 58,96%	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 85,97%	Program pengembangan kreativitas siswa dan guru	Pendidikan	Dinas Pendidikan	--
						Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	--
						Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
		3 Menaikkan rata-rata lama sekolah 4 Menaikkan rata-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 5 Meningkatkan minat baca masyarakat 6 Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	10,33 tahun	10,85 tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan	--
						Program pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	--
						Program peningkatan kualitas pendidikan non formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan	D. PMD
			Harapan lama Sekolah	15,71 tahun	16,68tahun	Program pengembangan budaya baca	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	--
			Nilai rata-rata hasil ujian SD SMP/MTs SMA/MA SMK	 236,17 261,65 335,25 252,93	 211.33 256.65 - -	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	--
						Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	DINSOS
						Program pengembangan dan keserasian hidup pemuda	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	--

Tabel 6.19

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021
Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	**Strategi :** 1. Meningkatkan peluang investasi daerah 2. Mengembangkan koperasi 3. Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM **Arah Kebijakan :** 1. Meningkatkan investasi inklusif 2. Meningkatkan keaktifan koperasi 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM 4. Meningkatkan aksessibilitas UMKM	Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini	5,40 % ≤0,40	5.63% 0,35 - 0,40	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	--
						Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	--
						Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	--
						Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	--
						Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	--
						Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Program pembinaan dan penataan pedagang pasar	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	D.PMPPT, SETDA,
						Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	--
						Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SETDA
2	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian	**Strategi :** 1. Menguatkan pariwisata berkelanjutan 2. Meningkatkan Nilai ekspor 3. Meningkatkan diversifikasi produk pariwisata, perindustrian perdagangan dan pertanian **Arah Kebijakan :** 1. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata 2. Memperluas pasar tujuan ekspor	Lama tinggal wisatawan Jumlah wisatawan	Wisatawan Nusantara: 1,63 hari wisatawan Manca negara: 2,00 hari 4.117.000	Wisatawan Nusantara: 2,02 hari wisatawan Manca negara: 2,04hari 8,500,000	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata	D.PMPPT
						Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata	--
						Program pengembangan desa wisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata	--
						Program pengembangan kemitraan	Pariwisata	Dinas Pariwisata	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian perdagangan dan pertanian	Nilai Eksport	42.000.000 US$	40,100,000 US$	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	--
		4. Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian perdagangan dan pertanian	Nilai tukar petani	111.65	112.70	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
			Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	3.26%	3.26%	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
			Presentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	2.70%	3.20%	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	--
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	--
						Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	--
3	Meningkatnya kesempatan kerja	**Strategi:** 1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja **Arah kebijakan:** 1 Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran terbuka	6.00%	5.40%	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	--
						Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	--
						Program peningkatan kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	--
						Program transmigrasi regional	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	--
4	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	**Strategi :** 1 Mengembangkan insfrastruktur perekonomian 2 Mengembangkan fasilitas perhubungan **Arah Kebijakan :** 1 Pembangunan dan pemeliharan infrastruktur perekonomian	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	65,99 %	80.23%	Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata	--
						Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bappeda
						Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
		2 Menyediakan prasarana dan sarana lalu lintas berdasarkan rencana pengembangan wilayah				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung oleh prasarana lalu lintas dan prasarana angkutan umum yang memadahi	65.25% dan 71.04%	82.55% dan 95%	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pembinaan jasa kontruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	--
						Program pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
						Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
						Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
						Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
						Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
						Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
						Program Keselamatan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan	--
5	Menurunnya kemiskinan	**Strategi:** Meningkatkan penanganan kemiskinan **Arah Kebijakan:** Menurunkan angka kemiskinan	Persentase KK Miskin Persentase penduduk miskin	10.69%	8.00% 6.01	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	Dinas Sosial	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Sosial	--
						Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinas Sosial	--
						Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Sosial	--
						Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Sosial	Dinas Sosial	--
						Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	KEC. TURI, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
						Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	--
						Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	--
						Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	--
						Program pengembangan perumahan	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Sosial	--
						Program pengembangan energi terbarukan	Energi dan sumberdaya mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan sumberdaya mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--
						Program pembangunan insfrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	--

Tabel 6.20

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 4 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021
Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	**Strategi :** Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarpras menuju kemandirian **Arah Kebijakan :** Menyediakan regulasi sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	21 desa dan 36 satuan pendidikan aman bencana	77 desa dan 76 satuan pendidikan aman bencana	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--
						Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KEC. SLEMAN

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	--
						Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	D.PUP KP	--
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Strategi :** 1. Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup 2. Meningkatkan ketersedian Ruang Terbuka Hijau 3. Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh 4. Meningkatkan pengelolaan tata ruang **Arah Kebijakan :** 1. Menyediakan IPAL udara 3. Menyediakan ruang terbuka hijau 4. Penanganan terhadap kawasan kumuh 5. Pengendalian pemanfaatan ruang 7. Penyusunan regulasi tata ruang (RDTR)	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42 40 32,25	41.33 72 32.30	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	--
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan Kawasan Permukiman	--
						Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan Kawasan Permukiman	--
						Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	D.PUP KP
						Program peningkatan pengendalian polusi	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	--
						Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	D.PUP KP,
						Program lingkungan sehat perumahan	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan Kawasan Permukiman	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	--
						Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kehutanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kehutanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	--
						Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	--
						Program pengelolaan areal pemakaman	Pekerjaan umum dan pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan Kawasan Permukiman	--
						Program perencanaan tata ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
						Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	D.PMPPT, D.PUP KP
						Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	D.PMPPT
						Program pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	--

Tabel 6.21

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 5 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021
Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaran gender yang proporsional

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	**Strategi :** 1. Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 2. Mempercepat pengarus-utamaan gender **Arah Kebijakan** 1. Meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. 2. Penguatan kelembagaan PUG	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.00%	2.00%	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
2	Meningkatnya kerukunan masyarakat	**Strategi :** 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangaan 3. Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbud-hankam **Arah kebijakan:** 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan 3. Memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbud-hankam 4. Sosialisasi kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat	Jumlah konflik SARA	≤ 5	≤ 3	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--
						Program pendidikan politik masyarakat	Fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
									KEC. CANGKRINGAN D.PMD
						Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	--
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	**Strategi :** 1. Peningkatan pelestarian terhadap cagar budaya 2. Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya **Arah kebijakan:** 1. Pengelolaan warisan budaya 2. Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	23.80%	38.00%	Program pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM KEC. CANGKRINGAN
						Program pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program sejarah, bahasa, sastra dan permusiuman	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--
						Program pengelolaan taman budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	--

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut didapatkan dari kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Selain itu dalam RPJMD ini, tercantum sejumlah program yang ada di setiap perangkat daerah antara lain: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan. Program-program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Propinsi, Dana Keistimewaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman dan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Sleman

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kapasitas Riil Keuangan	**2.455.446.948.874,24**	**2.489.596.631.327,52**	**2.580.093.717.989,06**	**2.800.885.085.871,00**	**3.260.602.091.679,70**	**3.234.229.290.455,70**
	Belanja	**2.455.446.948.874,24**	**2.489.596.631.327,52**	**2.580.093.717.989,06**	**2.800.885.085.871,00**	**3.260.602.091.679,70**	**3.234.229.290.455,70**
I	**Belanja Tidak Langsung**	**1.380.996.251.480,47**	**1.299.646.259.688,98**	**1.290.867.655.413,00**	**1.506.722.610.960,00**	**1.552.180.997.747,70**	**1.547.308.196.523,70**
1	Belanja pegawai	1.097.707.839.367,23	950.142.604.624,18	925.330.430.469,00	1.063.232.350.778,00	1.089.455.639.323,70	1.098.455.639.323,70
2	Belanja bunga	3.021.102.416,00	2.358.580.867,00	1.574.098.880,00	1.870.801.224,00	1.870.801.224,00	0,00
3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja hibah	40.024.505.000,00	47.965.959.800,00	52.751.833.680,00	68.669.600.000,00	92.677.800.000,00	67.565.800.000,00
5	Belanja bantuan sosial	29.383.789.000,00	34.694.686.100,00	29.112.937.900,00	22.209.667.000,00	22.316.000.000,00	24.316.000.000,00
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	43.485.614.551,00	48.747.897.642,00	61.204.231.336,00	62.545.217.425,00	69.441.025.000,00	75.031.025.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Daerah	166.884.663.874,24	214.565.611.722,80	220.758.430.850,00	268.544.031.154,00	272.919.732.200,00	278.439.732.200,00
8	Belanja tidak terduga	488.737.272,00	1.170.918.933,00	135.692.298,00	19.650.943.379,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
II	**Belanja Langsung**	**1.074.450.697.393,77**	**1.189.950.371.638,54**	**1.289.226.062.576,06**	**1.294.162.474.911,00**	**1.708.421.093.932,00**	**1.686.921.093.932,00**

BAPPEDA SLEMAN

Pendanaan pembangunan daerah direncanakan untuk disalurkan dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Sleman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembentukan BPRS ini telah dirintis sejak tahun 2017 dengan adanya kajian pendirian BPRS sebagai output dari kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD program pengembangan kualitas kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Kajian tersebut kemudian ditunjang dengan naskah akademik pendirian PT. BPRS hingga draft raperda yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman melalui kegiatan perencanaan investasi program perencanaan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari langkah tersebut, pada tahun 2019 direncanakan dan dianggarkan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD program pengembangan kualitas kebijakan publik untuk menghasilkan pendampingan pendirian BPRS yang meliputi panitia seleksi, sertifikasi badan hukum dan akta notaris BPRS, rekrutment pekerja (SDM) untuk BPRS, dan pelatihan pengurus dan pekerja (SDM) BPRS oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Selain itu, pada tahun 2019 juga direncanakan dan dianggarkan untuk pembangunan gedung BPRS melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Sleman.

Setelah semua rangkaian langkah tersebut dilakukan maka diharapkan pada tahun 2020 dapat dilakukan peresmian kantor BPRS yang diiringi dengan pendampingan operasional selama 6 bulan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD program pengembangan kualitas kebijakan publik.

Adapun indikasi rencana program disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagai berikut.

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 7.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018	2019			2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
										Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		
1	Urusan Pemerintahan Wajib				790,219,581,773.69		912,786,095,596.62		989,432,676,122.94			994,011,651,883.00			1,399,929,670,429.30			1,371,172,388,498.71	
1.01	Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				676,998,124,218.41		788,555,342,190.10		814,748,060,979.80			811,329,618,903.00			1,192,143,315,325.80			959,090,454,677.71	
1.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				86,236,415,577.00		161,965,698,436.50		191,417,627,269.92			127,723,081,730.00			132,918,238,921.00			140,157,556,172.14	
1.01.01.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	7,090,670,210.00	100%	3,195,435,675.00	100%	7,938,329,027.60	100%	100%	10,573,174,850.00	100%	100%	10,784,638,347.00	100%	100%	11,000,331,113.94	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	1,755,276,294.00	75%	1,963,847,473.00	75%	2,313,034,638.00	75%	75%	2,468,040,000.00	75%	75%	2,542,081,200.00	75%	75%	2,618,343,636.00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	284,209,550.00	93%	531,572,459.00	96%	290,847,829.20	98%	98%	357,071,250.00	100%	100%	364,212,675.00	100%	100%	364,212,675.00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	373,325,625.00	100%	373,623,300.00	100%	363,368,400.00	100%	100%	457,623,750.00	100%	100%	466,776,225.00	100%	100%	476,111,749.50	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.xx.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78.17%	78.2 %	3,303,345,320.00	78.23 %	3,175,566,500.00	78.26 %	7,198,512,180.00	78.29 %	78.30%	6,628,880,900.00	78.32 %	78.32%	6,960,324,945.00	78.35 %	78.35%	7,808,341,192.25	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.xx.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan	104.06%	105.29%	30,927,434,484.00	105.35%	119,690,106,700.50	105.50%	137,013,554,367.12	105.65%	110.10%	51,585,879,400.00	105.73%	110.15%	54,165,173,370.00	106.00%	110.19%	57,373,432,038.50	DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah:																	
		SD	84.65%	85.92%		87.24%		88.72%		90.23%	90.23%		91.79%	91.79%		93.39%	93.39%		
		SMP	87.21%	88.42%		89.65%		90.95%		92.58%	92.58%		94.21%	94.21%		95.93%	95.93%		
1.01.01.xx.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Melanjutkan	97.2%	97.73%	6,799,588,752.00	0	-	0		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah	102.08%	100.73%		0		0		0	0		0	0		0	0		
1.01.01.xx.18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman	68.1%	74%	1,376,981,125.00	75.25 %	1,404,613,707.00	76%	1,273,426,650.00	77%	77%	1,611,887,000.00	78%	78%	1,692,481,350.00	80%	80%	1,777,105,417.50	DINAS PENDIDIKAN. D. PMD
		Meningkatnya angka melek huruf di kabupaten sleman	98.6%	99.03 %		99.04 %		99.05 %		99.06 %	99.54%		99.07 %	99.55%		99.08 %	99.56%		
		Terbentuknya desa berkarakter	0 Desa	0 Desa		4 Desa		6 Desa		9 Desa	11 Desa		13 Desa	13 Desa		17 Desa	17 Desa		
1.01.01.xx.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	88.31%	88%	24,181,945,807.00	87%	24,444,118,430.00	88%	27,215,090,674.00	89%	92.15%	43,715,335,750.00	90%	92.17%	45,901,102,537.50	91%	92.19%	48,196,157,664.38	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.xx.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	96.92%	97%	8,291,675,735.00	97.1 %	5,229,791,070.00	97.2 %	6,186,422,154.00	97.3 %	97.3%	8,438,810,830.00	97.3 %	97.3%	8,860,751,371.50	97.4 %	97.4%	9,303,788,940.08	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	77.16%	98%		100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
1.01.01.xx.23	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba	33 Jumlah prestator	66 Jumlah prestator	1,851,962,675.00	99 Jumlah prestator	1,957,023,122.00	132 Jumlah prestator	1,625,041,350.00	165 Jumlah prestator	154 Jumlah prestator	1,886,378,000.00	198 Jumlah prestator	158 Jumlah prestator	1,180,696,900.00	231 Jumlah prestator	162 Jumlah prestator	1,239,731,745.00	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Kabupaten	1052 Jumlah prestasi	1055 Jumlah prestasi		1056 Jumlah prestasi		1057 Jumlah prestasi		1060 Jumlah prestasi	175 Jumlah prestasi		1062 Jumlah prestasi	175 Jumlah prestasi		1065 Jumlah prestasi	175 Jumlah prestasi		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019				2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		Target		Rp	Target		Rp	
		Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Propinsi	483 Jumlah prestasi	485 Jumlah prestasi		486 Jumlah prestasi		487 Jumlah prestasi		489 Jumlah prestasi	24 Jumlah prestasi		490 Jumlah prestasi	26 Jumlah prestasi		492 Jumlah prestasi	28 Jumlah prestasi		
		Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat nasional	34 Jumlah prestasi	35 Jumlah prestasi		36 Jumlah prestasi		37 Jumlah prestasi		38 Jumlah prestasi	5 Jumlah prestasi		39 Jumlah prestasi	5 Jumlah prestasi		40 Jumlah prestasi	5 Jumlah prestasi		
1.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				341,134,916,230.41		292,108,726,252.81		273,382,298,674.17			283,201,574,475.00			297,096,454,059.50			314,697,776,177.27	
1.01.02.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,921,482,296.00	100%	2,281,680,919.00	100%	2,887,192,763.00	100%	100%	5,246,861,325.00	100%	100%	5,351,798,551.50	100%	100%	5,458,834,522.53	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	1,265,430,284.00	75%	1,254,831,013.00	75%	1,388,086,200.00	75%	75%	2,699,257,850.00	75%	75%	2,780,235,585.50	75%	75%	2,863,642,653.07	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	463,315,000.00	93%	492,702,900.00	96%	433,874,681.00	98%	98%	555,164,000.00	100%	100%	566,267,280.00	100%	100%	566,267,280.00	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	186,819,500.00	100%	208,966,000.00	100%	244,258,507.00	100%	100%	295,050,750.00	100%	100%	300,951,765.00	100%	100%	306,970,800.30	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	93.2%	95%	5,507,488,982.88	95%	6,078,578,006.66	95%	7,031,485,945.78	95%	95%	7,074,963,500.00	95%	95%	7,428,711,675.00	95%	95%	8,300,147,258.75	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	73.52%	74%	134,693,925,037.65	77%	71,044,207,742.15	79%	63,375,032,054.40	82%	97.00%	77,499,986,550.00	85%	97.5%	81,374,985,877.50	88%	98.00%	85,943,735,171.38	DINAS KESEHATAN
		Menurunnya AKI	28.3 per 100.000 kelahiran hidup	63.23 per 100.000 kelahiran hidup		62.79 per 100.000 kelahiran hidup		55.42 per 100.000 kelahiran hidup		55.04 per 100.000 kelahiran hidup	55.04 per 100.000 kelahiran hidup		47.83 per 100.000 kelahiran hidup	47.83 per 100.000 kelahiran hidup		47.51 per 100.000 kelahiran hidup	47.51 per 100.000 kelahiran hidup		
		Menurunnya AKB	3.61 per 1000 kelahiran hidup	3.43 per 1000 kelahiran hidup		4.33 per 1000 kelahiran hidup		4.23 per 1000 kelahiran hidup		4.13 per 1000 kelahiran hidup	4.13 per 1000 kelahiran hidup		4.03 per 1000 kelahiran hidup	4.03 per 1000 kelahiran hidup		3.94 per 1000 kelahiran hidup	3.94 per 1000 kelahiran hidup		
		Persentase desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	60%	70%		80%		90%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
		Persentase desa Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	0%	5%		10%		15%		20%	60.00%		25%	80.00%		30%	100.00%		
		Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	90%	92%		94%		96%		98%	98.00%		100%	100.00%		100%	100.00%		
		Persentase angka bebas jentik	95%	≥ 95 %		≥ 95 %		≥ 95 %		≥ 95 %	≥95%		≥ 95 %	≥95%		≥ 95 %	≥95%		
1.01.02.xx.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	75%	75%	393,700,000.00	76%	609,477,125.00	77%	526,582,200.00	78%	78%	788,220,800.00	79%	79%	827,631,840.00	80%	80%	869,013,432.00	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	47.9%	50%	1,135,035,200.00	52.5 %	1,164,311,850.00	55%	1,225,188,300.00	57.5 %	57.5%	1,166,746,000.00	60%	57.5%	1,225,083,300.00	60%	57.5%	1,286,337,465.00	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status balita gizi buruk	0.4%	0.45 %	1,771,125,300.00	0.44 %	1,507,364,050.00	0.43 %	611,933,000.00	0.42 %	0.45%	599,149,250.00	0.41 %	0.45%	629,106,712.50	0.4 %	0.44%	660,562,048.13	DINAS KESEHATAN
		Cakupan balita pendek dan sangat pendek	12.86%	12.6 %		12.4 %		12%		11.5 %	11.5%		11.2 %	11.2%		11%	11%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp
1.01.02.xx.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS	45.6%	50%	101,400,950.00	52.5 %	109,709,375.00	55%	212,179,000.00	57.5 %	57.5%	159,606,250.00	60%	60.00%	167,586,562.50	60%	60.00%	175,965,890.63	SETDA
1.01.02.xx.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian penyakit menular	100%	100%	2,143,552,421.00	100%	2,223,741,797.00	100%	1,930,515,103.00	100%	100%	2,623,962,500.00	100%	100%	2,755,160,625.00	100%	100%	2,892,918,656.25	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas)	72%	90%	470,650,271.00	100%	666,336,120.00	100%	1,382,338,239.00	100%	100%	1,890,837,150.00	100%	100%	1,985,379,007.50	100%	100%	2,084,647,957.88	DINAS KESEHATAN. RSUD PRAMBANAN. RSUD SLEMAN
		Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemda)	50%	50%		100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
1.01.02.xx.26	Program pengadaan. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	80%	80%	52,214,289,388.88	80%	39,374,665,594.34	95%	39,246,204,342.19	95%	95%	34,293,023,000.00	95%	95%	36,007,674,150.00	95%	95%	38,808,057,857.50	DINAS KESEHATAN. RSUD SLEMAN. RSUD PRAMBANAN
1.01.02.xx.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan Balita	0.21 per 1000 kelahiran hidup	< 1.9 per 1000 kelahiran hidup	82,809,590.00	< 1.8 per 1000 kelahiran hidup	64,280,400.00	< 1.7 per 1000 kelahiran hidup	87,629,000.00	< 1.65 per 1000 kelahiran hidup	< 1.65 per 1000 kelahiran hidup	77,595,000.00	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup	81,474,750.00	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup	85,548,487.50	DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan kesehatan lansia	75.82%	70%	33,657,500.00	71%	52,507,400.00	72%		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		DINAS KESEHATAN
1.01.02.xx.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan/ makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya	30 Unit usaha	30 Unit usaha	18,152,000.00	30 Unit usaha	18,242,500.00	30 Unit usaha	25,738,000.00	30 Unit usaha		26,954,000.00	30 Unit usaha		0.00	30 Unit usaha		0.00	DINAS PERINDAG
1.01.02.xx.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.3%	33.40%	138,732,082,509.00	33.50%	164,957,123,460.66	33.60%	152,349,521,538.80	33.70%		147,808,071,000.00	33.80%		155,198,474,550.00	34.00%		163,958,398,277.50	DINAS KESEHATAN. RSUD SLEMAN. RSUD PRAMBANAN
1.01.02.33	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Jumlah Desa yang sudah terbentuk Posbindo	64 Desa	69 Desa	-	70 Desa	-	80 Desa	424,539,800.00	90 Desa	86 Desa	396,125,550.00	95 Desa	86 Desa	415,931,827.50	100 Desa	86 Desa	436,728,418.88	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	N/A	70%		73%		75%		78%	92%		80%	96%		83%	96%		
			3.34%	3.00%		3.20%		3.40%		3.50%	3.5%		3.70%	3.7%		4%	4%		
1.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				213,179,202,103.00		281,021,775,523.16		292,199,364,078.51			342,416,349,598.00			704,657,187,176.80			445,814,269,664.18	
1.01.03.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,091,789,340.00	100%	984,414,487.00	100%	1,050,486,026.00	100%	100%	1,615,758,690.00	100%	100%	1,648,073,863.80	100%	100%	1,681,035,341.08	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	2,965,652,356.00	75%	2,024,945,189.00	75%	2,971,387,541.00	75%	75%	4,773,775,000.00	75%	75%	4,916,988,250.00	75%	75%	5,064,497,897.50	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	87,736,300.00	93%	74,729,500.00	96%	64,697,000.00	98%	98%	72,523,500.00	100%	100%	73,973,970.00	100%	100%	73,973,970.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	325,467,685.00	100%	261,606,425.00	100%	239,995,700.00	100%	100%	252,934,250.00	100%	100%	257,992,935.00	100%	100%	263,152,793.70	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kab dalam kondisi baik dan sedang	65.18%	24.73%	46,084,778,600.00	26.23%	68,929,856,125.00	27.74%	75,390,287,273.00	28.18%		101,971,961,000.00	29.40%		113,971,961,000.00	30.81%		137,420,559,050.00	D. PUP DAN KP
		Cakupan Pembangunan jalan dan jembatan	22.07								29.02%			29.1%			29.12%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp
1.01.03.xx.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik	48.76%	48.8 %	14,839,799,860.00	48.85 %	16,890,306,088.00	48.9 %	13,565,362,302.00	49%	64.51%	20,303,085,000.00	50%	64.55%	25,303,085,000.00	52%	64.59%	26,303,085,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kab dalam kondisi baik dan sedang	65.18%	31.32 %	47,752,708,141.00	32.46 %	82,014,163,016.00	35.86 %	49,240,041,972.85	36.53 %		41,885,227,760.00	37.75 %		46,685,227,760.00	38.42 %		52,208,081,213.91	D. PUP DAN KP
		Cakupan rehabilitas /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25.32%								40.05%			40.1%			40.13%		
1.01.03.xx.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan	100%	100%	422,414,000.00	100%	525,123,260.00	100%	159,951,149.00	100%	100%	1,303,173,000.00	100%	100%	1,303,173,000.00	100%	100%	1,303,173,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	97.84%	93%	5,625,314,000.00	95%	3,234,212,740.00	96%	7,741,065,643.00	98%	98.00%	2,517,520,800.00	98%	98.00%	3,017,520,800.00	98%	98.00%	3,017,520,800.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	73%	75%	40,553,967,589.00	77%	30,095,307,521.00	78%	30,926,983,908.00	78%	79.42%	46,148,036,140.00	79%	79.6%	48,270,836,140.00	80%	79.7%	48,270,836,140.00	BAPPEDA, D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik	60%	65%	456,841,500.00	70%	205,682,132.00	75%	63,578,500.00	80%	79.42%	52,973,400.00	85%	79.6%	52,973,400.00	85%	79.7%	52,973,400.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.26	Program pengembangan. pengelolaan dan konversi sungai. danau dan sumber daya air lainnya	Embung dan sungai terkelola baik	74%	76%	6,866,682,025.00	77%	5,553,568,900.00	78%	5,234,959,825.00	79%	84.62%	3,741,278,550.00	80%	84.65%	3,741,278,550.00	82%	84.7%	3,741,278,550.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL)	2.75%	2.88 %	12,248,647,897.00	3%	9,741,487,372.00	3.25 %	35,368,267,658.00	3.5 %	2.52%	29,669,005,600.00	3.75 %	2.52%	31,669,005,600.00	4%	2.52%	31,669,005,600.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP. D. PUP DAN KP
		Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR)	4.5%	4.59 %		5.49 %		6%		6.5 %	31.5%		7%	33.1%		8%	33.1%		
		Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	11%	19.5 %		20%		20.1 %		20.5 %	20.5%		21%	21%		21%	21%		
1.01.03.xx.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	N/A	11.11%		44.44%	-	55.56%		55.56%	55.56%	0.00	88.89%	88.89%	500,000,000.00	100%	100%	1,500,000,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik (air bersih)	49.83%	52.99 %	7,096,725,100.00	56.15 %	6,343,726,150.00	59.31 %	8,555,347,920.00	62.41 %	62.41%	5,894,010,000.00	65.62 %	65.62%	5,894,010,000.00	66%	66.00%	5,894,010,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.31	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Kondisi gedung pemerintahan baik	81.63%	83.33 %	23,996,409,350.00	84.34 %	51,812,013,154.28	84.87 %	56,752,797,874.66	85.71 %	85.71%	76,798,731,000.00	86.55 %	86.55%	81,798,731,000.00	87.39 %	87.39%	91,798,731,000.00	D. PUP DAN KP.
1.01.03.xx.32	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peserta pembinaan	50%	20%	365,371,290.00	40%	673,093,750.00	60%	942,466,900.00	80%	80%	913,792,000.00	100%	100%	1,049,792,000.00	100%	100%	1,049,792,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.03.xx.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	4 Raperda	7 Raperda	989,326,545.00	7 Raperda	890,311,176.88	10 Raperda	2,182,625,908.00	13 Raperda	2 Raperda	2,012,895,750.00	15 Raperda	2 Raperda	2,012,895,750.00	16 Raperda	3 Raperda	2,012,895,750.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Peraturan Daerah	0 Perda	0 Perda		0 Perda		0 Perda		1 Perda	0 Perda		1 Perda	0 Perda		1 Perda	1 Perda		
1.01.03.xx.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah desa target pengawasan	40 desa	40 desa	1,409,570,525.00	42 desa	767,228,537.00	45 desa	1,749,060,978.00	48 desa	48 desa	2,489,668,158.00	50 desa	50 desa	2,489,668,158.00	52 desa	52 desa	2,489,668,158.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG. D.PMP2T. D. PUP DAN KP
		Luasan alih fungsi lahan	61.5 ha	< 100 ha		< 100 ha		< 100 ha		< 100 ha	< 100 ha		< 100 ha	< 100 ha		< 100 ha	< 100 ha		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019				2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.01.03.xx.37	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten												30%	330,000,000,000.00		30%	30,000,000,000.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				17,779,914,115.00		30,174,163,271.27		33,765,256,041.00			27,523,551,700.00			27,568,551,700.00			27,598,551,700.00	
1.01.04.xx.15	Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah layak huni	97.96%	98%	14,062,716,300.00	98.25 %	9,616,959,482.27	98.50 %	8,907,971,503.00	98.75 %	98.75%	8,817,850,700.00	99%	99.00%	8,892,850,700.00	99.25 %	99.25%	8,892,850,700.00	D. PUP DAN KP
1.01.04.xx.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	56.91%	60.8 %		71.5 %	13,001,573,476.00	97.87 %	21,177,046,405.00	100%	100%	14,181,885,000.00	100%		14,181,885,000.00	100%		14,181,885,000.00	D. PUP DAN KP
		Pencegahan kawasan kumuh												10%			20%		
1.01.04.xx.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	N/A	50%	923,125,200.00	50%	987,235,000.00	55%	1,054,653,900.00	60%	60%	609,270,000.00	65%	70%	579,270,000.00	70%	75%	609,270,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.04.xx.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	16%	16%	2,794,072,615.00	23%	6,568,395,313.00	30%	2,625,584,233.00	38%	66.42%	3,914,546,000.00	46%	66.42%	3,914,546,000.00	46%	66.42%	3,914,546,000.00	D. PUP DAN KP
1.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Pelindungan Masyarakat				16,286,960,363.00		19,226,481,172.16		19,044,858,100.84			24,212,194,250.00			23,672,657,219.00			24,421,063,183.83	
1.01.05.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,738,490,554.00	100%	1,709,742,389.56	100%	2,298,807,782.28	100%	100%	1,754,055,200.00	100%	100%	1,789,136,304.00	100%	100%	1,824,919,030.08	SATPOL PP. BPBD
1.01.05.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	1,362,753,948.00	75%	1,537,827,660.00	75%	1,381,847,647.00	75%	75%	1,285,145,500.00	75%	75%	1,323,699,865.00	75%	75%	1,363,410,860.95	SATPOL PP. BPBD
1.01.05.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	495,531,700.00	93%	356,354,400.00	96%	315,093,500.00	98%	98%	285,255,500.00	100%	100%	290,960,610.00	100%	100%	290,960,610.00	SATPOL PP. BPBD
1.01.05.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	206,634,900.00	100%	146,880,800.00	100%	179,111,300.00	100%	100%	142,757,000.00	100%	100%	145,612,140.00	100%	100%	148,524,382.80	SATPOL PP. BPBD
1.01.05.xx.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	N/A	13%	973,975,400.00	21%	913,663,400.00	30%	1,183,354,000.00	40%	66.00%	679,902,450.00	50%	67.00%	1,064,902,450.00	60%	68.00%	1,064,902,450.00	SATPOL PP
1.01.05.xx.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kelompok jaga warga	0 kelompok	17 kelompok	1,221,420,800.00	34 kelompok	1,026,887,525.00	51 kelompok	956,064,950.00	68 kelompok	133 kelompok	947,719,000.00	85 kelompok	150 kelompok	247,719,000.00	102 kelompok	167 kelompok	947,719,000.00	SATPOL PP
1.01.05.xx.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat	≤438 kasus	≤400 kasus	118,240,000.00	≤380 kasus	219,004,700.00	≤360 kasus	156,283,000.00	≤340 kasus		101,732,750.00	≤320 kasus		0.00	≤ 300 kasus		0.00	BADAN KESBANGPOL
1.01.05.xx.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	55.81%	61%	6,151,032,511.00	63%	7,306,371,939.60	67%	7,698,730,568.56	71%	71.00%	9,620,693,050.00	75%	75.00%	9,650,693,050.00	78%	78.67%	9,620,693,050.00	KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. BPBD. KEC. SLEMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target	Rp	
		Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	5968 orang	6828 orang		7688 orang		8548 orang		9408 orang	9528 orang		10268 orang	10008 orang		11128 orang	10458 orang	
1.01.05.xx.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	87.09%	88%	1,406,823,400.00	89%	1,652,658,008.00	90%	1,017,413,653.00	91%	91%	1,936,592,200.00	95%	95%	1,936,592,200.00	95%	95%	1,936,592,200.00	SATPOL PP
1.01.05.xx.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100%	100%	864,776,700.00	100%	878,875,050.00	100%	1,379,346,100.00	100%	100%	1,213,082,100.00	100%	100%	978,082,100.00	100%	100%	978,082,100.00	KEC. GAMPING. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. SATPOL PP
1.01.05.xx.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas anggota linmas	0 orang	500 orang	1,747,280,450.00	1010 orang	3,478,215,300.00	1520 orang	2,478,805,600.00	2030 orang	2030 orang	6,245,259,500.00	2540 orang	2540 orang	6,245,259,500.00	3050 orang	3050 orang	6,245,259,500.00	KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. SATPOL PP
1.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				2,380,715,830.00		4,058,497,534.20		4,938,656,815.36			6,252,867,150.00			6,230,226,249.50			6,401,237,780.29	
1.01.06.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	100%	471,457,916.96	100%	646,539,088.52	100%	100%	675,440,000.00	100%	100%	688,948,800.00	100%	100%	702,727,776.00	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	-	75%	358,756,917.00	75%	421,776,395.00	75%	75%	539,067,200.00	75%	75%	555,239,216.00	75%	75%	571,896,392.48	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	-	93%	32,074,370.24	96%	54,451,183.44	98%	98%	267,833,500.00	100%	100%	273,190,170.00	100%	100%	273,190,170.00	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	-	100%	55,989,900.00	100%	86,003,000.00	100%	100%	79,418,000.00	100%	100%	81,006,360.00	100%	100%	82,626,487.20	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	145 Kelompok	150 Kelompok	602,023,300.00	155 Kelompok	694,161,150.00	165 Kelompok	1,159,955,930.80	170 Kelompok	300 Kelompok	1,187,692,450.00	185 Kelompok	325 Kelompok	1,023,323,223.50	200 Kelompok	350 Kelompok	1,054,022,920.21	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan	90%	90%	869,460,930.00	90%	1,133,609,880.00	90%	724,446,651.60	90%	100%	1,213,124,100.00	90%	100%	1,249,517,823.00	90	100%	1,287,003,357.69	SETDA. DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.17	Program pembinaan anak terlantar	Cakupan penanganan anak terlantar	90%	90%	38,645,000.00	90%	18,266,900.00	90%	57,109,900.00	90%	100%	47,569,500.00	90%	100%	48,996,585.00	90%	100%	50,466,482.55	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma	65%	70%	324,250,200.00	70%	384,697,000.00	75%	718,233,266.00	75%	100%	814,879,000.00	75%	100%	839,325,370.00	75%	100%	864,505,131.10	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018	2019			2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1.01.06.xx.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo	90%	90%	32,357,500.00	90%	24,473,000.00	90%	32,558,000.00	90%	100%	38,024,000.00	90%	100%	39,164,720.00	90%	100%	40,339,661.60	DINAS SOSIAL
1.01.06.xx.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	40%	45%	513,978,900.00	50%	885,010,500.00	55%	1,037,583,400.00	60%	60%	1,389,819,400.00	65%	65%	1,431,513,982.00	67%	67%	1,474,459,401.46	DINAS SOSIAL
1.02	Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				113,221,457,555.28		124,230,753,406.52		174,684,615,143.14			182,682,032,980.00			207,786,355,103.50			412,081,933,821.00	
1.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				8,762,590,406.00		5,086,615,980.00		8,020,961,141.28			8,895,144,510.00			8,954,508,662.00			9,011,984,379.14	
1.02.01.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	987,122,358.00	100%	694,193,754.00	100%	1,017,676,643.71	100%	100%	1,548,141,350.00	100%	100%	1,579,104,177.00	100%	100%	1,610,686,260.54	DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	559,284,248.00	75%	394,686,971.00	75%	639,317,741.00	75%	75%	778,040,000.00	75%	75%	801,381,200.00	75%	75%	825,422,636.00	DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	80,036,000.00	93%	59,270,605.00	96%	54,089,804.57	98%	98%	162,212,250.00	100%	100%	165,456,495.00	100%	100%	165,456,495.00	DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	56,270,000.00	100%	49,365,400.00	100%	71,345,500.00	100%	100%	90,794,000.00	100%	100%	92,609,880.00	100%	100%	94,462,077.60	DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.xx.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	68.33%	68.33 %	5,262,884,600.00	70%	2,276,502,000.00	70%	3,618,120,100.00	75%	75%	4,298,266,300.00	75%	75%	4,298,266,300.00	75%	75%	4,298,266,300.00	DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.xx.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	70%	70%	854,682,600.00	75%	755,068,900.00	80%	1,765,282,000.00	85%	54%	1,203,819,450.00	90%	57%	1,203,819,450.00	90%	60%	1,203,819,450.00	DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.xx.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	85%	100%	962,310,600.00	100%	857,528,350.00	100%	855,129,352.00	100%	100%	813,871,160.00	100%	100%	813,871,160.00	100%	100%	813,871,160.00	DINAS TENAGA KERJA
1.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				5,556,149,688.00		4,457,216,381.00		9,025,877,044.85			6,551,611,050.00			6,601,813,922.00			6,651,792,243.14	
1.02.02.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	758,981,079.00	100%	850,244,120.00	100%	917,946,619.17	100%	100%	874,573,100.00	100%	100%	892,064,562.00	100%	100%	909,905,853.24	D. PPPA PP DAN KB
1.02.02.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	925,515,296.00	75%	667,889,471.00	75%	1,230,498,645.00	75%	75%	941,943,000.00	75%	75%	970,201,290.00	75%	75%	999,307,328.70	D. PPPA PP DAN KB
1.02.02.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	53,974,825.00	93%	50,304,000.00	96%	131,455,923.17	98%	98%	74,078,000.00	100%	100%	75,559,560.00	100%	100%	75,559,560.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.02.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	229,084,300.00	100%	110,559,190.00	100%	176,561,935.17	100%	100%	148,578,000.00	100%	100%	151,549,560.00	100%	100%	154,580,551.20	D. PPPA PP DAN KB
1.02.02.xx.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	24 Desa	26 Desa	795,950,450.00	28 Desa	503,401,080.00	30 Desa	1,203,943,285.00	32 Desa	32 Desa	666,681,000.00	34 Desa	34 Desa	666,681,000.00	36 Desa	36 Desa	666,681,000.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.02.xx.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	80%	81%	2,129,738,045.00	82%	1,621,258,380.00	83%	3,308,877,446.34	84%	84%	2,817,683,200.00	85%	85%	2,817,683,200.00	86%	86%	2,817,683,200.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.02.xx.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	288,717,375.00	100%	259,099,400.00	100%	211,158,500.00	100%	100%	142,947,250.00	100%	100%	142,947,250.00	100%	100%	142,947,250.00	D. PPPA PP DAN KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp
1.02.02.xx.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG aktif	100%	100%	374,188,318.00	100%	394,460,740.00	100%	1,845,434,691.00	100%	100%	885,127,500.00	100%	100%	885,127,500.00	100%	100%	885,127,500.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				4,148,915,630.00		3,799,135,285.00		5,968,850,075.00			6,040,569,025.00			6,040,569,025.00			6,040,569,025.00	
1.02.03.xx.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100%	100%	4,148,915,630.00	100%	3,799,135,285.00	100%	5,968,850,075.00	100%	100%	6,040,569,025.00	100%	100%	6,040,569,025.00	100%	100%	6,040,569,025.00	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
		Persentase cadangan pangan	27.86%	0.6		0.7		80%		90%	90%		100%	100%		100%	100%		
		Persentase Pola Pangan Harapan	85.5%	86.5 %		87.5 %		88%		88.5 %	88.5%		89%	89%		89.5 %	89.5%		
		Persentase ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah	100%	90%		90%		90%		90%	90%		90%	90%		100%	100%		
		Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	90%		90%		90%		90%	90%		90%	90%		90%	90%		
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%		80%		80%		80%	90%		80%	90%		80%	90%		
		Persentase ketersediaan energi dan protein (energi)	157%	140%		140%		140%		140%	140%		140%	140%		140%	140%		
		Persentase ketersediaan energi dan protein (protein)	153%	1.41		1.41		1.41		141%	141%		141%	141%		141%	141%		
		Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian	1 Kelompok	1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok		
1.02.04	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				3,248,325,802.00		4,761,490,115.92		6,541,074,819.00			5,924,303,225.00			8,181,778,180.50			8,399,600,909.56	
1.02.04.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	344,781,068.00	100%	553,695,203.96	100%	894,934,309.00	100%	100%	894,432,025.00	100%	100%	912,320,665.50	100%	100%	930,567,078.81	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.02.04.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	124,748,850.00	75%	444,403,139.00	75%	489,472,955.00	75%	75%	646,381,500.00	75%	75%	665,772,945.00	75%	75%	685,746,133.35	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.02.04.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	20,197,500.00	93%	41,238,500.00	96%	53,211,500.00	98%	98%	52,100,000.00	100%	100%	53,142,000.00	100%	100%	53,142,000.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.02.04.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	103,381,000.00	100%	83,192,788.96	100%	218,291,552.00	100%	100%	225,643,500.00	100%	100%	230,156,370.00	100%	100%	234,759,497.40	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.02.04.xx.16	Program Penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	86.4%	86.5 %	1,696,031,468.00	87%	3,039,091,084.00	87.5 %	3,130,282,351.00	88%	91%	2,808,449,550.00	88.5 %	93%	2,633,449,550.00	89%	95%	2,808,449,550.00	KEC. GAMPING. D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. D.PMP2T. KEC. DEPOK.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018	2019			2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1.02.04.xx.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	100%	418,645,175.00	100%	124,251,000.00	100%	277,221,500.00	100%	100%	109,875,000.00	100%	100%	109,875,000.00	100%	100%	109,875,000.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.02.04.xx.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	0 Jenis	1 Jenis	540,540,741.00	2 Jenis	475,618,400.00	3 Jenis	1,477,660,652.00	4 Jenis	4 Jenis	1,187,421,650.00	5 Jenis	4 Jenis	1,187,421,650.00	5 Jenis	4 Jenis	1,187,421,650.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG. D.PMP2T
1.02.04.xx.19	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN			0.00		0.00		0.00			0.00		500 bidang	2,015,000,000.00		1.000 bidang	2,015,000,000.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara												86 dokumen			86 dokumen		
		Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten												6 bidang			7 bidang		
1.02.04.xx.20	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah desa yang didaftarkan di BPN			0.00		0.00		0.00			0.00		500 bidang	374,640,000.00		1.000 bidang	374,640,000.00	D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		Persentase desa yang sudah mempunyai Perdes pemanfaatan tanah desa												58%			100%		
		Persentase pengajuan serat kekancingan yang ditindaklanjuti												70%			70%		
1.02.05	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				18,810,194,474.00		22,418,262,533.81		27,464,207,433.97			40,485,739,541.00			39,335,365,890.00			40,686,955,244.27	
1.02.05.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	738,574,798.00	100%	1,101,971,340.00	100%	1,384,571,186.00	100%	100%	2,029,041,000.00	100%	100%	2,069,621,820.00	100%	100%	2,111,014,256.40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	1,828,009,798.00	75%	1,880,506,347.00	75%	2,374,072,661.00	75%	75%	1,857,274,300.00	75%	75%	1,912,992,529.00	75%	75%	1,970,382,304.87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	46,643,750.00	93%	44,426,900.00	96%	65,918,500.00	98%	98%	28,760,000.00	100%	100%	29,335,200.00	100%	100%	29,335,200.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	144,478,400.00	100%	142,246,900.00	100%	174,086,050.00	100%	100%	137,605,000.00	100%	100%	140,357,100.00	100%	100%	143,164,242.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.xx.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan pengelolaan sampah Tipe A	15 Jumlah TPS	15 Jumlah TPS	6,020,045,515.00	15 Jumlah TPS	6,653,061,463.00	17 Jumlah TPS	12,513,845,723.97	20 Jumlah TPS	17 Jumlah TPS	14,831,127,841.00	21 Jumlah TPS	17 Jumlah TPS	13,931,127,841.00	21 Jumlah TPS	17 Jumlah TPS	14,831,127,841.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Layanan pengelolaan sampah Tipe B	3 Jumlah TPS	3 Jumlah TPS		3 Jumlah TPS		5 Jumlah TPS		7 Jumlah TPS	22 Jumlah TPS		9 Jumlah TPS	23 Jumlah TPS		9 Jumlah TPS	25 Jumlah TPS		
		Layanan pengelolaan sampah Tipe C	180 Jumlah TPS	200 Jumlah TPS		225 Jumlah TPS		260 Jumlah TPS		300 Jumlah TPS	355 Jumlah TPS		350 Jumlah TPS	355 Jumlah TPS		360 Jumlah TPS	360 Jumlah TPS		
		Rasio layanan pengelolaan sampah	6.5 Rasio	8 Rasio		9.4 Rasio		9.9 Rasio		10.5 Rasio	10.5 Rasio		11.2 Rasio	11.2 Rasio		12.4 Rasio	12.4 Rasio		
		Sampah yang tertangani	26%	28.8 %		29.5 %		32%		33.5 %	53.05%		35%	53.05%		36.5 %	53.05%		
1.02.05.xx.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	84.37%	85%	2,179,661,720.00	86%	2,668,923,130.00	87%	1,948,021,435.00	88%	91.67%	2,186,572,000.00	89%	91.67%	1,836,572,000.00	90%	91.67%	2,186,572,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, D. PUP DAN KP
		Jumlah dokumen KLHS tata ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0 dokumen		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019				2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
		Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	72.91%	74%		76%		78%		80%	80%		82%	82%		84%	84%		
1.02.05.xx.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim	8 Kampung	11 Kampung	2,532,464,476.00	14 Kampung	2,679,320,050.00	17 Kampung	3,273,241,950.00	20 Kampung	20 Kampung	5,461,954,250.00	23 Kampung	23 Kampung	5,461,954,250.00	26 Kampung	26 Kampung	5,461,954,250.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, D. PUP DAN KP
		Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4%	7%		0%		0%		0%	15.5%		0%	16%		0%	16.5%		
1.02.05.xx.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah sekolah berbudaya lingkungan	33 Sekolah	42 Sekolah	285,765,410.00	51 Sekolah	245,001,500.00	60 Sekolah	246,833,000.00	69 Sekolah	69 Sekolah	307,725,000.00	78 Sekolah	78 Sekolah	307,725,000.00	87 Sekolah	87 Sekolah	307,725,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, SETDA
		Peningkatan jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan	15 Pondok pesantren	18 Pondok pesantren		21 Pondok pesantren		24 Pondok pesantren		27 Pondok pesantren	27 Pondok pesantren		30 Pondok pesantren	30 Pondok pesantren		33 Pondok pesantren	33 Pondok pesantren		
1.02.05.xx.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan	79%	79.1 %	77,725,000.00	79.15 %	98,810,000.00	79.2 %	98,211,000.00	79.25 %	79.25%	99,573,000.00	79.3 %	79.3%	99,573,000.00	79.4 %	79.4%	99,573,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.xx.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	20.03%	20.04 %	4,956,825,607.00	20.05 %	6,903,994,903.81	20.06 %	5,385,405,928.00	20.07 %	30.07%	13,546,107,150.00	20.08 %	30.08%	13,546,107,150.00	20.08 %	30.09%	13,546,107,150.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)	1 Unit	1 Unit		1 Unit		2 Unit		2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit		
1.02.06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				5,247,867,966.00		7,201,400,584.36		10,575,575,763.00			9,565,029,699.00			9,658,978,735.50			9,753,906,763.83	
1.02.06.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,332,418,461.00	100%	555,050,305.00	100%	3,816,615,291.00	100%	100%	3,609,396,825.00	100%	100%	3,681,584,761.50	100%	100%	3,755,216,456.73	DINAS DUKCAPIL
1.02.06.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	226,221,700.00	75%	333,236,798.00	75%	1,096,880,988.00	75%	75%	629,979,000.00	75%	75%	648,878,370.00	75%	75%	668,344,721.10	DINAS DUKCAPIL
1.02.06.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	17,743,000.00	93%	29,549,500.00	96%	30,254,500.00	98%	98%	53,381,500.00	100%	100%	54,449,130.00	100%	100%	54,449,130.00	DINAS DUKCAPIL
1.02.06.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	95,418,000.00	100%	98,797,375.00	100%	100,910,000.00	100%	100%	89,705,000.00	100%	100%	91,499,100.00	100%	100%	93,329,082.00	DINAS DUKCAPIL
1.02.06.xx.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	3,576,066,805.00	100%	6,184,766,606.36	100%	5,530,914,984.00	100%	100%	5,182,567,374.00	100%	100%	5,182,567,374.00	100%	100%	5,182,567,374.00	KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC.
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99.17%	99.23 %		99.32 %		99.39 %		99.4 %	99.4%		99.45 %	99.45%		99.5 %	99.5%		
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	87%	88%		89%		90%		91%	96.01%		91.5 %	96.02%		92%	96.03%		
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	88%	56%		58%		62%		65%	90.56%		70%	90.57%		72%	90.58%		
1.02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				8,882,544,930.00		13,369,657,002.04		11,878,127,157.43			12,279,688,965.00			12,327,680,956.00			12,376,261,935.28	
1.02.07.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	100%	728,601,560.40	100%	840,972,171.99	100%	100%	945,615,950.00	100%	100%	964,528,269.00	100%	100%	983,818,834.38	D. PMD
1.02.07.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	-	75%	358,495,419.00	75%	417,043,067.00	75%	75%	851,078,000.00	75%	75%	876,610,340.00	75%	75%	902,908,650.20	D. PMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019				2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.02.07.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	-	93%	37,693,500.00	96%	57,986,200.00	98%	98%	30,694,850.00	100%	100%	31,308,747.00	100%	100%	31,308,747.00	D. PMD
1.02.07.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	-	100%	70,558,433.40	100%	95,428,741.00	100%	100%	146,671,750.00	100%	100%	149,605,185.00	100%	100%	152,597,288.70	D. PMD
1.02.07.xx.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih	4%	9%	1,141,248,750.00	15%	1,682,591,610.00	20%	1,856,720,269.00	30%	30%	2,544,045,000.00	40%	40%	2,544,045,000.00	45%	45%	2,544,045,000.00	D. PMD
1.02.07.xx.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	10 Bumdes	17 Bumdes	420,283,300.00	20 Bumdes	435,211,300.00	23 Bumdes	249,541,400.00	25 Bumdes	41 Bumdes	323,284,975.00	28 Bumdes	43 Bumdes	323,284,975.00	35 Bumdes	45 Bumdes	323,284,975.00	D. PMD
1.02.07.xx.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggula-ngan Kemiskinan (TPK) Desa	65%	75%	6,210,339,550.00	77%	8,827,728,229.24	79%	6,530,300,308.44	80%	80%	6,407,007,440.00	85%	85%	6,407,007,440.00	87%	87%	6,407,007,440.00	KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. DINAS PMD
1.02.07.xx.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%	90%	872,344,750.00	90%	1,098,057,050.00	90%	1,830,135,000.00	90%	90%	1,031,291,000.00	90%	90%	1,031,291,000.00	90%	90%	1,031,291,000.00	KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. DINAS PMD
1.02.07.xx.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB	87.07%	88.05 %	238,328,580.00	88.1 %	130,719,900.00	88.15 %		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	DINAS PMD
1.02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3,190,381,921.00		4,438,244,580.00		7,678,460,761.00			8,127,539,250.00			8,127,539,250.00			8,127,539,250.00	
1.02.08.xx.15	Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif	79.14%	79.2 %	1,364,588,221.00	79.25 %	2,277,951,500.00	79.3 %	5,692,960,395.00	79.35 %	76.5%	3,669,863,750.00	79.4 %	76.6%	3,669,863,750.00	79.5 %	76.7%	3,669,863,750.00	D. PPPA PP DAN KB
		Total Fertility Rate (TFR)	2.1 angka per 1.000 penduduk perempuan	2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan	2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan	2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan	2 angka per 1.000 penduduk perempuan		
1.02.08.xx.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	0.63%	1.5 %	185,449,600.00	1.4 %	184,835,500.00	1.3 %	75,000,000.00	1.2 %	0.5%	80,000,000.00	1.1 %	0.49%	80,000,000.00	1%	0.48%	80,000,000.00	D. PPPA PP DAN KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.02.08.xx.17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	86%	86%	87,065,975.00	86%	76,803,190.00	86%	75,972,536.00	86%	86%	216,228,000.00	86%	86%	216,228,000.00	86%	86%	216,228,000.00	D. PPPA PP DAN KB
		Persentase KB pria	8.2%	8.25 %		8.28 %		8.3 %		8.35 %	8.35%		8.4 %	8.4%		8.5 %	8.5%		
1.02.08.xx.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	Persentase capaian KB mandiri	80%	80.02 %	933,593,750.00	80.03 %	1,299,248,990.00	80.04 %	1,002,797,535.00	80.06 %	66.5%	3,271,624,000.00	80.08 %	66.6%	3,271,624,000.00	80.1 %	66.7%	3,271,624,000.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.08.xx.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar	117 Jumlah kelompok	134 Jumlah kelompok	332,162,650.00	151 Jumlah kelompok	284,511,900.00	168 Jumlah kelompok	314,273,900.00	185 Jumlah kelompok	140 Jumlah kelompok	421,240,000.00	202 Jumlah kelompok	143 Jumlah kelompok	421,240,000.00	219 Jumlah kelompok	146 Jumlah kelompok	421,240,000.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.08.xx.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba. PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	4 Desa	6 Desa	146,898,350.00	8 Desa	98,429,000.00	10 Desa	104,835,600.00	12 Desa	12 Desa	100,000,000.00	14 Desa	14 Desa	100,000,000.00	16 Desa	16 Desa	100,000,000.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.08.xx.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB	86 Kelompok	86 Kelompok	40,036,375.00	86 Kelompok	164,701,000.00	86 Kelompok	337,386,395.00	86 Kelompok	86 Kelompok	318,397,000.00	86 Kelompok	86 Kelompok	318,397,000.00	86 Kelompok	86 Kelompok	318,397,000.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.08.xx.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	6 Kelompok	23 Kelompok	100,587,000.00	40 Kelompok	51,763,500.00	57 Kelompok	75,234,400.00	64 Kelompok	80 Kelompok	50,186,500.00	71 Kelompok	83 Kelompok	50,186,500.00	86 Kelompok	86 Kelompok	50,186,500.00	D. PPPA PP DAN KB
1.02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				17,430,250,933.00		14,713,509,777.00		21,723,621,353.20			18,853,621,980.00			19,166,309,508.00			19,229,216,919.66	
1.02.09.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,550,350,729.00	100%	597,836,953.00	100%	1,163,292,011.00	100%	100%	977,179,900.00	100%	100%	996,723,498.00	100%	100%	1,016,657,967.96	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	1,078,243,379.00	75%	666,752,266.00	75%	801,449,148.00	75%	75%	1,280,525,000.00	75%	75%	1,318,940,750.00	75%	75%	1,358,508,972.50	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	55,078,000.00	93%	62,758,300.00	96%	69,098,900.00	98%	98%	69,511,000.00	100%	100%	70,901,220.00	100%	100%	70,901,220.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	121,556,000.00	100%	98,272,500.00	100%	111,229,216.00	100%	100%	166,898,000.00	100%	100%	170,235,960.00	100%	100%	173,640,679.20	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	59%	60%	5,921,161,525.00	61%	5,048,140,093.00	62%	7,233,588,178.00	63%	85.00%	8,532,872,030.00	64%	87.00%	8,532,872,030.00	64%	90.00%	8,532,872,030.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	74%	75%	2,271,449,670.00	76%	2,565,831,273.60	78%	5,279,376,606.00	79%	82%	2,660,227,000.00	80%	83%	2,660,227,000.00	85%	85%	2,660,227,000.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	56.25%	56.25 %	378,610,850.00	56.25 %	525,798,450.00	56.25 %	476,931,000.00	56.25 %	16.00%	440,435,450.00	56.25 %	16.00%	690,435,450.00	56%	16%	690,435,450.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan	74%	75%	1,042,482,550.00	76%	1,398,057,850.00	78%	3,290,407,600.00	79%	85%	1,278,628,500.00	80%	90%	1,278,628,500.00	85%	95%	1,278,628,500.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	94%	98%	2,074,726,475.00	98%	2,584,254,608.20	98%	1,443,307,356.00	98%	95%	1,468,045,100.00	98%	97%	1,468,045,100.00	98%	98%	1,468,045,100.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.09.xx.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji	92.76%	100%	936,591,755.00	100%	1,165,807,483.20	100%	1,312,990,338.20	100%	100%	1,528,504,000.00	100%	100%	1,528,504,000.00	100%	100%	1,528,504,000.00	D. PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp
1.02.09.21	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase ketersediaan prasarana. sarana dan kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan	0	0%	-	0%	-	60%	541,951,000.00	65%	65%	450,796,000.00	70%	70%	450,796,000.00	75%	75%	450,796,000.00	D. PERHUBUNGAN
1.02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				12,392,498,917.00		21,439,715,722.50		29,520,295,756.16			24,409,370,500.00			24,414,056,557.00			24,703,680,995.68	
1.02.10.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	100%	4,560,574,855.00	100%	5,279,907,839.80	100%	100%	6,159,968,150.00	100%	100%	6,283,167,513.00	100%	100%	6,408,830,863.26	DISKOMINFO
1.02.10.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	-	75%	333,682,181.00	75%	1,272,611,554.00	75%	75%	695,453,800.00	75%	75%	716,317,414.00	75%	75%	737,806,936.42	DISKOMINFO
1.02.10.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	-	93%	41,753,000.00	96%	22,050,500.00	98%	98%	34,714,000.00	100%	100%	35,408,280.00	100%	100%	35,408,280.00	DISKOMINFO
1.02.10.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	-	100%	77,145,000.00	100%	53,716,500.00	100%	100%	59,415,000.00	100%	100%	60,603,300.00	100%	100%	61,815,366.00	DISKOMINFO
1.02.10.xx.15	Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	60%	70%	6,804,821,727.00	75%	8,514,757,304.50	80%	15,160,903,088.36	85%	100%	10,777,412,400.00	90%	100%	10,636,152,900.00	100%	100%	10,777,412,400.00	BKPP. KEC. GAMPING. SETDA. D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG. BADAN BADAN KESBANGPOLPOL. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. DINAS KESEHATAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. DISDIK. DISPORA. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. BPBD. SATPOL PP. INSPEKTORAT. BAPPEDA. D.PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN. DISNAKER DINAS SOSIAL. DINAS LINGKUNGAN HIDUP. D.PMP2T. D. PUP DAN KP. DINAS KEBUDAYAAN. DINAS PARIWISATA. DINAS DUKCAPIL. BKAD. D PERHUBUNGAN. DISKOMINFO. DISPERINDAG. D KOPERASI DAN UKM. SET. DPRD. D. PPPA PP DAN KB. D PMD
		Jumlah publikasi informasi melalui media online	290 Publikasi	300 Publikasi		325 Publikasi		350 Publikasi		360 Publikasi	360 Publikasi		375 Publikasi	375 Publikasi		400 Publikasi	400 Publikasi		
		Jumlah lelang pengadaan barang jasa	240 Lelang	250 Lelang		250 Lelang		250 Lelang		250 Lelang	250 Lelang		250 Lelang	250 Lelang		250 Lelang	250 Lelang		
		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	65%	75%		80%		85%		85%	75%		90%	80%		90%	90%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.02.10.xx.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah	80%	80%	93,370,070.00	80%	163,719,350.00	80%	225,767,500.00	80%	80%	218,665,000.00	80%	80%	218,665,000.00	80%	80%	218,665,000.00	SETDA
1.02.10.xx.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo	40%	50%	60,503,775.00	55%	48,383,000.00	60%	36,416,700.00	65%	65%	31,845,000.00	70%	70%	31,845,000.00	80%	80%	31,845,000.00	DISKOMINFO, SETDA
1.02.10.xx.18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jejaring informasi dan media massa	41 Jejaring	41 Jejaring	2,091,646,420.00	42 Jejaring	1,636,027,538.00	43 Jejaring	3,926,327,203.00	44 Jejaring	27 Jejaring	2,458,048,500.00	45 Jejaring	27 Jejaring	2,458,048,500.00	46 Jejaring	27 Jejaring	2,458,048,500.00	SETDA. D.PMP2T. SET.DPRD. DISKOMINFO
1.02.10.xx.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan kepemerintahan berbasis TIK	5 layanan	15 layanan	3,342,156,925.00	20 layanan	6,063,673,494.00	25 layanan	3,542,594,871.00	28 layanan	50 layanan	3,973,848,650.00	30 layanan	55 layanan	3,973,848,650.00	35 layanan	60 layanan	3,973,848,650.00	DISKOMINFO
		Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK	25 layanan	35 layanan		40 layanan		45 layanan		52 layanan	52 layanan		60 layanan	60 layanan		65 layanan	65 layanan		
		Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	3	10		15		20		30	38		40	42		50	50		
		Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	64%	74%		76%		80%		82%	100%		85%	100%		95%	100%		
1.02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. usaha kecil. dan menengah				3,306,448,893.00		3,414,889,531.00		4,635,095,181.00			7,106,888,235.00			7,482,394,007.00			7,815,043,225.06	
1.02.11.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	745,168,465.00	100%	347,730,821.00	100%	511,141,484.00	100%	100%	837,731,825.00	100%	100%	854,486,461.50	100%	100%	871,576,190.73	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	416,684,224.00	75%	578,469,653.00	75%	380,190,437.00	75%	75%	587,906,750.00	75%	75%	605,543,952.50	75%	75%	623,710,271.08	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	57,663,400.00	93%	20,981,000.00	96%	53,694,900.00	98%	98%	35,171,000.00	100%	100%	35,874,420.00	100%	100%	35,874,420.00	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	61,534,700.00	100%	34,458,500.00	100%	57,303,000.00	100%	100%	63,114,000.00	100%	100%	64,376,280.00	100%	100%	65,663,805.60	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	6 Koperasi	10 Koperasi	51,056,500.00	10 Koperasi	70,224,000.00	10 Koperasi	169,545,000.00	10 Koperasi	10 Koperasi	236,509,900.00	10 Koperasi	10 Koperasi	248,335,395.00	10 Koperasi	10 Koperasi	260,752,164.75	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	100 Wirausaha baru	105 Wirausaha baru	513,410,625.00	115 Wirausaha baru	549,867,460.00	125 Wirausaha baru	985,519,701.00	135 Wirausaha baru	135 Wirausaha baru	1,338,643,260.00	140 Wirausaha baru	140 Wirausaha baru	1,405,575,423.00	145 Wirausaha baru	145 Wirausaha baru	1,475,854,194.15	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan aksesibilitas UMKM	45 UMKM	45 UMKM	1,027,543,419.00	45 UMKM	1,651,058,899.00	45 UMKM	2,072,158,836.60	45 UMKM	45 UMKM	2,635,101,000.00	45 UMKM	45 UMKM	2,826,856,050.00	45 UMKM	45 UMKM	2,968,198,852.50	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.11.xx.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	92.47%	92.5 %	433,387,560.00	92.55 %	162,099,198.00	92.6 %	405,541,822.40	92.65 %	93.2%	1,372,710,500.00	92.7 %	93.5%	1,441,346,025.00	93%	93.75%	1,513,413,326.25	D.KOPERASI DAN UKM
1.02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				2,544,281,023.50		1,960,079,149.00		2,381,719,360.00			2,714,125,710.00			2,764,667,073.00			2,815,265,602.44	
1.02.12.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	910,626,604.00	100%	920,841,964.00	100%	1,165,479,482.00	100%	100%	1,530,247,500.00	100%	100%	1,560,852,450.00	100%	100%	1,592,069,499.00	D.PMPPT
1.02.12.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	650,953,664.50	75%	489,312,847.00	75%	359,374,918.00	75%	75%	526,875,600.00	75%	75%	542,681,868.00	75%	75%	558,962,324.04	D.PMPPT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019				2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.02.12.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	49,630,815.00	93%	19,850,900.00	96%	38,394,300.00	98%	98%	54,496,250.00	100%	100%	55,586,175.00	100%	100%	55,586,175.00	D.PMPPT
1.02.12.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	53,267,300.00	100%	40,600,800.00	100%	77,289,800.00	100%	100%	152,011,000.00	100%	100%	155,051,220.00	100%	100%	158,152,244.40	D.PMPPT
1.02.12.xx.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	70.84%	70.97 %	711,909,140.00	71.28 %	392,661,138.00	72%	629,283,360.00	72.16 %	85.00%	394,825,360.00	72.45 %	87.50%	394,825,360.00	72.62 %	90.00%	394,825,360.00	D.PMP2T
1.02.12.xx.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	4.261 Rp	4.393 Rp	167,893,500.00	4.525 Rp	96,811,500.00	4.661 Rp	111,897,500.00	4.8 Rp	7.000 milyar	55,670,000.00	4.944 Rp	7.500 milyar	55,670,000.00	5.092 Rp	8.000 milyar	55,670,000.00	D.PMP2T
1.02.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				3,185,549,400.00		4,095,398,742.00		8,699,969,395.68			7,911,355,080.00			8,941,115,960.00			8,989,678,388.10	
1.02.13.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	100%	286,760,648.00	100%	513,234,392.00	100%	100%	682,074,500.00	100%	100%	695,715,990.00	100%	100%	709,630,309.80	DISPORA
1.02.13.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	-	75%	169,988,235.00	75%	259,955,422.00	75%	75%	396,871,000.00	75%	75%	408,777,130.00	75%	75%	421,040,443.90	DISPORA
1.02.13.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	-	93%	27,356,000.00	96%	42,205,951.68	98%	98%	307,977,000.00	100%	100%	314,136,540.00	100%	100%	314,136,540.00	DISPORA
1.02.13.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	-	100%	92,254,300.00	100%	160,975,500.00	100%	100%	140,186,000.00	100%	100%	142,989,720.00	100%	100%	145,849,514.40	DISPORA
1.02.13.xx.15	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersedianya dokumen data potensi kepemudaan	1	100%	186,548,700.00	100%	245,655,700.00	N/A		N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00	DISPORA
		Cakupan data potensi kepemudaan	100%	-		1		0											
1.02.13.xx.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	90%	90%	289,806,850.00	90%	488,835,430.00	90%	395,988,400.00	91%	91%	510,999,800.00	91%	91%	1,310,999,800.00	91%	91%	1,310,999,800.00	DISPORA
1.02.13.xx.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	presentase ormas pemuda yang aktif dibidang kewirausahaan	24%	N/A	75,627,500.00	15%	170,096,000.00	15%	427,688,450.00			565,000,000.00			565,000,000.00	25%		565,000,000.00	DISPORA
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang mandiri	N/A	N/A		15%		15%		20%	15%		20%	17%			20%		
1.02.13.xx.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalah gunaan Napza	22%	22%	615,807,600.00	25%	531,621,300.00	25%	674,448,300.00	29%	68%	993,966,580.00	29%	75%	993,966,580.00	32%	80%	993,966,580.00	DISPORA. DINAS SOSIAL
		Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	21 Satuan Tugas	25 Satuan Tugas		28 Satuan Tugas		31 Satuan Tugas		34 Satuan Tugas	59 Satuan Tugas		37 Satuan Tugas	64 Satuan Tugas		41 Satuan Tugas	69 Satuan Tugas		
1.02.13.xx.19	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Persentase keaktifan budaya olahraga di sekolah	90.3%	90.60%	75,642,375.00	91%	198,263,800.00	N/A		N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00	DISPORA
1.02.13.xx.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase prestasi olahraga pelajar	73%	73%	1,732,127,225.00	75%	1,884,567,329.00	75%	4,265,418,930.00	75%	80%	4,314,280,200.00	75%	100%	4,314,280,200.00	75%	85%	4,314,280,200.00	DISPORA
1.02.13.xx.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak	83%	83%	209,989,150.00	83%	-	83%	1,960,054,050.00	83%	83%	0.00	83%	83%	195,250,000.00	83%	83%	214,775,000.00	DISPORA
1.02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				2,012,094,727.00		2,003,347,240.24		2,255,891,377.44			8,304,976,750.00			8,154,976,750.00			8,304,976,750.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.02.14.xx.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	90%	95%	2,012,094,727.00	95%	2,003,347,240.24	95%	2,255,891,377.44	95%	95%	8,304,976,750.00	95%	95%	8,154,976,750.00	95%	95%	8,304,976,750.00	KEC. GAMPING. SETDA. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. DISKOMINFO. D PMD
1.02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				0.00		68,566,419.00		201,533,200.00			72,500,000.00			72,500,000.00			72,500,000.00	
1.02.15.xx.15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunika-si terlayani dan terlindungi keamanannya	90%	90%	-	90%	68,566,419.00	90%	201,533,200.00	90%	90%	72,500,000.00	90%	90%	72,500,000.00	90%	90%	72,500,000.00	D. Kominfo
1.02.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				7,766,312,031.00		4,637,975,745.00		9,304,007,795.00			8,119,420,490.00			30,199,660,073.50			231,698,462,595.07	
1.02.16.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,190,417,866.00	100%	542,093,904.00	100%	1,081,608,793.00	100%	100%	728,744,400.00	100%	100%	743,319,288.00	100%	100%	758,185,673.76	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	418,226,215.00	75%	404,786,173.00	75%	409,101,494.00	75%	75%	585,791,450.00	75%	75%	603,365,193.50	75%	75%	621,466,149.31	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	45,642,000.00	93%	52,356,000.00	96%	47,550,500.00	98%	98%	89,097,600.00	100%	100%	90,879,552.00	100%	100%	90,879,552.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	94,851,400.00	100%	45,305,468.00	100%	57,688,500.00	100%	100%	65,450,000.00	100%	100%	66,759,000.00	100%	100%	68,094,180.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	58.23%	58.26 %	586,424,100.00	58.29 %	618,226,800.00	58.32 %	2,745,827,300.00	58.35 %	65.00%	2,050,947,250.00	58.38 %	66.00%	2,050,947,250.00	58.41 %	67.00%	2,050,947,250.00	DINAS KEBUDAYAAN, KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018	2019			2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1.02.16.xx.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	17.62%	17.65 %	1,898,373,950.00	17.68 %	1,804,058,900.00	17.71 %	2,839,015,308.00	17.74 %	26.5%	2,291,970,560.00	17.77 %	29.00%	2,291,970,560.00	17.8 %	31.5%	2,291,970,560.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	13.6%	13.9 %	3,215,981,500.00	14.2 %	756,062,000.00	14.5 %	1,388,386,900.00	14.8 %	34.74%	887,784,780.00	15.1 %	40.28%	887,784,780.00	15.4 %	45.82%	887,784,780.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.18	Program Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	Persentase pelestarian dan pengembang-an peninggalan budaya	5.65%	5.68 %	316,395,000.00	5.7 %	415,086,500.00	5.73 %	734,829,000.00	5.76 %	23.1%	1,419,634,450.00	5.79 %	28.01%	1,419,634,450.00	5.82 %	32.92%	1,419,634,450.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.19	Program Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi			0.00		0.00		0.00			0.00		3 sumber sejarah	1,250,000,000.00		3 sumber sejarah	1,250,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan												3 karya			3 karya		
		Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain												0.02			0.02		
1.02.16.xx.20	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan			0.00		0.00		0.00			0.00		2.50%	700,000,000.00		2.50%	700,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.21	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana			0.00		0.00		0.00			0.00		2 layanan	3,500,000,000.00		2 layanan	3,500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.22	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi			0.00		0.00		0.00			0.00		2 event seni	16,595,000,000.00		2 event seni	16,595,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.23	Program pengelolaan taman budaya	Jumlah taman budaya di Kabupaten			0.00		0.00		0.00			0.00					0 taman budaya	200,964,500,000.00	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.16.xx.24	Program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing			0.00		0.00		0.00			0.00					0.00%	500,000,000.00	DINAS PARIWISATA
1.02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				3,150,918,324.78		2,710,262,311.00		4,514,441,851.00			3,933,352,000.00			3,975,643,584.00			4,017,702,624.78	
1.02.17.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	847,187,003.88	100%	636,670,700.00	100%	918,410,678.00	100%	100%	814,289,700.00	100%	100%	830,575,494.00	100%	100%	847,187,003.88	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.17.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	836,007,235.30	75%	510,015,534.00	75%	568,993,723.00	75%	75%	788,017,000.00	75%	75%	811,657,510.00	75%	75%	836,007,235.30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.17.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	65,739,000.00	93%	55,307,147.00	96%	60,272,000.00	98%	98%	64,450,000.00	100%	100%	65,739,000.00	100%	100%	65,739,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.17.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	55,988,085.60	100%	64,374,000.00	100%	79,329,500.00	100%	100%	53,814,000.00	100%	100%	54,890,280.00	100%	100%	55,988,085.60	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.17.xx.16	Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase minat baca masyarakat	55.85%	56.91 %	778,671,600.00	57.22 %	780,719,100.00	57.31 %	1,551,465,370.00	57.85 %	57.85%	1,157,935,500.00	58.18 %	58.18%	1,157,935,500.00	58.63 %	58.63%	1,157,935,500.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.17.xx.17	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat	0 Unit	4 Unit	567,325,400.00	8 Unit	663,175,830.00	12 Unit	1,335,970,580.00	16 Unit	16 Unit	1,054,845,800.00	20 Unit	20 Unit	1,054,845,800.00	24 Unit	24 Unit	1,054,845,800.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				3,586,132,489.00		3,654,986,307.65		4,294,905,678.13			3,386,796,970.00			3,386,796,970.00			3,386,796,970.00	
1.02.18.xx.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.	68.08%	68.08 %	279,249,075.00	69%	190,671,621.00	70%	824,913,158.00	72%	79%	489,463,700.00	74%	79%	489,463,700.00	76%	79%	489,463,700.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1.02.18.xx.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%	20%	2,781,466,739.00	20%	2,704,712,636.65	20%	2,879,943,020.13	20%	20%	2,303,066,770.00	20%	20%	2,303,066,770.00	20%	20%	2,303,066,770.00	BKPP. KEC. GAMPING. SETDA. D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG. BADAN BADAN KESBANGPOLPOL. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. DINAS KESEHATAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. DISDIK. DISPORA. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. BPBD. SATPOL PP. INSPEKTORAT. BAPPEDA. D.PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN. DISNAKER DINAS SOSIAL. DINAS
1.02.18.xx.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	90%	90%	169,610,000.00	90%	242,806,250.00	90%	178,422,500.00	90%	100%	240,556,500.00	90%	100%	240,556,500.00	90%	100%	240,556,500.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.02.18.xx.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan	70%	71%	355,806,675.00	72%	516,795,800.00	73%	411,627,000.00	74%	81.59%	353,710,000.00	75%	81.8%	353,710,000.00	76%	82.00%	353,710,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	Urusan Pemerintahan Pilihan				105,418,000,298.00		76,364,924,220.91		62,789,509,293.66			68,530,648,311.00			75,650,122,245.95			81,755,373,220.50	
2	Urusan Pemerintahan Pilihan				105,418,000,298.00		76,364,924,220.91		62,789,509,293.66			68,530,648,311.00			75,650,122,245.95			81,755,373,220.50	
2.00.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				3,294,465,930.00		3,787,602,980.00		3,735,285,776.00			3,197,569,500.00			3,197,569,500.00			3,197,569,500.00	
2.00.01.xx.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	7%	9%	2,679,017,530.00	9%	2,868,477,480.00	9%	2,721,774,576.00	9%	9%	2,063,348,500.00	9%	9%	2,063,348,500.00	9%	9%	2,063,348,500.00	D. PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN
2.00.01.xx.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasi-kan	5%	5%	134,656,900.00	5%	415,555,750.00	5%	499,516,200.00	5%	5.97%	518,419,000.00	5%	6.59%	518,419,000.00	5%	7.22%	518,419,000.00	D. PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN
2.00.01.xx.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase peningkatan konsumsi ikan	1.1%	1.1 %	336,114,000.00	1.1 %	410,253,000.00	1.1 %	392,202,500.00	1.1 %	1.1%	472,282,000.00	1.1 %	1.1%	472,282,000.00	1.1 %	1.1%	472,282,000.00	D. PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN
		Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi	2.5 Jumlah produk	5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		5 Jumlah produk	5 Jumlah produk		5 Jumlah produk	5 Jumlah produk		5 Jumlah produk	5 Jumlah produk		
2.00.01.xx.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar	Peningkatan jumlah ikan di perairan umum	1150 kg	1000 kg	144,677,500.00	1100 kg	93,316,750.00	1200 kg	121,792,500.00	1300 kg	2000 kg	143,520,000.00	1400 kg	2000 kg	143,520,000.00	1500 kg	2000 kg	143,520,000.00	D. PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN
2.00.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				5,083,160,885.00		10,447,548,093.00		14,838,469,170.00			19,561,297,400.00			20,557,808,464.50			21,499,502,388.88	
2.00.02.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	100%	755,479,970.00	100%	1,342,675,048.00	100%	100%	2,050,134,300.00	100%	100%	2,091,136,986.00	100%	100%	2,132,959,725.72	D. PARIWISATA
2.00.02.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	-	75%	334,964,431.00	75%	642,452,341.00	75%	75%	587,652,200.00	75%	75%	605,281,766.00	75%	75%	623,440,218.98	D. PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
2.00.02.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	-	93%	45,443,500.00	96%	50,455,000.00	98%	98%	141,867,000.00	100%	100%	144,704,340.00	100%	100%	144,704,340.00	D. PARIWISATA
2.00.02.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	-	100%	47,142,400.00	100%	61,855,000.00	100%	100%	134,690,750.00	100%	100%	137,384,565.00	100%	100%	140,132,256.30	D. PARIWISATA
2.00.02.xx.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Wisata	-	100%	1,781,147,100.00	100%	3,148,882,072.00	100%	3,121,534,950.00	100%	100%	4,208,185,750.00	100%	100%	4,418,595,037.50	100%	100%	4,639,524,789.38	D.PMP2T. D. PARIWISATA
2.00.02.xx.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata	3 buah	3 buah	2,419,522,154.00	3 buah	4,699,482,044.00	3 buah	7,145,333,547.00	3 buah	3 buah	9,491,840,750.00	3 buah	3 buah	9,966,432,787.50	3 buah	3 buah	10,464,754,426.88	D. PARIWISATA
2.00.02.xx.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama/ kemitraan pariwisata	6 Buah	6 Buah	571,498,631.00	6 Buah	967,980,776.00	7 Buah	1,806,941,484.00	7 Buah	7 Buah	2,116,069,150.00	7 Buah	7 Buah	2,321,872,607.50	7 Buah	7 Buah	2,437,966,237.88	D. PARIWISATA
2.00.02.xx.18	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata kategori mandiri	6 desa wisata	7 desa wisata	310,993,000.00	8 desa wisata	448,172,900.00	9 desa wisata	667,221,800.00	10 jumlah	10 desa wisata	830,857,500.00	11 jumlah	11 desa wisata	872,400,375.00	12 jumlah	12 desa wisata	916,020,393.75	D. PARIWISATA
2.00.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				23,536,734,025.00		17,371,557,654.00		17,606,837,820.00			21,646,968,835.00			22,603,170,668.22			23,602,023,302.21	
2.00.03.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,556,034,773.00	100%	1,641,790,641.00	100%	1,852,916,516.00	100%	100%	2,515,365,151.00	100%	100%	2,565,672,454.02	100%	100%	2,616,985,903.10	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	1,620,625,105.00	75%	1,398,866,323.00	75%	1,694,927,269.00	75%	75%	2,237,010,000.00	75%	75%	2,304,120,300.00	75%	75%	2,373,243,909.00	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	184,340,500.00	93%	140,932,400.00	96%	154,314,100.00	98%	98%	107,301,800.00	100%	100%	109,447,836.00	100%	100%	109,447,836.00	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	159,506,000.00	100%	118,712,000.00	100%	99,011,000.00	100%	100%	90,880,000.00	100%	100%	92,697,600.00	100%	100%	94,551,552.00	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan kelas kelompok	56 Kelom-pok	48 Kelom-pok	1,423,811,275.00	48 Kelom-pok	1,688,476,225.00	48 Kelom-pok	2,014,874,625.00	48 Kelom-pok	48 Kelom-pok	4,524,531,794.00	48 Kelom-pok	48 Kelom-pok	4,750,758,383.70	48 Kelom-pok	48 Kelom-pok	4,988,296,302.89	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang bersertifikat	39 Jumlah produk	5 Jumlah produk	836,997,555.00	5 Jumlah produk	1,025,997,676.00	5 Jumlah produk	990,741,700.00	5 Jumlah produk	5 Jumlah produk	909,849,390.00	5 Jumlah produk	5 Jumlah produk	955,341,859.50	5 Jumlah produk	5 Jumlah produk	1,003,108,952.48	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP	15%	15%	2,284,158,270.00	15%	2,569,958,120.00	15%	1,606,397,205.00	15%	15%	2,002,439,000.00	15%	15%	2,102,560,950.00	15%	15%	2,207,688,997.50	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	0.5%	0.5 %	11,995,908,055.00	0.5 %	5,014,413,810.00	0.5 %	5,362,498,082.00	0.5 %	4.47%	5,068,911,125.00	0.5 %	4.47%	5,322,356,681.25	0.5 %	4.47%	5,588,474,515.31	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis	10%	10%	1,428,622,150.00	10%	1,651,864,958.00	10%	1,495,786,023.00	10%	10%	1,888,958,850.00	10%	10%	1,983,406,792.50	10%	10%	2,082,577,132.13	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penangan kesehatan ternak	80%	80%	1,045,982,400.00	80%	944,906,616.00	80%	1,139,935,100.00	80%	80%	1,138,238,675.00	80%	80%	1,195,150,608.75	80%	80%	1,254,908,139.19	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0.23%	0.267 %	110,539,742.00	0.267 %	238,295,610.00	0.267 %	334,663,000.00	0.267 %	0.277%	341,045,000.00	0.267 %	0.277%	358,097,250.00	0.267 %	0.277%	376,002,112.50	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.03.xx.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan produk perternakan yang bersertifikat	2 Jumlah produk	3 Jumlah produk	180,382,500.00	3 Jumlah produk	398,081,475.00	3 Jumlah produk	461,703,700.00	3 Jumlah produk	3 Jumlah produk	261,359,900.00	3 Jumlah produk	3 Jumlah produk	274,427,895.00	3 Jumlah produk	3 Jumlah produk	288,149,289.75	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp
2.00.03.xx.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasi-kan	5%	5%	709,825,700.00	5%	539,261,800.00	5%	399,069,500.00	5%	5%	561,078,150.00	5%	5%	589,132,057.50	5%	5%	618,588,660.38	D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.04	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan				1,262,982,500.00		0		0			0			0			0	
2.00.04.xx.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan luasan hutan rakyat	3.9%	2%	213,527,000.00	0%	-	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.04.xx.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase penurunan luas lahan kritis	6.1%	2%	993,990,500.00	0%	-	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.04.xx.20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Peningkatan kelompok yang mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan kehutanan	14 Kelompok	14 Kelom-pok	55,465,000.00	0 Kelom-pok	-	0 Kelom-pok		0 Kelom-pok	0 Kelom-pok		0 Kelom-pok	0 Kelom-pok		0 Kelom-pok	0 Kelom-pok		D. PERTANIAN. PANGAN. DAN PERIKANAN
2.00.05	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				728,685,745.00		0		0			0			0			0	
2.00.05.xx.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan	60%	70%	111,338,045.00	0%	-	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		D PUPKP
2.00.05.xx.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Persentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis	12%	15%	97,007,050.00	0%	-	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		D PUPKP
2.00.05.xx.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase rumah yang teraliri listrik	99.96%	99.97 %	207,209,300.00	0%	-	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		D PUPKP
2.00.05.xx.18	Program Pengembangan Energi Terbarukan	Jumlah unit energi alternatif yang terbangun	400 Unit	410 Unit	313,131,350.00	0 Unit	-	0 UnitUnit		0 Unit	0 Unit		0 Unit	0 Unit		0 Unit	0 Unit		D PUPKP
2.00.06	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				70,132,466,813.00		43,097,751,143.91		22,807,084,616.66			20,177,473,126.00			25,036,911,490.73			29,022,242,345.79	
2.00.06.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,259,915,322.00	100%	3,457,204,837.00	100%	6,000,322,443.00	100%	100%	7,817,201,700.00	100%	100%	7,973,545,734.00	100%	100%	8,133,016,648.68	DISPERINDAG
2.00.06.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	736,840,607.00	75%	1,092,255,197.00	75%	1,233,814,315.00	75%	75%	1,098,834,100.00	75%	75%	1,131,799,123.00	75%	75%	1,165,753,096.69	DISPERINDAG
2.00.06.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	54,929,500.00	93%	43,174,000.00	96%	55,998,500.00	98%	98%	38,170,000.00	100%	100%	38,933,400.00	100%	100%	38,933,400.00	DISPERINDAG
2.00.06.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	60,564,000.00	100%	48,678,500.00	100%	81,280,000.00	100%	100%	89,075,000.00	100%	100%	90,856,500.00	100%	100%	92,673,630.00	DISPERINDAG
2.00.06.xx.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	49%	50%	1,041,178,825.00	51%	681,241,201.00	52%	856,070,185.00	53%	53%	1,045,420,100.00	54%	54%	1,107,691,105.00	55%	55%	1,163,075,660.25	SETDA. D.PMP2T. DISPERINDAG
		Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi	260 produk	248 produk		236 produk		224 produk		213 produk	213 produk		202 produk	202 produk		195 produk	195 produk		
2.00.06.xx.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor kumulatif	44.840.907 US$	$ 42,000,000	743,866,700.00	$ 42,500,000	523,255,337.00	$ 43,000,000	1,104,910,156.00	$ 43,500,000	$ 40,950,000	1,298,122,000.00	$ 44,000,000	$ 41,750,000	1,363,028,100.00	$ 45,000,000	$ 42,650,000	1,431,179,505.00	DISPERINDAG
2.00.06.xx.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan	19.011 Pelaku usaha perda-gangan	19.106 Pelaku usaha perda-gangan	1,461,923,371.00	19.198 Pelaku usaha perda-gangan	730,049,577.00	19.281 Pelaku usaha perda-gangan	373,731,500.00	19.352 Pelaku usaha perda-gangan	27.823 Pelaku usaha perda-gangan	262,131,000.00	19.424 Pelaku usaha perda-gangan	27.893 Pelaku usaha perda-gangan	275,237,550.00	19.501 Pelaku usaha perda-gangan	27.963 Pelaku usaha perda-gangan	288,999,427.50	DISPERINDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
2.00.06.xx.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan	581 Orang	962 Orang	685,748,300.00	1064 Orang	462,965,050.00	1314 Orang	585,215,025.00	1424 Orang	1424 Orang	160,999,000.00	1529 Orang	1529 Orang	169,048,950.00	1723 orang	1723 orang	177,501,397.50	DISPERINDAG
2.00.06.xx.20	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten	20 Pasar dan obyek wisata	21 Pasar dan obyek wisata	62,305,153,588.00	22 Pasar dan obyek wisata	35,262,989,444.91	23 Pasar dan obyek wisata	11,630,037,692.66	24 Pasar dan obyek wisata	27 Pasar dan obyek wisata	6,980,634,150.00	25 Pasar dan obyek wisata	28 Pasar dan obyek wisata	9,765,540,648.93	26 Pasar dan obyek wisata	29 Pasar dan obyek wisata	13,253,817,681.38	DISPERINDAG
2.00.06.xx.21	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib	-2.5%	7%	782,346,600.00	2%	795,938,000.00	2%	885,704,800.00	2%	9.04%	1,386,886,076.00	2%	10.00%	3,121,230,379.80	2%	11.00%	3,277,291,898.79	DISPERINDAG
2.00.07	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				863,936,750.00		1,074,787,600.00		3,006,213,332.00			2,807,115,450.00			3,587,471,222.50			3,766,844,783.63	
2.00.07.xx.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan	5 IKM	60 IKM	372,450,900.00	65 IKM	247,634,900.00	70 IKM	1,690,226,032.00	75 IKM	70 IKM	401,337,000.00	80 IKM	75 IKM	421,403,850.00	85 IKM	80 IKM	442,474,042.50	DISPERINDAG
2.00.07.xx.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang meningkat Kemampuannya dalam Pengelolaan Usaha	5%	10%	250,359,250.00	10%	483,832,900.00	11%	767,560,650.00	11%	11%	2,057,482,500.00	12%	12%	2,600,356,625.00	12%	12%	2,730,374,456.25	DISPERINDAG
2.00.07.xx.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri	25 IKM	33 IKM	203,604,100.00	38 IKM	271,602,300.00	43 IKM	376,046,350.00	48 IKM	50 IKM	71,991,000.00	53 IKM	55 IKM	275,590,550.00	58 IKM	60 IKM	289,370,077.50	DISPERINDAG
2.00.07.xx.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra yang dikukuhkan	10 Sentra industri	15 Sentra industri	37,522,500.00	20 Sentra industri	71,717,500.00	25 Sentra industri	172,380,300.00	30 Sentra industri	30 Sentra industri	276,304,950.00	35 Sentra industri	33 Sentra industri	290,120,197.50	40 Sentra industri	35 Sentra industri	304,626,207.38	DISPERINDAG
2.00.08	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				515,567,650.00		585,676,750.00		795,618,579.00			1,140,224,000.00			667,190,900.00			667,190,900.00	
2.00.08.xx.17	Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berangkat	40%	40%	515,567,650.00	45%	585,676,750.00	50%	795,618,579.00	55%	55%	1,140,224,000.00	60%	60%	667,190,900.00	60%	60%	667,190,900.00	DINAS SOSIAL, DINAS TENAGA KERJA
3	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				179,178,678,898.86		200,799,351,821.01		237,003,877,159.46			231,620,174,717.00			231,876,801,256.75			233,993,332,212.79	
3	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				179,178,678,898.86		200,799,351,821.01		237,003,877,159.46			231,620,174,717.00			231,876,801,256.75			233,993,332,212.79	
3.00.01	Urusan Sekretariat Daerah				32,871,533,627.86		29,005,028,624.28		37,988,691,676.59			42,180,189,885.00			40,935,068,603.10			41,595,399,628.90	
3.00.01.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	9,530,293,825	100%	8,220,154,804.04	100%	9,275,997,670.00	100%	100%	11,537,186,730.00	100%	100%	11,767,930,464.60	100%	100%	12,003,289,073.89	KEC. GAMPING. SETDA. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
3.00.01.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	6,078,862,030	75%	5,562,455,550.00	75%	6,792,240,956.00	75%	75%	9,311,248,450.00	75%	75%	9,590,585,903.50	75%	75%	9,878,303,480.61	KEC. GAMPING. SETDA. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN
3.00.01.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	685,824,054	93%	835,811,950.00	96%	983,050,378.00	98%	98%	648,953,000.00	100%	100%	661,932,060.00	100%	100%	661,932,060.00	KEC. GAMPING. SETDA. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN
3.00.01.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	731,893,125	100%	735,222,977.00	100%	938,697,611.00	100%	100%	1,090,923,500.00	100%	100%	1,112,741,970.00	100%	100%	1,134,996,809.40	KEC. GAMPING. SETDA. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN
3.00.01.xx.15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	100%	100%	1,172,855,228.00	100%	1,381,630,943.00	100%	1,741,140,979.00	100%	100%	1,172,145,000.00	100%	100%	1,172,145,000.00	100%	100%	1,172,145,000.00	SETDA
3.00.01.xx.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya	100%	100%	2,135,913,329.00	100%	2,647,624,587.00	100%	4,173,596,423.00	100%			100%			100%			
		Presentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Peraturan Daerah									80%	4,174,432,150.00		80%	4,174,432,150.00		80%	4,174,432,150.00	SETDA, SET. DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp
3.00.01.xx.18	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	90%	90%	802,062,525.00	90%	507,263,185.00	90%	789,678,690.00	90%	90%	385,437,650.00	90%	90%	785,437,650.00	90%	90%	785,437,650.00	SETDA
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional												80%			82%		
3.00.01.xx.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	3%	5%	1,547,377,275.00	10%	1,268,666,706.00	15%	2,232,010,475.00	20%	20%	2,181,212,500.00	25%	25%	2,181,212,500.00	30%	30%	2,181,212,500.00	SETDA
3.00.01.xx.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	30%	30%	7,396,792,508.86	45%	5,296,070,969.24	60%	8,069,561,952.59	75%	75%	6,791,934,195.00	90%	90%	4,591,934,195.00	100%	100%	4,591,934,195.00	KEC. GAMPING. SETDA. BADAN BADAN KESBANGPOLPOL. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. DINAS KESEHATAN. KEC. SEYEGAN. KEC.
		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan. Pengelolaan. dan Penanganan Aduan	100%	100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
3.00.01.xx.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelengga-raan pemerintahan diatas 70	10 Kecamatan	10 Ke-camatan	1,577,842,434.00	12 Ke-camatan	1,707,638,595.00	14 Ke-camatan	2,142,058,861.00	17 Ke-camatan	15 Kecamatan	4,054,740,010.00	17 Ke-camatan	16 Kecamatan	4,054,740,010.00	17 Ke-camatan	17 Kecamatan	4,054,740,010.00	KEC. GAMPING. SETDA. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN, D. PMD
3.00.01.xx.22	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Persentase penanganan hukum	100%	100%	650,410,185.00	100%	412,576,600.00	100%	632,209,482.00	100%	100%	652,711,000.00	100%	100%	537,711,000.00	100%	100%	652,711,000.00	SETDA
3.00.01.xx.24	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang aktif	93.33%	90%	482,987,875.00	90%	373,310,522.00	90%	161,553,105.00	90%	90%	50,932,000.00	90%	90%	50,932,000.00	90%	90%	50,932,000.00	SETDA
3.00.01.xx.25	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	100%	2%	78,419,234.00	2%	56,601,236.00	3%	56,895,094.00		100%	128,333,700.00		100%	128,333,700.00	4%	100%	128,333,700.00	SETDA
3.00.01.xx.26	Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman								3%			4%	50%	125,000,000.00		60%	125,000,000.00	SETDA
3.00.02	Urusan Sekretariat DPRD				22,994,556,225.00		36,098,800,127.00		46,612,859,506.00			46,802,785,540.00			47,050,452,279.70			47,283,232,802.31	
3.00.02.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,996,289,119.00	100%	4,296,948,685.00	100%	4,287,197,343.00	100%	100%	6,491,908,400.00	100%	100%	6,621,746,568.00	100%	100%	6,754,181,499.36	SET. DPRD
3.00.02.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	960,042,150.00	75%	1,208,376,473.00	75%	986,813,809.00	75%	75%	3,188,312,390.00	75%	75%	3,283,961,761.70	75%	75%	3,382,480,614.55	SET. DPRD
3.00.02.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	188,839,000.00	93%	665,153,547.00	96%	1,294,124,524.00	98%	98%	1,019,414,000.00	100%	100%	1,039,802,280.00	100%	100%	1,039,802,280.00	SET. DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
3.00.02.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	73,028,150.00	100%	101,815,200.00	100%	107,609,100.00	100%	100%	89,546,000.00	100%	100%	91,336,920.00	100%	100%	93,163,658.40	SET. DPRD
3.00.02.xx.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda	3 Perda	3 Perda	18,776,357,806.00	4 Perda	29,826,506,222.00	3 Perda	39,937,114,730.00	2 Perda	4 Perda	36,013,604,750.00	3 Perda	3 Perda	36,013,604,750.00	3 Perda	3 Perda	36,013,604,750.00	SET. DPRD
3.00.03	Urusan Inspektorat				3,722,116,098.00		2,949,895,025.23		3,567,238,139.61			3,923,245,800.00			3,961,197,558.00			3,997,184,488.77	
3.00.03.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	891,475,108	100%	748,529,003.00	100%	777,495,036.00	100%	100%	675,995,850.00	100%	100%	689,515,767.00	100%	100%	703,306,082.34	INSPEKTORAT
3.00.03.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	410,220,634	75%	346,158,282.00	75%	370,899,765.00	75%	75%	680,158,700.00	75%	75%	700,563,461.00	75%	75%	721,580,364.83	INSPEKTORAT
3.00.03.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	85,176,500	93%	76,396,440.23	96%	93,643,366.61	98%	98%	143,525,000.00	100%	100%	146,395,500.00	100%	100%	146,395,500.00	INSPEKTORAT
3.00.03.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	98,617,200	100%	50,948,000.00	100%	69,423,000.00	100%	100%	57,829,000.00	100%	100%	58,985,580.00	100%	100%	60,165,291.60	INSPEKTORAT
3.00.03.xx.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	50%	50%	2,132,000,381.00	60%	1,621,055,450.00	70%	2,189,921,472.00	80%	98%	2,327,027,250.00	90%	99%	2,327,027,250.00	100%	100%	2,327,027,250.00	KEC. GAMPING. SETDA. D. PERTANAHAN DAN TATA RUANG. BADAN KESBANGPOL. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. DINAS KESEHATAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. DISDIK. DISPORA. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. BPBD. SATPOL PP. BAPPEDA. D. PERTANIAN. PANGAN DAN PERIKANAN. BKPP. DINAS SOSIAL. DINAS LINGKUNGAN HIDUP. D.PMP2T. D. PUP DAN KP. D.KEBUDAYAAN. D.PARIWISATA. DINAS DUKCAPIL. DISKOMINFO. DISPERINDAG. SET. DPRD. D. PPPA PP.
		Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	3 Jumlah SKPD	8 Jumlah SKPD		11 Jumlah SKPD		14 Jumlah SKPD		17 Jumlah SKPD	17 Jumlah SKPD		20 Jumlah SKPD	20 Jumlah SKPD		22 Jumlah SKPD	22 Jumlah SKPD		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
3.00.03.xx.16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/ Setifikasi JFA/IB/TB	100%	100%	73,771,000.00	100%	88,723,750.00	100%	40,301,500.00	100%	100%	38,710,000.00	100%	100%	38,710,000.00	100%	100%	38,710,000.00	INSPEKTORAT
3.00.03.xx.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 2	Level 2	30,855,275.00	Level 2	18,084,100.00	Level 2	25,554,000.00	3 Level	Level 3	0.00	Level 3	Level 3	0.00	Level 3	Level 3	0.00	INSPEKTORAT
3.00.04	Urusan Perencanaan				9,377,072,321.00		6,759,888,417.00		9,652,649,283.00			8,162,101,275.00			8,127,972,136.75			8,790,916,421.37	
3.00.04.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	839,280,182.00	100%	980,171,510.00	100%	1,709,686,342.00	100%	100%	1,655,986,900.00	100%	100%	1,689,106,638.00	100%	100%	1,722,888,770.76	BAPPEDA
3.00.04.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	746,144,230.00	75%	680,828,750.00	75%	1,085,145,468.00	75%	75%	886,520,125.00	75%	75%	913,115,728.75	75%	75%	940,509,200.61	BAPPEDA
3.00.04.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	119,178,000.00	93%	43,595,000.00	96%	106,846,324.00	98%	98%	221,076,000.00	100%	100%	225,497,520.00	100%	100%	225,497,520.00	BAPPEDA
3.00.04.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	98,291,475.00	100%	56,834,500.00	100%	113,327,000.00	100%	100%	86,700,000.00	100%	100%	88,434,000.00	100%	100%	90,202,680.00	BAPPEDA
3.00.04.xx.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	40%	60%	434,231,928.00	65%	164,430,295.00	65%	89,251,500.00	70%	70%	28,480,000.00	75%	75%	28,480,000.00	80%	80%	28,480,000.00	BAPPEDA
3.00.04.xx.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	99.4%	100%	4,966,365,875.00	100%	3,004,729,657.00	100%	2,573,227,881.00	100%	100%	2,571,774,650.00	100%	100%	2,571,774,650.00	100%	100%	3,071,774,650.00	KEC. GAMPING. KEC. GODEAN. KEC. BERBAH. KEC. MOYUDAN. KEC. PRAMBANAN. KEC. MINGGIR. KEC. KALASAN. KEC. SEYEGAN. KEC. MLATI. KEC. DEPOK. KEC. NGEMPLAK. KEC. NGAGLIK. KEC. SLEMAN. KEC. TEMPEL. KEC. TURI. KEC. PAKEM. KEC. CANGKRINGAN. BAPPEDA
3.00.04.xx.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	33.33%	33.33 %	1,380,813,113.00	33.33 %	1,263,441,705.00	33.33 %	1,310,382,123.00	33.33 %	44.00%	873,959,500.00	33.33 %	44.00%	773,959,500.00	33.33 %	44.00%	873,959,500.00	SETDA, BAPPEDA
3.00.04.xx.20	Program perencanaan sosial budaya	Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan	35%	40%	585,338,850.00	45%	424,895,350.00	50%	393,285,950.00	55%	84%	334,396,900.00	60%	84%	334,396,900.00	65%	84%	334,396,900.00	BAPPEDA
3.00.04.xx.21	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	0 dokumen	1 dokumen	121,042,628.00	1 dokumen	82,219,400.00	1 dokumen	839,139,479.00	1 dokumen	1 dokumen	584,278,000.00	1 dokumen	1 dokumen	584,278,000.00	1 dokumen	1 dokumen	584,278,000.00	BAPPEDA
3.00.04.xx.22	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	0 dokumen	1 dokumen	86,386,040.00	2 dokumen	58,742,250.00	3 dokumen	86,734,000.00	4 dokumen	10 dokumen	77,736,200.00	5 dokumen	12 dokumen	77,736,200.00	6 dokumen	14 dokumen	77,736,200.00	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
3.00.04.23	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	95%	1,345,623,216.00	95%	95%	841,193,000.00	95%	95%	841,193,000.00	95%	95%	841,193,000.00	Bappeda
3.00.05	Urusan Keuangan				95,931,500,219.00		112,045,140,064.50		118,263,106,153.26			105,003,887,777.00			105,852,797,456.20			106,716,314,404.98	
3.00.05.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	35,106,073,393	100%	38,637,903,416.30	100%	41,302,333,918.00	100%	100%	40,221,874,960.00	100%	100%	41,026,312,459.20	100%	100%	41,846,838,708.38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.05.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	854,136,700	75%	1,025,406,096.00	75%	713,295,111.00	75%	75%	1,320,780,000.00	75%	75%	1,360,403,400.00	75%	75%	1,401,215,502.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.05.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	95,087,546	93%	82,581,600.00	96%	181,962,500.00	98%	98%	135,645,000.00	100%	100%	138,357,900.00	100%	100%	138,357,900.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.05.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	115,003,700	100%	79,463,100.00	100%	76,016,000.00	100%	100%	106,794,000.00	100%	100%	108,929,880.00	100%	100%	111,108,477.60	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.05.xx.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar	100%	100%	43,635,601,627.00	100%	56,253,843,660.20	100%	55,964,418,676.26	100%	100%	45,968,231,492.00	100%	100%	45,968,231,492.00	100%	100%	45,968,231,492.00	KEC, GAMPING, SETDA, BADAN KESBANGPOL, KEC, BERBAH, D,PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, KEC, MOYUDAN, KEC, PRAMBANAN, KEC, MINGGIR, KEC, KALASAN, DINAS KESEHATAN, KEC, SEYEGAN, KEC, MLATI, KEC, DEPOK, KEC, NGEMPLAK, KEC, NGAGLIK, KEC, SLEMAN, KEC, TEMPEL, DISDIK, DISPORA, KEC, TURI, KEC, PAKEM, KEC, CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, D,PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN,BKPP, DINAS SOSIAL, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, D,PMP2T, D,KEBUDAYAAN, D,PARIWISATA, DINAS DUKCAPIL, BKAD, DISKOMINFO, DISPERINDAG, SET, DPRD, D, PERTANAHAN DAN TATA RUANG, D, PUP DAN KP, D, PPPA PP DAN KB, RSUD SLEMAN, DINAS KOPERASI DAN UKM
		Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah	100%	100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018	2019			2020				2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
3,00,05,xx,17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa	86 desa	316,267,600.00	86 desa	609,334,441.00	86 desa	768,156,850.00	86 desa	86 desa	2,279,810,750.00	86 desa	86 desa	2,279,810,750.00	86 desa	86 desa	2,279,810,750.00	KEC, GAMPING, KEC, GODEAN, KEC, BERBAH, KEC, MOYUDAN, KEC, PRAMBANAN, KEC, MINGGIR, KEC, KALASAN, KEC, SEYEGAN, KEC, MLATI, KEC, DEPOK, KEC, NGEMPLAK, KEC, NGAGLIK, KEC, SLEMAN, KEC, TEMPEL, KEC, TURI, KEC, PAKEM, KEC, CANGKRINGAN, SETDA, DINAS PMD
3,00,05,xx,18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	7%	5%	15,809,329,653.00	5%	15,356,607,751.00	5%	19,256,923,098.00	5%	5%	14,970,751,575.00	5%	5%	14,970,751,575.00	5%	5%	14,970,751,575.00	D,PMP2T, BKAD
3,00,06	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				4,844,980,986.00		6,580,096,708.00		10,594,627,245.00			13,324,370,950.00			13,348,351,862.00			13,387,471,166.06	
3,00,06,xx,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	792,255,095	100%	983,706,098.00	100%	1,265,082,354.00	100%	100%	1,309,482,500.00	100%	100%	1,335,672,150.00	100%	100%	1,362,385,593.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3,00,06,xx,02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	373,201,350	75%	469,326,051.00	75%	672,151,138.00	75%	75%	330,979,400.00	75%	75%	340,908,782.00	75%	75%	351,136,045.46	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3,00,06,xx,05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	41,348,000	93%	115,095,700.00	96%	73,467,475.00	98%	98%	16,750,000.00	100%	100%	17,085,000.00	100%	100%	17,085,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3,00,06,xx,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	105,992,250	100%	91,159,575.00	100%	118,158,750.00	100%	100%	121,403,000.00	100%	100%	108,929,880.00	100%	100%	111,108,477.60	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3,00,06,xx,15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	N/A	55%	35,852,900.00	60%	34,896,625.00	60%	71,502,149.00	65%	72%	48,282,000.00	65%	72%	48,282,000.00	65%	72%	48,282,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3,00,06,xx,16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	37.13%	38%	779,678,537.00	39%	1,501,041,031.00	39%	3,836,400,409.00	40%	45%	7,726,296,000.00	40%	50%	7,726,296,000.00	42%	55%	7,726,296,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3,00,06,xx,17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	87%	89%	2,716,652,854.00	90%	3,384,871,628.00	91%	4,557,864,970.00	92%	92%	3,771,178,050.00	93%	93%	3,771,178,050.00	94%	95%	3,771,178,050.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	N/A	85%		85%		85%		90%	92%		90%	93%		90%	94%		
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	89.49%	86%		86%		88%		90%	90%		92%	92%		92%	92%		
3,00,07	Urusan Penelitian dan Pengembangan				322,025,825.00		264,785,805.00		329,183,800.00			330,382,500.00			330,382,500.00			330,382,500.00	
3,00,07,xx,15	Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek	Persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/ kajian	30%	32%	322,025,825.00	33%	264,785,805.00	34%	329,183,800.00	35%	35%	330,382,500.00	36%	36%	330,382,500.00	37%	37%	330,382,500.00	BAPPEDA
3,00,08	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				9,114,893,597.00		7,095,717,050.00		9,995,521,356.00			11,893,210,990.00			12,270,578,861.00			11,892,430,800.40	
3,00,08,xx,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	237,969,613	100%	-	100%	513,081,070.00	100%	100%	512,918,900.00	100%	100%	523,177,278.00	100%	100%	533,640,823.56	BADAN KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019			2020			2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
3,00,08,xx,02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	109,737,750	75%	-	75%	455,544,400.00	75%	75%	334,913,600.00	75%	75%	344,961,008.00	75%	75%	355,309,838.24	BADAN KESBANGPOL
3,00,08,xx,05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	29,800,800	93%	-	96%	159,054,236.00	98%	98%	215,507,750.00	100%	100%	219,817,905.00	100%	100%	219,817,905.00	BADAN KESBANGPOL
3,00,08,xx,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	53,597,800	100%	-	100%	58,271,500.00	100%	100%	50,959,000.00	100%	100%	51,978,180.00	100%	100%	53,017,743.60	BADAN KESBANGPOL
3,00,08,xx,16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Penanganan Kejadian SARA	100%	100%	7,725,136,584.00	100%	5,809,568,950.00	100%	7,495,803,150.00	100%	100%	8,676,744,290.00	100%	100%	9,028,477,040.00	100%	100%	9,028,477,040.00	KEC, GAMPING, BADAN KESBANGPOL, KEC, GODEAN, KEC, BERBAH, KEC, MOYUDAN, KEC, PRAMBANAN, KEC, MINGGIR, KEC, KALASAN, KEC, SEYEGAN, KEC, MLATI, KEC, DEPOK, KEC, NGEMPLAK, KEC, NGAGLIK, KEC, SLEMAN, KEC, TEMPEL, KEC, TURI, KEC, PAKEM, KEC, CANGKRINGAN
3,00,08,xx,17	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah rekomendasi kemitraan wawasan kebangsaan	N/A	N/A	424,568,650.00	3	351,336,300.00	3	870,417,400.00	4	4	827,622,450.00	4	4	827,622,450.00	4	4	827,622,450.00	BADAN KESBANGPOL
3,00,08,xx,18	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades	76.75%	77%	534,082,400.00	77%	934,811,800.00	77%	443,349,600.00	78%	78%	1,274,545,000.00	79%	79%	1,274,545,000.00	79%	79%	874,545,000.00	KEC, GAMPING, BADAN KESBANGPOL, KEC, GODEAN, KEC, BERBAH, KEC, MOYUDAN, KEC, PRAMBANAN, KEC, MINGGIR, KEC, KALASAN, KEC, SEYEGAN, KEC, MLATI, KEC, DEPOK, KEC, NGEMPLAK, KEC, NGAGLIK, KEC, SLEMAN, KEC, TEMPEL, KEC, TURI, KEC, PAKEM, KEC, CANGKRINGAN, SETDA, D PMD
									1,289,226,062,576.06										

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini kemudian dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman

No	Indikator	Target Tahun								
		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Usia Harapan Hidup	74,47	74,48	74,65	74,49	74,78	74,49	74,80	74,49	74,82
2	Persentase KK Miskin	10,69%	10,02%	9,35%	8,68%	8,68%	8,50%	8,50%	8,00%	8,00%
3	Persentase penduduk miskin	-	-	7,65%	-	6,87%	-	6,36%	-	6,01%
4	Pertumbuhan ekonomi	5,40%	5,46%	5,39%	5,56%	5,48%	5,60%	5,55%	5,65%	5,63%
5	Predikat AKIP kabupaten	A	A	A	A	A (82,50)	A	A (83,00)	A	A (84,50)
6	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,67	79,36	81,08	78,87	81,59	78,90	81,80	79,00	82,00
8	Nilai eksport	US$42.000.000	US$42.500.000	US$43.000.000	US$43.500.000	US$40.950.000	US$44.000.000	US$41.750.000	US$45.000.000	US$42.650.000
9	Nilai Tukar Petani	111,65%	111,90%	112,10%	112,3%	112,3%	112,5%	112,5%	112,7%	112,7%
10	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	65,99%	69,54%	71,07%	72,59%	77,91%	74,11%	79,07%	76,00%	80,23%
11	Perrsentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	65,25%	65,45%	63,65% dan 73,71%	65,85%	82,46% dan 85%	66,05%	82,50% dan 90%	66,25%	82,55% dan 95%
12	Jumlah lembaga tangguh bencana	21 desa dan 36 satuan pendidikan aman bencana	29 desa dan 44 satuan pendidikan aman bencana	37 desa dan 52 satuan pendidikan aman bencana	45 desa dan 60 satuan pendidikan aman bencana	53 desa dan 68 satuan pendidikan aman bencana	53 desa dan 68 satuan pendidikan aman bencana	65 desa dan 72 satuan pendidikan aman bencana	61 desa dan 76 satuan pendidikan aman bencana	77 desa dan 76 satuan pendidikan aman bencana

BAPPEDA SLEMAN

No	Indikator	Target Tahun								
		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
13	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,00%	31,00%	32,00%	33,00%	33,00%	34,00%	34,00%	35,00%	35,00%
14	Indeks Kualitas Air (IKA)	42,00	43,00	44,00	45,00	41,33	46,00	41,33	47,00	41,33
15	Indeks Kualitas Udara (IKU)	40	41	42	43	72	44	72	45	72
16	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,25	32,26	32,27	32,28	32,28	32,29	32,29	32,30	32,30
17	Lama tinggal wisatawan	Wisatawan Nusantara: 1,63 wisatawan Mancanegara : 2,00	Wisatawan Nusantara: 1,64 wisatawan Mancanegara : 2,01	Wisatawan Nusantara: 1,65 wisatawan Mancanegara : 2,02	Wisatawan Nusantara: 1,66 wisatawan Mancanegara : 2,03	Wisatawan Nusantara: 2,00 wisatawan Mancanegara : 2,03	Wisatawan Nusantara: 1,67 wisatawan Mancanegara : 2,04	Wisatawan Nusantara: 2,01 wisatawan Mancanegara : 2,04	Wisatawan Nusantara: 1,68 wisatawan Mancanegara : 2,05	Wisatawan Nusantara: 2,02 wisatawan Mancanegara : 2,04
18	Jumlah Wisatawan	4.117.000	4.323.000	4.561.000	4.561.000	8.000.000	4.834.000	8.200.000	5.149.000	8.500.000
19	Tingkat pengangguran terbuka	6,00	5,90	5,80	5,60	5,60	5,50	5,50	5,40	5,40
20	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,26%	3,40%	3,26%	3,40%	3,26%
21	Persentase Peningkatan nilai produksi industri	2,70%	2,80%	2,90%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,20%	3,20%
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,20%	78,23%	78,26%	78,29%	78,30%	78,32%	78,32%	78,35%	78,35%
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK/ MA : 86.45%	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs :

BAPPEDA SLEMAN

No	Indikator	Target Tahun								
		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
		APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,97% APM SMA/SMK/ MA : 58,96%	83,98%	83,99%	84,00%	SMP/MTs : 85,93%	84,01%	85,95	84,50%	85,97%
24	Rata-rata lama sekolah	10,33 tahun	10,36 tahun	10,70 tahun	10,42 tahun	10,75 tahun	10,45 tahun	10,80 tahun	10,48 tahun	10,85 tahun
25	Harapan Lama sekolah	15,71 tahun	15,74 tahun	15,78 tahun	15,81 tahun	16,58 tahun	15,85 tahun	16,63 tahun	15,88 tahun	16,68 tahun
26	Nilai rata-rata hasil ujian									
	SD/MI	236,17	236,18	236,20	236,21	211,13	236,21	211,23	236,22	211,33
	SMP/MTs	261,64	261,66	261,68	261,70	256,5	261,70	256,6	261,71	256,65
	SMA/MA	335,25	335,26	335,28	335,28	-	335,28	-	335,30	-
	SMK	252,93	252,94	252,96	252,96	-	252,96	-	252,97	-
27	Persentase Pelestarian warisan budaya	23,80%	23,83%	23,86%	23,89%	33,00%	23,92%	35,50%	23,95%	38,00%
28	Peresentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1,00%	0,98%	0,96%	0,94%	2,5%	0,92%	2,3%	0,90%	2,0%
29	Angka Konflik Sara	≤ 5	≤ 5	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3

BAPPEDA SLEMAN

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sleman

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
				2016	2017	2018	2019		2020		2021			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**													
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.47	74,47	74,48	74,65	74,49	74.78	74,49	74.80	74,49	74.82	74,49	74.82
2	Persentase KK Miskin	%	11.36	10,69%	10,02%	9,35%	8.68	8.68	8.50	8.50	8.00	8.00	8.00	8.00
3	Persentase Penduduk Miskin	%		-	-	7,65%	-	6,87	-	6,36	-	6,01	-	6,01
4	Pertumbuhan ekonomi	%	5.35	5,40%	5,46%	5,39%	5,56	5.48	5,60	5.55	5,65	5.63	5,65	5,63
II	**Aspek Daya Saing**													
5	Predikat AKIP kabupaten	Nilai/ Predikat	BB	A	A	A	B	A (82,50)	B	A (83,00)	A	A (84,50)	A	A (84,50)
6	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	78.61	78,67	78,74	78,80	78,87	81.59	78,90	81.80	79,00	82.00	79,00	82.00
8	Nilai eksport	US$	41.000.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000	43.500.000	39.700.000	44.000.000	40.950.000	45.000.000	41.750.000	45.000.000	42.650.000
9	Nilai Tukar Petani	%	111.54	111,65%	111,90%	112,10%	112.30	112.30	112.50	112.50	112.70	112.70	112.70	112.70
10	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	%	63.00	65,99%	69,54%	71,07%	72.59	72.59	74.11	74.11	76.00	76.00	76.00	76,00
11	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	65,18	65,25%	65,45%	63,65% dan 73,71%	65,65	82,46 dan 85,00	65,85	82,50 dan 90,00	66,25	82,55 dan 95,00	66,25	82,55 dan 95,00

BAPPEDA SLEMAN

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
				2016	2017	2018	2019		2020		2021			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	**Aspek Pelayanan Umum**													
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
12	Jumlah lembaga tangguh bencana	desa dan satuan pendidikan aman bencana	13 dan 28	21 dan 36	29 dan 44	37 dan 52	45 dan 60	53 dan 68	53 dan 68	65 dan 72	61 dan 76	77 dan 76	61 dan 76	77 dan 76
	Urusan Keuangan													
13	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	28,00	30,00	31,00	32,00	33,00	33,00	34,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Urusan Lingkungan Hidup													
14	Indeks Kualitas Air (IKA)	nilai	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	41,33	46,00	41,33	47,00	41,33	47,00	41,33
	Indeks Kualitas Udara (IKU)		38,74	40,00	41,00	42,00	43,00	72,00	44,00	72,00	45,00	72,00	45,00	72,00
	Indeks Kualiatas Tutupan Lahan (IKTL)		32,23	32,25	32,26	32,27	32,28	32,28	32,29	32,29	32,30	32,30	32,30	32,30
	Urusan Pariwisata													
15	Lama tinggal wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara: 1,62 wisatawan Mancanegara: 1,99	Wisatawan Nusantara: 1,63 wisatawan Mancanegara: 2,00	Wisatawan Nusantara: 1,64 wisatawan Mancanegara: 2,01	Wisatawan Nusantara: 1,65 wisatawan Mancanegara: 2,02	Wisatawan Nusantara: 1,66 wisatawan Mancanegara: 2,03	Wisatawan Nusantara: 2,00 wisatawan Mancanegara: 2,03	Wisatawan Nusantara: 1,67 wisatawan Mancanegara: 2,04	Wisatawan Nusantara: 2,01 wisatawan Mancanegara: 2,04	Wisatawan Nusantara: 1,68 wisatawan Mancanegara: 2,05	Wisatawan Nusantara: 2,02 wisatawan Mancanegara: 2,04	Wisatawan Nusantara: 1,68 wisatawan Mancanegara: 2,05	Wisatawan Nusantara: 2,02 wisatawan Mancanegara: 2,04
16	Jumlah Wisatawan	Orang	4.117.000	4.117.000	4.117.000	4.323.000	4.561.000	8.000.000	4.834.000	8.200.000	5.149.000	8.500.000	5.149.000	8.500.000

BAPPEDA SLEMAN

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
				2016	2017	2018	2019		2020		2021			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Tenaga Kerja													
17	Tingkat pengangguran terbuka	Rasio	6.12	6,00	5,90	5,80	5,60	5,60	5,50	5,50	5,40	5,40	5,40	5,40
	Urusan Pertanian													
18	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2.73	3,40	3,40	3,40	3,40	3,26	3,40	3,26	3,40	3,26	3,40	3,26%
	Urusan Perindustrian													
19	Persentase Peningkatan nilai produksi industri	%	2,65	2,70%	2,80%	2,90%	3,00	3,00	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20	3,20
	Urusan Pendidikan													
20	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,17	78,20%	78,23%	78,26%	78,29	78,29	78,32	78,30	78,35	78,32	78,35	78,35
21	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%	APK SD/MI ≥ 116,81%, APK SMP/MTs ≥ 111,70% APK	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI :

BAPPEDA SLEMAN

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
				2016	2017	2018	2019		2020		2021				
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
			SMA/ SMK/MA : 88,69% APM SD/MI : 103,20% APM SMP/MTs : 83,96% APM SMA/SMK/MA : 58,95%	/MA : 86.45% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,97% APM SMA/SMK /MA : 58,96%	≤100% APM SMP/MTs : 83,98%	≤100% APM SMP/MTs : 83,99%	≤100% APM SMP/MTs : 84,00	≤100% APM SMP/MTs : 85,93%	≤100% APM SMP/MTs : 84,01	≤100% APM SMP/MTs : 85,95	≤100% APM SMP/MTs : 84,50	≤100% APM SMP/MTs : 85,97%		≤100% APM SMP/MTs : 84,50	≤100% APM SMP/MTs : 85,97%
22	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,33	10,36	10,70	10,42	10,75	10,45	10,80	10,48	10,85		10,48	10,85
23	Harapan Lama sekolah	Tahun	15,65	15,71	15,74	16,53	15,81	16,58	15,85	16,63	15,88	16,68		15,88	16,68
24	Nilai rata-rata hasilujian														
	SD/MI	Nilai	236,15	236,17	236,18	236,20	236,20	211,13	236,21	211,23	236,22	211,33		236,22	211,33
	SMP/MTs		261,64	261,64	261,66	261,68	261,68	256,5	261,70	256,6	261,71	256,65		261,71	256,65
	SMA/MA		335,23	335,25	335,26	335,28	335,28	-	335,30	-	335,30	-		335,30	-
	SMK		252,92	252,93	252,94	252,96	252,96	-	252,97	-	252,97	-		252,97	-

BAPPEDA SEMARANG

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
				2016	2017	2018	2019		2020		2021			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Kebudayaan													
25	Persentase Pelestarian warisan budaya	%	23.77	23,80	23,83	23,86	23,89	33,00	23,92	35,50	23,95	38,00	23,95	38,00
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
26	Peresentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	539 kasus	1,00	0,98	0,96	0,94	2,5	0,92	2,3	0,90	2,0	0,90	2,0
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Peraturan Perundang-Undangan													
27	Angka Konflik Sara	Jumlah kasus	2	≤ 5	≤ 5	≤ 4	≤4	≤ 4	≤3	≤ 3	≤3	≤3	≤3	≤3

BAPPEDA SEMA

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman 2016-2021 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5(lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD DIY dan RPJMN.

Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat sleman, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah daerah kabupaten Sleman, dukungan DPRD Kabupaten Sleman, Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Sleman akan lebih baik dari hari kemarin.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah:

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program dalam APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAPPEDA SLEMAN

3. RKPD masa transisi pada tahun pertama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021 dan berpedoman pada RPJP Kabupaten Sleman tahun 2006-2025. RPJMD juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sleman dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sleman dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Sleman;
3. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;

BAPPEDA SLEMAN

6. Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Sleman harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sleman merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, setiap Perangkat Daerah perlu mengupayakan pengaturan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut:
    a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
    b. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
    c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;

BAPPEDA SLEMAN

d. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sleman dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI SLEMAN

ttd

SRI PURNOMO

BAPPEDA SLEMAN